



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

18. Peraturan Daerah

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31 seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 32 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 48);

24. Peraturan Daerah

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya Dan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 42);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 71 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 75 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi seluas-luasnya dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat pada pemerintah daerah Kabupaten Lamandau.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan.
14. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Lamandau, Tahun 2013-2018 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yang memuat visi, misi, dan program kepala daerah; arah kebijakan keuangan daerah; strategi pembangunan daerah; kebijakan umum; program SKPD; program lintas SKPD; program kewilayahan; rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun dengan tujuan untuk dijadikan acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di daerah kabupaten sekaligus dijadikan tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Sistematika RPJMD Kabupaten Lamandau disusun sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS BESERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

(2) Isi dan uraian perincian RPJMD Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018, dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) 5 (lima) tahunan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahunan, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahunan.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPJMD.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah lingkup Kabupaten Lamandau.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Lamandau dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Lamandau dan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJM Daerah hanya dilakukan, apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah,
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah,
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis

ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 6, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan RPJM Daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJM Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lamandau 2005-2025, RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2005-2025, dan RPJMN 2015-2019.
- (2) Bupati pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Pemerintahan berikutnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 02 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 Pebruari 2014**

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 14 Pebruari 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN L.P. UMBING

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2014 NOMOR 122 SERI E**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 - 2018

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah, setiap dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan harus mengacu atau berpedoman kepada dokumen perencanaan yang ada di atas (pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi). Hal ini bertujuan untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan pembangunan nasional, pembangunan di tingkat provinsi sampai pembangunan di tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pengertian pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD), dan tahunan (Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja SKPD) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah kebijakan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. Sedangkan, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. Selain itu, RPJMD juga menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai pedoman perencanaan lima tahun masing-masing SKPD. Selanjutnya, Renstra SKPD menjadi pedoman bagi penyusun Rencana Kerja SKPD, yang menjadi masukan bagi penyusunan RKPD.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Perda tentang RPJM Daerah Tahun 2013-2018 adalah untuk : (a) memberikan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD, (b) menjadi pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama periode tahun 2014 -2018, (c) menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Lamandau di bawah Bupati dan Wakil Bupati, (d) menjadi tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program kepala daerah, (e) menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Lamandau dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, (f) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pemerintahan daerah, maupun antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Perda tentang RPJM Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 terdiri dari 6 bab dan 11 pasal yang mengatur mengenai pengertian, sistematika penulisan RPJM Daerah Kabupaten Lamandau, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah. Serta lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda tentang RPJM Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2014 NOMOR 105 SERI E**

LAMPIRAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)**

**KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013-2018**



KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dokumen RPJMD tersebut selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBN). Berikutnya, penyusunan RAPBD Kabupaten Lamandau harus berpedoman kepada RKPD sebagai penterjemahan RPJMD, dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu

 BUPATI LAMANDAU,

KEMARUKAN



DAFTAR ISI

	Kata Pengantar Bupati Kabupaten Lamandau	i
	Daftar Isi	ii
	Daftar Tabel	iv
	Daftar Bagan	vii
	Daftar Gambar	viii
Bab I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-4
1.4	Sistematika Penulisan	I-7
1.5	Maksud dan Tujuan	I-8
Bab II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-16
2.3	Aspek Pelayanan Umum	II-32
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-61
2.5	Kinerja Pembangunan Daerah	II-65
Bab III	GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-13
3.3	Kerangka Pendanaan	III-24
Bab IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV-1
4.1	Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.2	Isu Strategis Daerah	IV-3
Bab V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	V-1
5.1	Visi	V-1
5.2	Misi	V-2
5.3	Tujuan dan Sasaran	V-3
Bab VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1



6.1	Strategi	VI-1
6.2	Arah kebijakan	VI-9
Bab VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII-1
Bab VIII	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA KERANGKA PENDANAAN	VIII-1
Bab IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX-1
Bab X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	X-1
10.1	Pedoman Transisi	X-1
10.2	Kaidah Pelaksanaan	X-2





DAFTAR TABEL

Bab II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
Tabel 2.1	Tinggi Rata-Rata, Luas Daerah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lamandau Tahun 2012	II-3
Tabel 2.2	Sungai di Kabupaten Lamandau Tahun 2012	II-5
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lamandau	II-13
Tabel 2.4	Kepadatan Penduduk serta Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2012	II-14
Tabel 2.5	Persentase Penduduk Kabupaten Lamandau yang Bekerja Menurut Sektor Tahun 2012	II-15
Tabel 2.6	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s.d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lamandau	II-16
Tabel 2.7	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s.d 2012 Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lamandau	II-17
Tabel 2.8	Perkembangan PDRB Tahun 2009 s.d 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Lamandau	II-18
Tabel 2.9	PDRB per Kapita Kabupaten Lamandau Tahun 2008 – 2012	II-22
Tabel 2.10	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2008 – 2012	II-23
Tabel 2.11	Angka Melek Huruf Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012	II-25
Tabel 2.12	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Lamandau Tahun 2008 – 2012	II-27
Tabel 2.13	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Lamandau Tahun 2008 – 2012	II-28
Tabel 2.14	Angka Harapan Hidup Kab.Lamandau Tahun 2008 – 2012	II-30
Tabel 2.15	Balita Gizi Buruk di Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012	II-31
Tabel 2.16	Jumlah Penduduk 15 Tahun keatas (Usia Kerja) di Kab. Lamandau	II-31
Tabel 2.17	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012	II-32
Tabel 2.18	Rasio Sekolah terhadap Murid Di Kabupaten Lamandau 2008-2012	II-34
Tabel 2.19	Rasio Guru terhadap Murid Di Kabupaten Lamandau 2008-2012	II-34
Tabel 2.20	Rasio Fasilitas Kesehatan Terhadap 1.000 penduduk Tahun 2009-2012	II-36
Tabel 2.21	Rasio Rumah Sakit Terhadap 1.000 penduduk Tahun 2009-2012	II-37
Tabel 2.22	Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Terhadap 1.000 penduduk Tahun 2009-2012	II-38
Tabel 2.23	Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kabupaten Lamandau	II-39
Tabel 2.24	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Lamandau	II-40
Tabel 2.25	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	II-42
Tabel 2.26	Rumah Tangga Pengguna Listrik	II-43
Tabel 2.27	Jumlah Sarana Perhubungan di Kabupaten Lamandau Tahun 2013	II-45
Tabel 2.28	Pencapaian Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lamandau 2010-2012	II-46
Tabel 2.29	Pencapaian Pelayanan Akta Kelahiran Lamandau Tahun 2010-2012	II-47
Tabel 2.30	Rasio Akseptor KB Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012	II-48
Tabel 2.31	Jumlah Peserta KB Aktif Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012	II-49



Tabel 2.32	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Lamandau Tahun 2010-2012	II-50
Tabel 2.33	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lamandau Tahun 2007 – 2012	II-51
Tabel 2.34	Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Lamandau Tahun 2007-2012	II-52
Tabel 2.35	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012	II-57
Tabel 2.36	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalan Terhadap PDRB Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012	II-58
Tabel 2.37	Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran Terhadap PDRB Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012	II-59
Tabel 2.38	Kondisi Lingkungan Hidup dan Tata Ruang di Kabupaten Lamandau	II-62
Tabel 2.39	Rasio Ketergantungan Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012	II-64
Tabel 2.40	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012	II-65
Bab III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	III-1
Tabel 3.1.	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2010-2012	III-2
Tabel 3.2.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2010-2012	III-3
Tabel 3.3.	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2010-2012	III-4
Tabel 3.4.	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2008-2012	III-5
Tabel 3.5.	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2010-2012	III-9
Tabel 3.6.	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2010-2012	III-17
Tabel 3.7.	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2011-2012	III-19
Tabel 3.8.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	III-20
Tabel 3.9.	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2011-2012	III-21
Tabel 3.10.	Defisit Riil dan Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2010-2012	III-22
Tabel 3.11.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2010-2012	III-23
Tabel 3.12.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014-2018	III-25
Tabel 3.13.	Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014-2018	III-26
Tabel 3.14.	Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014-2018	III-27
Tabel 3.15.	Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014-2018	III-27
Tabel 3.16.	Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Prioritas Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014-2018	III-29



Tabel 3.17.	Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014-2018	III-29
Bab IV	Analisis Isu-Isu Strategis	IV-1
Tabel 4.1	Identifikasi Kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota Lain	IV-17
Bab V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	V-1
Tabel 5.1	Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lamandau	V-3
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, dan Indikator	V-6
Tabel 5.3	Target Tahunan Indikator Sasaran RPJMD	V-11
Bab VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1
Tabel 6.1	Analisis SWOT	VI-2
Tabel 6.2	Sasaran, Indikator, Strategi	VI-3
Tabel 6.3	Hubungan Sasaran dengan Strategi	VI-6
Tabel 6.4	Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Lamandau	VI-10
Tabel 6.5	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lamandau	VI-15
Bab VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS	VII-1
Tabel 7.1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah	VII-2
Bab VIII	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA KERANGKA PENDANAAN	VIII-1
Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan	VIII-2
Bab IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX-1
Tabel 9.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah	IX-2





DAFTAR BAGAN

Bab II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1	Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Lamandau	II-4
2.2	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lamandau	II-13
2.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin & Kelompok Umur	II-14
2.4	Persentase Penduduk Kabupaten Lamandau yang Bekerja Menurut Sektor Tahun 2012	II-15
2.5	Distribusi PDRB Kabupaten Lamandau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012	II-19
2.6	Nilai PDRB per Kapita (Rp) Kabupaten Lamandau (dalam juta rupiah)	II-22
2.7	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2008 – 2012	II-24
2.8	Angka Melek Huruf di Kabupaten Lamandau Tahun 2008 - 2012	II-25
2.9	APK Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Lamandau Tahun 2008 – 2012	II-27
2.10	APM Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Lamandau Tahun 2008 – 2012	II-28
2.11	Rasio Sekolah terhadap Murid Di Kabupaten Lamandau 2008-2012	II-33
2.12	Rasio Guru terhadap Murid Di Kabupaten Lamandau 2008-2012	II-35
2.13	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	II-42
2.14	Rumah Tangga Pengguna Listrik	II-43
2.15	Pencapaian Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lamandau 2010-2012	II-46
2.16	Pencapaian Pelayanan Akta Kelahiran Lamandau Tahun 2010-2012	II-47
2.17	Grafik TPT Kabupaten Lamandau Tahun 2007-2012	II-51
2.18	Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Lamandau Tahun 2007-2012	II-52
2.19	Grafik Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012	II-57
2.20	Grafik Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012	II-58
2.21	Grafik Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel, & Restoran Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012	II-60
Bab III	GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Persentase Realisasi Pendapatan Kabupaten Lamandau 2010-2012	III-3
3.2	Persentase Realisasi Belanja Kabupaten Lamandau 2010-2012	III-4
3.3	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2010-2012	III-18
3.4	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2010-2012	III-23



DAFTAR GAMBAR



Bab I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Alur Perencanaan dan Penganggaran	I-6
Bab II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1	Peta Administrasi Kabupaten Lamandau	II-2
2.2	Peta Pola Ruang Kabupaten Lamandau	II-6







BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan berbagai turunan peraturan pelaksanaannya. Penyusunan RPJMD sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Sementara berdasarkan pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

- a. Pendekatan politik, dimana pemilihan langsung Presiden atau Kepala Daerah telah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik yang kemudian dijabarkan kedalam visi misi rencana pembangunan jangka menengah;
- b. Pendekatan teknokratik, dimana perencanaan dilakukan oleh perencana profesional atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan (khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana);
- c. Pendekatan partisipatif, dimana perencanaan harus melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan antara lain melalui pelaksanaan musrenbang;



- d. Pendekatan *bottom up* dan *top down*, dimana perencanaan dilakukan sesuai jenjang pemerintahan yang selanjutnya diselaraskan melalui musyawarah baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra SKPD disusun oleh SKPD sebagai dokumen operasional dari RPJMD dengan durasi yang sama yaitu 5 (lima) tahun. Rancangan Renstra SKPD disusun berdasarkan rancangan awal RPJMD, guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan rancangan awal menjadi rancangan RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dokumen RPJMD tersebut selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBN). Berikutnya, penyusunan RAPBD Kabupaten Lamandau harus berpedoman kepada RKPD sebagai penterjemahan RPJMD, dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RPJMD adalah dokumen resmi yang menjadi payung hukum dalam perencanaan pembangunan daerah. Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180)



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);



19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31 seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 32 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 48);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya Dan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 42);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 71 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D);



27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 75 Seri D);

1.3. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2015, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Lamandau

RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018 merupakan RPJMD Kedua dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lamandau masa bakti tahun 2013 - 2018, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Lamandau Tahun 2005 - 2025.



2. RPJMD dan RTRW Kabupaten Lamandau

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah disusun dalam rancangan RTRW Kabupaten Lamandau sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Lamandau.

3. RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lamandau.

4. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018, setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Selanjutnya Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Lamandau yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

Uraian berikut ini menjelaskan keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Lamandau dengan RPJM Nasional disamping dengan Dokumen Perencanaan lainnya. Untuk memahami posisi RPJMD dengan kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional dan Penganggarannya, dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran



Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 5 ayat (2), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Adapun RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, serta program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD mengoperasionalkan perencanaan strategis lima tahunan (RPJMD) dan menghubungkannya ke sisi penganggaran.

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun berpedoman pada RPJMD yang isinya antara lain visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Renstra SKPD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD.

Rencana Kerja SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kaitan antara RPJMD Kabupaten Lamandau dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah RPJMD Kabupaten Lamandau akan dijabarkan kedalam RKPD untuk setiap tahunnya yang akan dijadikan pedoman bagi

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lamandau.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagai dokumen publik, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sistematika penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah untuk daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Maksud dan Tujuan

Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.5 Kinerja Pembangunan Daerah

Bab III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3 Kerangka Pendanaan



Bab IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu Strategis

Bab V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan dan Sasaran

Bab VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 6.1 Strategi
- 6.2 Arah kebijakan

Bab VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

- 10.1 Pedoman Transisi
- 10.2 Kaidah Pelaksanaan

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 akan diuraikan berikut ini.

1.5.1. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, RPJMD akan digunakan oleh seluruh satuan kerja pemerintah



kabupaten sebagai acuan dan dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2013 - 2018 dan didalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam rangka membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lamandau.

1.5.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018, yaitu:

1. Memberikan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD;
2. Menjadi pedoman penyusunan RKPD setiap tahun selama periode tahun 2014 - 2018;
3. Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Lamandau di bawah Bupati dan Wakil Bupati;
4. Menjadi tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program kepala daerah;
5. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Lamandau dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
6. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pemerintahan daerah, maupun antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.





BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang **kondisi geografi dan demografi** serta **indikator capaian kinerja** penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi atau kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu **aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum** dan **aspek daya saing daerah**.

Gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah provinsi atau kabupaten/kota. Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan, baik dari aspek geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Lamandau, merupakan data dan informasi yang menggambarkan keadaan pada setiap kecamatan di wilayah masing-masing.

2.1 Aspek Geografis dan Demografi

Aspek geografi kabupaten/kota memberikan gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, dan potensi pengembangan wilayah. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada kabupaten/kota.

2.1.1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Lamandau terletak pada 1° 9' sampai dengan 3° 36' Lintang Selatan dan 110° 25' sampai dengan 112° 5' Bujur Timur. Kabupaten yang merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah ini memiliki wilayah yang cukup luas, yaitu sekitar 6.414 Km².

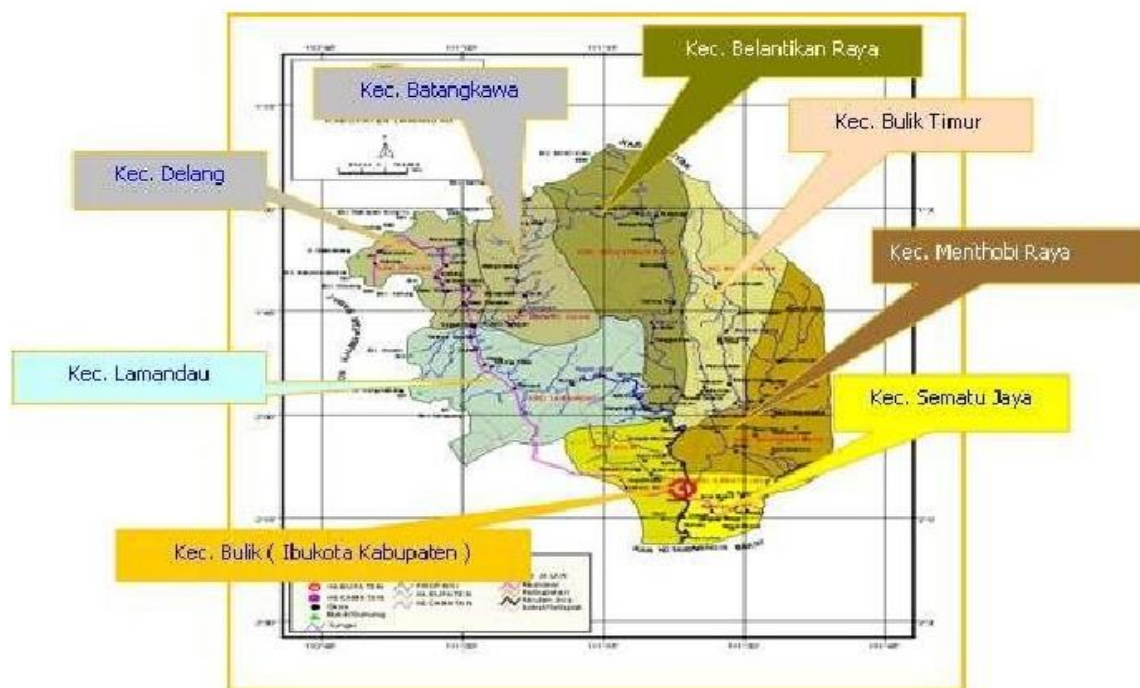


Secara administratif Kabupaten Lamandau berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Seruyan.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukamara dan Provinsi Kalimantan Barat.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukamara dan Provinsi Kalimantan Barat.

Peta wilayah administratif dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Lamandau



Ibukota Kabupaten Lamandau terletak di **Nanga Bulik**. Wilayah administrasi Kabupaten Lamandau terbagi menjadi 8 Kecamatan yang terdiri dari 80 desa dan 3 kelurahan. Jarak terjauh dari ibukota Kabupaten Lamandau ke ibukota kecamatan adalah Kecamatan Delang yaitu sejauh 114 km. Selanjutnya adalah Kecamatan Batang Kawa yaitu sejauh 112 km, Kecamatan Lamandau sejauh 84 km, dan Kecamatan Belantikan Raya sejauh 80 km. Sementara yang terdekat adalah Kecamatan Sematu Jaya.

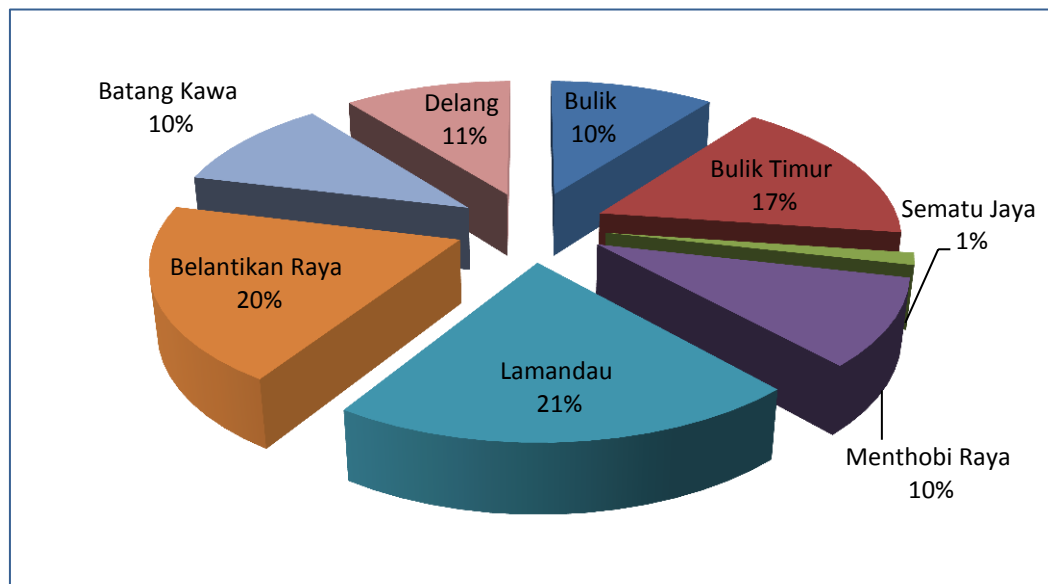
Kabupaten Lamandau terdiri dari 8 kecamatan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Lamandau yaitu seluas 1.333 km² (20,78 persen) dari total luas wilayah Kabupaten Lamandau. Selanjutnya, Kecamatan Belantikan Raya seluas 1263 km² (19,69 persen) dari luas wilayah Kabupaten Lamandau, Kecamatan Bulik Timur seluas 1074,72 km² (16,76 persen) dan Kecamatan Batang Kawa dan Delang memiliki luas yang kurang lebih sama, seluas 685 km² atau (10,59 persen). Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Sematu Jaya dengan persentase luas (1,35 persen) dari luas wilayah Kabupaten Lamandau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 2.1 dan Bagan 2.1.

Tabel 2.1

Tinggi Rata-Rata, Luas Daerah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lamandau Tahun 2012

No	Nama Kecamatan	Tinggi Rata-Rata dpl (m)	Luas Daerah (Km2)	Persentase Luas Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Bulik	90,08	665,55	10,38	12
2	Bulik Timur	118,17	1074,72	16,76	12
3	Sematu Jaya	109,29	86,85	1,35	7
4	Menthobi Raya	124,00	620,88	9,68	11
5	Lamandau	95,30	1333,00	20,78	10
6	Belantikan Raya	110,33	1263,00	19,69	12
7	Batang Kawa	131,67	685,00	10,59	9
8	Delang	153,20	685,00	10,59	10

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013

Bagan 2.1 Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Lamandau

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

Kabupaten Lamandau termasuk daerah yang beriklim tropis Type A berdasarkan zone iklim, yaitu jumlah bulan basah lebih banyak dibandingkan dengan bulan kering. Suhu rata-rata di Kabupaten Lamandau 27,48°C (kisaran rata-rata 21,6° – 33,2°). Suhu udara rata-rata minimum adalah 81%. Daerah Kabupaten Lamandau beriklim tropis, yang dipengaruhi oleh musim kemarau/kering dan musim hujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juni sampai bulan September, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Mei. Curah hujan berkisar antara 2.000 – 2.500 mm/tahun. Curah hujan tertinggi pada bulan Januari dan terendah pada bulan Agustus. Kelembaban udara berkisar antara 81% - 92%, yang berarti tergolong daerah yang memiliki udara yang cukup lembab. Kecepatan angin 0,4 – 0,7 knot.

Kabupaten Lamandau terletak pada ketinggian yang berkisar antara 200-500 meter di atas permukaan air laut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa daerah perbukitan di wilayah Kabupaten Lamandau. Kemiringan lahan Kabupaten Lamandau tersebar dengan indeks kemiringan 0-15%, masih dapat digunakan untuk lahan pertanian sebesar 39.587 hektar.

Kondisi topografi Kabupaten Lamandau yaitu terdiri dari rawa dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan, yang juga dialiri oleh beberapa sungai besar maupun kecil yang masih menjadi urat nadi perekonomian di Lamandau. Topografis

Kabupaten Lamandau dibagi empat bagian, yaitu dataran, daerah berombak, daerah berombak berbukit, dan daerah berbukit-bukit.

Wilayah Kabupaten Lamandau memiliki potensi sumber daya alam antara lain: bijih besi, emas, galena bauksit, serta jenis mineral ikutan lainnya seperti Zync, Pyrite, dan lain-lain. Dari total luas Lamandau sebesar 6.414.400 km² tercatat 167.343 Ha yang telah dikelola oleh kuasa pertambangan.

Geologi permukaan tanah di kawasan Lamandau terdiri dari lapisan humus, jenis tanah latosol dan podsolik merah kuning yang tahan erosi namun memiliki tingkat resapan yang sangat kecil. Bagian utara terdiri dari tanah litosol, bagian tengah terdiri dari tanah podsolik merah kuning, dan bagian selatan terdiri dari danau dan rawa aluvial/organosol banyak mengandung air.

Untuk kondisi hidrologi Kabupaten Lamandau terdiri dari sungai-sungai baik besar maupun kecil. Salah satu aliran sungai terbesar yang melalui wilayah Kabupaten Lamandau adalah sungai Lamandau dengan beberapa cabang yang membentuk anak sungai yang berada di sekitar kota antara lain Sungai Bulik, Sungai Samaliba, Sungai Sebelimbingan, Sungai Dawak dan lain-lain. Sungai Lamandau beserta anak-anak sungainya disamping berfungsi untuk menunjang kehidupan sehari-hari penduduk di sekitarnya juga berfungsi sebagai jalur transportasi.

Tabel 2.2
Sungai di Kabupaten Lamandau Tahun 2012

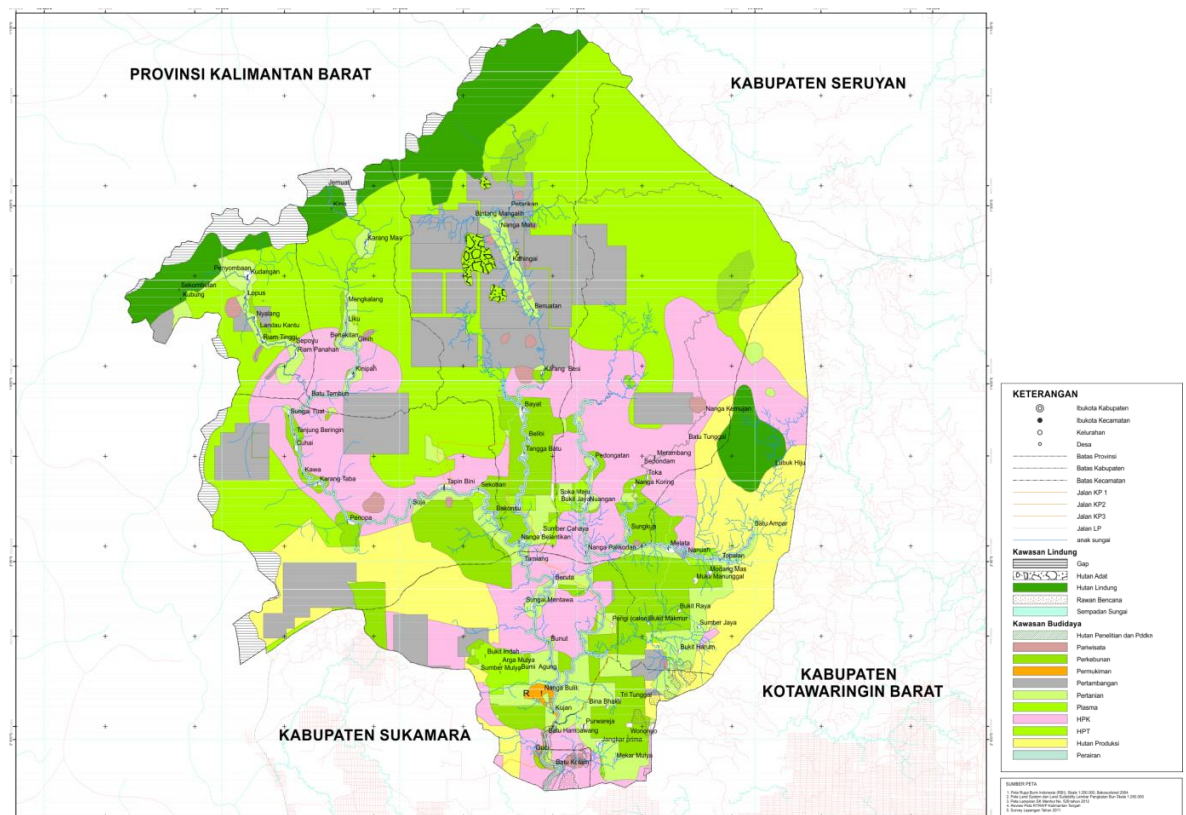
No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Dapat Dilayari (km)	Rata-rata	
				Kedalaman (m)	Lebar (m)
1	Sungai Bulik	45	45	5	30
2	Sungai Lamandau	65	65	6	65
3	Sungai Belantikan	52	52	4	23
4	Sungai Matu	21	21	3,5	8
5	Sungai Batang Kawa	65	65	6	25
6	Sungai Delang	57	40	5	18
7	Sungai Kungkung	20	-	2	4

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013

Rencana pola ruang di Kabupaten Lamandau meliputi:

- pola ruang kawasan lindung
- pola ruang kawasan budidaya.

Gambar 2.2
Peta Pola Ruang Kabupaten Lamandau



Untuk kawasan lindung meliputi:

- kawasan hutan lindung;
- kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- kawasan perlindungan setempat;
- kawasan rawan bencana lainnya; dan
- kawasan hutan adat / ulayat.

Kawasan hutan lindung terdapat di wilayah Kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 9.722 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 28.491,73 hektar, Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 5.731,64 hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 418,80 hektar dan Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 10.391,45 hektar. Luas total kawasan hutan lindung kurang lebih 54.755,62 hektar.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan kawasan resapan air yang terdapat di area hutan lindung dengan luas kurang lebih 54.755,62 hektar, tersebar di wilayah Kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 9.722 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 28.491,73 hektar, Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 5.731,64 hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 418,80 hektar dan Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 10.391,45 hektar

Kawasan perlindungan setempat yaitu sempadan sungai, dengan luas kurang lebih 13.777 hektar, terdapat di sungai Lamandau dengan luas kurang lebih 6.513 hektar, sungai Bulik dengan luas kurang lebih 2.253 hektar, sungai Belantikan dengan luas kurang lebih 2.026 hektar, sungai Pelikodan dengan luas kurang lebih 1.629 hektar, sungai Menthobi dengan luas kurang lebih 1.356 hektar dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan.

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan rawan rawan banjir yaitu pada daerah-daerah sekitar Sungai Lamandau Kecamatan Bulik dan rawan kebakaran yaitu pada daerah Kecamatan Sematu Jaya.

Kawasan hutan adat merupakan kawasan hutan yang statusnya tidak tumpang tindih dan jelas keberadaannya di tiap-tiap desa.

Untuk kawasan budidaya meliputi:

- a. Kawasan peruntukan hutan;
- b. Kawasan peruntukan pertanian;
- c. Kawasan peruntukan perkebunan;
- d. Kawasan peruntukan peternakan;
- e. Kawasan peruntukan perikanan;
- f. Kawasan peruntukan pertambangan;
- g. Kawasan peruntukan industri;
- h. Kawasan peruntukan pariwisata;
- i. Kawasan peruntukan permukiman;
- j. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan

Kawasan peruntukan hutan meliputi :

- a. hutan produksi terbatas (HPT) seluas kurang lebih 299.378,11 hektar yang tersebar di wilayah Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 93.200,00 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 102.700,00 hektar, Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 36.370,00 hektar, Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 21.820,01 hektar, Kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 105,1 hektar dan Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 45.183 hektar;
- b. hutan produksi tetap (HP) seluas kurang lebih 93.525,45 hektar yang tersebar di wilayah Kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 43.210,00 hektar, Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 27.211,45 hektar, Kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 15.330,00 hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 4.503,00 hektar dan Kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 3.271,00 hektar;
- c. hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 167.874,25 hektar yang tersebar di wilayah Kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 13.970,00 hektar, Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 56.270,01 hektar, Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 8.535,00 hektar, Kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 14.450,00 hektar, Kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 4.635,00 hektar, Kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 31.080,00 hektar, Kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 35.508,13 hektar dan Kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 3.426,11 hektar;
- d. Hutan penelitian dan pendidikan (HPP) seluas kurang lebih 6.893 hektar yang lokasinya berada di dalam hutan produksi di Kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 3.673,08 hektar dan Kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 3.219,72 hektar.

Kawasan peruntukan pertanian meliputi:

- a. Kawasan pertanian tanaman pangan meliputi :
 1. kawasan pertanian lahan basah difokuskan terutama pada bagian tengah dan selatan, dengan luas kurang lebih 6.239 hektar tersebar dikecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 2.705 hektar, kecamatan Bulik Timur dengan luas



kurang lebih 298 hektar, kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 451 hektar, kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 435 hektar, kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 735 hektar, kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 630 hektar, kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 625 hektar, kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 360 hektar;

2. kawasan pertanian lahan kering direncanakan penyebarannya difokuskan pada seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 111.619 hektar tersebar di kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 14.308 hektar, kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 18.494 hektar, kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 10.489 hektar, kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 1.648 hektar, kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 19.855 hektar, kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 20.516 hektar, kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 14.209 hektar, kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 12.100 hektar; dan
 3. Kawasan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 75.498,77 hektar tersebar di kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 14.686,85 hektar, kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 12.838,56 hektar, kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 6.137,86 hektar, kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 2.924,86 hektar, kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 10.620,53 hektar, kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 13.270,80 hektar, kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 8.527,06 hektar, kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 6.492,27 hektar.
- b. Kawasan pertanian hortikultura terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 50.108 hektar tersebar di kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 1.398 hektar, kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 6.059 hektar, kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 2.980 hektar, kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 462 hektar, kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 9.663 hektar, kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 8.516 hektar, kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 11.964 hektar, kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 9.066 hektar.



Kawasan perkebunan terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 212.127 hektar tersebar di kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 46.981,90 hektar, kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 44.290,11 hektar, kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 34.053,82 hektar, kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 8.542,83 hektar, kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 40.987,39 hektar, kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 22.270,23 hektar, kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 7.114 hektar, kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 7.887 hektar.

Kawasan peternakan terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 4.033 hektar tersebar di kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 703,82 hektar, kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 555 hektar, kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 466 hektar, kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 386,14 hektar, kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 455 hektar, kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 529 hektar, kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 516 hektar, kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 422 hektar.

Kawasan perikanan terdapat di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 166,02 hektar tersebar di kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 70,78 hektar, kecamatan Bulik Timur dengan luas kurang lebih 8,95 hektar, kecamatan Menthobi Raya dengan luas kurang lebih 16,95 hektar, kecamatan Sematu Jaya dengan luas kurang lebih 20,06 hektar, kecamatan Lamandau dengan luas kurang lebih 11,66 hektar, kecamatan Belantikan Raya dengan luas kurang lebih 15,24 hektar, kecamatan Delang dengan luas kurang lebih 12,42 hektar, kecamatan Batang Kawa dengan luas kurang lebih 9,96 hektar.

Kawasan peruntukan pertambangan meliputi :

a. Mineral Logam, terdiri dari:

1. bijih besi tersebar di Kecamatan Bulik, Kecamatan Belantikan Raya, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Menthobi Raya dan Kecamatan Lamandau;
2. bauksit tersebar di Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Bulik, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Delang dan Kecamatan Bulik Timur;
3. galena tersebar di Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa;
4. zinc tersebar di Kecamatan Batang Kawa dan Kecamatan Belantikan Raya;



- b. Mineral non logam yaitu pasir kwarsa tersebar di Kecamatan Lamandau.
- c. Batuan khusus, terdiri dari:
 - 1. granit tersebar di kecamatan Batang Kawa dan Kecamatan Belantikan Raya;
 - 2. andesit tersebar di Kecamatan Belantikan raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Batang Kawa, Kecamatan Delang dan Kecamatan Lamandau; dan
 - 3. pasir tersebar secara parsial di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Lamandau.
- d. Khusus untuk pertambangan rakyat, terdiri dari:
 - 1. emas tersebar di Desa Karang Mas, Desa Kina, Desa Mengkalang, Desa Karang Besi, Desa Sungai Buluh dan Desa Tanjung Beringin;
 - 2. ametis (batu mulia) tersebar di Desa Nanga Pelikodan dan di Desa Penopa.

Kawasan peruntukan industri meliputi:

- a. Industri menengah dan besar di Kelurahan Nanga Bulik dan desa Kujan kecamatan Bulik dengan luas kurang lebih 230 hektar;
- b. Industri mikro dan kecil dapat berada di luar kawasan peruntukan industri sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan.

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

- a. wisata alam; dan
- b. wisata budaya.

Kawasan peruntukan wisata alam antara lain:

- a. Kawasan Pegunungan tersebar di kecamatan Delang, kecamatan Belantikan Raya, kecamatan menthobi Raya, kecamatan Lamandau;
- b. Kawasan Sungai tersebar di kecamatan Lamandau, kecamatan Delang, kecamatan Batang Kawa, kecamatan Belantikan Raya, kecamatan Bulik Timur, kecamatan Bulik; dan
- c. Wisata flora dan fauna di Sopaan Pangaraman Kahingai dan Bahu Burung serta Sopaan Penggaraman hulu ginih, Wisata Pancing di Danau Sematu.



Kawasan peruntukan wisata budaya antara lain: Rumah Betang di kecamatan Delang dan kecamatan Lamandau.

Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
- b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan berada di Nanga Bulik dan sekitarnya dengan luas kurang lebih 21.031 hektar. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan berada tersebar disetiap kecamatan dengan luas kurang lebih 277.852 hektar.

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi :

- a. Kodim, terdapat di ibukota Kabupaten Lamandau yaitu Nanga Bulik;
- b. Koramil, terdapat di tiap kecamatan di Kabupaten Lamandau;
- c. Lapangan Hely sebagai Pertahanan Pangkal Perlawanan di Desa Penyombean Kecamatan Delang.

2.1.2. Kondisi Demografis

a. Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Lamandau

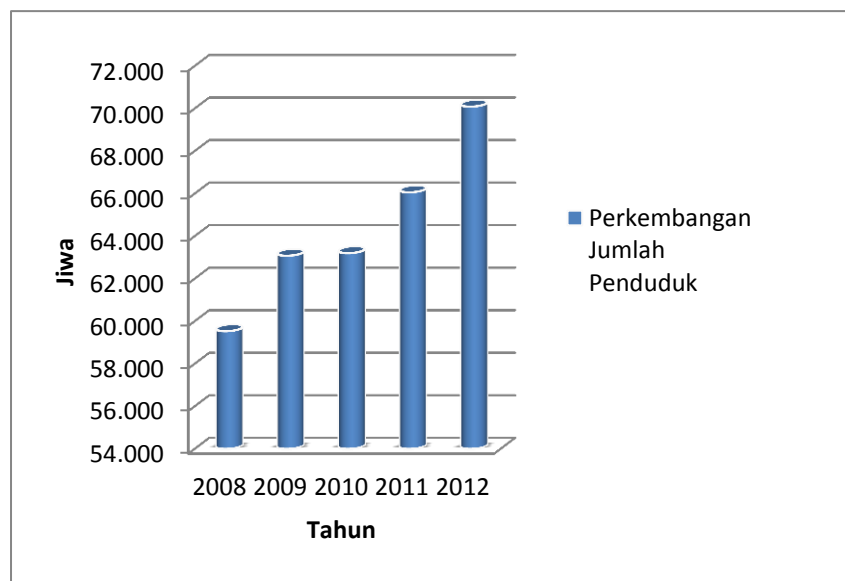
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, selama tahun 2008 hingga tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Lamandau terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2008 berjumlah 59.531 jiwa, tahun 2009 berjumlah 63.079, tahun 2010 berjumlah 63.199 jiwa, tahun 2011 berjumlah 66.061 jiwa dan tahun 2012 berjumlah 70.090 jiwa.

Penduduk Kabupaten Lamandau pada tahun 2012 berjumlah 70.090 jiwa, terdiri dari perempuan 32.722 jiwa dan laki-laki 37.368 jiwa. Apabila dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2008, peningkatan tingkat kepadatan penduduk dari 9,28 jiwa per kilometer persegi selama tahun 2008 menjadi 10,93 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2012. Kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Sematu Jaya yaitu 113,61 penduduk per kilometer persegi, diikuti Kecamatan Bulik sebanyak 36,59 penduduk dan Kecamatan Menthobi Raya sebanyak 15,42 penduduk.



Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Batang Kawa (3,86) dan Belantikan Raya (4,13). (Lihat Tabel 2.3)

Bagan 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lamandau



Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Lamandau

No	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Per Km ²)
1	Bulik	665,55	24.352	36,59
2	Bulik Timur	1.074,72	7.104	6,61
3	Sematu Jaya	86,85	9.867	113,61
4	Menthobi Raya	620,88	9.576	15,42
5	Lamandau	1.333,00	5.991	4,49
6	Belantikan Raya	1.263,00	5.212	4,13
7	Delang	685	5.346	7,80
8	Batang Kawa	685	2.642	3,86
Jumlah Total		6.414	70.090	10,93
Tahun 2011			66.061	10,3
Tahun 2010			63.199	9,85
Tahun 2009			63.079	9,83
Tahun 2008			59.531	9,28

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013

b. Sex Ratio dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Sex ratio digunakan untuk mengukur komposisi jenis kelamin. Data ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, utamanya yang berkaitan dengan kesetaraan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan.

Jika dilihat dari *sex ratio* atau komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Lamandau lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) di Kabupaten Lamandau sebesar 114. Dengan demikian, terdapat 114 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

Apabila dilihat dari komposisi kelompok umur, selama tahun 2012, usia produktif (15 – 64 tahun) masih mendominasi rata-rata sebesar 63%, sedangkan usia 0 – 14 tahun mencapai 34% dan penduduk usia lebih dari 65 tahun sekitar 3%. Kepadatan penduduk dan jumlahnya berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Lamandau tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Bagan 2.3.

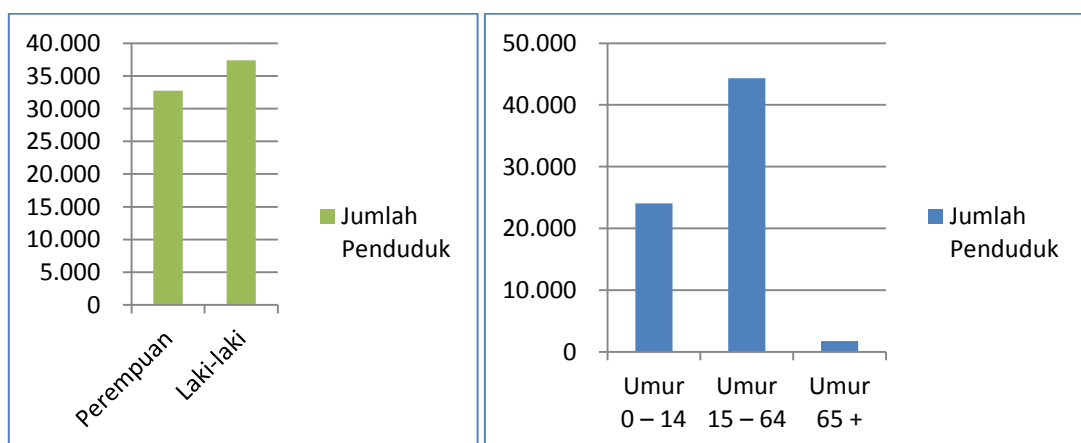
Tabel 2.4

Kepadatan Penduduk serta Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2012

Tahun		Kelompok Umur			Jenis Kelamin			Jumlah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
		0 – 14	15 – 64	65 +	Perempuan	Laki-laki	Rasio		
2012	Jiwa	24.036	44.301	1.753	32.722	37.368	114	70.090	10,9
	%	34	63	3	47	53		100	

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013

Bagan 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin & Kelompok Umur



Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

Dilihat berdasarkan lapangan usaha/sector ekonomi dari persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha/sector ekonomi, selama tahun 2012 sebagian besar penduduk Kabupaten Lamandau bekerja pada sektor pertanian yaitu mencapai 22.302 jiwa atau mencapai 63% dari total penduduk yang bekerja. Sedangkan penduduk yang bekerja di sektor pemerintahan sejumlah 9,45%, perdagangan 7,37% dan sektor jasa 7,20%. Sementara itu, untuk sektor Listrik & Air Minum, Sewa Rumah, dan sektor perbankan hanya mencapai kurang dari 1%. Persentase penduduk Kabupaten Lamandau yang bekerja menurut lapangan usaha tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Bagan 2.4.

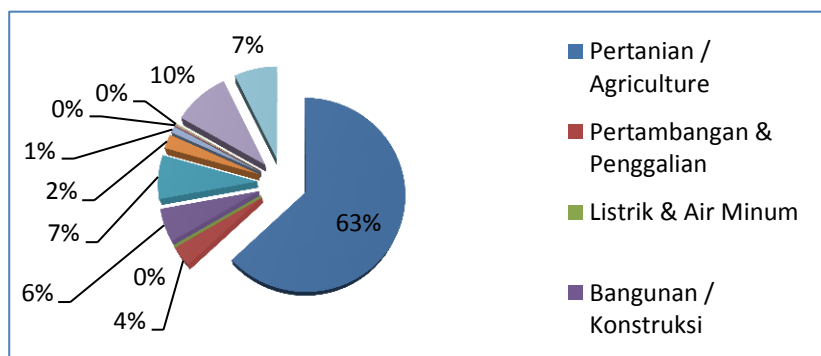
Tabel 2.5

Persentase Penduduk Kabupaten Lamandau yang Bekerja Menurut Sektor Tahun 2012

No	SEKTOR	Tahun 2012	
		Penduduk (Jiwa)	(%)
1	Pertanian / Agriculture	22.302	63,00
2	Pertambangan & Penggalan	1.218	3,44
3	Listrik & Air Minum	14	0,04
4	Bangunan / Konstruksi	1.985	5,61
5	Perdagangan	2.608	7,37
6	Industri Pengolahan	844	2,38
7	Pengangkutan & Komunikasi	390	1,10
8	Bank & Lembaga Keuangan	79	0,22
9	Sewa Rumah	68	0,19
10	Pemerintahan	3.346	9,45
11	Jasa-jasa	2.548	7,20
Total		35.402	100,00

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013

Bagan 2.4 Persentase Penduduk Kabupaten Lamandau yang Bekerja Menurut Sektor Tahun 2012



Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamandau. Fokus ini akan memaparkan tentang kondisi ekonomi makro sebuah wilayah yang diukur dengan beberapa indikator, yaitu pertumbuhan PDRB, Struktur Perekonomian, PDRB per kapita, dan persentase penduduk diatas garis kemiskinan.

a. Pertumbuhan PDRB

Indikator umum yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi regional berhubungan erat dengan sektor-sektor yang membentuknya. Artinya, sektor mana saja yang memberikan kontribusi lebih terhadap perekonomian, dan sektor mana saja yang kontribusinya masih kurang sehingga memerlukan perhatian lebih.

PDRB ada dua macam, yaitu PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga (ADH) Berlaku dan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga (ADH) Konstan. Data mengenai pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamandau tahun 2009 - 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.6, Tabel 2.7, dan Tabel 2.8.

Tabel 2.6

**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s.d 2012
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lamandau**

No	Sektor	2009		2010		2011		2012	
		jutaan Rp	%	jutaan Rp	%	jutaan Rp	%	jutaan Rp	%
1	Pertanian	635.100,30	8,13	735.995,45	15,89	838.512,59	13,93	947.663,84	13,02
2	Pertambangan & penggalian	10.056,53	- 34,70	13.197,25	31,23	16.092,83	21,94	19.311,98	20,00
3	Industri pengolahan	6.959,18	13,30	7.490,87	7,64	8.130,07	8,53	9.126,09	12,25
4	Listrik, gas & air bersih	933,12	33,67	1.342,69	43,89	1.545,17	15,08	1.752,84	13,44
5	Konstruksi	2.239,87	29,23	2.773,15	23,81	3.293,12	18,75	3.752,14	13,94
6	Perdagangan, hotel & restoran	149.254,88	10,36	165.415,93	10,83	181.340,20	9,63	206.157,56	13,69
7	Pengangkutan & komunikasi	35.883,75	10,11	38.178,26	6,39	42.121,15	10,33	47.219,89	12,10
8	Kuangan, sewa, & jasa	21.723,22	14,76	26.290,22	21,02	30.736,95	16,91	36.664,66	19,29



No	Sektor	2009		2010		2011		2012	
		jutaan Rp	%	jutaan Rp	%	jutaan Rp	%	jutaan Rp	%
	Perusahaan								
9	Jasa-jasa	78.419,72	11,44	92.241,49	17,63	110.366,94	19,65	124.445,18	12,76
PDRB		940.570,57	8,30	1.082.925,31	15,13	1.232.139,02	13,78	1.396.094,18	13,31

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

Selama kurun waktu 2009-2012, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 nilai PDRB ADHB tercatat sebesar 950,57 milyar rupiah dan pada tahun 2011 mencapai 1,39 trilyun rupiah. Artinya, PDRB ADHB Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan sebesar 455,52 milyar rupiah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun. Kontribusi terbesar PDRB ADHB Kabupaten Lamandau tahun 2009-2012 adalah dari sektor pertanian.

Tabel 2.7

**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s.d 2012
Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lamandau**

No	Sektor	2009		2010		2011		2012	
		Jutaan (Rp)	%	Jutaan (Rp)	%	Jutaan (Rp)	%	Jutaan (Rp)	%
1	Pertanian	359.769,46	6,87	376.295,12	4,59	396.808,61	5,45	424.657,14	7,02
2	Pertambangan & penggalian	5.949,38	35,92	7.042,06	18,37	7.529,49	6,92	8.369,54	11,16
3	Industri pengolahan	4.355,19	9,82	4.521,66	3,82	4.806,35	6,30	5.170,50	7,58
4	Listrik, gas & air bersih	560,32	26,56	748,16	33,52	794,11	6,14	842,85	6,14
5	Konstruksi	1.542,08	22,03	1.890,32	22,58	2.099,27	11,05	2.260,16	7,66
6	Perdagangan, hotel & restoran	90.031,91	5,10	97.947,17	8,79	105.230,57	7,44	109.762,92	4,31
7	Pengangkutan & komunikasi	22.927,41	6,59	23.972,86	4,56	25.129,68	4,83	26.525,82	5,56
8	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	14.223,94	9,62	16.394,31	15,26	18.639,69	13,70	21.291,71	14,23
9	Jasa-jasa	57.139,40	4,84	61.934,20	8,39	68.246,17	10,19	73.715,74	8,01
PDRB		556.499,09	5,74	590.745,86	6,15	629.283,94	6,52	672.596,38	6,88

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

Demikian halnya dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) selama kurun waktu 2009-2012 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 nilai PDRB riil tercatat sebesar 556,49 milyar rupiah kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi 672,59 milyar rupiah sehingga selama periode tersebut secara riil PDRB ADHK Kabupaten Lamandau naik sebesar 116,09 milyar rupiah. Peningkatan nilai PDRB terjadi di semua sektor. Namun, kontribusi terbesar PDRB ADHK Kabupaten Lamandau tahun 2009-2012 masih dari sektor pertanian.



Tabel 2.8

Perkembangan PDRB Tahun 2009 s.d 2012
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Lamandau

No	Sektor	2009		2010		2011		2012	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian	8,13	6,87	15,89	4,59	13,93	5,45	13,02	7,02
2	Pertambangan & penggalian	-34,70	-35,92	31,23	18,37	21,94	6,92	20,00	11,16
3	Industri pengolahan	13,30	9,82	7,64	3,82	8,53	6,30	12,25	7,58
4	Listrik, gas & air bersih	33,67	26,56	43,89	33,52	15,08	6,14	13,44	6,14
5	Konstruksi	29,23	22,03	23,81	22,58	18,75	11,05	13,94	7,66
6	Perdagangan, hotel, & restoran	10,36	5,10	10,83	8,79	9,63	7,44	13,69	4,31
7	Pengangkutan & komunikasi	10,11	6,59	6,39	4,56	10,33	4,83	12,10	5,56
8	Keuangan, sewa, & jasa perusahaan	14,76	9,62	21,02	15,26	16,91	13,70	19,29	14,23
9	Jasa-jasa	11,44	4,84	17,63	8,39	19,65	10,19	12,76	8,01
PDRB		8,30	5,74	15,13	6,15	13,78	6,52	13,31	6,88

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

Jika dilihat dari persentase perkembangannya, PDRB ADHB Kabupaten Lamandau dari tahun 2009-2012 mengalami peningkatan dan penurunan, tahun 2009 sebesar 8,30%, meningkat pada tahun 2010 menjadi 15,13%, kemudian berturut-turut mengalami penurunan pada tahun 2011 dan 2012 sebesar 13,78% dan 13,31%. Sementara itu, PDRB ADHK justru mengalami peningkatan tiap tahunnya dari 5,74% pada tahun 2009 menjadi 6,88% pada tahun 2012.

Berdasarkan 9 (sembilan) sektor ekonomi pembentuk PDRB, terdapat 6 (enam) sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan di atas total pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamandau pada akhir tahun 2012. Keenam sektor tersebut adalah pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, sektor bangunan, sektor keuangan, dan sektor jasa. Sedangkan tiga sektor lainnya berada di bawah pertumbuhan total PDRB, yaitu sektor listrik, gas & air bersih, sektor perdagangan, hotel, & restoran, dan sektor pengangkutan & komunikasi.

b. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian dapat menggambarkan seberapa besar peran setiap sektor pembentuk PDRB dalam perekonomian suatu daerah digunakan. Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar analisis maupun pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sebagai upaya peningkatan perekonomian suatu daerah.

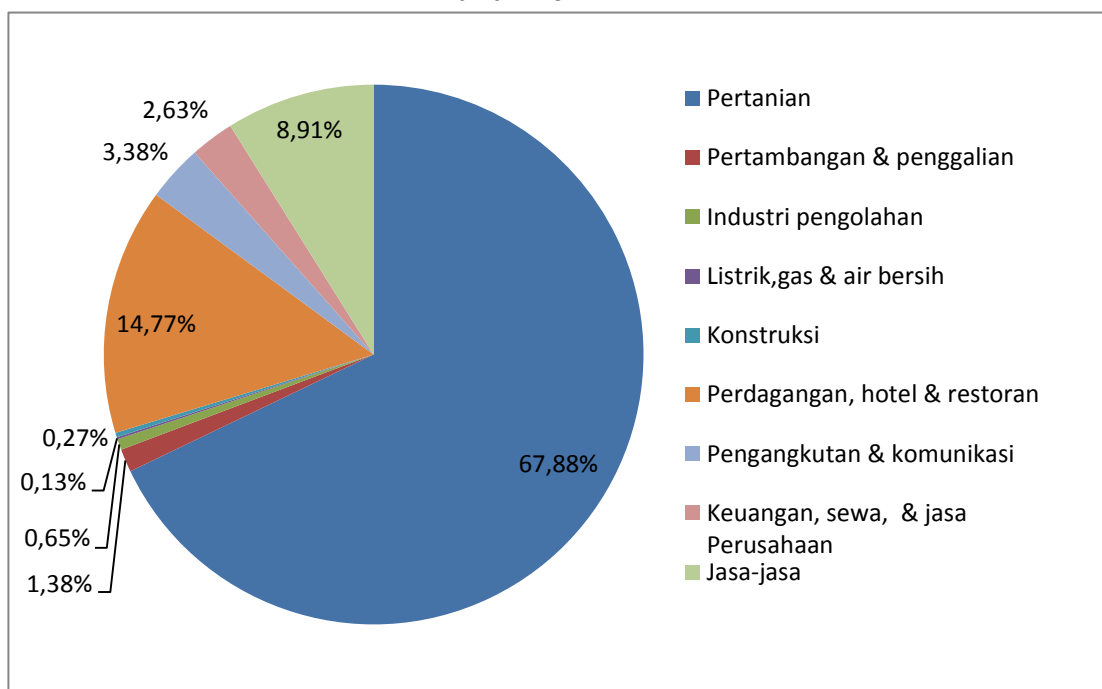


Struktur ekonomi tercermin dari besarnya distribusi persentase nilai tambah masing-masing sektor terhadap PDRB atas dasar harga berlaku.

Struktur perekonomian suatu daerah dipengaruhi oleh potensi yang ada di daerah tersebut, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Sehingga daerah satu dengan yang lain akan memiliki struktur perekonomian yang berbeda-beda, hal ini terkait dengan potensi yang ada di daerah masing-masing. Daerah yang memiliki sumber daya alam potensial akan menggali dan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki.

3 (tiga) sektor yang mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Lamandau tahun 2012 adalah Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, dan Sektor Jasa-jasa. Dari ketiga sektor, sektor Pertanian memiliki kontribusi terbesar, yaitu 67,88 persen, dengan Subsektor Perkebunan menjadi penyumbang terbesar pada sektor Pertanian. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam Bagan berikut.

Bagan 2.5 Distribusi PDRB Kabupaten Lamandau Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012



Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

Besarnya sumbangan dari sektor Pertanian terhadap PDRB Lamandau menunjukkan perekonomian Lamandau masih tergantung pada sumber daya alam. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan total PDRB Lamandau atas dasar harga berlaku dibanding dengan

sektor-sektor lainnya. Sektor pertanian dari tahun 2008-2012 menjadi sektor yang memiliki kontribusi terbesar dan mengalami fluktuasi bervariasi, hal ini dikarenakan meningkatnya peran dari kelompok sektor tersier dan sekunder.

Perkembangan peran Sektor Pertanian di Kabupaten Lamandau yaitu sebagai berikut: tahun 2008 kontribusinya mencapai 67,63 persen, tahun 2009 67,52 persen, tahun 2010 kontribusinya mencapai 67,53 persen, tahun 2011 kontribusinya mencapai 68,05, dan tahun 2012 kontribusinya mencapai 67,88 dari total PDRB.

Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran merupakan sektor dengan kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian Lamandau, yaitu sebesar 14,77 persen setelah tahun sebelumnya memberikan kontribusi hingga 14,72 persen. Peranan sektor ini dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yang cukup bervariasi.

Sektor Jasa-jasa merupakan sektor ketiga terbesar dalam struktur perekonomian Lamandau. Kontribusi sektor ini dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Tahun 2008 kontribusinya sebesar 8,10 persen, 8,34 persen pada tahun 2009, 8,52 persen pada tahun 2010, dan 8,96 persen pada tahun 2011. Sedangkan di tahun 2012, kontribusinya sedikit menurun, yaitu sebesar 8,91 persen. Menurunnya kontribusi sektor Jasa-jasa ini tidak berarti bahwa yang dibentuk oleh sektor ini menurun, tetapi lebih disebabkan karena meningkatnya kontribusi pada sektor-sektor lainnya.

Kontribusi keempat terhadap PDRB tahun 2012 ditempati oleh Sektor Pengangkutan dan Komunikasi yaitu sebesar 3,38 persen. Kontribusi di sektor ini selama tiga tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, yaitu di tahun 2009 dari 3,82 persen menjadi 3,53 persen di tahun 2010. Di tahun 2011 turun kembali menjadi 3,42 persen. Meskipun demikian prospek sektor ini ke depannya diperkirakan akan semakin meningkat sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang semakin baik meskipun peningkatannya tidak sebesar sektor lain. Sektor ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi masyarakat ataupun dunia usaha. Penurunan persentase kontribusi juga dipengaruhi oleh substitusi masyarakat dalam penggunaan angkutan sungai menjadi angkutan jalan raya.

Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan menempati posisi kelima terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Lamandau. Kontribusi sektor

ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Posisi keenam ditempati oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 1,38 persen.

Sektor-sektor tersebut di atas menempati kontribusi pada urutan pertama sampai dengan keenam yang merupakan sektor- sektor yang sangat besar mempengaruhi naik turunnya laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamandau tahun 2012 secara riil. Tiga sektor lainnya yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Lamandau tahun 2012 yaitu Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 0,65 persen; Sektor Bangunan dengan kontribusi 0,27 persen. Selanjutnya pada urutan terakhir masih ditempati oleh Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dengan kontribusi sebesar 0,13 persen. Walaupun ketiga sektor ini masih kecil pengaruhnya terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau secara keseluruhan saat ini pertumbuhan yang cukup pesat pada sektor ini menjanjikan peningkatan kontribusi ekonomi yang berperan besar dalam memajukan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Lamandau.

c. PDRB per Kapita

Pendapatan perkapita adalah besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Indikator ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan daerah dengan kata lain semakin tinggi/besar pendapatan perkapitanya maka semakin makmur daerah tersebut, meskipun angka tersebut tidak menggambarkan pendapatan penduduk secara nyata karena angka ini hanya merupakan rata-rata.

PDRB per kapita dapat diukur menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu PDRB atas harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk, sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.

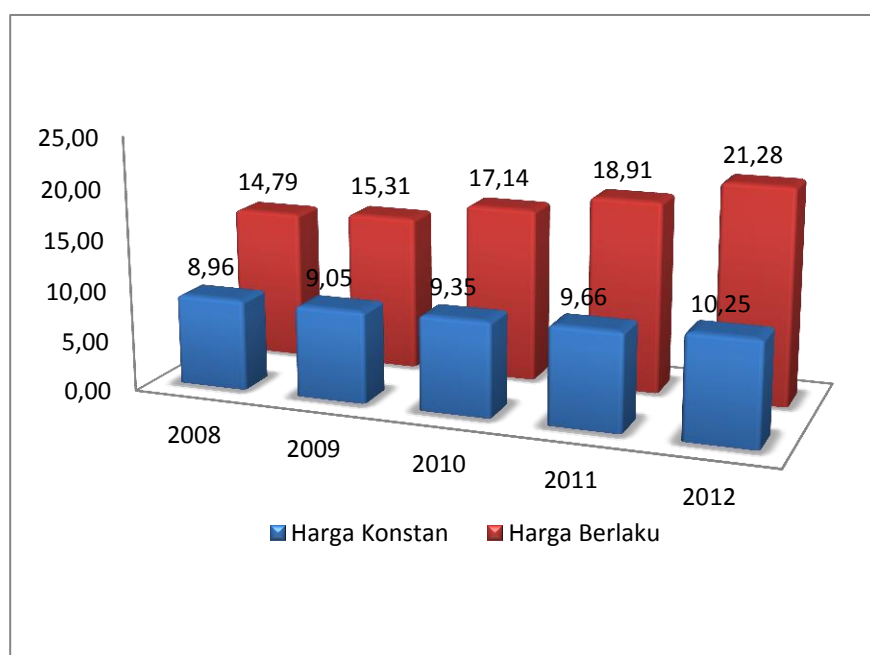


Tabel 2.9**PDRB per Kapita Kabupaten Lamandau Tahun 2008 - 2012**

Tahun	Penduduk Pertengahan Tahun	PDRB Perkapita			
		Harga Berlaku (Rp.)	Pertumbuhan	Harga Konstan (Rp.)	Pertumbuhan
			(%)		(%)
2008	58.706	14.793.505,72	5,97	8.964.455,49	2,31
2009	61.442	15.308.267,31	3,48	9.054.163,98	1,00
2010	63.199	17.135.165,38	11,93	9.345.428,31	3,22
2011	65.167	18.907.407,46	10,34	9.656.481,58	3,33
2012	65.616	21.276.734,14	12,53	10.250.493,48	6,15

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Lamandau Periode 2008-2013, dan Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013

Berdasarkan Tabel 2.8 terlihat bahwa PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun menunjukkan adanya pertumbuhan positif akibat pengaruh pertumbuhan penduduk pada tahun bersangkutan. PDRB Perkapita yang meningkat dari tahun ke tahun memberikan gambaran bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan cukup berhasil dan mampu menghasilkan kemajuan perekonomian Kabupaten Lamandau.

Bagan 2.6 Nilai PDRB per Kapita (Rp) Kabupaten Lamandau**(dalam juta rupiah)**

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Lamandau baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK selama tahun 2008-2012 mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, nilai PDRB ADHB per kapita tercatat sebesar 14,79 juta rupiah kemudian naik mencapai 21,27 juta rupiah pada tahun 2012. Sementara itu, PDRB ADHK per kapita pada tahun 2008 sebesar 8,96 juta rupiah naik menjadi 10,25 juta rupiah pada tahun 2011.

d. Penduduk diatas garis kemiskinan

Indikator persentase penduduk diatas garis kemiskinan adalah indikator yang menggambarkan rasio penduduk yang hidup berkecukupan dan yang tidak menurut standar tertentu yang berlaku secara nasional.

Proses pembangunan yang dinilai cukup berhasil dan mampu menghasilkan kemajuan perekonomian Kabupaten Lamandau tentunya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Indikasi peningkatan kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan Kabupaten Lamandau.

Berdasarkan Tabel 2.10 dan Bagan 2.7, dapat dilihat bahwa penduduk miskin di Kabupaten Lamandau selama tahun 2008 – 2012 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 penduduk miskin di Kabupaten Lamandau 7,78%, turun menjadi 6,01% pada tahun 2009, dan menurun kembali menjadi 5,64% di tahun 2010, pada tahun 2011 menjadi 5,06% dan pada tahun 2012 juga mengalami penurunan menjadi 4,42%.

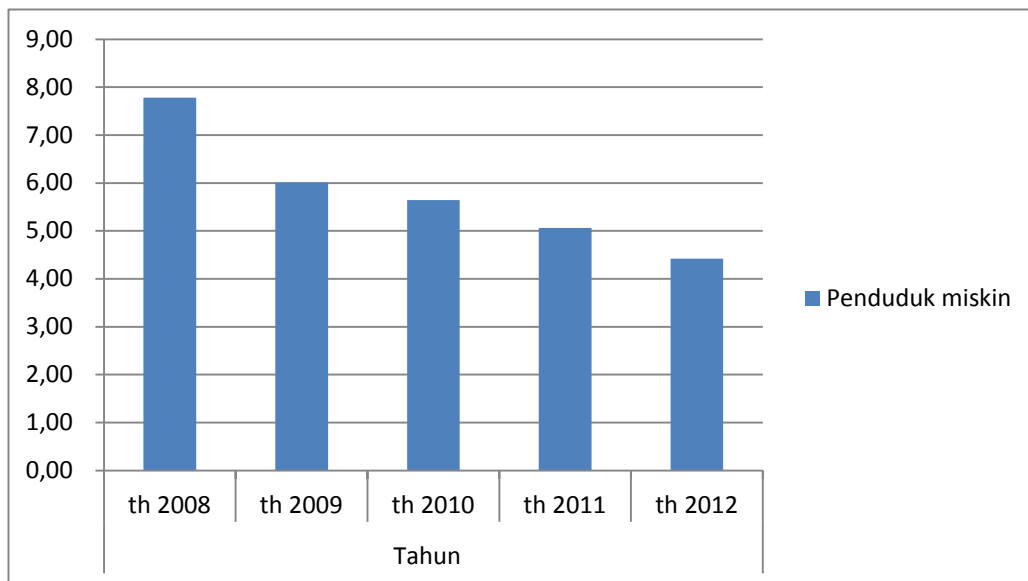
Tabel 2.10

Persentase Penduduk Miskin Tahun 2008 – 2012

No	Keterangan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Penduduk miskin (%)	7,78	6,01	5,64	5,06	4,42

Sumber: Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012



Bagan 2.7 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2008 - 2012

Sumber: Bappeda Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012

2.2.2. Kesejahteraan Masyarakat

Identifikasi/pemahaman tentang kondisi kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek pemerintahan yang terkait. Dari berbagai macam aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, aspek yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah pendidikan, kesehatan, pertanian dan ketenagakerjaan.

a. Pendidikan

a.1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Manfaat perhitungan angka melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, yang khususnya ada di wilayah perdesaan.

Data angka melek huruf Kabupaten Lamandau tahun 2008 hingga 2012 adalah sebagai berikut/ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.

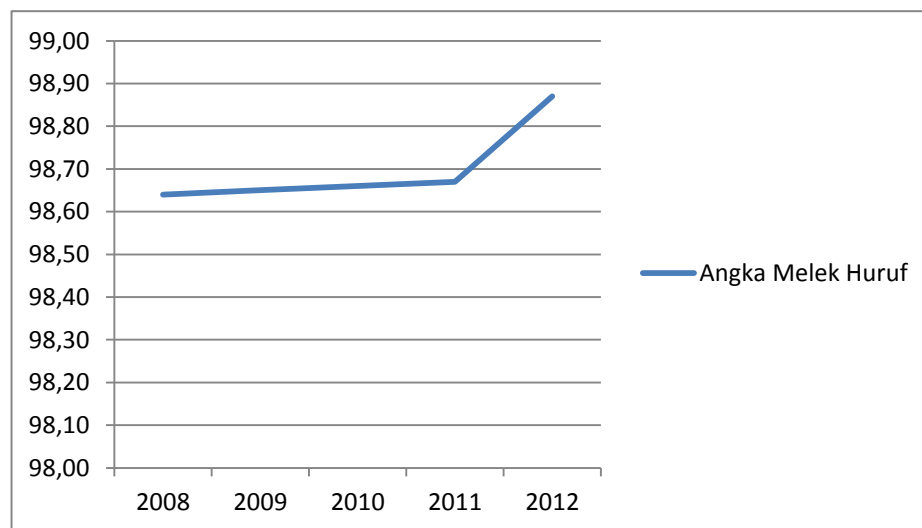
Tabel 2.11**Angka Melek Huruf Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012**

Indikator	Angka Melek Huruf (%)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
2008	98,64	7,60
2009	98,65	7,61
2010	98,66	7,63
2011	98,67	7,73
2012	98,87	7,75

Sumber: Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa angka melek huruf di Kabupaten Lamandau dari tahun 2008 sampai 2012 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Laju peningkatan angka melek huruf adalah 0,01%. Pada tahun 2008 angka melek huruf tercatat sebesar 98,64%. Selanjutnya pada tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 angka melek huruf Kabupaten Lamandau adalah 98,65%, 98,66%, 98,67% dan 98,87. Tahun 2012 masih terdapat 1,13% penduduk Kabupaten Lamandau yang ditengarai masih buta huruf.

Semakin tinggi angka melek huruf, maka semakin tinggi kemampuan menyerap informasi dari berbagai media. Angka melek huruf masyarakat yang tinggi akan mempengaruhi potensi perkembangan intelektual dan kontribusinya terhadap pembangunan di Kabupaten Lamandau. Dengan angka melek huruf yang tinggi, Kabupaten Lamandau mempunyai SDM berpendidikan dalam jumlah besar yang potensial untuk mendukung gerak pembangunan.

Bagan 2.8 Angka Melek Huruf di Kabupaten Lamandau Tahun 2008 - 2012

Sumber: Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau

a.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar diusia yang lebih muda atau lebih tua. Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang.

Berdasarkan data pada Tabel 2.11, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lamandau tahun 2008 hingga tahun 2012 meningkat. Pada tahun 2008 angka rata-rata lama sekolah adalah 7,60; pada tahun 2009 angka rata-rata lama sekolah adalah 7,61; pada tahun 2011 rata-rata lama sekolah adalah 7,73, dan pada tahun 2012 rata-rata lama sekolah adalah 7,75.

Nilai rata-rata lama sekolah menunjukkan tingginya tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah. Pada tahun 2008-2012 nilai rata-rata lama sekolah berkisar pada 7,60 hingga 7,75 yang artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Lamandau bersekolah sampai 7 tahun 7 bulan atau SMP. Meskipun angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan, namun rata-rata lama sekolah penduduk sebesar 7 tahun 7 bulan menunjukkan bahwa kesadaran akan pendidikan penduduk di Kabupaten Lamandau belum cukup tinggi.

a.3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP/ SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa.

Angka partisipasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan. Dari tabel menunjukkan nilai APK pada tahun 2008 sampai 2012,



nilai APK pada jenjang pendidikan SD memiliki nilai APK yang paling tinggi dan selalu meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan pada jenjang pendidikan SMP dan SMA memiliki tingkat APK yang lebih rendah meskipun juga memiliki kecenderungan meningkat.

Tabel 2.12

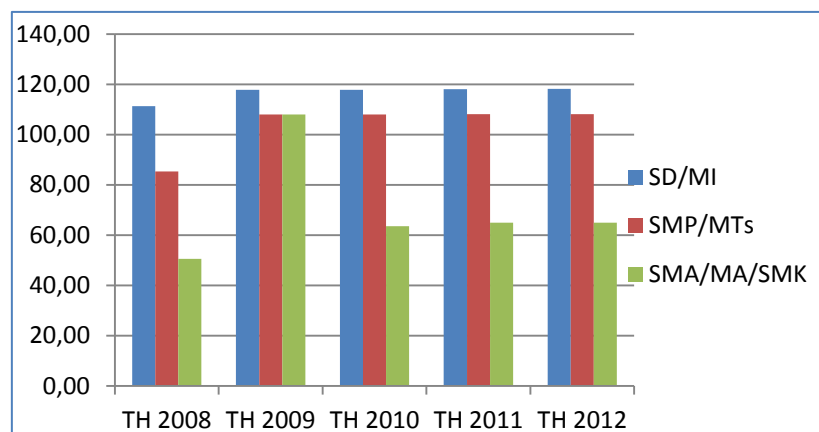
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012**

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
Angka Partisipasi Kasar (APK)						
1	SD/MI	111,28	117,82	117,82	118,02	118,22
2	SMP/MTs	85,31	107,97	107,97	108,19	108,19
3	SMA/MA/SMK	50,55	107,97	63,59	65,00	65,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau

Bagan 2.9 APK Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Lamandau

Tahun 2008 - 2012



Sumber: Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau, diolah

Peningkatan APK pada jenjang pendidikan SMA perlu mendapat perhatian khusus agar terus meningkat, agar memenuhi program pemerintah nasional yaitu wajib belajar 12 tahun. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan terutama dimulai dari pendidikan dasar.

a.4. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM

merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Jenjang pendidikan menurut kelompok usia sekolah:

SD/MI : 7-12 tahun

SMP/MTs : 13-15 tahun

SMA/MA/SMK : 16-18 tahun

Data mengenai angka partisipasi murni menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Lamandau Tahun 2008 dan 2012 dapat dilihat dari tabel berikut.

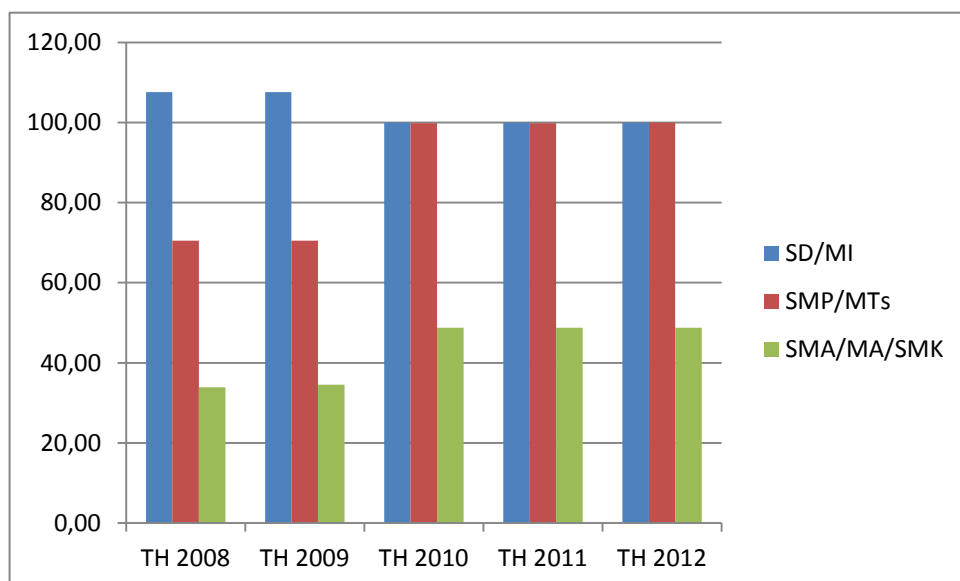
Tabel 2.13

**Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012**

No	Jenjang Pendidikan	2008	2009	2010	2011	2012
Angka Partisipasi Murni (APM)						
1	SD/MI	107,60	107,60	100,00	100,00	100,00
2	SMP/MTs	70,49	70,50	99,85	99,85	100,00
3	SMA/MA/SMK	33,89	34,51	48,72	48,72	48,72

Sumber: Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau

Bagan 2.10 APM Menurut Jenjang Pendidikan Kab. Lamandau Tahun 2008 - 2012



Sumber: Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau, diolah

Dilihat dari tingkat pendidikan, Angka Partisipasi Murni SD, SMP, dan SMA mengalami peningkatan dari tahun 2008 ke tahun 2010, sedangkan untuk tahun 2011 dan 2012 APM pada masing-masing jenjang sama dengan tahun 2010.

APM menggambarkan kondisi kapasitas SDM Kabupaten Lamandau di masa depan, dimana APM yang tinggi menunjukkan tingkat intelektualitas angkatan kerja pada beberapa tahun mendatang, selepas para pelajar meninggalkan bangku sekolah. Dari data diatas diketahui bahwa secara umum semakin tinggi tingkat pendidikan, maka angka partisipasi semakin menurun, maka Kabupaten Lamandau diperkirakan akan kekurangan sumber daya manusia yang kompeten untuk menjalankan kegiatan pembangunan yang membutuhkan keahlian tinggi.

Dalam jangka pendek, intervensi pemerintah diperlukan agar anak usia diatas 15 tahun mendapat pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi, dengan kata lain program wajib belajar 12 tahun terpenuhi. Dalam jangka panjang, intervensi pemerintah diperlukan agar tersedia angkatan kerja dengan *knowledge, skill* dan *attitude* yang mendukung pembangunan.

Kemajuan pembangunan suatu wilayah tidak terlepas dari kondisi atau kemampuan sumber daya manusianya. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan suatu daerah adalah aspek pendidikan penduduk. Oleh karena itu, sebaiknya permasalahan pendidikan dapat menjadi perhatian bersama dalam penanganannya.

b. Kesehatan

b.1 Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat di suatu daerah terutama di sektor kesehatan. Angka harapan hidup juga dijadikan salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia selain pendidikan dan ekonomi. Angka harapan hidup dapat diketahui dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.



Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan angka usia harapan hidup di Kabupaten Lamandau disajikan dalam gambar sebagai berikut:

Tabel 2.14

Angka Harapan Hidup Kab.Lamandau Tahun 2008 - 2012

TAHUN	Angka Harapan Hidup (Tahun)
2008	66,05
2009	67,13
2010	67,21
2011	67,29
2012	67,36

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

Pada tahun 2008 bernilai 66,05 dan terus meningkat sampai 67,36 pada tahun 2012. Angka harapan hidup Kabupaten Lamandau pada tahun 2008 adalah 66,05 hal ini menunjukkan bahwa bayi-bayi yang lahir pada tahun 2008 usianya dapat mencapai 66 tahun, tidak jauh berbeda dengan tahun 2008, tahun 2012 bayi-bayi yang dilahirkan usianya berkisar antara 67 hingga 67,36 tahun. Meskipun peningkatan ini tidak signifikan, namun sudah dapat mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamandau. Meningkatnya pelayanan kesehatan dan kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal kesehatan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka usia harapan hidup masyarakat Lamandau.

b.2 Presentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah kondisi terparah dari kekurangan gizi menahun.

Tabel 2.15**Balita Gizi Buruk di Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012**

No	Status Gizi	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Balita Gizi Buruk (Jiwa)	0	0	1	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

Dari data tersebut diketahui bahwa angka balita gizi buruk di Kabupaten Lamandau sangatlah rendah. Pada tahun 2010 nilai gizi buruk meningkat. Angka tersebut kemudian naik pada tahun 2010 menjadi 1, namun berhasil diturunkan lagi menjadi nol pada tahun 2011 dan 2012.

Rendahnya balita gizi buruk menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik dari pemerintah daerah/kualitas kesehatan masyarakat yang baik. Dengan melihat data gizi buruk Kabupaten Lamandau, maka hal itu adalah hal yang positif dan baik bagi perkembangan Kabupaten Lamandau. Penurunan nilai gizi buruk juga menggambarkan keberhasilan program pemerintah yang berkaitan dengan perbaikan gizi.

c. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Lamandau selama periode 2008-2012 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 jumlah penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 59,23% dan terus meningkat hingga mencapai 76,87% pada tahun 2012.

Tabel 2.16**Jumlah Penduduk 15 Tahun keatas (Usia Kerja) di Kabupaten Lamandau**

Jenis Kegiatan Utama	Tahun 2008 (%)	Tahun 2009 (%)	Tahun 2011 (%)	Tahun 2012 (%)
Bekerja	59,23	65,90	71,68	76,87
Sekolah	21,62	13,91	11,91	6,60
Mengurus Rumah Tangga	16,13	18,19	14,54	15,00
Lainnya	3,02	2,00	1,86	1,53
Total	100	100	100	100

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013



Peningkatan ini mengindikasikan bahwa di Tahun 2012 semakin besar bagian dari penduduk usia kerja semakin meningkatnya nilai angkatan kerja menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk di Kabupaten Lamandau yang berpartisipasi dalam pergerakan aktivitas ekonomi.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamandau, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, KB, Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM, penanaman modal, kebudayaan, ketahanan pangan, statistik, komunikasi dan informatik, serta perpustakaan. Sedangkan urusan pilihan mencakup pertanian dan kehutanan, ESDM, serta perdagangan dan pariwisata.

2.3.1. Urusan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Kabupaten Lamandau masih perlu ditingkatkan.

a. Pendidikan

a.1. Angka Partisipasi Sekolah Dasar dan Menengah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi sekolah memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda.

Tabel 2.17

Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012

Kategori	Angka Partisipasi Sekolah				
	2008	2009	2010	2011	2012
SD	98,52	98,70	98,90	99,30	99,75
SMP	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
SMA	55,00	57,00	59,00	61,00	63,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau



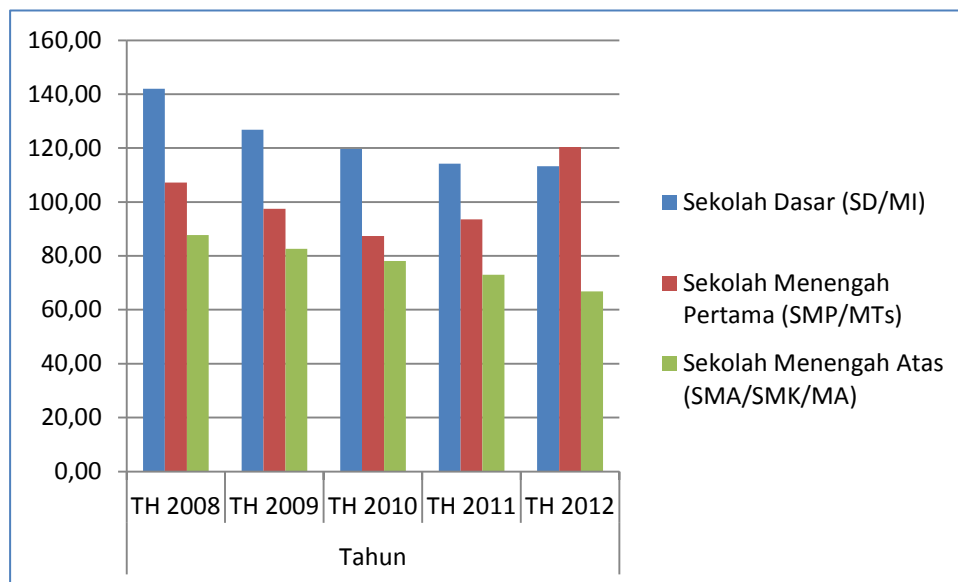
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa APS penduduk usia SD menurun pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 terus mengalami peningkatan. Begitu juga dengan APS penduduk usia SMP dan SMA, terus mengalami peningkatan selama periode 2008-2012

a.2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar dan Menengah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar dan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar dan menengah.

Semakin rendah rasio ketersediaan sekolah, semakin baik pelayanan pendidikan suatu daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah murid diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah. Sebaliknya, semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah semakin buruk pelayanan pendidikan suatu daerah, karena jumlah sekolah menjadi kurang serta tidak seimbang dengan jumlah murid yang ada.

Bagan 2.11 Rasio Sekolah terhadap Murid Di Kabupaten Lamandau 2008-2012



Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

Tabel 2.18**Rasio Sekolah terhadap Murid Di Kabupaten Lamandau 2008-2012**

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Sekolah Dasar (SD/MI)	141,99	126,85	119,72	114,20	113,27
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	107,19	97,46	87,35	93,55	120,44
3	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	87,72	82,64	78,08	73,03	66,79

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

Berdasarkan Tabel 2.18 dapat disimpulkan bahwa Rasio Sekolah-Murid di Kabupaten Lamandau 2008-2012 masih cukup tinggi, terutama pada tingkat Sekolah Dasar. Namun demikian rasio tersebut memiliki kecenderungan menurun setiap tahunnya selama kurun waktu tahun 2008-2012, baik di tingkat Sekolah Dasar, maupun Sekolah Menengah Atas. Sedangkan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama menunjukkan penurunan rasio dari tahun 2008 hingga 2010 yaitu dari 107,19 menjadi 87,35, kemudian meningkat kembali pada tahun 2012 menjadi sebesar 120,44. Kecenderungan penurunan rasio sekolah-murid ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Lamandau penambahan jumlah murid diikuti dengan penambahan jumlah sekolah. Seperti diketahui, semakin rendah rasio berarti semakin baik kondisi pelayanan pendidikan sebuah daerah.

a.3. Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah

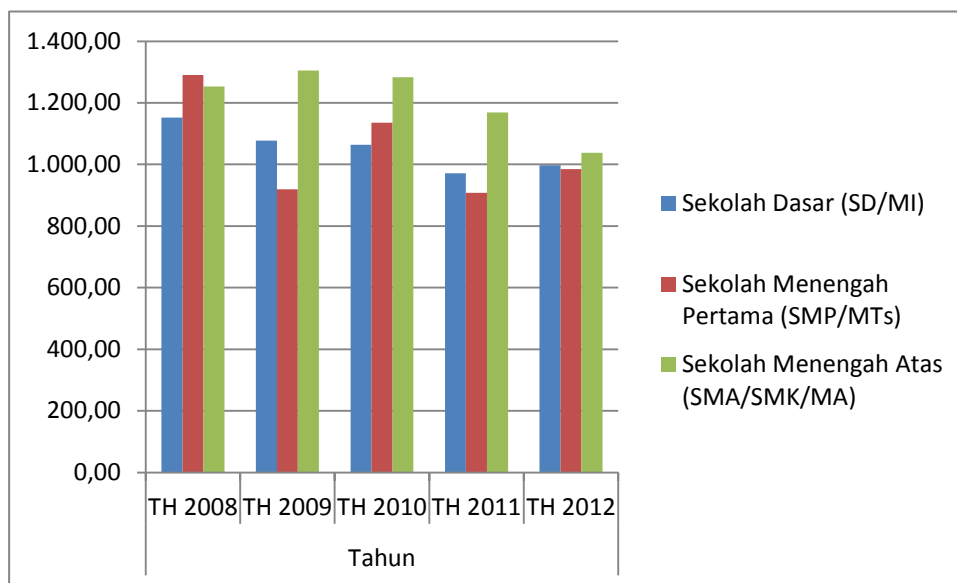
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.19**Rasio Guru terhadap Murid Di Kabupaten Lamandau 2008-2012**

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Sekolah Dasar (SD/MI)	1.152,47	1.077,59	1.063,38	971,28	996,81
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	1.290,19	918,90	1.135,55	907,39	985,18
3	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	1.253,13	1.304,60	1.282,77	1.168,49	1.037,40

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah



Bagan 2.12 Rasio Guru terhadap Murid Di Kabupaten Lamandau 2008-2012

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah pada tingkat SD mengalami penurunan setiap tahun selama 2008-2011, meningkat kembali pada tahun 2012. Rasio Guru Terhadap Murid pada tingkat SMP mengalami penurunan pada tahun 2009, kemudian naik pada tahun 2010, turun kembali pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 meningkat lagi. Sedangkan pada tingkat SMA, rasio Guru Terhadap Murid mengalami kenaikan pada tahun 2009, kemudian terus mengalami penurunan pada tahun 2010 dan 2011, meningkat kembali pada tahun 2012. Jika melihat nilai rasionya, kondisi pendidikan di Kabupaten Lamandau mengalami kekurangan murid. Sebagai contoh untuk tingkat SD pada tahun 2012 setiap 1 (satu) guru hanya mengajar untuk 10 (sepuluh) murid, untuk tingkat SMP setiap 1 (satu) guru hanya mengajar untuk 10 (sepuluh) murid, dan untuk tingkat SMA setiap 1 (satu) guru hanya mengajar untuk 10 (sepuluh) murid.

b. Kesehatan

Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar, semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas

sumber daya manusia yang diharapkan akan mencapai derajat kesehatan yang baik, yang pada gilirannya akan memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif. Melalui berbagai kebijakan program dan kegiatan, Pemerintah Kabupaten Lamandau berupaya meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

b.1 Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk

Keberadaan puskesmas dan puskesmas pembantu merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Melalui puskesmas dan puskesmas pembantu, masyarakat baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan akan dengan mudah memperoleh berbagai pelayanan dan informasi kesehatan. Rasio puskesmas dan pustu merupakan perhitungan untuk mengetahui suatu wilayah dalam cakupannya untuk memenuhi pelayanannya kepada penduduk. Tujuan agar pelayanan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan.

Tabel 2.20

Rasio Fasilitas Kesehatan Terhadap 1.000 penduduk Tahun 2009-2012

No	Fasilitas Kesehatan	2009	2010	2011	2012
1	Puskesmas	0,143	0,142	0,151	0,157
2	Puskesmas pembantu	0,904	0,934	0,923	0,870

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2011/2012, diolah

Data diatas menunjukkan nilai rasio puskesmas tahun 2009-2012 mengalami peningkatan pada tahun 2012. Sedangkan rasio puskesmas pembantu pada tahun 2009-2010 mengalami kenaikan 0,03 dan pada tahun 2010-2012 terus mengalami penurunan.

Pada tahun 2012 setiap 1.000 penduduk terdapat 0,157 puskesmas atau dengan kata lain setiap 1 puskesmas di Kabupaten Lamandau melayani 6.369 penduduk. Sedangkan untuk pustu, setiap 1.000 penduduk terdapat 0,870 pustu atau dengan kata lain setiap 1 pustu di Kabupaten Lamandau melayani 1.149 penduduk.

Rasio puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk adalah mengukur ketersediaan puskesmas dan pustu berdasarkan jumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio fasilitas kesehatan maka semakin banyak penduduk

yang dilayani oleh puskesmas ataupun pustu. Sedangkan semakin rendah nilai rasio fasilitas kesehatan maka semakin sedikit penduduk yang dilayani oleh puskesmas ataupun pustu. Penurunan nilai pustu ini diharapkan tidak terjadi secara menerus. Kesesuaian antara fasilitas kesehatan dengan penduduk yang dilayani akan memberikan hasil yang optimal pada pelayanannya.

b.2 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah dengan menyediakan sarana prasarana kesehatan diantaranya adalah rumah sakit. Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang bekesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 1000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Data mengenai Rasio Rumah Sakit terhadap 1000 penduduk di Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21

Rasio Rumah Sakit Terhadap 1.000 penduduk Tahun 2009-2012

No	Fasilitas Kesehatan	2009	2010	2011	2012
1	Rumah Sakit	0,0159	0,0158	0,0151	0,0143

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

Sumber data Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013 dapat diketahui jumlah penduduk di Kabupaten Lamandau adalah 63.079 jiwa pada tahun 2009, 63.199 jiwa pada tahun 2010, 66.061 jiwa pada tahun 2011, dan 70.090 jiwa pada tahun 2012 dengan jumlah rumah sakit di Kabupaten Lamandau ada 1 buah. Dari data diatas dapat dihitung nilai rasio rumah sakit per satuan penduduk dan diketahui nilai rasio rumah sakit per satuan penduduk diketahui yaitu kurang dari 0,02 setiap tahunnya. Ini berarti jumlah rumah sakit di Kabupaten Lamandau masih sangat kurang.

Jika dilihat dari data yang ada, proporsi ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Lamandau dirasa timpang, sehingga ke depan perlu diatur agar rasio rumah



sakit dibandingkan penduduk yang dilayani lebih proporsional. Harapannya pemerataan pelayanan kesehatan akan terwujud dengan baik termasuk kedalaman cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, pengoptimalan pelayanan, kelengkapan fasilitas, serta sistem manajemen yang baik juga harus diperhatikan.

b.3 Rasio Dokter dan Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Menghitung rasio dokter dan rasio tenaga medis per satuan penduduk bermanfaat untuk mengetahui kebutuhan tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Lamandau dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Tabel 2.22

Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Terhadap 1.000 penduduk Tahun 2009-2012

No	Tenaga Kesehatan	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1	Dokter	0,301	0,19	0,257	0,043
2	Bidan	0,793	0,807	1,075	0,185
3	Perawat	2,822	2,389	3,058	2,226

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

Dari tabel diketahui bahwa rasio dokter dari tahun 2009-2010 mengalami penurunan, kemudian meningkat kembali dari tahun 2010-2011, dan turun secara signifikan pada tahun 2012. Sedangkan untuk tenaga medis bidan dari tahun 2009-2011 terus mengalami peningkatan, dan turun signifikan tahun 2012. Sementara itu, untuk tenaga medis perawat memiliki rasio yang menurun dari tahun 2009-2010, kemudian meningkat pada tahun 2011, dan turun kembali pada tahun 2012.

Penurunan rasio dokter, bidan dan perawat karena menurunnya jumlah dokter, bidan, dan perawat. Di sisi yang lain, jumlah penduduk terus bertambah setiap tahunnya.

Rasio dokter di Kabupaten Lamandau tahun 2011 sebesar 0,043 per 1.000 penduduk, yang berarti 1 orang dokter di Kabupaten Lamandau untuk 23.255 penduduk. Rasio tersebut masih di bawah standar apabila dikaitkan dengan sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya setiap dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Kabupaten Lamandau belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk. Selain itu distribusi dokter

belum merata serta perlu ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu diperlukan penanganan agar pemenuhan tenaga kesehatan terpenuhi.

Rasio perawat di Kabupaten Lamandau tahun 2012 sebesar 2,226 per 1.000 penduduk (1 perawat untuk 449 penduduk), angka ini di atas angka standar nasional yang sebesar 117 per 100.000 penduduk. Sedangkan rasio bidan di Kabupaten Lamandau tahun 2012 sebesar 0,185 per 1.000 penduduk (1 bidan untuk 5.405 penduduk), angka ini masih di bawah standar nasional yang sebesar 100 per 100.000 penduduk.

b.4 Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Cakupan puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) diperlukan karena bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan fasilitas kesehatan dimasyarakat. Puskesmas biasanya cakupannya adalah Kecamatan, sedangkan pustu cakupannya adalah desa dan atau kelurahan tergantung jumlah penduduknya.

Tabel 2.23

Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kabupaten Lamandau

No	Fasilitas Kesehatan	Tahun 2012 (%)
1	Puskesmas	137,50
2	Puskesmas Pembantu	73,49

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

Dari tabel, diketahui bahwa cakupan untuk puskesmas di Kabupaten Lamandau adalah 137,5%, sedangkan cakupan untuk pustu adalah 73,49%. Semakin tinggi nilai cakupan pelayanan suatu fasilitas, maka daya layannya semakin baik. Pada puskesmas pembantu nilai cakupannya 73,49%. hal ini menunjukkan bahwa puskesmas pembantu belum mampu secara maksimal dalam melayani wilayah pelayanannya. Cakupan pelayanan pustu perlu ditingkatkan salah satu caranya dengan menambah jumlah pustu.

Sedangkan cakupan puskesmas bernilai 137,5%, yang berarti menunjukkan bahwa puskesmas mampu melayani wilayah pelayanannya secara maksimum. Cakupan Puskesmas di Kabupaten Lamandau yang mencapai lebih dari 100% menunjukkan di setiap kecamatan sudah memiliki puskesmas.

c. Pekerjaan Umum

c.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten, serta kecamatan yang ada di Kabupaten Lamandau. Jalan ini penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan darat ini, perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Data untuk menghitung proporsi panjang jalan dalam kondisi baik diperoleh dari Katalog BPS Kabupaten Lamandau Dalam Angka tahun 2012/2013, seperti tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.24

Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Lamandau

No	Rasio	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1	Jalan kondisi baik dan sedang	0,57	0,57	0,58	0,59

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

Dari tabel, diketahui proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2009-2010 adalah tetap. Sedangkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 0,58 dan tahun 2012 menjadi 0,59. Tahun 2012, panjang jalan di Kabupaten Lamandau dalam kondisi baik sebesar 59% dan sisanya atau 41% kondisi jalan di Kabupaten Lamandau dalam kondisi kurang baik atau buruk.

Kondisi jalan yang 59% dalam kondisi baik dirasa kurang untuk sebuah daerah. Pembangunan wilayah akan terhambat karena tidak didukung oleh infrastruktur jaringan jalan yang memadai/dipengaruhi oleh akses jaringan jalan yang rusak. Untuk itu, peningkatan kualitas jaringan jalan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Seperti diketahui, semakin tinggi nilai proporsi

panjang jaringan jalan akan memberikan dampak yang baik bagi penduduknya ataupun bagi daerah itu sendiri, karena akan mendukung dan memperlancar kegiatan perekonomian.

c.2. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran untuk kebutuhan budidaya pertanian.

Data mengenai jaringan irigasi saat ini yang dimiliki kurang lengkap untuk menggambarkan rasio jaringan irigasi. Dari Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Lamandau Periode 2008-2013, hanya diketahui Dinas Pekerjaan Umum melakukan peningkatan sarana irigasi.

c.3. Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Drainase berfungsi untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Drainase merupakan salah satu cara untuk membuang kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah. Selain itu tujuan dari drainase adalah salah satu unsur dari prasarana kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat.

Data untuk menghitung drainase dalam kondisi baik kurang cukup lengkap. Dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Lamandau Periode 2008-2013, hanya diketahui Dinas Pekerjaan Umum melakukan peningkatan sarana/prasarana drainase dan membangun drainase baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan.

d. Perumahan

d.1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

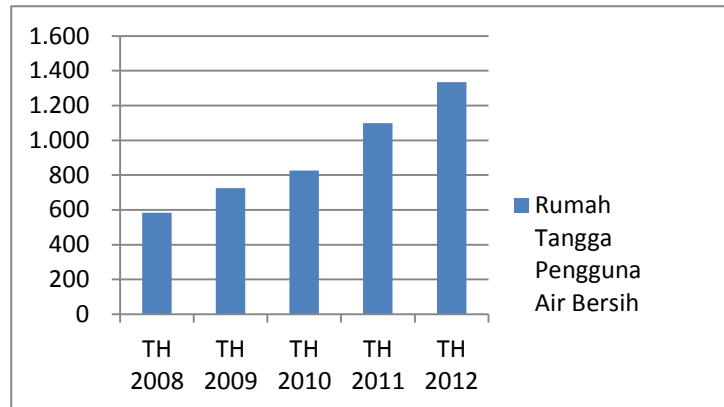
Rumah tangga pengguna air bersih adalah rumah tangga yang memanfaatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangga. Ketersediaan dalam jumlah cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah.



Tabel 2.25**Rumah Tangga Pengguna Air Bersih**

No	Fasilitas Perumahan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	584	725	827	1.098	1.335

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2011/2012 dan 2012/2013

Bagan 2.13 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2011/2012 dan 2012/2013, diolah

Rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Lamandau dari tahun 2008-2012 terus mengalami laju peningkatan. Meningkatnya setiap tahun pengguna air bersih di Kabupaten Lamandau, menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Lamandau semakin menyadari pentingnya air bersih bagi kesehatan. Peningkatan pengguna air bersih di Kabupaten Lamandau diharapkan terus meningkat, semakin banyaknya warga yang menggunakan air bersih akan memberikan dampak baik bagi peningkatan kualitas hidup penduduk.

Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan penggunaan air bersih juga sangat penting. Pemerintah Kabupaten Lamandau khususnya di bidang pekerjaan umum yaitu meningkatkan sarana dan prasarana air bersih.

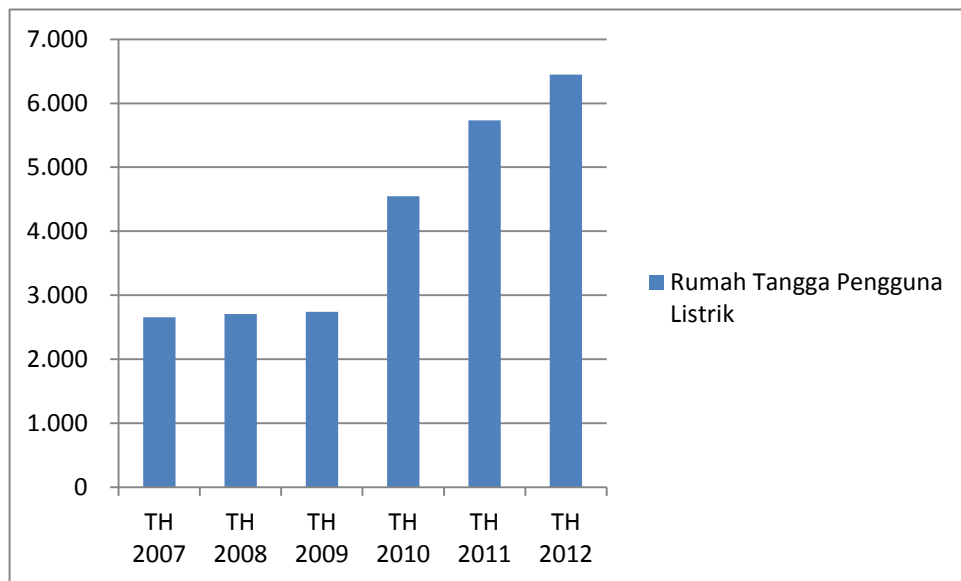
d.2. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Rumah tangga pengguna listrik adalah rumah tangga yang memanfaatkan listrik sebagai penerangannya.

Tabel 2.26**Rumah Tangga Pengguna Listrik**

No	Fasilitas Perumahan	2008	2009	2010	2011	2012
1	Rumah Tangga Pengguna Listrik	2.707	2.744	4.548	5.731	6.449

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2011/2012 dan 2012/2013

Bagan 2.14 Rumah Tangga Pengguna Listrik

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2011/2012 dan 2012/2013

Rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Lamandau setiap tahunnya meningkat cukup tinggi. Pada tahun 2008 rumah tangga pengguna listrik 2.707, hingga tahun 2012 menjadi 6.449. Peningkatan ini menunjukkan bahwa rumah tangga di Kabupaten Lamandau semakin maju dan sejahtera, dengan banyak rumah tangga telah menggunakan listrik. Peningkatan pemanfaatan listrik sebagai penerangan seharusnya diimbangi dengan tersedianya pasokan listrik yang cukup untuk penduduk di Kabupaten Lamandau secara merata.

Ketenagalistrikan berperan sebagai infrastruktur yang harus ada untuk mendukung kegiatan pembangunan masyarakat. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diprioritaskan baik untuk meningkatkan keandalan penyediaan tenaga listrik maupun memberikan akses penyediaan tenaga listrik. Penyediaan tenaga listrik yang memadai dan berkualitas merupakan parameter penting untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

e. Perencanaan Pembangunan

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan urusan perencanaan pembangunan berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 54 tahun 2010 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti:

- RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
- RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

- RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
- Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Keempat dokumen diatas ada di Kabupaten Lamandau dan telah di PERDA kan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang telah di-PERDA-kan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 dan berlaku mulai tahun 2005 hingga tahun 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamandau yang lalu telah di-PERDA-kan dengan Perda Nomor 02 Tahun 2009. Berlaku pada tahun 2009 sampai tahun 2013, dan kemudian diubah melalui Perda Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2009. Saat ini sedang disusun RPJMD yang baru untuk tahun 2013 sampai tahun 2018. Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun setelah RPJMD disahkan dan berlaku selama satu tahun. Pada dasarnya RKPD dibuat dengan mengacu pada RPJMD.

Indikator Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD belum dapat dihitung karena data RKPD tidak tersedia ketika dokumen ini disusun. Namun berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa perwakilan SKPD, diketahui bahwa dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang menjadi input bagi RKPD, SKPD menggunakan dokumen RPJMD sebagai referensi utama. Secara kualitatif dapat disimpulkan bahwa RKPD telah mengakomodir muatan RPJMD.

Dengan menghitung penjabaran program RPJMD kedalam RKPD maka akan diketahui capaian RKPD terhadap RPJMD. Menggunakan kesimpulan yang dibangun, maka Kabupaten Lamandau memiliki cakupan penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD yang baik. Hal ini adalah sebuah prestasi dalam tata kelola pemerintahan yang perlu dipertahankan di masa mendatang.

f. Perhubungan

f.1. Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/Terminal Bis dan Angkutan Darat

Kabupaten Lamandau memiliki layanan angkutan laut maupun perairan, dan juga daratan maka yang termasuk dalam simpul transportasi adalah pelabuhan dan juga terminal bus. Jumlah pelabuhan laut/udara/ terminal bis disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.27**Jumlah Sarana Perhubungan di Kabupaten Lamandau Tahun 2013**

No	Sarana Perhubungan	Jumlah
1	Terminal	1
2	Dermaga (pelabuhan)	2

Sumber: Selayang Pandang Kabupaten Lamandau Tahun 2013

f.2. Pemasangan Rambu-Rambu

Untuk fasilitas keselamatan lalu lintas jalan diperlukan kebutuhan akan rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas dan ketertiban lalulintas merupakan salah satu tugas dari Dinas Perhubungan. Selain pemasangan rambu-rambu juga diperlukan perawatan secara berkala. Dengan demikian rambu-rambu dapat mengatur lalu lintas dalam jangka waktu yang lama.

Data yang bersumber dari LKPJ tahun 2013 belum dapat dihitung nilai dari pemasangan rambu-rambu. Diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Perhubungan yang berkaitan dengan rambu-rambu lalu lintas hingga tahun 2012 adalah: terlaksananya pengadaan/pemeliharaan rambu lalu lintas. Pemasangan rambu-rambu yang ada diharapkan dapat mengatur kondisi transportasi yang baik termasuk diantaranya lampu penerangan jalan (LPJU), rambu petunjuk pengarah jalan (RPPJ), pita pengkaduh, paku marka, *warning light*, *traffic light*, *guard rail*, dan *deliniator*. Selain itu tujuan kedepan adalah terciptanya kondisi transportasi Kabupaten Lamandau yang tertib, aman, dan minim kecelakaan.

g. Kependudukan Catatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

h.1. Penduduk Ber- KTP

Kartu Tanda Penduduk merupakan kartu identitas di Indonesia. Saat ini di Indonesia mulai diganti KTP yang lama dengan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Lamandau Periode 2008-2013 disebutkan mengenai pencapaian pelayanan KTP (jumlah lembar KTP).

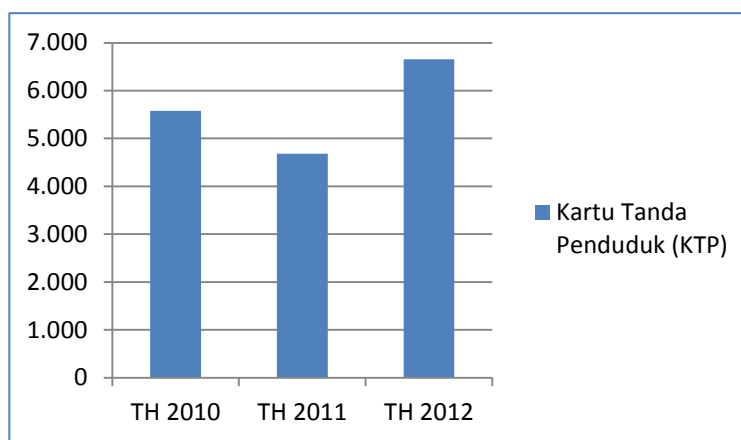
Tabel 2.28

Pencapaian Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lamandau 2010-2012

Uraian	Tahun		
	2010	2011	2012
Kartu Tanda Penduduk (lembar)	5.577	4.685	6.655

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Lamandau Periode 2008-2013

Bagan 2.15 Pencapaian Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lamandau 2010-2012



Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Lamandau Periode 2008-2013

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa jumlah penduduk ber-KTP mengalami penurunan pada tahun 2011, dan mengalami kenaikan pada tahun 2012. Semakin banyak penduduk yang memiliki KTP, maka semakin tinggi capaian Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Banyaknya penduduk Ber-KTP akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pencatatan penduduk serta memudahkan pemerintah dalam merencanakan perencanaan pembangunan.

h.2. Kepemilikan Akta Kelahiran

Pentingnya akta kelahiran adalah akta yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam-puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi. Akta kelahiran mempunyai manfaat yang besar serta kegunaan dari sebuah akte kelahiran ini di kemudian hari.

Hasil kinerja Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau mencatat pada laporannya LKPJ AMJ Kabupaten Lamandau tahun 2008-2013 mengenai data kepemilikan akta kelahiran berikut.

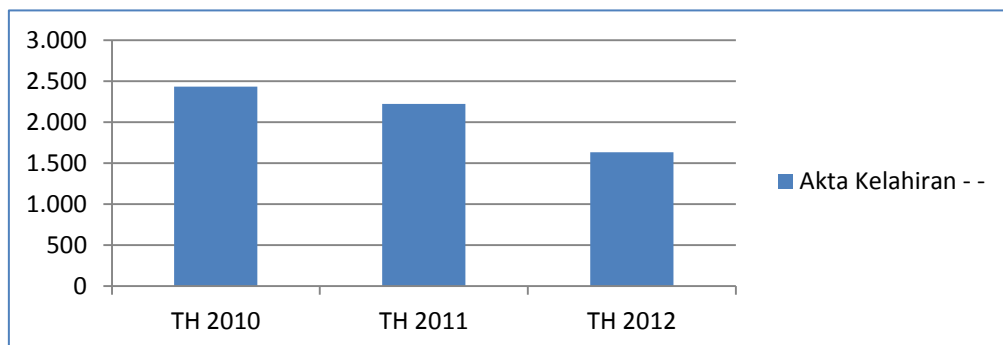
Tabel 2.29

Pencapaian Pelayanan Akta Kelahiran Lamandau Tahun 2010-2012

Uraian	Tahun		
	2010	2011	2012
Akta Kelahiran (lembar)	2.431	2.223	1.634

Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Lamandau Periode 2008-2013

Bagan 2.16 Pencapaian Pelayanan Akta Kelahiran Lamandau Tahun 2010-2012



Pencapaian pelayanan akta kelahiran di Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012 tergantung dengan angka kelahiran pada tahun tersebut. Melihat pentingnya akta kelahiran dimasa mendatang, sosialisasi ke daerah-daerah menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar setiap penduduk memiliki akta kelahiran baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan.

h. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

i.1. Rasio Akseptor KB

Keluarga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.

Tabel 2.30

Rasio Akseptor KB Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012

Tahun	Akseptor KB (%)
2008	20
2009	25
2010	30
2011	35
2012	40

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Rasio akseptor KB dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Saat ini pemerintah pusat sudah banyak melakukan banyak promosi tentang KB melalui iklan di televisi, akan lebih baik apabila program ini diteruskan ke daerah. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera biasanya adalah sulitnya regenerasi kader dan keterbatasan petugas penyuluh Keluarga Berencana serta berbagai masalah terkait kesehatan reproduksi.

i.2. Cakupan Peserta KB Aktif

Tujuan dari Keluarga Berencana adalah Meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Cakupan KB aktif dihitung dengan rumus berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

$$\frac{\text{Jumlah peserta program KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$$



Data cakupan KB Aktif tidak diperoleh datanya sehingga hanya digunakan pendekatan dengan jumlah peserta KB aktif.

Tabel 2.31

Jumlah Peserta KB Aktif Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Peserta KB
2008	8.500
2009	9.500
2010	10.000
2011	10.500
2012	11.000

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Jumlah peserta KB Aktif Kabupaten Lamandau mengalami kenaikan setiap tahunnya. Semakin tingginya jumlah peserta KB maka sosialisasi KB kepada penduduk khususnya pasangan usia subur mengenai manfaat program KB telah berhasil dilakukan.

i. Ketenagakerjaan

Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan adalah ketenagakerjaan. Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan penduduk. Pada urusan Ketenagakerjaan indikator yang dijelaskan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

j.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara penduduk tergolong angkatan kerja dengan penduduk usia kerja.

Tabel 2.32

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Lamandau Tahun 2010-2012

Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
TPAK (%)	69,60	75,19	80,85

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Lamandau

Tingkat partisipasi angkatan kerja Tahun 2012 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 80,85%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa di Tahun 2012 semakin besar bagian dari penduduk usia kerja semakin meningkatnya nilai angkatan kerja menunjukkan bahwa semakin banyak

penduduk di Kabupaten Lamandau yang berpartisipasi dalam pergerakan aktivitas ekonomi. Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai akan berdampak baik bagi Pemerintah Daerah.

Pemerintah diharapkan dapat membaca kondisi positif ini dengan memberikan stimulasi maupun dukungan terhadap peningkatan TPAK, salah satu contohnya dalam memberikan kemudahan para pengusaha kecil/menengah dalam melakukan pengurusan perijinan usaha, infrastruktur terutama jalan, atau memberikan kredit berbasis kerakyatan dan lain sebagainya. Dengan dukungan-dukungan tersebut diharapkan juga dapat menekan angka pengangguran, dan tentu saja meningkatkan kinerja perekonomian di Kabupaten Lamandau.

j.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik atau penduduk yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja dapat digunakan untuk melihat perkembangan angka pengangguran.

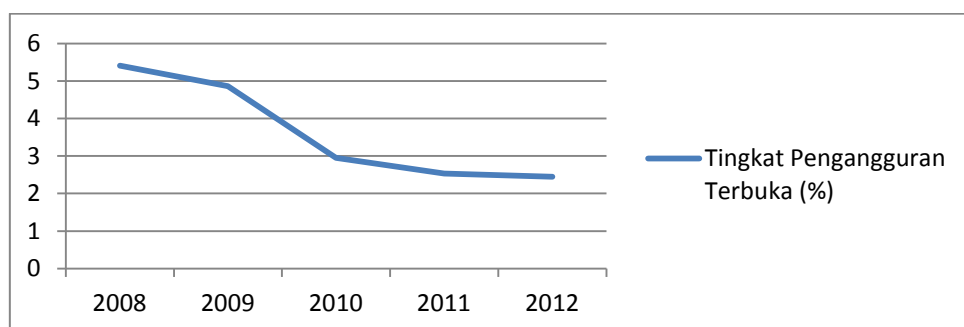
Tabel 2.33

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lamandau Tahun 2008 - 2012

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,41	4,86	2,95	2,53	2,45

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Lamandau

Bagan 2.17 Grafik TPT Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012



Sumber: Disnakertrans Kabupaten Lamandau

Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten lamandau dari tahun 2008-2012 terus mengalami penurunan setiap tahun. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2009-2010, yaitu sebesar 1,91%. Semakin rendah nilai pengangguran terbuka, akan semakin rendah beban bagi daerah. Pengangguran terbuka dapat dikurangi dengan beberapa cara diantaranya, peningkatan *softskil* agar menjadi SDM yang berkualitas dan pelatihan *enterpreneur*, sehingga orang yang menganggur dapat menciptakan lapangan kerja baru, yang kemudian dapat mengurangi jumlah pengangguran.

j. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

k.1. Persentase Koperasi Aktif

Pemberdayaan koperasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat, karena koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

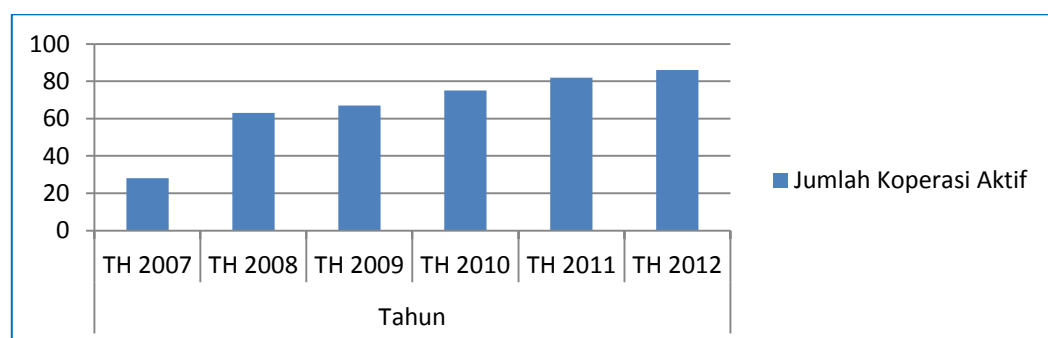
Tabel 2.34

Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Lamandau Tahun 2007-2012

Persentase	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Koperasi Aktif	52,83	71,59	72,04	74,26	74,55	80,37

Sumber: Disperindakop Kabupaten Lamandau

Bagan 2.18 Jumlah Koperasi Aktif Kabupaten Lamandau Tahun 2007-2012



Persentase koperasi aktif di Kabupaten Lamandau setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2007 hingga 2012. Peningkatan cukup tinggi terjadi pada tahun 2007 ke 2008, nilai peningkatan sebesar 18,76%. Peningkatan persentase koperasi aktif menunjukkan bahwa peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi daerah kabupaten menjadi penting. Semakin besar nilai persentase koperasi aktif, maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi.

k. Penanaman Modal

Jumlah Investor Berskala Nasional dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan.

Berdasarkan data dari Statistik Daerah Kabupaten Lamandau 2012, realisasi investasi di Lamandau meliputi bidang pertanian dan umum, kehutanan, perkebunan dan pertambangan pada tahun 2009 mencapai Rp. 42,37 miliar, yang mencakup investasi PMA, PMN dan PBS. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp.27,33 miliar. Total investasi di sektor pertanian dan umum, kehutanan, perkebunan, pertambangan dari tahun 2003 s.d 2009 mencapai Rp. 117,405 miliar.

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Jumlah investasi di Kabupaten Lamandau diharapkan dapat terus meningkat dengan demikian pendapatan daerah juga terus meningkat, namun peningkatan investasi diiringi dengan menjaga kelestarian alam terutama investasi penambangan.



l. Ketahanan Pangan

Kementerian Pertanian mengartikan ketahanan pangan sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat di semua daerah, mudah memperoleh, aman dikonsumsi dan harga yang terjangkau. Hal ini diwujudkan dengan adanya sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi.

Data yang tersedia bersumber dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Lamandau Periode 2008-2013 sebagai berikut.

- terlaksananya Studi Banding Petani ke luar daerah;
- terlaksananya pelatihan petani/nelayan/peternak di 8 Desa;
- terlaksananya magang petugas ke Luar Daerah;
- terlaksananya pelatihan Poktan/Gapoktan Pelaksana PUAP sebanyak 7 kelompok;
- terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan sebanyak 4 balai;
- terlaksananya penyediaan bahan perpustakaan BPP sebanyak 4 balai;
- terlaksananya penilaian kemampuan kelompok petani sebanyak 50 kelompok;
- terlaksananya lomba antar kelompok petani 1 kali;
- terlaksananya penyediaan buku NBM;
- terlaksananya Demo Pengolahan/Difersifikasi Produk Pangan di 8 Desa;
- terlaksananya Demontrasi Plot Usaha Tani di 8 Desa;
- terlaksananya penyuluhan pasca panen;
- terlaksananya pencatatan hasil pangan;
- terlaksananya pertemuan rutin petugas/penyuluh.

m. Statistik

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 54 tahun 2010 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti.

- Buku “Kabupaten Dalam Angka”
- Buku “PDRB Kabupaten”



Kedua dokumen diatas ada di Kabupaten Lamandau, disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

n. Komunikasi dan Informatika

Dunia komunikasi dan informasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat di era global seperti saat ini. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi bahkan sudah menyentuh berbagai aspek kehidupan, bahkan kini cenderung menjadi kebutuhan primer manusia. Dalam konteks pembangunan daerah, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi juga telah berkembang dengan pesat. Semakin majunya teknologi berdampak pada kemudahan penduduk memperoleh informasi. Kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah telah dituangkan di dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*). Melalui pengembangan *e-government*, pemerintah mengharapkan dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Oleh karena itu, untuk memudahkan penduduknya mengakses informasi, Pemerintah Kabupaten Lamandau memiliki *website* resmi dengan alamat www.lamandaukab.go.id. Website Kabupaten Lamandau ini dapat dengan mudah diakses siapa saja. Website yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau dari segi tampilan sudah interaktif dan menarik, dan dari segi *update* informasi sudah *up todate*. Diharapkan kedepannya website semakin interaktif dan informatif dalam menyampaikan informasi mengenai Kabupaten Lamandau.

Urusan Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu 2008-2012, dapat terlaksana dengan baik. Adapun Sarana & prasarana komunikasi & informatika di Kabupaten Lamandau hingga tahun 2012:

- 1) Menara komunikasi (19 unit)
- 2) Warnet (7 unit)



- 3) TV Kabel (2)
- 4) TV Satelit (4)
- 5) Radio/RRI (3)
- 6) Media Cetak (8)
- 7) Internet Kecamatan (8 unit)
- 8) Pusat Pelayanan Internet Pedesaan (98 unit)
- 9) Kendaraan M-Plik (Mobil Pelayanan Internet Kecamatan) (8 unit)

o. Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

Perpustakaan merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam menunjang kualitas tingkat pendidikan di Kabupaten Lamandau. Oleh karena itu, urusan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan umum masyarakat di bidang perpustakaan dan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan cinta buku.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kabupaten Lamandau Periode 2008-2013 disebutkan terlaksananya pembangunan gedung perpustakaan dan perlengkapan serta pengadaan buku-buku perpustakaan di sekolah-sekolah dari tingkat SD sampai SLTA tersebar di 8 Kecamatan.

2.3.2. Urusan Pilihan

a. Pertanian dan Kehutanan

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui urusan pilihan bagian pertanian salah satunya dengan melihat Kontribusi sektor pertanian dari PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun). Dalam hal ini yang termasuk dengan sektor pertanian adalah tanaman pangan, palawija, kehutanan dan perkebunan.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Lamandau diperoleh dari Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau 2012/2013 seperti ditunjukkan oleh tabel dibawah ini.

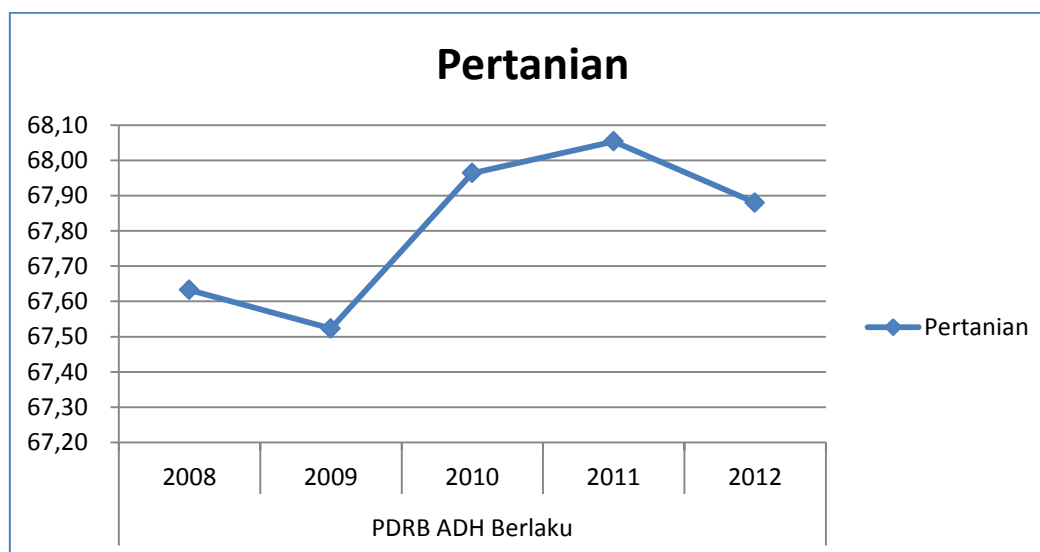
Tabel 2.35

Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012

No	Sektor	PDRB ADH Berlaku					Rata-Rata
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	Pertanian	67,63	67,52	67,96	68,05	67,88	67,81

Sumber: Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau 2012/2013

Bagan 2.19 Grafik Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012



Sumber: Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau 2012/2013

Berdasarkan Tabel 2.35 dan Bagan 2.19, dapat diketahui bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari tahun 2008 hingga 2012 mengalami penurunan dan kenaikan. Penurunan terjadi pada tahun 2008 ke 2009 sebesar 0,11%, sedangkan pada tahun berikutnya kenaikan. Rata-rata dari tahun 2008-2012 kontribusi sektor pertanian sebesar 67,81%. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Lamandau cenderung stabil, ini menunjukkan ketahanan pangan serta kestabilan wilayah terjaga. Kontribusi pertanian terhadap PDRB ADHB tahun 2012 yang sebesar 67,88% menunjukkan bahwa pertanian masih menjadi sektor yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lamandau dibanding dengan sektor-sektor lainnya.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Lamandau di bidang pertanian, lebih diarahkan kepada optimalisasi sumber-sumber daya pertanian melalui intensifikasi sumber daya pertanian. Hal ini didukung masih luasnya lahan yang tersedia untuk pertanian, serta mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani sehingga pertanian menjadi urusan pilihan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lamandau. Hal ini terkait dengan target pemerintah mewujudkan swasembada beras dan kesinambungan ketersediaan dan ketahanan pangan.

b. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian seperti mineral, batubara, panas bumi, migas. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun).

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Lamandau diperoleh dari Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau 2012/2013 ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 2.36

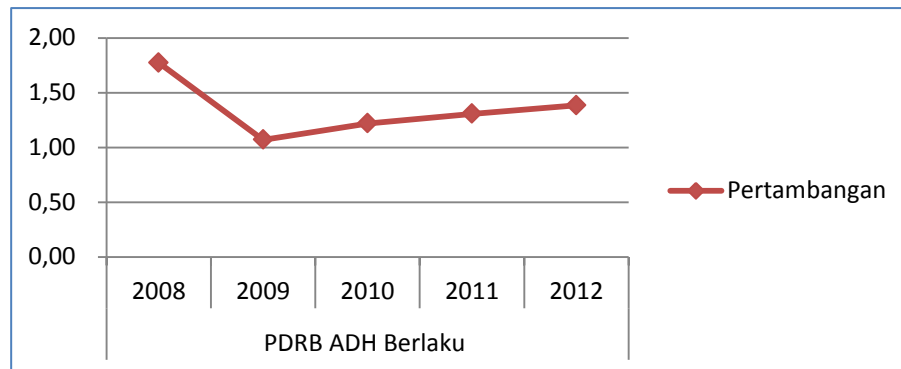
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012

No		PDRB ADH Berlaku					Rata-Rata
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	Pertambangan	1,77	1,07	1,22	1,31	1,38	1,35

Sumber: Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau 2012/2013



Bagan 2.20 Grafik Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012



Sumber: Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau 2012/2013

Kontribusi pertambangan terhadap PDRB dari tahun 2008 hingga 2012 mengalami penurunan dan juga peningkatan. Penurunan terjadi dari tahun 2008-2009 sebesar 0,7%. Peningkatan terjadi secara perlahan setiap tahun dari tahun 2009 ke 2012. Rata-rata dari tahun 2008-2012 kontribusi sektor pertambangan sebesar 1,35%.

Kontribusi sektor pertambangan tidak cukup besar menyumbang PDRB jika dibandingkan dengan sektor pertanian. Peningkatan sektor pertambangan sebaiknya didukung oleh pemerintah namun dengan mempertimbangkan aspek lingkungan agar sektor pertambangan menyumbang lebih banyak kepada sektor PDRB. Peningkatan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamandau.

c. Perdagangan dan Pariwisata

Perdagangan adalah proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pariwisata merupakan industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan. Pariwisata menawarkan tempat istirahat, budaya, petualangan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun).

Kontribusi sektor perdagangan dan pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Lamandau diperoleh dari Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau 2012/2013 seperti ditunjukkan oleh tabel berikut.

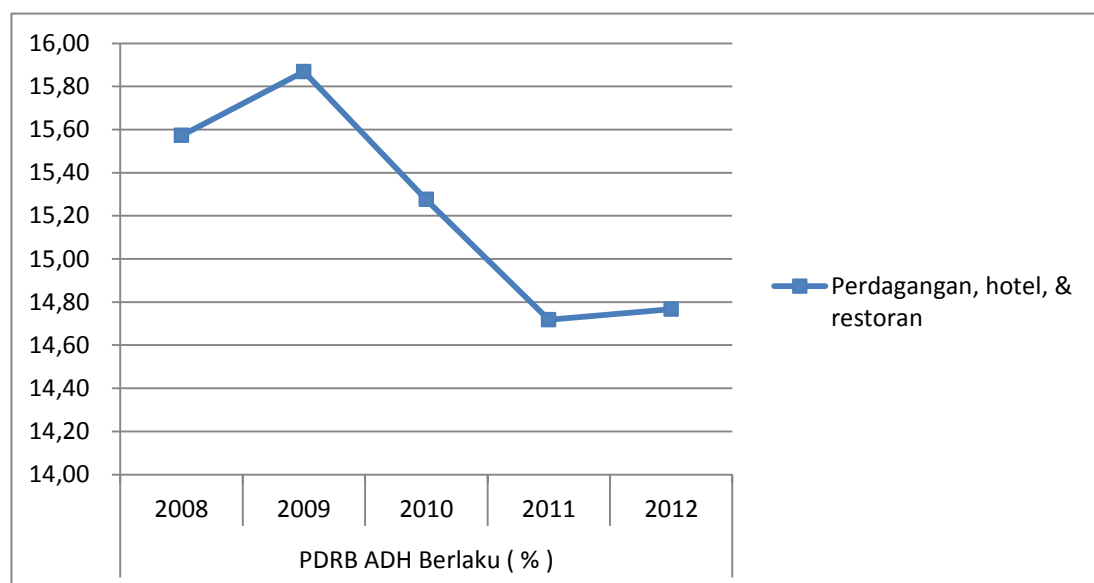
Tabel 2.37

**Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran Terhadap PDRB
Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012**

No	Sektor	PDRB ADH Berlaku (%)					Rata-Rata
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	Perdagangan, hotel, & restoran	15,57	15,87	15,27	14,72	14,77	15,24

Sumber: Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau 2012/2013

Bagan 2.21 Grafik Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel, & Restoran Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012



Sumber: Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamandau 2012/2013

Sektor perdagangan dan pariwisata merupakan sektor strategis bagi Lamandau yaitu sebagai penyumbang terbesar kedua dalam pembentukan PDRB setelah sektor pertanian. Sebagai sektor strategis, sektor perdagangan memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi di Lamandau karena sangat terkait dengan sektor-sektor lain seperti sektor pertanian, industri, pariwisata dan lainnya.

Berdasarkan Tabel 2.35 dan Bagan 20, kontribusi sektor perdagangan dan pariwisata terhadap PDRB dari tahun 2008-2009 mengalami peningkatan

sebesar 0,3%. Namun untuk tahun berikutnya terus mengalami penurunan, dan sedikit mengalami peningkatan kembali pada tahun 2012. Rata-rata dari tahun 2008-2012 kontribusi sektor perdagangan dan pariwisata sebesar 15,24%. Penurunan kontribusi sektor perdagangan dan pariwisata sebaiknya menjadi perhatian khusus. Seperti dalam hal perbaikan infrastruktur perdagangan dan pariwisata, sehingga warga dan wisatawan yang datang semakin banyak dan sektor perdagangan dan pariwisata menyumbang PDRB lebih besar.

Dalam bidang pariwisata, sebaiknya diupayakan untuk mengembangkan sektor pariwisata di Lamandau melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu, Pemerintah Lamandau juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pelaku pariwisata, akademisi, masyarakat dan instansi terkait baik pusat maupun yang ada di daerah dalam rangka pengembangan destinasi, pengembangan pemasaran dan pengembangan kemitraan untuk mewujudkan sinergitas dan keterpaduan.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus ini berusaha melihat sejauh mana upaya penyediaan sarana-prasarana yang sudah dilakukan pemerintah daerah untuk menarik sektor usaha agar mau menyelenggarakan kegiatan ekonomi di Lamandau. Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Kesiapan tersebut diukur dari sub fokus sebagai berikut

a. Perhubungan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Berdasarkan Data Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka Tahun 2012/2013, panjang jalan di Kabupaten Lamandau diketahui pada tahun 2012 sepanjang 743,26 Km. Kendaraan yang diketahui jumlahnya pada tahun 2012 adalah 3.721 unit. Sehingga dapat dihitung rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah 0,20. Nilai rasio 0,20 menunjukkan bahwa sarana jalan di Kabupaten Lamandau masih cukup tersedia untuk memberi akses kepada kendaraan.

b. Penataan Ruang

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Lamandau pada umumnya cukup baik, karena industri besar yang berpotensi menimbulkan pencemaran tidak banyak, namun masih perlu dioptimalkan lagi penataan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pada pemanfaatan lingkungan lestari dan berkelanjutan.

Tabel 2.38

Kondisi Lingkungan Hidup dan Tata Ruang di Kabupaten Lamandau

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Kawasan Hutan Lindung	68.532,60
	a. Hutan	54.755,60
	b. Bukan Hutan	13.777,00
2	Luas Kawasan Pemukiman	278.883,70
3	Luas Kawasan Industri	230,00
4	Luas Lahan Produktif	159.888,00
5	Luas Lahan Kritis	336.273,67
6	Luas Ruang Terbuka Hijau	12.422,20
7	Luas Wilayah Perkotaan	21.031,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2013

2.4.2. Iklim Berinvestasi

Fokus ini mengidentifikasi seberapa kondusif kondisi Kabupaten Lamandau dalam rangka mendukung investasi riil masuk. Terdapat 2 indikator yang tersedia



untuk menilai tingkat iklim investasi, yaitu angka kriminalitas dan jumlah demo. Penjelasan akan dua hal tersebut akan dijabarkan pada paragraf di bawah ini.

a. Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir.

b. Jumlah Demo

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Aksi demonstrasi yang aman dan tertib tentu tidak akan menimbulkan kerugian. Namun, demonstrasi akan merugikan banyak pihak apabila dilakukan secara anarkis dan berlebihan bahkan kerugian yang ditimbulkan dapat merugikan masyarakat secara luas.

2.4.3. Sumber Daya Manusia

Fokus ini berusaha melihat kesiapan sumber daya manusia dalam rangka mendukung agenda pembangunan daerah. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah.



Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator yang digunakan dan tersedia untuk mengukur hal tersebut adalah indikator rasio ketergantungan.

Tabel 2.39

Rasio Ketergantungan Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	18.356	19.451	19.436	19.763	24.036
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	1.879	1.989	2.199	2.220	1.753
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) &(2)	20.235	21.440	21.635	21.983	25.789
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	39.296	41.639	43.322	44.078	44.301
5.	Rasio ketergantungan (3)/(4)	51	51	50	50	58

Sumber: Katalog BPS Kabupaten Lamandau dalam Angka 2012/2013, diolah

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk yang tidak produktif (penduduk berusia <15 tahun dan diatas 65 tahun).

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.



Dilihat dari data tahun 2008 hingga 2012, rasio ketergantungan penduduk Kabupaten nilainya diatas 50%. Ketergantungan paling tinggi yaitu pada tahun 2012 yang mencapai 58%. Ini berarti setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 58 penduduk tidak produktif. Dengan nilai angka ketergantungan yang cukup tinggi diharapkan pemerintah membantu penduduknya dengan membuka lapangan kerja baru sehingga pembangunan daerah tidak terhambat oleh angka ketergantungan yang tinggi. Selain itu, tingginya persentase penduduk yang belum produktif harus diikuti dengan program-program yang terkait dengan program penurunan tingkat kelahiran bayi, seperti program Keluarga Berencana (KB).

2.5 Kinerja Pembangunan Daerah

Selain gambaran yang disajikan dalam Sub Bab 2.1 Aspek Geografi dan Demografi, Sub Bab 2.2 Aspek kesejahteraan Masyarakat, Sub Bab 2.3 Aspek Pelayanan Umum, dan Sub Bab 2.4 Aspek Daya Saing Daerah, pemerintah daerah Kabupaten Lamandau juga menggambarkan capaian kinerja daerah sesuai dengan kinerja yang tersedia pada lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.40

**Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1.1	Pertumbuhan PDRB Atas Harga Berlaku	persen	9,83	8,30	15,13	13,78	13,31
1.1.2	Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan	persen	6,04	5,74	6,15	6,52	6,88
1.1.3	Indeks Gini	indeks	0,2646	n/a	n/a	n/a	n/a
1.1.4	Persentase penduduk miskin	persen	7,78	6,01	5,64	5,06	4,42
1.1.5	Angka Pengangguran	persen	5,41	4,86	2,95	2,75	2,6
2	Fokus Kesejahteraan Sosial						
2.1	Pendidikan						
2.1.1	Angka Melek Huruf	persen	98,64	98,65	98,66	98,67	98,87
2.1.2	Angka Rata-rata lama sekolah	tahun	7,6	7,61	7,63	7,73	7,75
2.1.3	APK SD	persen	111,28	117,82	117,82	118,02	118,22
2.1.4	APK SMP/MTs	persen	85,31	107,97	107,97	108,19	108,19
2.1.5	APK SMA/SMK/MA	persen	50,55	107,97	63,59	65,00	65,00
2.1.6	APM SD/SDLB/MI	persen	107,6	107,6	100	100	100
2.1.7	APM SMP	persen	70,49	70,5	99,85	99,85	100



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2008	2009	2010	2011	2012
2.1.8	APM SMA	persen	33,89	34,51	48,72	48,72	48,72
2.2	Kesehatan						
2.2.1	Angka Kematian Bayi	jiwa	0	1	17	19	21
2.2.2	Angka Harapan Hidup	tahun	66,05	67,13	67,21	67,29	67,36
2.2.3	Persentase Balita Gizi buruk	persen	0	0	1	0	0
3	Fokus Budaya dan Olahraga						
3.1	Kebudayaan						
3.1.1	Jumlah Grup Kesenian	buah	2	5	12	15	18
3.1.2	Jumlah Sarana Peribadatan	buah	256	256	256	256	256
3.2	Olahraga						
3.2.1	Jumlah Gedung Olahraga	buah	1	1	1	1	1
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	Fokus Layanan Urusan Wajib						
1.1	Pendidikan						
1.1.1	Pendidikan Dasar						
1.1.1a	Angka partisipasi sekolah SD	persen	98,52	98,7	98,9	99,3	99,75
1.1.1b	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dasar	rasio	1 : 98	1 : 98	1 : 99	1 : 99	1 : 100
1.1.1c	Rasio Guru terhadap murid	rasio	1:08	1:09	1:10	1:11	1:12
1.1.1d	Rasio Guru terhadap murid per kelas rata-rata	rasio	1:30	1:32	1:32	1:34	1:34
1.1.2	Pendidikan Menengah						



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.1.2a	Angka partisipasi sekolah SMP	persen	100	101	102	103	104
1.1.2b	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah pertama	rasio	1 : 100	1 : 101	1 : 102	1 : 103	1 : 104
1.1.2c	Rasio Guru terhadap murid	rasio	1:09	1:10	1:11	1:12	1:13
1.1.2d	Rasio Guru terhadap murid per kelas rata-rata	rasio	1:30	1:32	1:32	1:34	1:34
1.1.2e	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	persen	95	98,4	98,6	98,8	99
1.1.2f	Angka Partisipasi Sekolah SMA	persen	55,00	57,00	59,00	61,00	63,00
1.1.2g	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah atas	rasio	1 : 55	1 : 57	1 : 59	1 : 61	1 : 63
1.1.2h	Rasio guru terhadap murid	rasio	1:08	1:09	1:10	1:11	1:12
1.1.2i	Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata	rasio	1:30	1:32	1:32	1:34	1:34
1.1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
1.1.3a	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	persen	43,2	43,42	43,82	44,5	44,8
1.1.4	Angka Putus Sekolah						
1.1.4a	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	persen	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02
1.1.4b	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	persen	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04
1.1.4c	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	persen	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04
1.1.4d	Penurunan angka putus sekolah	persen	0	0,01	0	0	0,01
1.1.5	Angka Kelulusan						
1.1.5a	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	persen	100	100	100	100	100
1.1.5b	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	persen	100	100	100	100	100
1.1.5c	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	persen	95,02	95,12	95,22	95,42	95,12
	Angka melanjutkan sekolah :						

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.1.5d	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	persen	99,57	99,59	99,61	99,63	99,65
1.1.5e	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	persen	97,23	97,43	97,63	97,83	98,03
1.1.5f	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	33,23	34,43	36,53	38,83	40,57
1.2	Kesehatan						
1.2.1	Rasio Posyandu per satuan balita	rasio	15,05	15,05	15,05	15,05	15,54
1.2.2	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	rasio	1,60	1,60	1,71	1,74	1,74
1.2.3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	rasio	0,016	0,016	0,016	0,015	0,015
1.2.4	Rasio dokter per satuan penduduk	rasio	0,30	0,301	0,19	0,257	0,22
1.2.5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	rasio	0,79	0,79	0,81	1,08	1,08
1.2.6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
1.2.8	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.14	Cakupan kunjungan bayi	persen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.2.15	Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization	persen	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.3	Pekerjaan Umum						
1.3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	58,91	59,91	64,91	69,91	71,30



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.3.2	Rasio Jaringan Irigasi	rasio	653,913	726,57	807,3	897	1,201
1.3.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	persen	22,45	23,63	24,87	26,18	27,68
1.3.4	Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk	rasio	1:1,72	1:1,72	1:1,72	1:1,72	1:1,72
1.3.5	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	rasio	1:50	1:35	1:30	1:2,8	1:18
1.3.6	Rasio Rumah Layak Huni	rasio	1:3,9	1:3,9	1:3,9	1:3,9	1:3,6
1.3.7	Panjang Jalan dilalui roda empat	km	387,80	410,75	430,80	448,65	462,90
1.3.9	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	persen	35,19	42,14	44,89	46,78	56,86
1.3.11	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	2,96	40,81	43,54	48,83	49,65
1.3.12	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	persen	58,91	59,91	64,91	69,19	74,32
1.4	Perumahan						
1.4.1	Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih	jumlah	1524	1693	2436	2707	2977
1.4.2	Persentase rumah tangga pengguna listrik	persen	25,20	29,70	34,50	38,00	42,50
1.4.3	Rumah tangga bersanitasi	persen	22,45	23,63	24,87	26,18	27,68
1.4.4	Lingkungan pemukiman kumuh	persen	2,44	2,22	2,02	1,84	1,64
1.5	Penataan Ruang						
1.5.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	rasio	0	0	0,0001	0,0002	0,0005
1.5.2	Persentase Ruang publik yang berubah peruntukannya	persen	0	0	0	0	0
1.6	Perencanaan Pembangunan						
1.6.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.6.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	Ada
1.6.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	Ada
1.6.4	Persentase keselarasan penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	persen	100	100	100	100	100
1.7	Perhubungan						
1.7.1	Jumlah uji kir angkutan darat	jumlah	-	-	314	423	552
1.7.2	Jumlah terminal angkutan umum	jumlah	1	1	1	1	1
1.7.3	Jumlah angkutan darat	jumlah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
1.7.4	Persentase kepemilikan KIR angkutan darat	persen	-	-	9,588	8,568	14,835
1.7.5	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	50	50	50	50	50
1.7.6	Pemasangan rambu-rambu	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	92
1.8	Lingkungan Hidup						
1.8.1	Pencemaran status mutu air	persen	60	60	70	70	80
1.8.2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal	persen	82	87	100	96	96
1.9	Kependudukan dan Catatan Sipil						
1.9.1	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	persen	63,11	71,59	74,07	76,43	77,10
1.9.2	Persentase bayi berakte kelahiran	persen	16,99	57,94	67,10	67,10	66,2
1.9.3	Pasangan berakte nikah	persen	35,02	34,00	37,90	40,30	40,40
1.9.4	Persentase kepemilikan KTP	persen	63,11	71,59	74,07	76,43	77,10
1.9.5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	persen	16,99	57,94	67,1	67,1	66,2
1.9.6	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	ada/tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	ada	ada
1.9.7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/belum	belum	sudah	sudah	sudah	Sudah

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.10	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1.10.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	10	15	20	30	35
1.10.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	persen	14	16	18	20	22
1.10.3	Rasio KDRT	rasio	0	0	0	0	0,001
1.10.4	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	persen	10	9	8	7	6
1.10.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	23,07	23,11	23,15	23,19	23,23
1.10.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	persen	90	90	90	90	90
1.11	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera						
1.11.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	rata-rata	2 s/d 3	2 s/d 3	2 s/d 3	2 s/d 3	2 s/d 3
1.11.2	Persentase Akseptor KB	persen	20	25	30	35	40
1.11.3	Cakupan peserta KB aktif	orang	8.500	9.500	10.000	10.500	11.000
1.11.4	Persentase keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	persen	10	15	20	30	35
1.11.5	Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	persen	70	65	60	55	50
1.11.6	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif	persen	10	15	20	25	30
1.11.7	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet need)	persen	80	75	70	65	60
1.11.8	Cakupan bina keluarga balita (BKB) ber KB)	persen	10	15	20	25	30
1.11.9	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB	persen	3	5	7	9	11
1.11.10	Cakupan PLKB/PKB disetiap desa/kelurahan	persen	10	15	20	25	30
1.11.11	Keluarga pra sejahtera	persen	60	55	50	45	40
	Persentase Ks I swasta	persen	14	16	18	20	22
	Pemerintah daerah	persen	10	15	20	30	35



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.11.12	Cakupan PPKBD di setiap desa/kelurahan	persen	10	15	20	25	30
1.11.13	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	persen	20	25	30	35	40
1.12	Sosial						
1.12.1	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan social	orang	0	30	30	530	430
1.12.3	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan social	persen	0	0	1	2	30
1.12.4	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	unit	0	0	0	2	1
1.13	Ketenagakerjaan						
1.13.1	Angka Partisipasi angkatan kerja	jiwa	26.938	27.159	30.930	34.051	37.473
1.13.2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	angka	5	10	10	10	10
1.13.3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	n/a	65,7	69,6	75,19	80,85
1.13.4	Tingkat pengangguran terbuka	persen	5,41	4,86	2,95	2,53	2,45
1.13.5	Persentase keselamatan dan perlindungan	persen	0,2	0,4	0,4	0,4	0,5
1.13.6	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	persen	0	5	5	5	5
1.14	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
1.14.1	Persentase koperasi aktif	persen	71,59	72,04	74,26	74,55	78
1.14.2	Persentase Usaha Mikro dan kecil	persen	15	21	26	34	36
1.14.3	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	jumlah	450	510	560	607	655
1.14.4	Jumlah BPR/LKM	jumlah	0	1	1	1	1
1.14.5	Usaha Mikro dan Kecil	jumlah	1.300	1.390	1.465	1.515	1.580



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.15	Penanaman Modal						
1.15.1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	jumlah	11	13	14	14	15
1.15.2	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	persen	n/a	n/a	n/a	91,91	94,27
1.16	Kebudayaan						
1.16.1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	jumlah	2	2	2	5	10
1.16.2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	jumlah	0	0	0	0	2
1.16.3	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	persen	0	0	0	0	12,5
1.17	Kepemudaan dan Olahraga						
1.17.1	Jumlah organisasi pemuda	jumlah	13	13	13	13	17
1.17.2	Jumlah Organisasi olahraga	jumlah	16	16	16	16	17
1.17.3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	jumlah	10	10	10	10	13
1.17.4	Jumlah Kegiatan Olahraga	jumlah	20	20	20	20	25
1.17.5	Lapangan Olahraga	jumlah	2	2	2	2	5
1.18	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
1.18.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP	jumlah kegiatan	15	16	16	16	18
1.18.2	Kegiatan pembinaan politik daerah	jumlah kegiatan	13	13	13	13	13
1.18.3	Petugas perlindungan masyarakat	jumlah	15	15	15	15	40
1.18.4	Jumlah LSM	jumlah	21	21	21	21	21

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.19	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.19.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	orang	6	12	12	12	11
1.19.2	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	rasio	55	51	48	47	46
1.19.3	Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan	rasio	2	2	2	5	5
1.19.4	Sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintah	ada/tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Tidak
1.19.5	Persentase penegakan PERDA	persen	100	100	100	100	100
1.19.6	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketrentaman, keindahan) di kabupaten	persen	100	100	100	100	100
1.20	Ketahanan Pangan						
1.20.1	Ketersedian Pangan :						
	Beras	ton	7.549	8.726	11.830,48	8.043,59	8.534,66
	Daging	ton	81,25	83,55	99,53	109,97	153,49
	Telur	kg	9.985	10.669	11.705	13.931	267.598
	Ikan	ton	278,77	298,80	1.832,77	1.887,36	2.129,33
1.21	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1.21.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	rata-rata	0	0	0	83	83
1.21.2	Rata-rata Jumlah kelompok binaan PKK	rata-rata	0	0	0	0	30
1.21.3	Jumlah LSM yang aktif	jumlah	5	10	15	19	22
1.21.4	Persentase PKK aktif	persen	35	35	40	45	50
1.21.5	Persentase posyandu aktif	persen	40	50	50	55	60
1.21.6	Persentase Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	persen	0	0	0	0	5

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.21.7	Persentase pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	persen	0	0	0	0	5
1.22	Statistik						
1.22.1	Buku Kabupaten Dalam Angka	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	Ada
1.22.2	Buku PDRB Kabupaten	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	Ada
1.23	Kearsipan						
1.23.1	Persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku	persen	0	0	0	0	0
1.23.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	jumlah kegiatan	0	0	0	0	0
1.24	Komunikasi dan Informatika						
1.24.1	Jumlah jaringan komunikasi	jaringan	14	14	15	19	26
1.24.2	Rasio warnet terhadap penduduk	rasio	0,057	0,057	0,100	0,100	0,086
1.24.3	Jumlah surat kabar nasional	eksemplar	6	6	7	7	7
1.24.4	Jumlah surat kabar daerah	eksemplar	1	1	2	2	2
1.24.5	Jumlah penyiaran radio	jumlah	3	4	4	4	4
1.24.6	Keberadaan website milik Pemerintah Daerah	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	Ada
1.24.7	Jumlah pelaksanaan pameran/expo	kali	2	3	3	3	3
1.25	Perpustakaan						
1.25.1	Jumlah perpustakaan	buah	0	0	0	0	0
1.25.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	0	0	0	0	0
1.25.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	jumlah	0	0	0	0	0

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2008	2009	2010	2011	2012
2	Fokus Layanan Urusan Pilihan						
2.1	Pertanian						
2.1.1	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	kuintal/ha	16,56	18,5	19,57	21,11	21,36
2.1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	persen	67,63	67,52	67,96	68,05	67,88
2.1.3	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	persen	49,75	48,62	49,48	51,60	52,36
2.1.4	Cakupan Bina Kelompok Tani	persen	40	46	48	50	54
2.2	Kehutanan						
2.2.1	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	persen	7,79	7,16	6,28	5,10	4,24
2.3	Energi dan Sumberdaya Mineral						
2.3.1	Persentase pertambangan tanpa izin	persen	23,00%	21,00%	18,50%	15,40%	12,30%
2.3.2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	persen	1,77	1,07	1,22	1,31	1,38
2.4	Kelautan dan Perikanan						
2.4.1	Produksi Perikanan	ton/tahun	278,77	351,39	409,72	477,73	557,03
2.4.2	Konsumsi ikan	kg/kapita/thn	27,50	27,50	27,91	28,33	28,76
2.5	Pariwisata						
2.5.1	Kunjungan wisata	persen	n/a	n/a	n/a	48,67	57,33
2.6	Perdagangan						
2.6.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	persen	15,57	15,87	15,27	14,72	14,77
2.6.2	Nilai ekspor bersih perdagangan	juta rupiah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.6.3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	persen	14,89	15,17	14,63	14,08	14,13

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2008	2009	2010	2011	2012
2.7	Perindustrian						
2.7.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (tanpa migas)	persen	0,71	0,74	0,69	0,66	0,65
2.7.3	Persentase pertumbuhan industry	persen	3	3	3	3	3
2.7.4	Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	3	6	9	12	16
2.8	Ketransmigrasian						
2.8.1	Persentase transmigran swakarsa	persen	0	0	0	0	0
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah						
1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	ribu rupiah	628.476	664.770	713.277	759.032	794.333
2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur						
2.1	Perhubungan						
2.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	0,247	0,247	0,145	0,096	0,127
2.1.2	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	orang	n/a	10.152	11.461	18.301	20.067
2.1.3	Jumlah orang melalui terminal per tahun	orang	n/a	10.152	11.461	18.301	20.067
2.2	Penataan Ruang						
2.2.1	Ketaatan terhadap RTRW	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	0,00%
2.2.1	Luas wilayah produktif	ha	n/a	n/a	n/a	n/a	159.888
2.2.3	Luas wilayah industry	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	7,00%



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2008	2009	2010	2011	2012
2.2.4	Luas wilayah banjir	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	93,95%
2.2.5	Luas wilayah kekeringan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	94,93%
2.2.6	Luas wilayah perkotaan	persen	n/a	n/a	n/a	n/a	12,00%
3	Fokus Iklim Berinvestasi						
3.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
3.3.1	Angka kriminalitas	jumlah	38	37	90	84	94
3.3.2	Jumlah demo	kali	0	1	1	1	2
3.3.3	Lama proses perizinan (usaha strategis/perizinan tertentu)						
a.	IMB untuk rumah tinggal yang luasnya $\geq 200m^2$	hari kerja	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
b.	Izin Usaha Perkebunan	hari kerja	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
c.	Izin Usaha Pertambangan	hari kerja	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
d.	Izin Trayek Darat/Sungai Baru dan Perpanjangan	hari kerja	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
e.	Izin Sertifikasi dan Past Kapal	hari kerja	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
f.	Izin Pembuangan Limbah Cair	hari kerja	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
g.	Izin Pendirian SPBU	hari kerja	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
h.	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja	hari kerja	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
i.	Izin Penelitian	hari kerja	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
j.	Izin untuk Pendirian Hotel Berbintang	hari kerja	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
k.	Izin Usaha Jasa Kontruksi	hari kerja	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3.3.4	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	macam	11 ; 30	11 ; 30	11 ; 30	11 ; 30	11 ; 30
3.3.5	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	perda	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2008	2009	2010	2011	2012
4	Fokus Sumber Daya Manusia						
4.1	Ketenagakerjaan						
4.1.1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	jumlah	1.417	1.743	1.938	2.070	2.282





BAB III

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun ketidaktersedianya pendanaan pada suatu urusan pemerintahan.

Gambaran kinerja pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Lamandau, diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Lamandau dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi APBD, perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah, permasalahan yang muncul serta potensi tantangan ke depan. Gambaran secara umum kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Lamandau tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Gambaran umum tentang Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau yang disajikan secara *series* menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2010-2012 tertuang pada Tabel 3.1, sebagai berikut:



Tabel 3.1.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2010-2012

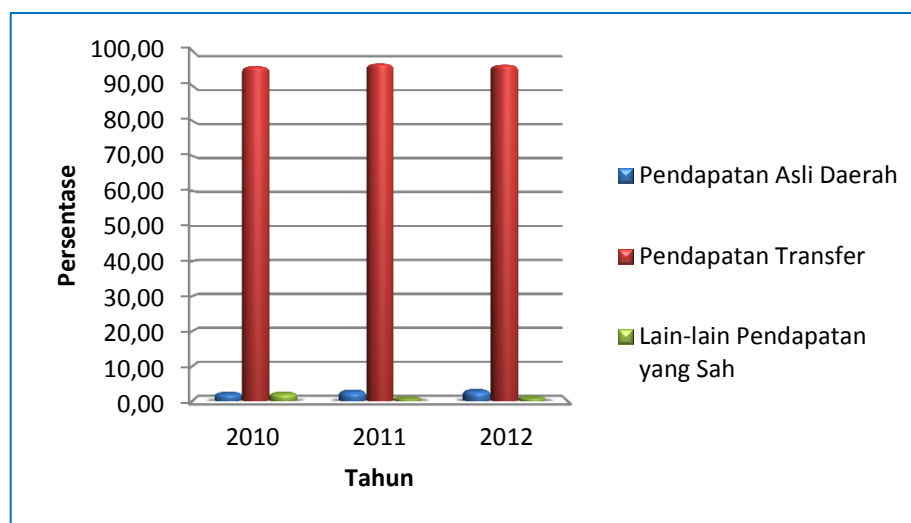
(dalam juta rupiah)

NO. URUT	URAIAN	2010	2011	2012	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		REALISASI	REALISASI	REALISASI	
1	PENDAPATAN	388.164,60	461.563,69	485.070,27	8,89
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.285,84	12.681,00	14.281,30	12,80
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.842,35	1.433,55	2.032,00	37,57
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.101,76	1.106,09	3.179,69	68,18
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.580,87	1.946,77	2.143,24	3,64
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.760,86	8.194,58	6.926,37	17,62
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	371.519,83	445.290,18	466.385,68	9,40
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	351.181,35	393.603,99	441.546,44	8,01
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	37.565,12	35.896,27	35.440,40	2,47
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	24.003,69	27.889,48	32.615,32	18,07
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	257.428,84	285.962,84	339.309,47	10,19
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	32.183,70	43.855,40	34.181,25	-4,02
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	12.530,50	42.291,79	12.174,77	55,43
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	12.530,50	42.291,79	12.174,77	55,43
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	7.807,98	9.394,41	12.664,47	24,71
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	7.807,98	9.394,41	12.664,47	24,71
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	8.358,93	3.592,51	4.403,29	-10,52
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	4.403,29	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	8.358,93	3.592,51	0,00	-

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Lamandau TA 2010– 2012, diolah



Bagan 3.1
Persentase Realisasi Pendapatan Kabupaten Lamandau 2010-2012



Dari tabel 3.1 di atas terlihat bahwa pertumbuhan rata-rata selama tahun 2010 - 2012 mencapai 8,89 %. Struktur pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Transfer, yaitu: Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan. Adapun pertumbuhan rata-rata pendapatan transfer mencapai 9,4 % untuk periode tahun 2010 -2012.

Untuk Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan rata-rata mencapai 12,80 % untuk periode 2010 -2012. Dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi tersebut, perlu diketahui potensi riil Pendapatan Asli Daerah yang sebenarnya. Apabila Pendapatan Asli Daerah bisa diprediksi secara lebih pasti akan sangat berguna untuk pembangunan Kabupaten Lamandau.

b. Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah secara umum akan disajikan secara *series* untuk menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan/penurunan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lamandau yang tertuang pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2010-2012

(dalam juta rupiah)

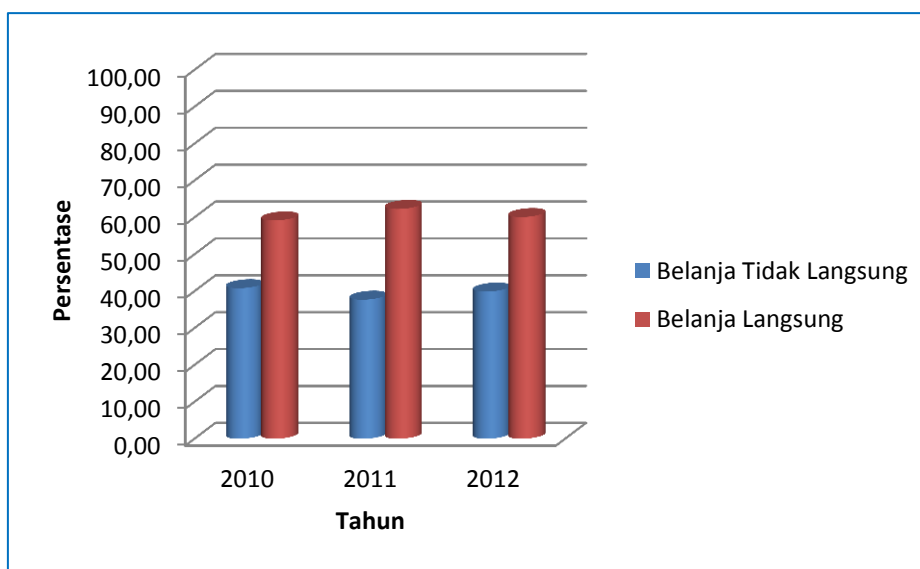
NO.	URAIAN	2010	2011	2012	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	152,419,363,374.60	166,164,528,519.66	189,513,172,177.00	11.87
1	Belanja Pegawai	113,066,992,784	130,395,248,715	144,724,151,113	15.10



2	Belanja Subsidi	1,008,784,000	-	-	-
3	Belanja Hibah	4,984,443,050	5,585,161,572	13,899,709,216	-
4	Belanja Bantuan Sosial	12,043,419,218	13,181,176,892	5,337,723,200	(25.42)
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/ Kota Pemerintahan Desa dan Partai Politik	21,315,724,323	15,689,917,956	25,487,432,648	13.34
6	Belanja Tidak Terduga	-	1,313,023,385	64,156,000	-
II	BELANJA LANGSUNG	220,999,625,552	274,677,213,278	285,491,211,224	1.96
1	Belanja Pegawai	14,504,736,959	19,632,436,439	25,373,573,495	18.51
2	Belanja Barang dan Jasa	73,288,293,419	70,681,179,481	100,394,094,379	3.04
3	Belanja Modal	133,206,595,174	184,363,597,358	159,723,543,350	1.94
JUMLAH BELANJA DAERAH		373,418,988,926	440,841,741,797	475,004,383,401	4.90

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Lamandau TA 2010- 2012, diolah

Bagan 3.21
Persentase Realisasi Belanja Kabupaten Lamandau 2010-2012



Untuk belanja tidak langsung dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan sebesar 11,07 %. Adapun belanja langsung, rata-rata pertumbuhan sebesar 1,96 %.

Alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung dapat dilihat dari bagan 3.2, di mana belanja tidak langsung masih sekitar 40% dan belanja langsung sekitar 60%.

c. Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah akan disajikan secara *series* untuk menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Lamandau yang tertuang pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun Anggaran 2010-2012

(dalam juta rupiah)

NO. URUT	URAIAN	2010	2011	2012	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		REALISASI	REALISASI	REALISASI	
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	42,877.61	54,940.43	67,037.38	0.14
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	42,877.61	54,940.43	66,562.38	-0.15
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			475.00	-
3.2	PENGELUARAN DAERAH	2,682.79	9,100.00	10,065.25	139.36
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		4,000.00	3,590.25	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,600.00	5,100.00	6,475.00	101.90
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1,082.79	0.00	0.00	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				-
	PEMBIAYAAN NETTO	40,194.82	45,840.43	56,972.13	-4.66
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	54,940.43	66,562.38	67,038.02	17.19

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Lamandau TA 2010– 2012, diolah



Dari Tabel 3.3 di atas terlihat bahwa Penerimaan Daerah mengalami pertumbuhan 4,32% selama periode tahun 2010 -2012. Adapun Penerimaan Daerah diperoleh sebagian besar melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Alangkah baiknya apabila SiLPA bisa ditekan seminimal mungkin sehingga pembangunan di Kabupaten Lamandau dapat berjalan sesuai rencana.

3.1.2 Neraca Daerah

Tujuan dari Analisis neraca daerah adalah untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Gambaran mengenai neraca Kabupaten Lamandau dalam kurun waktu tahun 2008-2012 disajikan pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2008-2012

(dalam juta rupiah)

URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata Pertumbuhan
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	64.700	42.956	54.733	66.562	67.038	4,03
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.721	613	207	0	0	-60,92
Kas di Bendahara Penerimaan	83	20	2	0	6	-66,10
Piutang						
Piutang Pajak	0	0	0	0	0	0,00
Piutang Retribusi	0	0	45	70	29	24,36
Piutang Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	3.922	25,00
Piutang Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0,00
Piutang Dana Alokasi Khusus	1.798	0	0	0	0	-25,00
Piutang Dana Penyesuaian	0	0	0	0	0	0,00
Piutang Lain-lain						
Piutang Kredit Ternak	158	0	0	0	0	-25,00
Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran	0	0	0	0	0	0,00



URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata Pertumbuhan
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah	0	0	0	0	0	0,00
Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	0	0	0	0	0	0,00
Piutang Deviden	0	0	0	0	0	0,00
Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah	0	0	0	0	0	0,00
Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0	0	0	0	0	0,00
Piutang Lain-lain – Lainnya	0	0	1.572	63	71	4,25
Persediaan	10.972	1.622	7.596	13.264	11.464	86,01
JUMLAH ASET LANCAR	80.432	45.211	64.156	79.959	82.531	6,49
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0	0	0	0	0	0,00
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0	0	0	0	0	0,00
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0	0	0	0	0	0,00
Investasi dalam Surat Utang Negara	0	0	0	0	0	0,00
Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0	0,00
Dana Bergulir diragukan tertagih	0	0	0	0	0	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0	475	475	475	4.335	228,18
Jumlah Investasi Non Permanen	0	475	475	475	4.335	228,18
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.476	1.476	3.426	5.026	8.956	64,24
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	5.000	6.000	6.000	9.500	14.375	32,41
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	0	0	0	0	0	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0	0	0	0	0	0,00
Jumlah Investasi Permanen	6.476	7.476	9.426	14.526	23.331	39,06
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	6.476	7.951	9.901	15.001	27.667	45,81



URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata Pertumbuhan
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
ASET TETAP						
Tanah	103.567	106.471	109.825	110.810	111.171	1,79
Peralatan dan Mesin	55.716	109.014	131.244	160.232	179.120	37,48
Gedung dan Bangunan	220.648	312.923	341.319	374.035	420.813	18,25
Jalan, Jembatan dan Instalasi	73.587	223.070	254.198	430.662	491.229	75,14
Aset Tetap Lainnya	1.956	13.247	15.563	15.792	9.209	138,60
Ternak Sapi	2.763	0	0	0	0	-25,00
Konstruksi dalam penyelesaian	0	12.233	55.333	4.077	45.854	346,13
JUMLAH ASET TETAP	458.236	776.958	907.482	1.095.607	1.257.396	30,46
DANA CADANGAN						
Cadangan Penyelenggaraan Pilkada	6.080	0	0	0	0	-25,00
Dana Cadangan Lain-lain	0	0	0	4.008	7.598	47,40
JUMLAH DANA CADANGAN	6.080	0	0	4.008	7.598	22,40
ASET LAINNYA						
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0,00
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Ganti Rugi	0	7.173	7.514	5.582	5.558	19,65
Aset Tak Berwujud	0	652	850	850	850	32,58
Ternak digaduhkan	0	0	0	0	0	0,00
Penyertaan Modal yang belum ditetapkan statusnya	0	0	0	0	0	0,00
Aset Lain-lain	0	1.196	8.808	13.039	10.677	191,65
JUMLAH ASET LAINNYA	0	9.021	17.172	19.472	17.085	47,87
JUMLAH ASET	551.225	839.142	998.711	1.214.048	1.392.277	26,87
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	1.679	691	0	0	0	-14,71



URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata Pertumbuhan
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
(PFK)						
Kewajiban Hutang Jangka Pendek	0	0	0	0	0	0,00
Hutang Bunga	0	0	0	0	0	0,00
Hutang Pajak	0	0	0	0	0	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	0	0	0,00
Hutang Jangka Pendek Lainnya	0	972	1.436	258	0	-8,57
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.679	1.663	1.436	258	0	-49,16
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Hutang Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0,00
Hutang Luar Negeri	0	0	0	0	0	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	0	0	0	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	1.679	1.663	1.436	258	0	-49,16
EKUITAS DANA						
EKUITAS DANA LANCAR						
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	67.504	42.364	54.940	66.562	67.038	3,58
Pendapatan yang Ditangguhkan	0	20	2	0	6	
Cadangan untuk Piutang	1.956	0	1.617	133	4.023	708,94
Cadangan untuk Persediaan	10.972	1.622	7.596	13.264	11.464	86,01
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Hutang Jangka Pendek	0	-458	-1.436	-258	0	32,88
Hutang jangka pendek	-1.679	0	0	0	0	-25,00
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	78.753	43.548	62.720	79.701	82.531	7,49
EKUITAS DANA INVESTASI						
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	6.476	7.951	9.901	15.001	27.667	45,81



URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata Pertumbuhan
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	458.236	776.958	907.482	1.095.607	1.257.396	30,46
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	0	9.021	17.172	19.472	17.085	47,87
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Hutang Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0,00
Hutang jangka panjang	0	0	0	0	0	0,00
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	464.713	793.931	934.555	1.130.081	1.302.148	31,18
EKUITAS DANA CADANGAN						
Dana Penyelenggaraan Pilkada Bupati	6.080	0	0	0	0	-25,00
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0	0	0	4.008	7.598	47,40
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	6.080	0	0	4.008	7.598	22,40
JUMLAH EKUITAS DANA	549.546	837.479	997.275	1.213.790	1.392.277	26,97
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	551.225	839.142	998.711	1.214.048	1.392.277	26,87

Selanjutnya akan disajikan analisis terhadap neraca keuangan Kabupaten Lamandau untuk periode tahun 2010-2012 yang mencakup rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas sebagai berikut:

RASIO LIKUIDITAS

Rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar dan rasio *quick*. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek yang dimilikinya.

Rumus yang digunakan adalah dengan membagi aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek

Kemudian *quick rasio* diperoleh dengan jalan mengurangi aset lancar dengan persediaan kemudian dibagi dengan kewajiban jangka pendek.



Rasio quick = (aktiva lancar – persediaan) : kewajiban jangka pendek

RASIO SOLVABILITAS

Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

Rasio solvabilitas juga merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang ditanggung Pemerintah Daerah dibandingkan dengan aset yang dimiliki atau untuk mengukur sejauh mana aset Pemerintah Daerah dibiayai dari hutang. Rumus rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah adalah:

Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset

Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas

Hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau untuk Tahun 2010-2012 berdasarkan formulasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Analisis Rasio Keuangan
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2010-2012

No	Uraian	2010	2011	2012
A	Rasio Likuiditas			
1.	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	44,68	310,01	1.469.907,79
2.	Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	39,39	258,59	1.265.725,67
B	Rasio Solvabilitas			
1	Rasio total hutang terhadap total aset	0,00144	0,00021	0,00000004
2	Rasio hutang terhadap modal	0,00144	0,00021	0,00000004

Berdasarkan data neraca Kabupaten Lamandau sebagaimana tersaji pada 0 dan hasil perhitungan rasio keuangan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.5 menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis yaitu :

1. Rasio Lancar

Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada Tahun 2012 adalah sebesar 1.469.907,79. Hal ini berarti kemampuan membayar hutang Pemerintah Kabupaten Lamandau sebesar 1.469.908 kali lebih.

2. Rasio Quick

Rasio *Quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel diatas, Rasio *Quick* pada Tahun 2012 adalah sebesar 1.265.725,67. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

Sedangkan Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas :

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva. Semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset pada Tahun 2012 sebesar 0,00000004. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki. Semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2012 Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau sebesar 0,00000004. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Lamandau, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.



3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kurun waktu lima tahun mulai dari 2008 sampai dengan tahun 2012 pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

1) Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Lamandau telah melakukan berbagai upaya berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah Tahun 2008-2012 meliputi:

- a). Penggalan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah, meningkatkan pendataan potensi pajak/retribusi daerah serta meningkatkan pemungutan pajak/retribusi daerah.
- b) Melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak dan retribusi daerah, menyiapkan sarana untuk pemasangan iklan, pekan panutan pembayaran PBB, pemberian penghargaan bagi petugas pemungut yang berprestasi, penegakan sanksi bagi wajib pajak/wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.



- c). Meningkatkan koordinasi dengan para pengusaha serta memberi kesempatan kepada pengusaha berpartisipasi dalam mengelola dan melaksanakan pembangunan khususnya bagi yang telah memenuhi kewajiban pajak/retribusi.
- d). Mengutamakan produksi lokal dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan memenuhi kewajiban pajak/retribusi.
- e). Memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran membayar pajak/retribusi.
- f). Melakukan pendataan ulang terhadap aset atau kekayaan daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah serta mengoptimalkan penggunaannya dalam memaksimalkan pendapatan daerah.
- g). Mengintensifkan dan mengevaluasi semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan memfungsikan tupoksi masing-masing Dinas/Badan sampai ketingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- i). Meningkatkan koordinasi, konsultasi maupun rekonsiliasi khususnya bagi pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan maupun Bantuan Keuangan dari Provinsi, sehingga diharapkan realisasi pendapatan tersebut dapat terlaksana secara transparan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Lamandau menetapkan kebijakan terkait pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat jenis, yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu Bagi Hasil Pajak dan



Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam; Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain – lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya.

2). Kebijakan Umum Belanja Daerah

Secara umum, kebijakan umum keuangan daerah menyangkut tentang belanja daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Lamandau, termasuk gaji, uang refresentasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk penghasilan/penerimaan lainnya ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai yakni memberikan tambahan penghasilan berdasarkan kemampuan daerah.

b. Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan untuk operasional Bhakti TNI (TMMD), sewa genset listrik, PKK Kab. Lamandau, KORPRI Kab. Lamandau Kwarcab Pramuka Kab. Lamandau, KONI Kab. Lamandau, PMI Kab. Lamandau serta untuk mengakomodir dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pusat untuk sekolah swasta di Kab. Lamandau.

c. Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, yaitu organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok



masyarakat, anggota masyarakat serta bantuan keuangan kepada partai politik sesuai ketentuan yang berlaku. Bantuan sosial akan diberikan secara selektif yang peruntukannya jelas dan dapat dipertanggung jawabkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial sifatnya tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Dalam belanja bantuan sosial dialokasikan anggaran untuk bantuan pembangunan Mesjid Agung Nanga Bulik, bantuan pembangunan Gereja Induk GKE, Gereja Induk Khatolik, Gereja Bethel, GPDI, GSJA. Balai Basarah/Rumah Ibadah Hindu Kaharingan, Bantuan Beasiswa, Bantuan Berobat Keluarga Miskin, Bantuan BLM-PNPM MP. Selain itu, alokasi anggaran juga untuk bantuan rehabilitasi rumah masing-masing 2 (dua) rumah dalam satu desa, serta bantuan sosial lainnya.

d. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa. Alokasi anggaran bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi berupa kontribusi terhadap kerjasama pembiayaan sewa transponder dengan TVRI Kalteng. Sedangkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD), TPAD kades, TPAD sekdes, TPAD kaur, operasional dan tunjangan demang, insentif ketua BPD, insentif wakil ketua BPD, insentif sekretaris BPD, insentif anggota BPD, tunjangan sekretaris damang, dan mantir adat kecamatan, desa serta kelurahan. Anggaran alokasi dana desa selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

e. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk menanggulangi kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban serta untuk membiayai penyelenggaraan STQ Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013.



2. Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Belanja Langsung meliputi Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur PNS, dan Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

c. Belanja Modal

Belanja Modal dominan digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi/jaringan, peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Realisasi secara umum dari kebijakan belanja daerah Kabupaten Lamandau pada periode tahun anggaran 2010 – 2012 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1) Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Secara umum tentang belanja daerah yang disajikan secara *series* menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Lamandau yang tertuang pada Tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2010-2012

(dalam jutaan)

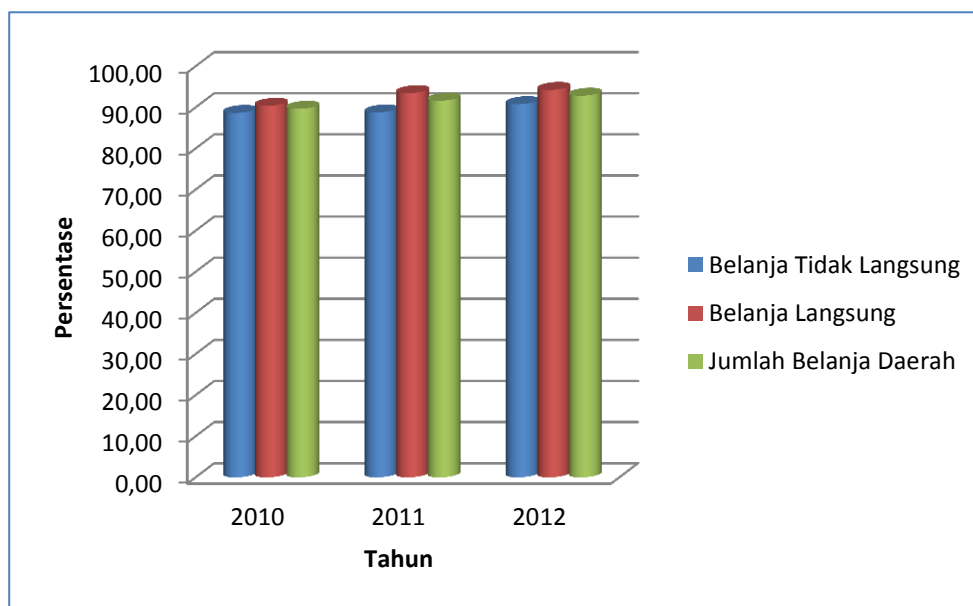
No	URAIAN	2010			2011			2012		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
I	BELANJA TIDAK	171,927.53	152,419.36	88.65	187,186.53	166,164.53	88.77	208,743.38	189,513.17	90.79



No	URAIAN	2010			2011			2012		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
	LANGSUNG									
1	Belanja Pegawai	123,949.20	113,066.99	91.22	138,575.37	130,395.25	94.10	153,734.80	144,724.15	94.14
2	Belanja Subsidi	1,058.87	1,008.78	95.27	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
3	Belanja Hibah	6,930.00	4,984.44	71.93	6,357.67	5,585.16	87.85	18,559.30	13,899.71	74.89
4	Belanja Bantuan Sosial	14,904.00	12,043.42	80.81	17,815.49	13,181.18	73.99	6,025.00	5,337.72	88.59
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/ Kota Pemerintahan Desa dan Partai Politik	23,098.74	21,315.72	92.28	20,582.41	15,689.92	76.23	29,314.44	25,487.43	86.94
6	Belanja Tidak Terduga	1,986.72	0.00	0.00	3,855.58	1,313.02	34.06	1,109.83	64.16	5.78
II	BELANJA LANGSUNG	244,491.91	220,999.63	90.39	293,883.69	274,677.21	93.46	302,896.34	285,491.21	94.25
1	Belanja Pegawai	17,769.63	14,504.74	81.63	22,668.58	19,632.44	86.61	29,163.64	25,373.57	87.00
2	Belanja Barang dan Jasa	85,172.28	73,288.29	86.05	78,659.94	70,681.18	89.86	109,868.70	100,394.09	91.38
3	Belanja Modal	141,550.00	133,206.60	94.11	192,555.18	184,363.60	95.75	163,864.00	159,723.54	97.47
	JUMLAH BELANJA DAERAH	416,419.45	373,418.99	89.67	481,070.22	440,841.74	91.64	511,639.72	475,004.38	92.84

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten LamandauTA 2010– 2012, diolah

Bagan 3.3
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2010-2012



2) Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur

Secara umum tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Lamandau tertuang pada Tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2011-2012

KODE	URAIAN	Tahun 2011	Tahun 2012
		(Rp)	(Rp)
5	BELANJA	196,529,928,211	226,825,103,705
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	130,349,052,346	144,649,151,113
5.1.1	Belanja Pegawai	130,349,052,346	144,649,151,113
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	104,787,156,025	115,849,640,066
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	23,651,839,842	26,830,111,047
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1,374,300,000	1,409,400,000
5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	535,756,479	560,000,000
5.2	BELANJA LANGSUNG	66,180,875,865	82,175,952,592
5.2.1	Belanja Pegawai	18,969,156,189	25,244,033,995
5.2.1.00	Belanja Pegawai BLUD	-	-
5.2.1.01	Honorarium PNS	6,811,183,600	9,868,943,620
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11,835,693,589	14,793,490,375
5.2.1.03	Uang Lembur	322,279,000	581,600,000
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32,427,404,425	40,104,215,688
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	225,600,000	222,600,000
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6,296,778,124	7,311,943,660
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	671,582,504	761,670,500
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	453,296,750	421,852,400
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	825,545,607	1,309,375,761
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21,076,641,215	26,244,725,817
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	774,300,000	483,240,000
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis PNS & Studi Banding	2,103,660,225	3,348,807,550
5.2.2.18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-
5.2.3	Belanja Modal	14,784,315,251	16,827,702,909
5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	970,371,350	367,590,500
5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	150,232,500	110,650,000
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	1,736,102,000	7,443,715,313



KODE	URAIAN	Tahun 2011	Tahun 2012
		(Rp)	(Rp)
5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	26,375,000	87,230,000
5.2.3.05	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	29,800,000	-
5.2.3.06	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor	1,868,937,000	-
5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	426,830,000	217,556,000
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	334,471,931	310,511,600
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1,174,785,984	2,541,504,979
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4,876,910,019	2,822,869,020
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2,366,885,159	2,021,668,236
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	395,186,627	153,052,704
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	12,692,000	8,940,000
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	358,888,181	611,721,557
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2,250,000	45,113,000
5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Micropon Conference System	-	-
5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	53,597,500	85,580,000
5.2.3.33	Belanja Modal Pengadaan Alat / Sarana Keselamatan / Emergency	-	-

Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur akan ditampilkan pada Tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

NO	URAIAN	TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR (RP)	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN) (RP)	PROSENTASE
		(a)	(b)	(a) / (b) X 100%
1	Tahun Anggaran 2011	196,529,928,211	449,941,741,797.21	43.68
2	Tahun Anggaran 2012	226,825,103,705	485,069,629,956.10	46.76

3) Pengeluaran wajib dan mengikat serta Prioritas Utama

Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

Secara umum tentang realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Lamandau pada 2 (dua) tahun terakhir, tertuang pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2011-2012

NO	URAIAN	2011	2012	KENAIKAN
		(Rp)	(Rp)	(%)
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	106,697,212,504	117,819,040,066	10.42
	Gaji dan Tunjangan	104,787,156,025	115,849,640,066	10.56
	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1,374,300,000	1,409,400,000	2.55
	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	535,756,479	560,000,000	4.53
	Belanja Bunga	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-
B	BELANJA LANGSUNG	10,830,060,502	10,825,992,058	(0.04)
	Belanja Pegawai BLUD	-	-	-
	Belanja Barang Jasa BLUD	-	-	-
	Belanja Jasa Kantor	9,720,979,502	9,816,045,558	0.98
	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	334,781,000	526,706,500	57.33
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	774,300,000	483,240,000	(37.59)
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9,100,000,000	10,065,246,555	10.61
	Pembentukan Dana Cadangan	4,000,000,000	3,590,246,555	(10.24)
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,100,000,000	6,475,000,000	26.96
	Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga	-	-	-
	JUMLAH (A+B+C)	126,627,273,006	138,710,278,679	9.54

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan Kabupaten Lamandau dalam kurun waktu tahun 2010-2012 akan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.10.
Defisit Riil dan Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2010-2012

(dalam juta rupiah)

NO	Uraian	2010	2011	2012
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	388.164,60	461.563,69	485.070,27
2	BELANJA DAERAH	373.418,99	440.841,74	475.004,38
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.682,79	9.100,00	10.065,25
A.	Defisit Riil	12.062,82	11.621,95	0,64
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	42.877,61	54.940,43	66.562,38
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	475,00
B.	Total Realisasi Penerimaan	42.877,61	54.940,43	67.037,38
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		54.940,43	66.562,38	67.038,02

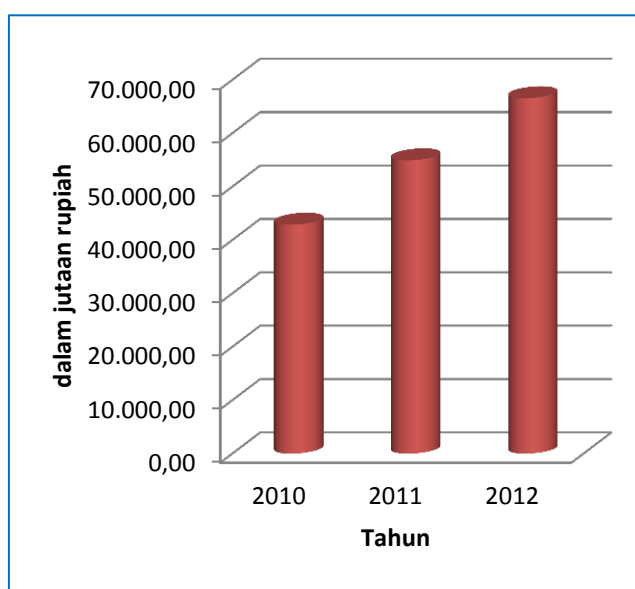
Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten LamandauTA 2010– 2012, diolah

**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA)
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2010-2012**

NO	URAIAN	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	RATA-RATA PERTUMBUHAN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	Jumlah SiLPA	42.877,61	54.940,43	66.562,38	38,71%
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	
7	Kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00	
SiLPA riil (1-6-7)		42.877,61	54.940,43	66.562,38	38,71%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten LamandauTA 2010– 2012, diolah

Bagan 3.4
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2010-2012



Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pembiayaan daerah antara lain:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan

rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

- b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

3.3 Kerangka Pendanaan

Tujuan dari analisis kerangka pendanaan adalah untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Tahap awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan Kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Lamandau kurun waktu 2010-2012, yakni 8,89% per tahun. Dengan berbagai pertimbangan maka proyeksi pendapatan Kabupaten Lamandau periode tahun 2014-2018 hanya akan menggunakan pertumbuhan sebesar 6,27 % maka dapat dikalkulasikan proyeksi pendapatan daerah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.12 sebagai berikut ini:



Tabel 3.11.
Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014-2018

(dalam juta rupiah)

No.	URAIAN	PERUBAHAN	PROYEKSI					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		APBD 2013	APBD 2014	APBD 2015	APBD 2016	APBD 2017	APBD 2018	
1	PENDAPATAN DAERAH	558.399	573.988	592.859	628.728	669.511	708.920	6,27
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	16.900	17.715	18.862	20.257	21.825	23.590	8,58
1.1.1	Pajak Daerah	2.604	2.699	3.104	3.570	4.105	4.721	16,18
1.1.2	Retribusi Daerah	3.987	4.831	4.534	5.214	5.996	6.896	15,46
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.035	3.850	4.000	4.250	4.500	4.750	10,93
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	7.275	6.335	7.224	7.224	7.224	7.224	0,22
1.2.	Dana Perimbangan	490.016	524.723	541.358	575.582	612.297	651.691	7,24
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	68.860	60.377	60.377	60.377	60.377	60.377	-2,46
1.2.3	Dana Alokasi Umum	383.326	424.352	442.981	476.205	511.920	550.314	9,13
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	37.831	39.994	38.000	39.000	40.000	41.000	2,21
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	51.482	31.550	32.639	32.889	35.389	33.639	-4,92
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	0,00
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	0,00
1.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Prov. dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	20.546	18.250	11.250	11.500	11.750	12.000	-8,16
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	16.139	-	16.139	16.139	16.139	16.139	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Prov./ Pemerintah Daerah Lainnya	9.650	8.300	-	-	2.000	-	0,00
1.3.6	Lain-lain Pendapatan	5.147	5.000	5.250	5.250	5.500	5.500	2,33



Proyeksi pendapatan menggunakan pertumbuhan 6,27% selama periode tahun 2014-2018 karena potensi riil pendapatan yang ada akan terjadi fluktuasi dari setiap pendapatan daerah sehingga dengan menetapkan pertumbuhan hanya 6,27% maka target pendapatan daerah dapat terealisasi atau mencapai target yang telah ditetapkan.

3.3.2 Proyeksi SiLPA

Tingkat pertumbuhan SiLPA yang cukup besar untuk periode tahun 2010-2012 yaitu 38,71%. Proyeksi SiLPA untuk periode tahun 2014 -2018 akan mempergunakan pertumbuhan sebesar 3,67%. Dasar pertimbangan menggunakan pertumbuhan 3,67% adalah bahwa diasumsikan proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga SiLPA akan berkurang. Proyeksi SiLPA untuk tahun 2014-2018 akan ditunjukkan melalui Tabel 3.13 sebagai berikut:

Tabel 3.12.
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014-2018

(dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	PERTUMBUHAN	TAHUN PROYEKSI				
			2014	2015	2016	2017	2018
		%					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	0,90	90.339	89.229	87.469	89.162	93.504
	- Sisa Belanja	(8,68)	33.219	31.220	26.961	26.153	22.995
	- Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR)	5,48	57.119	58.009	60.509	63.009	70.509

Jika dilihat dari tabel 3.13 maka akan diketahui bahwa komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang terbesar adalah Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBH DR). Ketidakmampuan penyerapan/penggunaan Dana Bagi Hasil Reboisasi yang membuat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menjadi semakin besar selama periode tahun 2014-2018.

Berikutnya, akan dibuat proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan data historis yang telah disajikan pada tabel sebelumnya. Proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lamandau untuk mendanai pembangunan untuk periode tahun 2014-2018, akan disajikan pada Tabel 3.14 sebagai berikut:



Tabel 3.13.
Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014-2018

(dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN PROYEKSI				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pendapatan Daerah	573.988	592.859	628.728	669.511	708.920
2	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	90.339	89.229	87.469	89.162	93.504
	Total Kapasitas Kemampuan Keuda	664.327	682.088	716.198	758.673	802.424

3.3.3 Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dihitung berdasarkan rata-rata tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2011-2012. Adapun hasil proyeksi akan ditunjukkan di Tabel 3.15 berikut ini:

Tabel 3.14.
Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014-2018

(dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	PERTUMBUHAN	PROYEKSI				
		%	2014	2015	2016	2017	2018
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,66	209.680,85	214.191,85	234.153,58	256.028,43	280.001,47
1	Belanja Pegawai	8,13	181.633,75	184.881,95	203.370,14	223.707,16	246.077,87
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	4,62	28.047,10	29.309,90	30.783,44	32.321,28	33.923,60
B	BELANJA LANGSUNG	(2,98)	5.598,63	6.625,00	7.200,00	8.000,00	8.800,00
1	Belanja Pegawai BLUD	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Barang Jasa BLUD	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Jasa Kantor	(3,68)	3.994,52	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14,20	999,62	975,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00
5	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	6,72	604,48	650,00	700,00	750,00	800,00
	PRIORITAS I : JUMLAH (A+B)	6,72	215.279,47	220.816,85	241.353,58	264.028,43	288.801,47



3.3.4 Kebijakan Alokasi Anggaran

Setelah membuat proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, hal yang perlu ditetapkan selanjutnya adalah kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas.

Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2013-2018, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen) dan bidang kesehatan 10% (sepuluh persen). Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: dana pendamping DAK, tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga

Tabel 3.15.
Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Prioritas
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014-2018

(dalam juta rupiah)

No.	URAIAN	PROYEKSI									
		(%)	APBD 2014 (Rp.)	(%)	APBD 2015 (Rp.)	(%)	APBD 2016 (Rp.)	(%)	APBD 2017 (Rp.)	(%)	APBD 2018 (Rp.)
1	2		3		4		5		6		7
1.	Prioritas I	35,83	215.279,47	35,73	220.816,85	37,29	241.353,58	38,42	264.028,43	39,92	288.801,47
	BTL	34,90	209.680,85	34,65	214.191,85	36,18	234.153,58	37,26	256.028,43	38,71	280.001,47
	BL	0,93	5.598,63	1,07	6.625,00	1,11	7.200,00	1,16	8.000,00	1,22	8.800,00
2.	Prioritas II	60,28	362.134,60	60,23	372.261,97	59,00	381.835,21	57,50	395.135,72	56,28	407.113,81
3.	Prioritas III	3,89	23.343,38	4,04	25.000,00	3,71	24.000,00	4,07	28.000,00	3,80	27.500,00
	Total	100,00	600.757,46	100,00	618.078,82	100,00	647.188,79	100,00	687.164,15	100,00	723.415,28

Dari Tabel 3.16 di atas terlihat bahwa Prioritas I dari tahun 2014 sampai tahun 2018 sebesar 215.279,47 juta, 220.816,85 juta, 241.353,58 juta, 264.028,43 juta, 288.810,47 juta. Alokasi dana di Prioritas I di Tabel 3.16 harus sesuai dengan Tabel 3.15.

Tabel 3.17
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2014-2018

(dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018
A	KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	664.326,70	682.087,61	716.197,58	758.672,94	802.424,07
1	PENDAPATAN	573.988,20	592.858,85	628.728,12	669.511,03	708.920,21
2	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	90.338,50	89.228,76	87.469,46	89.161,91	93.503,86
B	BELANJA	600.757,46	618.078,82	647.188,79	687.164,15	723.415,28
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	233.024,23	239.191,85	258.153,58	284.028,43	307.501,47
	PRIORITAS I	209.680,85	214.191,85	234.153,58	256.028,43	280.001,47
a	Belanja Pegawai	181.633,75	184.881,95	203.370,14	223.707,16	246.077,87
b	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
c	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
d	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	28.047,10	29.309,90	30.783,44	32.321,28	33.923,60
	PRIORITAS III	23.343,38	25.000,00	24.000,00	28.000,00	27.500,00
a	Belanja Hibah	16.724,84	17.500,00	16.500,00	20.500,00	20.000,00



b	Belanja Bantuan Sosial	5.274,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
c	Belanja Tidak Terduga	1.344,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	BELANJA LANGSUNG	367.733,23	378.886,97	389.035,21	403.135,72	415.913,81
	PRIORITAS I	5.598,63	6.625,00	7.200,00	8.000,00	8.800,00
a	Belanja Pegawai BLUD	-	-	-	-	-
b	Belanja Barang Jasa BLUD	-	-	-	-	-
c	Belanja Jasa Kantor	3.994,52	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
d	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	999,62	975,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00
e	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	604,48	650,00	700,00	750,00	800,00
		-	-	-	-	-
	PRIORITAS II	362.134,60	372.261,97	381.835,21	395.135,72	407.113,81
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.450,00	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	Pembentukan Dana Cadangan	-	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Penyertaan Modal	6.450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	A-(B+C)	57.119,24	58.008,79	60.508,79	63.008,79	70.508,79
D	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Penerimaan Piutang	-	-	-	-	-
	SILPA	57.119,24	58.008,79	60.508,79	63.008,79	70.508,79

Dari Tabel 3.17, kapasitas kemampuan daerah harus sesuai dengan Tabel 3.14, kemudian untuk Prioritas I, II, III harus sesuai dengan Tabel 3.16.





BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” atau kesenjangan harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Capaian kinerja pembangunan di berbagai bidang pada masa sebelumnya telah menghantarkan masyarakat Kabupaten ke dalam kondisi kehidupan yang semakin baik. Berbagai permasalahan pokok yang muncul pada awal periode pemerintahan sebelumnya telah seoptimalnya diatasi. Hal ini terbukti pada hasil capaian kinerja pembangunan pada akhir periode pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Namun demikian, patut diakui bahwa pembangunan yang sudah dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat pada periode pemerintahan yang lalu masih menyisakan beberapa permasalahan pokok yang mendasar guna mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten yang lebih baik lagi.

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2008-2013, telah membuahkan hasil yang menggembirakan, tetapi tetap menyisakan tugas ke depan, yaitu mengatasi permasalahan-permasalahan pokok yang mendasar di masa datang. Beberapa permasalahan pembangunan mendasar yang dapat diidentifikasi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Lamandau akan diuraikan berikut ini.

4.1.1. Pendidikan

Berdasarkan uraian di Bab II mengenai Pendidikan dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan di bidang Pendidikan dapat dilihat dari indikator di bawah ini:

- Rendahnya angka rata-rata lama sekolah
- Angka Partisipasi Murni yang rendah untuk pendidikan menengah atas
- Tingkat rasio sekolah-murid yang masih rendah, terutama untuk pendidikan menengah atas



4.1.2. Kesehatan

Berdasarkan uraian di Bab II mengenai Kesehatan dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan di bidang Kesehatan dapat dilihat dari indikator di bawah ini:

- Rendahnya rasio dokter per satuan penduduk
- Rendahnya rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu per satuan penduduk
- Rendahnya rasio rumah sakit per satuan penduduk

4.1.3. Ketenagakerjaan

Berdasarkan uraian di Bab II mengenai Ketenagakerjaan dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan di bidang Ketenagakerjaan dapat dilihat dari indikator di bawah ini:

- Tingkat partisipasi angkatan kerja yang masih rendah

4.1.4. Pekerjaan Umum

Berdasarkan uraian di Bab II mengenai Pekerjaan Umum dan dari hasil analisis Dinas Pekerjaan Umum dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan di bidang Pekerjaan Umum adalah:

- Kondisi jalan yang rusak masih tinggi
- Sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum (alat berat) umur pakainya sudah tidak layak dan sering mengalami kerusakan, akibatnya pemeliharaan jalan tidak dapat dilakukan secara maksimal
- Sampai saat ini izin pembukaan lahan ke daerah terisolir masih belum selesai dan masih dalam proses
- Potensi pengembangan sumber daya air belum termanfaatkan secara maksimal, khususnya dibidang air baku dan irigasi
- Infrastruktur pedesaan belum seluruhnya terakomodir dalam pembangunan

4.1.5 Perumahan

Berdasarkan uraian di Bab II mengenai Perumahan dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan di bidang Perumahan dapat dilihat dari indikator di bawah ini:

- Rendahnya rumah tangga pengguna air bersih
- Rendahnya rumah tangga pengguna listrik

4.2. Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah merupakan permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang belum dapat diselesaikan pada periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan berikutnya harus bisa mengatasi masalah yang belum terselesaikan tersebut.

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau 2013-2018 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 5 tahun ke depan.

4.2.1 Kajian Kebijakan Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan Internasional

Penentuan isu strategis didahului dengan *review* terhadap kebijakan pembangunan nasional dan agenda pembangunan internasional yang relevan dalam memberi arah bagi pembangunan Kabupaten Lamandau. Hasil *review* akan melengkapi draf isu strategis yang diperoleh dari kajian terhadap kondisi Kabupaten Lamandau.

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan memperhatikan capaian pembangunan pada periode yang lalu dan mencermati tantangan ke depan, RPJMN menetapkan Visi Indonesia 2014, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 3



misi, dimana misi pertama (melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera) dan misi ketiga (memperkuat dimensi keadilan di semua bidang) bersinggungan dengan permasalahan riil di Kabupaten Lamandau.

Perwujudan visi dan misi RPJMN 2010-2014 dilakukan melalui 5 agenda pembangunan, dimana agenda I (pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat) dan agenda V (pembangunan yang inklusif dan berkeadilan) dapat dipahami sebagai turunan dari misi pertama dan ketiga yang telah dijelaskan sebelumnya. Agenda-agenda ini dilengkapi dengan sasaran, yaitu indikator pencapaian di akhir pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Pada Sasaran Pembangunan Kesejahteraan Rakyat misalnya, ditetapkan target untuk indikator “Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas” pada tahun 2014 adalah 8,25.

Visi dan misi diturunkan ke level operasional dengan cara menetapkan 11 prioritas nasional supaya lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Mayoritas sumber daya akan dialokasikan untuk mengerjakan 11 prioritas nasional yang terdiri dari:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
11. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik

Pada setiap program, terdapat substansi inti yang berisi aspek-aspek pada sebuah program yang dilengkapi dengan target yang terukur. Substansi inti ini hendaknya menjadi target bersama yang harus dikejar oleh seluruh daerah, tidak terkecuali oleh Kabupaten Lamandau, sebagai bentuk kontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia 2014.



2. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada daerah yang baru dibentuk. Evaluasi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. EPPD meliputi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB).

EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Didalamnya terdapat arahan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengimplementasikan "Sistem Pengukuran Kinerja Mandiri" (*self assessment*) sebagaimana amanat Pasal 32 hingga 40 PP 6/2008. Untuk dapat melakukan hal tersebut Tim Nasional EPPD menyusun indikator kinerja kunci untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah dan pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan. Berdasarkan hasil kajian dan analisis, tim penilai dapat melakukan evaluasi tahap akhir dengan membandingkan tingkat capaian kinerja masing-masing SKPD dengan:

- a. target kinerja yang direncanakan sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja SKPD;
- b. target kinerja yang direncanakan sebagaimana termuat dalam RKPD;
- c. realisasi kinerja SKPD tahun sebelumnya; dan
- d. seluruh realisasi kinerja SKPD

Dalam kaitannya dengan isu strategis Kabupaten Lamandau, aspek-aspek pembangunan yang terdapat dalam Indikator Kinerja Kunci dapat dipandang sebagai aspek strategis yang harus diprioritaskan penanganannya. Tim perumus dapat melakukan identifikasi permasalahan pada aspek di Indikator Kinerja Kunci supaya dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dengan aspek tersebut.



3. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Dalam pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), diamanatkan bahwa SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Sampai dengan pertengahan Tahun 2013, telah diterbitkan 15 (lima belas) SPM oleh kementerian/lembaga, yaitu SPM:

- 1) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
- 2) Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.
- 3) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota.
- 4) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.
- 5) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.
- 6) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- 7) Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera di Kab/Kota.
- 8) Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.



- 9) Bidang Pekerjaan Umum.
- 10) Bidang Ketenagakerjaan.
- 11) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kab/Kota.
- 12) Bidang Komunikasi dan Informasi.
- 13) Bidang Kesenian.
- 14) Bidang Penanaman Modal.
- 15) Bidang Perhubungan Daerah.

4. *Millenium Development Goals*(MDG's)

Salah satu agenda pembangunan dunia yang dapat menjadi referensi bagi perumusan isu strategis RPJMD Kabupaten Lamandau adalah komitmen *Millenium Development Goals* (MDGs) yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB. Dengan telah diadopsinya komitmen MDG's oleh Indonesia, maka merupakan keharusan bagi seluruh daerah di Indonesia termasuk Lamandau untuk menggunakan target yang dicanangkan dalam MDGs sebagai referensi dalam penetapan target pembangunan daerah masing-masing.

Konsep MDGs berawal dari adanya pemikiran bahwa ada beberapa hal yang menjadikan masyarakat menjadi tetap rentan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, ditetapkan delapan tujuan beserta target-targetnya yang diharapkan mampu membantu masyarakat keluar dari persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Konsep MDGs pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak, baik untuk manusia dan lingkungan hidup, bagi laki-laki dan perempuan, bagi orangtua dan anak-anak, serta bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Adapun kedelapan tujuan pembangunan milenium terdiri dari:

1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan;
2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal;
3. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;



5. Memperbaiki kesehatan maternal;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya;
7. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup; dan
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan

Dalam kaitannya dengan penyusunan isu strategis Kabupaten Lamandau, sebagian atau seluruh aspek MDGs dapat dipilih sebagai aspek yang diberi perhatian besar dalam pembangunan Lamandau 5 tahun mendatang. Hal ini dapat diawali dengan menjadikan isu MDGs sebagai isu strategis RPJMD Kabupaten Lamandau, dengan catatan telah dilakukan kajian mengenai relevansi antara relevansi antara isu MDG dengan permasalahan riil di lapangan.

5. *Post 2015 Development Agenda*

Seiring dengan semakin dekatnya tahun berakhirnya MDGs, yaitu 2015, diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca 2015 dimulai. Pada pertemuan Rio +20 Summit, 192 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada semua negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah negara dan menghargai kebijakan dan prioritas nasional.

Pada tanggal 30 Mei 2013, *High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda* mengeluarkan "*A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development*," sebuah laporan yang menetapkan agenda universal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dari muka bumi pada tahun 2030, dan mewujudkan janji pembangunan berkelanjutan. Laporan ini mengajak seluruh warga dunia untuk bekerjasama dalam sebuah kemitraan global baru (*New Global Partnership*) yang menawarkan harapan dan peran bagi setiap orang.

Dalam laporan tersebut, *High Level Panel* yang salah satu ketuanya adalah Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mendorong tujuan



pembangunan pasca 2015 untuk melakukan 5 pergeseran transformasi utama, yaitu:

a. Tidak meninggalkan siapapun di belakang

Setelah tahun 2015 dunia harus bergerak dari mengurangi kemiskinan ke mengakhiri kemiskinan ekstrim, dalam segala bentuknya. Dunia perlu memastikan bahwa tidak ada satu orangpun-apapun etnis, gender, geografi, disabilitas, ras dan status lainnya-yang tidak mendapatkan kesempatan ekonomi dasar dan hak asasi.

b. Menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai inti

Dunia harus mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dari keberlanjutan. Dunia harus bertindak sekarang untuk mengurangi laju perubahan iklim dan degradasi lingkungan, yang menimbulkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi manusia.

c. Transformasi ekonomi untuk penyediaan pekerjaan dan pembangunan yang inklusif

Transformasi ekonomi yang mendalam dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim dan meningkatkan mata pencaharian, dengan memanfaatkan inovasi, teknologi dan potensi bisnis. Semakin beragam kegiatan ekonomi, dan dengan kesempatan yang sama bagi semua orang, akan mewujudkan inklusi sosial, terutama bagi generasi muda, dan mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

d. Membangun perdamaian dan kelembagaan yang efektif, terbuka dan akuntabel bagi semua

Kebebasan dari konflik dan kekerasan adalah hak manusia yang paling mendasar, dan merupakan fondasi paling penting dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Pada waktu yang bersamaan, masyarakat di seluruh dunia berharap pemerintah bersikap jujur, akuntabel dan responsif terhadap permintaan mereka. Dunia mendesak sebuah pergeseran fundamental-yang menempatkan perdamaian dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai elemen inti kesejahteraan, bukan sebuah pilihan ekstra.



e. Membina kemitraan global baru

Semangat kebersamaan, kerjasama dan akuntabilitas antar pihak harus menyokong agenda pembangunan pasca 2015. Kemitraan baru harus dilandaskan pada pemahaman bersama akan perikemanusiaan, berbasis pada pengertian dan manfaat antar pihak. Hal tersebut harus berada di tengah-tengah masyarakat, termasuk mereka yang terdampak oleh kemiskinan dan terpinggirkan, perempuan, remaja, lansia, penyandang cacat dan penduduk lokal/*indigenous*. Kemitraan tersebut harus melibatkan organisasi masyarakat, institusi multilateral, pemerintah daerah dan pusat, komunitas sains dan akademis, pelaku bisnis dan filantropi.

Pemanfaatan agenda pembangunan dunia sebagai bahan pertimbangan penyusunan RPJMD menunjukkan keterbukaan Kabupaten Lamandau terhadap tantangan global yang dihadapi umat manusia, sekaligus kesiapan untuk mencari solusi bagi tantangan tersebut.

4.2.2 Kajian Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

4.2.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 yang telah disepakati adalah:

KALIMANTAN TENGAH YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL

Adapun misi pembangunan daerah Kalimantan Tengah tahun 2005-2025 untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang maju, mandiri dan adil adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
2. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
3. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.



4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
5. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
6. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
8. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
11. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang maju, mandiri dan adil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang maju, mandiri dan adil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembangunan daerah diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

1. Tercukupinya sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
2. Terwujudnya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
3. Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
4. Terwujudnya peningkatan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
5. Terbangun dan berkembangnya budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
6. Terwujudnya masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
7. Terwujudnya pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
8. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Terwujudnya kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.



10. Terwujudnya peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
11. Terwujudnya fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
12. Terwujudnya optimalisasi produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

4.2.2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah

Di dalam sub bab ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah hanya akan ditelaah untuk visi, misi, tujuan, dan permasalahan saja.

Visi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah: ***“Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah agar Rakyat Lebih Sejahtera dan Bermartabat Demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”***.

Adapun misi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Sinergi dan Harmonisasi Pembangunan Kewilayahan Kalimantan Tengah melalui pemantapan Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.
2. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata.
3. Menjamin dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau.
4. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi rakyat.

5. Pengembangan dan penguatan ekonomi Kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan.
6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah.
7. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah.

Adapun tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut.

1. Revitalisasi dan terciptanya *cluster-cluster* ekonomi unggulan di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota.
2. Terselenggaranya penataan ruang yang memperhatikan keberlanjutan sumber daya wilayah.
3. Terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu dan terjangkau.
4. Tersedianya akses infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok wilayah.
5. Meningkatnya sistem layanan kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau.
6. Tersedianya akses infrastruktur Kesehatan dasar hingga ke pelosok wilayah.
7. Terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan.
8. Tersedianya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan.
9. Tersedianya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat.
10. Terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu.
11. Terselenggaranya kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar.
12. Meningkatnya daya saing masyarakat.
13. Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah.
14. Terwujudnya soliditas antarkelompok masyarakat

Adapun permasalahan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

1. Masalah penyediaan infrastruktur pembangunan.
2. Masalah pengembangan ekonomi lokal.
3. Masalah kualitas dan keterjangkauan pendidikan.
4. Masalah bidang kesejahteraan social.
5. Masalah pengembangan kapasitas birokrasi.
6. Masalah pengelolaan sumber daya alam.

4.2.2.3 Program Inisiatif Provinsi Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah membuat beberapa program inisiatif yang dimulai dari tahun 2008. Program inisiatif tersebut adalah:

- **Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)**

Tujuan program untuk mewujudkan desa/kelurahan percontohan yang mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki. Desa/kelurahan percontohan diharapkan dapat memacu pertumbuhan desa/kelurahan sekitarnya. PM2L dimulai sejak tahun 2008, dan sampai saat ini sebanyak 210 desa/kelurahan tertinggal telah dianggap berhasil mejadi desa/kelurahan yang lebih baik.

- **Program Kalteng Harati**

Program Kalteng Harati atau Kalteng Pintar merupakan program di bidang pendidikan. Program Kalteng Harati mengedepankan lima prioritas, yaitu: kesejahteraan guru, pendidikan dan pelatihan guru, beasiswa untuk siswa berprestasi, penyediaan dan pendistribusian buku-buku pelajaran, meningkatkan kualitas mutu belajar mengajar. Program Kalteng Harati dimulai sejak 2 Mei 2010, yang dicanangkan bertepatan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional.

- **Program Kalteng Barigas**

Program Kalteng Barigas merupakan program di bidang kesehatan. Tujuan Program Kalteng Barigas untuk meningkatkan program pelayanan kesehatan sehingga dapat membuat masyarakat Kalimantan Tengah yang sehat. Program Kalteng Barigas yang dimanifestasikan ke



dalam program pembangunan kesehatan. Kalteng Barigas (Kalteng Sehat) dimulai sejak tahun 2010.

- **Kalteng Besuh**

Tujuan program Kalteng Besuh (Kalteng Kenyang) adalah mewujudkan ketahanan pangan serta berdaulat pangan di Kalimantan Tengah. Program Kalteng Besuh menyentuh di bidang pertanian dan perikanan. Program Kalteng Besuh dimulai sejak Juni 2013.

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya

Dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam Provinsi Kalimantan Tengah, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Lamandau meninjau kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang berada di sekitar Kabupaten Lamandau.

Tabel 4. 1
Identifikasi Kebijakan RPJMD Kabupaten/Kota Lain

NO	NAMA DAERAH LAIN	PERIODE RPJMD	KEBIJAKAN TERKAIT	KETERANGAN
1	Kabupaten Seruyan	2013 - 2018		Masih dalam proses penyusunan
2	Kabupaten Kotawaringin Barat	2011 - 2016	Isu Strategis: <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Pendidikan Berkualitas Bagi Semua • Perbaikan Derajat Kesehatan Masyarakat • Dampak Aktivitas Pertambangan dan Kehutanan Terhadap Lingkungan Hidup • Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial • Optimalisasi Potensi Sumber Daya Unggulan • Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Investasi • Kapasitas Aparatur Pemerintah Menghadapi Tantangan Otonomi Daerah dan Perkembangan Global • Kemudahan perijinan 	Penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
3	Kabupaten Sukamara	2013 - 2018		Masih dalam proses penyusunan

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamandau 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau (RPJP Kabupaten Lamandau) merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan (2005-2025). Dokumen tersebut memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan yang digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Visi RPJPD Kabupaten Lamandau adalah Kabupaten Lamandau yang **Maju, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Budaya**.

Tahapan pembangunan Lamandau berdasarkan RPJPD pada periode III (2014-2018) difokuskan pada:

- ✓ Percepatan pembangunan,
- ✓ Peningkatan kualitas sumber daya manusia,
- ✓ Kesejahteraan masyarakat terus meningkat melalui pengembangan usaha kecil menengah dan mikro,
- ✓ Kesadaran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga meningkat,
- ✓ Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang dengan terwujudnya fungsi tata guna lahan,
- ✓ Kualitas sumber daya manusia terus membaik dengan naiknya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan sistem pendidikan yang lebih bermutu, bermakna, dan kontekstual dengan karakteristik daerah,
- ✓ Derajat kesehatan juga meningkat karena didukung layanan kesehatan yang makin terjangkau dan merata,
- ✓ Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkendali,
- ✓ Ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing mulai muncul dan berkembang,
- ✓ Profesionalisme aparatur pemerintahan daerah di Kabupaten Lamandau meningkat ditandai dengan meningkatnya layanan birokrasi yang murah dan berkualitas.



Hal ini mengamanatkan bahwa pembangunan pada periode tahun 2013 sampai dengan 2018, harus diarahkan pada kebijakan-kebijakan terkait hal-hal sebagaimana telah disebutkan diatas.

4.2.4 Penetapan Isu Strategis Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018

Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau 2013-2018 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Input dari tahap ini akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran di bab selanjutnya. Isu strategis Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses pendidikan

Pendidikan merupakan suatu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten. Syarat utama sebuah daerah untuk bersaing dalam era globalisasi adalah dengan memiliki sumber daya yang kompeten. Penyiapan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui rencana mendirikan perguruan tinggi di Kabupaten Lamandau.

2. Peningkatan akses pelayanan di bidang kesehatan

Kesehatan merupakan suatu fondasi yang penting bagi masyarakat. Produktifitas masyarakat dapat berjalan apabila berada dalam kondisi yang sehat. Masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani akan mampu melakukan berbagai macam kegiatan sosial dan ekonomi yang membuat sebuah daerah terus bergerak.

Penyediaan pelayanan kesehatan secara umum dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu penambahan fasilitas dan peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan yang ada.

Program pembangunan yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan kesehatan akan sangat mendukung kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Lamandau.

3. Penyerapan angkatan kerja melalui penyediaan lapangan kerja

Ketenagakerjaan merupakan tantangan berat yang harus dapat dijawab oleh pemerintahan daerah. Bertambahnya angkatan kerja akan cenderung menjadi beban dibandingkan peluang.

Kebijakan penyiapan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan menjadi semakin penting untuk meningkatkan daya saing daerah. Kebijakan ini juga harus dibarengi dengan strategi-strategi yang mendorong investasi dan pembukaan lapangan kerja baru.

Keterhubungan antara kualitas sumber daya manusia dengan kebutuhan industri akan membuat tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat dan angka pengangguran terbuka akan menurun.

4. Peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan suatu cara masyarakat dalam berusaha untuk hidup mandiri sebagai wirausahawan. Keterbatasan lapangan usaha kerja dan jiwa hidup mandiri yang membuat usaha mikro, kecil, dan menengah masih terus tumbuh. Pemerintah harus tetap mendukung tumbuh dan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar keberadaannya dapat terus berlanjut.

Keberhasilan dari suatu usaha, mikro, kecil, dan menengah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Pengembangan komoditas unggulan daerah

Pengembangan komoditas unggulan tanaman daerah harus didasarkan pada pertimbangan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial untuk menjamin keberlanjutan dari sistem produksi komoditas ini. Secara ekologi, pemilihan komoditas disesuaikan dengan daya dukung lahan yang dapat dilihat dari kesesuaian lahan untuk komoditas tersebut. Aspek ekonomi mempertimbangkan keuntungan atau nilai tambah komoditas ini bagi petani. Sedangkan aspek sosial mempertimbangkan aspirasi dan penguasaan teknologi oleh petani.



Pengembangan komoditas unggulan daerah yang akan dilakukan harus memenuhi kriteria secara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial sehingga akan bermanfaat untuk masyarakat secara luas di Kabupaten Lamandau dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

6. Peningkatan ketahanan pangan

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ditetapkan bahwa ketahanan pangan sebagai prioritas nasional kelima dari 11 prioritas nasional. Peningkatan ketahanan pangan dilakukan untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

Rencana pola ruang Kabupaten Lamandau memuat kawasan pertanian, peternakan, dan perikanan yang cukup luas. Peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Lamandau dapat dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pangan. Keberhasilan ketahanan pangan di Kabupaten Lamandau akan menghilangkan ketergantungan pangan kepada daerah lain.

7. Reformasi Birokrasi yang bersifat melayani masyarakat

Tujuan reformasi birokrasi salah satunya adalah bagaimana menciptakan aparatur negara mampu melayani publik. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan *mindset* aparatur dari penguasa menjadi pelayan. Hal ini sangat beralasan karena birokrasi sesungguhnya adalah abdi negara dan abdi masyarakat yang harus melayani dan kondisi ini memang harus dipahami birokrasi.

Menyadari hal tersebut tiada pilihan lain bagi seorang birokrasi adalah kembali mengenal jati dirinya sebagai seorang pelayan dan mengenal karakter dirinya dalam birokrasi pemerintahan. Oleh sebab itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa seorang birokrat harus segera memposisikan dirinya bekerja untuk melayani, bukan untuk dilayani.

Perubahan yang akan dilakukan oleh para birokrat tersebut akan membuat masyarakat merasa terlayani.

8. Pengembangan infrastuktur daerah untuk menunjang pembangunan ekonomi

Infrastruktur jaringan jalan dapat meningkatkan aksesibilitas sebuah wilayah sehingga kebutuhan akan mobilitas orang dan barang dapat terlayani. Dampak dari aksesibilitas adalah ekonomi dapat tumbuh lebih cepat karena waktu tunggu barang sampai di tangan konsumen menjadi lebih sebentar.

Untuk masyarakat di wilayah yang tertinggal, keberadaan jaringan jalan akan membuka isolasi sehingga mereka dapat mengakses pelayanan di tempat yang semula tidak terjangkau.

Untuk produsen, jaringan jalan ke wilayah baru akan memperluas pasar sehingga dapat meningkatkan keuntungan, sebuah hal yang bagus bagi keberlangsungan bisnis. Kegiatan perekonomian baru juga akan tumbuh di sepanjang jalan baru.

Penyediaan infrastruktur merupakan kebijakan pembangunan yang harus diperhatikan dalam menunjang pembangunan ekonomi.





BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 yang merupakan tahapan kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025, dan juga merupakan periode kedua dari masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya.

Berpedoman pada hasil pembangunan yang telah dicapai, maka Visi dan Misi Tahun 2008 – 2013, masih relevan untuk menjadi Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2013 – 2018, dengan beberapa perbaikan dalam rangka penyempurnaan, dimana pelaksanaannya difokuskan pada program kegiatan yang belum selesai.

Diharapkan dengan mengangkat kembali Visi dan Misi ini, program-program pembangunan di Kabupaten Lamandau dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan dapat menuntaskan program kegiatan yang telah direncanakan namun belum dapat dilaksanakan pada periode 2008 – 2013 yang lalu. Adapun Visi Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, TERLAKSANANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK BEBAS DARI KKN YANG DILANDASI KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA”.

Pada Visi Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 terdapat 3 (tiga) kalimat kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, berarti mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan dan daya saing daerah, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya dengan selalu memperhatikan kearifan lokal. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi: sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan,



kesempatan berusaha dalam iklim yang kondusif, rasa aman, didukung oleh infrastruktur yang mantap.

Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bebas Dari KKN, adalah pemerintahan yang mempunyai kredibilitas, profesionalisme, akuntabilitas, berkualitas dan mampu mengayomi seluruh masyarakat, dengan mengedepankan transparansi sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah sekaligus juga diharapkan dapat memberikan masukan maupun informasi apabila ada kekurangan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya dilapangan.

Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang religius melalui peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan, hal ini ditempuh dengan melaksanakan pembangunan rumah ibadah, membangun persatuan yang kuat antar para pemuda lintas agama dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Lamandau, sehingga tercipta keseimbangan dan toleransi serta sikap saling menghargai dan saling menghormati antar umat beragama, antar suku dan antar golongan di masyarakat.

Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah tersebut tetap berada dalam koridor cita-cita menuju masyarakat yang maju, mandiri dan adil, seperti dimaksud dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

5.2. Misi

Sesuai dengan Visi tersebut diatas dan sebagai upaya dalam mewujudkannya, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018, yaitu sebagai berikut :

1. Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri.
3. Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun.



4. Menciptakan ketenteraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau.
5. Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa.
6. Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani.
8. Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
9. Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan.
10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Visi dan Misi tersebut diatas kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran, di samping menerjemahkan visi/misi dan menjawab permasalahan pembangunan daerah/isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah.

Keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran akan diperlihatkan di tabel 5.1.

Tabel 5.1

Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lamandau

Visi :	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bebas Dari KKN Yang Dilandasi Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa
---------------	--

No.	Misi	Tujuan	No	Sasaran
1	Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera.	Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam.	1	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah.
			2	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.
		Meningkatkan investasi melalui penyediaan fasilitas dan insentif serta kemitraan dengan UMKM,	3	Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta



No.	Misi	Tujuan	No	Sasaran
		Koperasi dan IKM.		berdaya saing.
			4	Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja serta lapangan usaha.
			5	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri.	Mewujudkan daerah yang memiliki sumberdaya manusia handal dengan produktivitas tinggi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.	6	Meningkatnya mutu pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan.
			7	Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda.
			8	Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda atas bahaya minuman keras, narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya.
			9	Meningkatkan peran generasi muda dalam berbangsa dan bernegara
3	Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun.	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.	10	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan.
		Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang kesehatan.	11	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan pengelolaan lingkungan sehat.
			12	Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana.
4	Menciptakan ketenteraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau.	Mewujudkan kehidupan yang tenteram, nyaman, dan terpeliharanya keamanan serta semangat berkebangsaan.	13	Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman dalam berbangsa dan bernegara.
			14	Meningkatnya pembinaan kepada penyandang kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana.
			15	Meningkatkan nilai dan jiwa kebangsaan masyarakat
5	Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa.	Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya dan pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh.	16	Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi.
			17	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman.
			18	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan.
			19	Meningkatnya partisipasi swasta/pihak ketiga untuk pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur.
		Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan keseimbangan lingkungan dan tata ruang yang sesuai peruntukan.	20	Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

No.	Misi	Tujuan	No	Sasaran
6	Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya.	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan budaya yang didukung oleh suasana yang kondusif dalam penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat.	21	Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan adat dan budaya lokal.
			22	Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel	23	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
			24	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah
			25	Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan publik.	26	Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.
8	Menumbuhkembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	27	Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama.
			28	Meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan.
9	Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan	Meningkatkan daya saing pariwisata	29	Meningkatnya peran masyarakat dalam bidang pariwisata
			30	Meningkatnya jumlah wisatawan
10	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	31	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Dari tabel 5.1 dapat dilihat bahwa ada 31 sasaran yang dibuat dari visi, misi, dan tujuan. Berikutnya sasaran tersebut akan diberikan suatu indikator yang terukur dan dapat dihitung. Pencapaian keberhasilan suatu sasaran dapat dilihat dari pencapaian terhadap indikator tersebut.

Keterkaitan dari misi, tujuan, sasaran, dan indikator akan diperlihatkan di tabel 5.2. sebagai berikut ini:

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, dan Indikator

NO	MISI	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2013*)	KONDISI AKHIR (2018)
1	Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera.	Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam.	1	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah.	Jumlah Produksi Komoditi Unggulan		
					Karet (ton/ha/tahun)	1,40	1,80
					Kelapa Sawit (ton/ha/tahun)	16	26
					Jengkol (ton/ha/tahun)	175	185
					Kopi (ton/ha/tahun)	0,2	0,6
					Gaharu (ton/ha/tahun)	0,1	0,6
					Pisang Kepok (ton/ha/tahun)	8,00	9,30
		Meningkatkan investasi melalui penyediaan fasilitas dan insentif serta kemitraan dengan UMKM, Koperasi dan IKM.	2	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.	Ketersediaan Pangan Utama:		
					Beras (kg/tahun)	8.660.788	10.039.112
					Daging (kg/tahun)	155.774	180.565
					Telur (kg/tahun)	462.345	535.925
					Ikan (kg/tahun)	2.160.929	2.504.831
			3	Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing.	Jumlah KUKM	Koperasi : 113 UKM:705	Koperasi : 150 UKM:1000
					Jumlah IKM	1030	1120
			4	Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja.	Jumlah Investor :	15	30
					- Investor Dalam Negeri	10	20
					- Investor Luar Negeri	5	10
			5	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.	Total Investasi masuk	2.065.115.403.752	2.581.394.254.690
					Angka partisipasi angkatan kerja	41.220	66.387
					Rasio Penduduk Miskin	4,46%	3,65%
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Mewujudkan daerah yang memiliki sumberdaya	6	Meningkatnya mutu pendidikan dan	Angka Partisipasi Murni		
					- SD/MI	100%	100%

NO	MISI	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2013*)	KONDISI AKHIR (2018)
	agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri.	manusia handal dengan produktivitas tinggi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.		pemerataan pendidikan.	- SMP/MTS	100%	100%
					- SMA/SMK/MA	48,72%	50,72%
					Angka Partisipasi Kasar		
					- SD/MI	118,42%	119,22%
					- SMP/MTS	109,19%	110,09%
					- SMA/SMK/MA	65%	67%
					Angka rata-rata lama sekolah	7,70%	8,70%
					Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	43,57%	90,50%
					Rasio Ketersediaan sekolah terhadap usia sekolah		
					- SD/MI	1 : 102	1 : 122
					- SMP/MTS	1 : 117	1 : 128
					- SMA/SMK/MA	1 : 65	1 : 68
					Rasio Guru terhadap murid		
					- SD/MI	1 : 13	1 : 23
					- SMP/MTS	1 : 14	1 : 24
					- SMA/SMK/MA	1 : 13	1 : 23
			7	Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda.	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda	3	9
			8	Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda atas bahaya minuman keras, narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya.	Jumah kasus penyalahgunaan minuman keras, narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya yang ditindaklanjuti	100%	100%
			9	Meningkatkan peran generasi muda dalam berbangsa dan bernegara	Cakupan Pembinaan generasi muda dalam berbangsa dan bernegara	70%	87,50%

NO	MISI	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2013*)	KONDISI AKHIR (2018)
3	Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun.	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.	10	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan.	Rasio tenaga medis (dokter, Dokter gigi dan dokter spesialis) per satuan penduduk	0,53	1,08
					Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1,94	2,11
					Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,01	0,01
			11	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan pengelolaan lingkungan sehat.	Angka Usia Harapan Hidup	67,36	68,30
		Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang kesehatan	12	Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana.	Angka Kematian Ibu	<102	<102
					Angka kematian bayi	17,70	17,00
4	Menciptakan ketenteraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau.	Mewujudkan kehidupan yang tenteram, nyaman, dan terpeliharanya keamanan serta semangat berkebangsaan.	13	Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, berbangsa dan bernegara.	Persentase penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%
					Kasus kriminallitas yang ditindaklanjuti	100%	100%
			14	Meningkatnya pembinaan kepada penyandang kesejahteraan sosial, dan penanggulangan bencana.	Jumlah Penanganan Penyandang Kesejahteraan Sosial	680	350
					Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75%	85%
			15	Meningkatkan nilai dan jiwa kebangsaan masyarakat	Cakupan pembinaan kebangsaan terhadap masyarakat	70%	87,50%

NO	MISI	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2013*)	KONDISI AKHIR (2018)
5	Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa.	Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya dan pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh.	16	Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi.	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (km)	408,75	495,37
					Jumlah Terminal Bis	1	2
					Bandara Perintis)*	0	1
					Cakupan Angkutan Darat	0,1935	0,2185
			17	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman.	Rasio Permukiman Layak Huni	1 : 1,48	1 : 1,43
			18	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan.	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik	11.052	12.950
					Rumah Tangga pengguna air bersih (%)	31,62	46,45
					Rumah Tangga bersanitasi (%)	31,56	48,21
6	Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya.	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan keseimbangan lingkungan dan tata ruang yang sesuai peruntukan.	19	Meningkatnya partisipasi swasta/pihak ketiga untuk pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur.	Persentase Partisipasi swasta (CSR) dalam pembangunan	80%	95%
			20	Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	45%	86%
6	Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya.	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan budaya yang didukung oleh suasana yang kondusif dalam penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat.	21	Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan adat dan budaya lokal.	Jumlah Acara Kebudayaan	5	10
			22	Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.	Jumlah Prestasi Olahraga	11	16
					Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (sanggar)	0	4
					Jumlah Grup Kesenian	20	32
					Jumlah Pelaku Budaya	0	34

NO	MISI	TUJUAN	NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2013*)	KONDISI AKHIR (2018)
7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel	23	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan Nilai LAKIP	20	32
			24	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan pemerintah daerah	Peningkatan Opini BPK	WDP	WTP
			25	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	Golongan dan Jabatan yang sesuai	149	441
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan publik.	26	Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.	IKM	Belum ada	Ada
8	Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	27	Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama.	Jumlah Konflik SARA	0	0
			28	Meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan.	Cakupan Rumah Ibadah dalam kondisi baik	256	275
9	Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan	Meningkatkan daya saing pariwisata	29	Meningkatnya peran masyarakat dalam bidang pariwisata	Jumlah pelaku di bidang pariwisata	25	55
			30	Meningkatnya jumlah wisatawan	Jumlah wisatawan	250	1300
10	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	31	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan indeks kualitas lingkungan	58	72

Tabel 5.3

Target Tahunan Indikator Sasaran RPJMD

INDIKATOR	KONDISI AWAL (2013*)	TARGET					KONDISI AKHIR (2018)
		TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	
Jumlah Produksi Komoditi Unggulan							
Karet (ton/ha/tahun)	1,40	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,80
Kelapa Sawit (ton/ha/tahun)	16	18	20	23	24	26	26
Jengkol (ton/ha/tahun)	175	175	178	180	182	185	185
Kopi (ton/ha/tahun)	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6
Gaharu (ton/ha/tahun)	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	0,6	0,6
Pisang Kepok (ton/ha/tahun)	8,00	8,20	8,50	8,80	9,00	9,30	9,30
Ketersediaan Pangan Utama:							
Beras (kg/tahun)	8.660.788	8.914.049	9.163.657	9.532.590	9.785.857	10.039.112	10.039.112
Daging (kg/tahun)	155.774	160.329	164.819	171.455	176.010	180.565	180.565
Telur (kg/tahun)	462.345	475.865	489.190	508.885	522.405	535.925	535.925
Ikan (kg/tahun)	2.160.929	2.224.119	2.286.398	2.378.450	2.441.640	2.504.831	2.504.831
Jumlah KUKM	Koperasi : 113 UKM:705	Koperasi : 120 UKM:852	Koperasi : 135 UKM:895	Koperasi : 140 UKM:935	Koperasi : 145 UKM:990	Koperasi : 150 UKM:1000	Koperasi : 150 UKM:1000
Jumlah IKM	1030	1050	1075	1090	1105	1120	1120
Jumlah Investor :	15	16	19	22	25	28	30
- Investor Dalam Negeri	10	10	12	14	16	18	20
- Investor Luar Negeri	5	6	7	8	9	10	10
Total Investasi masuk	2.065.115.403.752	2.168.371.173.940	2.271.626.944.127	2.374.882.714.315	2.478.138.484.503	2.581.394.254.690	2.581.394.254.690
Angka partisipasi angkatan kerja	41.220	45.342	49.879	54.866	60.352	66.387	66.387
Rasio Penduduk Miskin	4,46%	4,18%	4,04%	3,91%	3,78%	3,65%	3,65%
Angka Partisipasi Murni							
- SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- SMP/MTS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

INDIKATOR	KONDISI AWAL (2013*)	TARGET					KONDISI AKHIR (2018)
		TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	
- SMA/SMK/MA	48,72%	48,92%	50,12%	50,32%	50,52%	50,72%	50,72%
Angka Partisipasi Kasar							
- SD/MI	118,42%	118,62%	118,82%	118,82%	119,02%	119,22%	119,22%
- SMP/MTS	109,19%	109,39%	109,59%	109,79%	109,99%	110,09%	110,09%
- SMA/SMK/MA	65%	65,2%	65,4%	65,6%	65,8%	67%	67%
Angka rata-rata lama sekolah	7,70%	7,90%	8,10%	8,30%	8,50%	8,70%	8,70%
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	43,57%	50,10%	60,20%	70,40%	80,50%	90,50%	90,50%
Rasio Ketersediaan sekolah terhadap usia sekolah							
- SD/MI	1 : 102	1 : 104	1 : 106	1 : 108	1 : 120	1 : 122	1 : 122
- SMP/MTS	1 : 117	1 : 119	1 : 122	1 : 124	1 : 126	1 : 128	1 : 128
- SMA/SMK/MA	1 : 65	1 : 66	1 : 67	1 : 66	1 : 67	1 : 68	1 : 68
Rasio Guru terhadap murid							
- SD/MI	1 : 13	1 : 15	1 : 17	1 : 19	1 : 21	1 : 23	1 : 23
- SMP/MTS	1 : 14	1 : 16	1 : 18	1 : 20	1 : 22	1 : 24	1 : 24
- SMA/SMK/MA	1 : 13	1 : 15	1 : 17	1 : 19	1 : 21	1 : 23	1 : 23
Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda	3	4	5	6	7	8	9
Jumah kasus penyalahgunaan minuman keras, narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan Pembinaan generasi muda dalam berbangsa dan bernegara	70%	80%	82%	85%	87,50%	87,50%	87,50%
Rasio tenaga medis (dokter. Dokter gigi dan dokter spesialis) per satuan penduduk	0,53	0,65	0,79	0,94	1,01	1,08	1,08

INDIKATOR	KONDISI AWAL (2013*)	TARGET					KONDISI AKHIR (2018)
		TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1,94	1,94	1,94	2,00	2,00	2,11	2,11
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Angka Usia Harapan Hidup	67,36	67,50	67,70	67,90	68,10	68,30	68,30
Angka Kematian Ibu	<102	<102	<102	<102	<102	<102	<102
Angka kematian bayi	17,70	17,70	17,70	17,50	17,00	17,00	17,00
Rasio akseptor KB (%)	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00
Persentase penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kasus kriminallitas yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Penanganan Penyandang Kesejahteraan Sosial	680	650	578	520	405	359	350
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75%	75%	75%	80%	80%	85%	85%
Cakupan pembinaan kebangsaan terhadap masyarakat	70%	80%	82%	83%	85%	85%	87,50%
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (km)	408,75	428,75	448,75	468,75	488,75	495,37	495,37
Jumlah Terminal Bis	1	1	1	1	1	2	2
Bandara Perintis)*	0	0	0	0	0	1	1
Cakupan Angkutan Darat	0,1935	0,1973	0,1987	0,2027	0,2083	0,2185	0,2185

INDIKATOR	KONDISI AWAL (2013*)	TARGET					KONDISI AKHIR (2018)
		TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	
Rasio Permukiman Layak Huni	1 : 1,48	1 : 1,47	1 : 1,46	1 : 1,45	1 : 1,44	1 : 1,43	1 : 1,43
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik	11.052	11.452	11.752	12.050	12.350	12.650	12.950
Rumah Tangga pengguna air bersih (%)	31,62	33,52	35,87	38,74	42,22	46,45	46,45
Rumah Tangga bersanitasi (%)	31,56	36,1	39,13	42,16	45,18	48,21	48,21
Persentase Partisipasi swasta (CSR) dalam pembangunan	80%	80%	85%	85%	90%	95%	95%
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	45%	50%	59%	68%	77%	86%	86%
Jumlah Acara Kebudayaan	5	7	10	10	10	10	10
Jumlah Prestasi Olahraga	11	11	12	13	14	15	16
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (sanggar)	0	3	3	4	4	4	4
Jumlah Grup Kesenian	20	24	25	27	30	32	32
Jumlah Pelaku Budaya	0	10	18	34	34	34	34
Peningkatan Nilai LAKIP	20	24	25	27	30	32	32
Peningkatan Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Golongan dan Jabatan yang sesuai	149	58	58	58	59	59	441
IKM	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Ada
Jumlah Konflik SARA	0	0	0	0	0	0	0
Cakupan Rumah Ibadah dalam kondisi baik	256	260	265	265	270	275	275
Jumlah pelaku di bidang pariwisata	25	30	35	40	45	50	55
Jumlah wisatawan	250	600	700	800	900	1000	1300

INDIKATOR	KONDISI AWAL (2013*)	TARGET					KONDISI AKHIR (2018)
		TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	
Peningkatan indeks kualitas lingkungan	58	60	62	65	67	69	72





BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi

Strategi merupakan pemikiran-pemikiran konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan posisi Kabupaten Lamandau yang diukur dari berbagai indikator.

Perumusan langkah-langkah menentukan strategi pembangunan daerah, dapat dilakukan dengan analisis SWOT. Berdasarkan analisis SWOT akan dibuat pilihan strategi dengan pertimbangan, yaitu: *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang), *threat* (ancaman).

Di dalam analisis SWOT akan terbagi dalam faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal terdiri dari: *strength* dan *weakness*. Adapun faktor eksternal terdiri dari: *opportunity* dan *threat*.

Faktor Internal:

- a. Kekuatan (*Strength*), terdiri dari:
 - Angkatan kerja besar
 - Dukungan pemerintah terhadap UMKM
 - Terdapat program peningkatan ketahanan pangan
 - Luas lahan
 - Angka kriminalitas rendah
- b. Kelemahan (*Weakness*), terdiri dari:
 - Infrastruktur jalan belum optimal
 - Prasarana dasar belum optimal
 - Tumpang tindih dan sengketa lahan



Faktor Eksternal:

a. Peluang (*Opportunity*), terdiri dari:

- Kondisi politik dan keamanan nasional stabil
- Kebijakan pembangunan nasional sejalan dengan prioritas daerah
- Kebijakan reformasi birokrasi yang diterapkan secara nasional

b. Ancaman (*Threath*), terdiri dari:

- Produk impor berpotensi mematikan usaha lokal
- Penanaman Modal Asing berpotensi menguasai sektor ekonomi strategis
- Dampak perubahan iklim bagi kehidupan masyarakat

Tabel 6.1
Analisis SWOT

FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR INTERNAL	PELUANG (OPPORTUNITY)	ANCAMAN (THREATH)
	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi politik dan keamanan nasional stabil - Kebijakan pembangunan nasional sejalan dengan prioritas daerah - Kebijakan reformasi birokrasi yang diterapkan secara nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Produk impor berpotensi mematikan usaha lokal - Penanaman Modal Asing berpotensi menguasai sektor ekonomi strategis - Dampak perubahan iklim bagi kehidupan masyarakat
KEKUATAN (STRENGTH)	Alternatif Strategi (S-O):	Alternatif Strategi (S-T):
<ul style="list-style-type: none"> - Angkatan kerja besar - Dukungan pemerintah terhadap UMKM - Terdapat program peningkatan ketahanan pangan - Luas lahan - Angka kriminalitas rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Diversifikasi Pangan - Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar dan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin - Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat - Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sektor ekonomi potensial - Peningkatan daya saing angkatan kerja - Peningkatan pemberdayaan masyarakat
KELEMAHAN (WEAKNESS)	Alternatif Strategi (W-O):	Alternatif Strategi (W-T):
<ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur jalan belum optimal - Prasarana dasar belum optimal - Tumpang tindih dan sengketa lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan serta serta kebudayaan dan olah raga - Peningkatan akses dan kualitas layanan sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Hidup

Berdasarkan pengolahan menggunakan alat analisis SWOT, diperoleh alternatif strategi yang memberikan arah yang jelas bagi pencapaian sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau 2013-2018. Alternatif strategi ini selanjutnya diselaraskan dengan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan pada Bab V. Penentuan masing-masing strategi untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan akan ditampilkan pada tabel 6.2 di bawah ini.

Tabel 6.2
Sasaran, Indikator, Strategi

NO	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI
1	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah.	Jumlah Produksi Komoditi Unggulan	Strategi 1: Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi Komoditi/Pangan
		Karet (ton/ha/tahun)	
		Kelapa Sawit (ton/ha/tahun)	
		Jengkol (ton/ha/tahun)	
		Kopi (ton/ha/tahun)	
		Gaharu (ton/ha)	
		Pisang Kepok (ton/ha/tahun)	
2	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.	Ketersediaan Pangan Utama:	Strategi 1: Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi Komoditi/Pangan
		Beras (kg/tahun)	
		Daging (kg/tahun)	
		Telur (kg/tahun)	
		Ikan (kg/tahun)	
3	Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing.	Jumlah KUKM	Strategi 2: Pengembangan Sektor Ekonomi
		Jumlah IKM	
4	Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja.	Jumlah Investor :	Strategi 2: Pengembangan Sektor Ekonomi
		- Investor Dalam Negeri	
		- Investor Luar Negeri	
		Total Investasi masuk	
5	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.	Angka partisipasi angkatan kerja	Strategi 3: Pemberdayaan Masyarakat Miskin
		Rasio Penduduk Miskin	
6	Meningkatnya mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan.	Angka Partisipasi Murni	Strategi 4: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Olah Raga
		- SD/MI	
		- SMP/MTS	
		- SMA/SMK/MA	
		Angka Partisipasi Kasar	
		- SD/MI	
		- SMP/MTS	
		- SMA/SMK/MA	



NO	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI
		Angka rata-rata lama sekolah	
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	
		Rasio Ketersediaan sekolah terhadap usia sekolah	
		- SD/MI	
		- SMP/MTS	
		- SMA/SMK/MA	
		Rasio Guru terhadap murid	
		- SD/MI	
		- SMP/MTS	
		- SMA/SMK/MA	
7	Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda.	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda	Strategi 5: Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
8	Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda atas bahaya minuman keras, narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya.	Jumlah kasus penyalahgunaan minuman keras, narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya yang ditindaklanjuti	Strategi 5: Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
9	Meningkatkan peran generasi muda dalam berbangsa dan bernegara	Cakupan Pembinaan generasi muda dalam berbangsa dan bernegara	Strategi 5: Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
10	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan.	Rasio tenaga medis (dokter, Dokter gigi dan dokter spesialis) per satuan penduduk	Strategi 4: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Olah Raga
		Rasio puskesmas, poliklinik,ustu per satuan penduduk	
		Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	
11	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan pengelolaan lingkungan sehat.	Angka Usia Harapan Hidup	Strategi 4: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Olah Raga
12	Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana.	Angka Kematian Ibu	Strategi 4: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Olah Raga
		Angka Kematian bayi	
		Rasio akseptor KB	
13	Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman, berbangsa dan bernegara.	Persentase penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Strategi 5: Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
		Kasus kriminallitas yang ditindaklanjuti	
14	Meningkatnya pembinaan kepada penyandang kesejahteraan sosial, dan penanggulangan bencana.	Jumlah Penanganan Penyandang Kesejahteraan Sosial	Strategi 5: Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	
15	Meningkatkan nilai dan jiwa kebangsaan masyarakat	Cakupan pembinaan kebangsaan terhadap masyarakat	Strategi 5: Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
16	Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (km)	Strategi 6: Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana

NO	SASARAN terintegrasi.	INDIKATOR	STRATEGI
		Jumlah Terminal Bis	
		Bandara Perintis)*	
		Cakupan Angkutan Darat	
17	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman.	Rasio Permukiman Layak Huni	Strategi 6: Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana
18	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan.	Rumah Tangga Pengguna Listrik	Strategi 6: Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana
		Rumah Tangga pengguna air bersih	
		Rumah Tangga bersanitasi	
19	Meningkatnya partisipasi swasta/pihak ketiga untuk pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur.	Partisipasi swasta (CSR) dalam pembangunan infrastruktur jalan	Strategi 6: Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana
		Presentase Partisipasi swasta (CSR) dalam pembangunan	
20	Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	Strategi 7: Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Hidup
21	Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan adat dan budaya lokal.	Jumlah Acara Kebudayaan	Strategi 4: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Olah Raga
22	Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.	Jumlah Prestasi Olahraga	Strategi 4: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Olah Raga
		Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (sanggar)	
		Jumlah Grup Kesenian	
		Jumlah Pelaku Budaya	
23	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan Nilai LAKIP	Strategi 8: Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
24	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan pemerintah daerah	Peningkatan Opini BPK	Strategi 8: Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
25	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	Golongan dan Jabatan yang sesuai	Strategi 8: Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
26	Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.	IKM	Strategi 8: Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
27	Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama.	Jumlah Konflik SARA	Strategi 9: Pemberdayaan Tokoh Agama dan Masyarakat
28	Meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan.	Cakupan Rumah Ibadah Dalam Kondisi Baik	Strategi 10: Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan
29	Meningkatnya peran masyarakat dalam bidang pariwisata	Jumlah pelaku di bidang pariwisata	Strategi 2: Pengembangan Sektor Ekonomi
30	Meningkatkan daya saing pariwisata	Jumlah wisatawan	Strategi 2: Pengembangan Sektor Ekonomi
31	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan indeks kualitas lingkungan	Strategi 7: Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Hidup

Dari tabel di atas terdapat 10 strategi untuk mencapai 31 sasaran. Berikutnya akan dipetakan strategi yang sama untuk sasaran-sasaran yang berbeda seperti tabel 6.3 berikut ini.



Tabel 6.3
Hubungan Sasaran dengan Strategi

NO	SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah.	Strategi 1: Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi Komoditi/Pangan
2	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.	
3	Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing.	
4	Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja.	Strategi 2: Pengembangan Sektor Ekonomi
29	Meningkatnya peran masyarakat dalam bidang pariwisata	
30	Meningkatkan daya saing pariwisata	
5	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.	Strategi 3: Pemberdayaan Masyarakat Miskin
6	Meningkatnya mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan.	Strategi 4: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Olah Raga
10	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan.	
11	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan pengelolaan lingkungan sehat	
12	Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana	
21	Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan adat dan budaya local	
22	Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan local	

NO	SASARAN	STRATEGI
7	Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda.	Strategi 5: Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
8	Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda atas bahaya minuman keras, narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya.	
9	Meningkatkan peran generasi muda dalam berbangsa dan bernegara	
13	Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, berbangsa dan bernegara.	
14	Meningkatnya pembinaan kepada penyandang kesejahteraan sosial, dan penanggulangan bencana.	
15	Meningkatkan nilai dan jiwa kebangsaan masyarakat	Strategi 6: Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana
16	Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi.	
17	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman.	
18	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan.	
19	Meningkatnya partisipasi swasta/pihak ketiga untuk pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur.	Strategi 7: Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Hidup
20	Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.	

NO	SASARAN	STRATEGI
31	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Strategi 8: Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
23	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	
24	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan pemerintah daerah	
25	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	
26	Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.	
27	Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama.	Strategi 9: Pemberdayaan Tokoh Agama dan Masyarakat
28	Meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan.	Strategi 10: Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Apabila beberapa sasaran pembangunan memiliki keterkaitan, maka satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai beberapa sasaran pembangunan tersebut.

Dari tabel 6.3 di atas dapat dilihat bahwa:

- Strategi 1 terdapat 2 sasaran;
- Strategi 2 terdapat 4 sasaran;
- Strategi 3 terdapat 1 sasaran;
- Strategi 4 terdapat 6 sasaran;
- Strategi 5 terdapat 6 sasaran;
- Strategi 6 terdapat 4 sasaran;
- Strategi 7 terdapat 2 sasaran;
- Strategi 8 terdapat 4 sasaran;
- Strategi 9 terdapat 1 sasaran;
- Strategi 10 terdapat 1 sasaran;

6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lamandau akan ditampilkan pada Tabel 6.4, kemudian arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lamandau tahun 2014 -2018 akan ditampilkan pada Tabel 6.5 di bawah ini.

Tabel 6.4
Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Lamandau

Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Bebas Dari KKN Yang Dilandasi Keimanan Dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa					
Misi I : Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera					
No.	Tujuan	No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam.	1	Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah.	Strategi 1: Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi Komoditi/Pangan	Meningkatkan produktifitas komoditi
		2	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.	Strategi 1: Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi Komoditi/Pangan	Meningkatkan produktifitas pangan
	Meningkatkan investasi melalui penyediaan fasilitas dan insentif serta kemitraan dengan UMKM, Koperasi dan IKM.	3	Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing.	Strategi 2: Pengembangan Sektor Ekonomi	Mengembangkan kelembagaan permodalan
		4	Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja serta lapangan usaha.	Strategi 2: Pengembangan Sektor Ekonomi	Mempermudah layanan perizinan investasi

		5	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.	Strategi 3: Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Mengembangkan tempat pelatihan kerja terhadap masyarakat yang belum bekerja
Misi II: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar generasi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan mampu mandiri					
No.	Tujuan	No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2	Mewujudkan daerah yang memiliki sumberdaya manusia handal dengan produktivitas tinggi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.	6	Meningkatnya mutu pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan.	Strategi 4: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Olah Raga	Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan
		7	Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda.	Strategi 5: Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Mengembangkan tempat pelatihan kerja untuk generasi muda
		8	Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda atas bahaya minuman keras, narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya.	Strategi 5: Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Penyebaran informasi tentang bahaya narkoba, obat-obatan terlarang
		9	Meningkatkan peran generasi muda dalam berbangsa dan bernegara	Strategi 5: Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan wawasan kebangsaan di generasi muda
Misi III: Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun					
No.	Tujuan	No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.	10	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan.	Strategi 4: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Olah Raga	Peningkatan Layanan RSUD, Puskesmas

		11	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan pengelolaan lingkungan sehat.	Strategi 4: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Olah Raga	Peningkatan wawasan masyarakat terhadap pola hidup sehat
	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang kesehatan.	12	Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana.	Strategi 4: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Olah Raga	Pengembangan Pemberdayaan Perempuan
Misi IV: Menciptakan ketentraman, keamanan, dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau					
No.	Tujuan	No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4	Mewujudkan kehidupan yang tenteram, nyaman, dan terpeliharanya keamanan serta semangat berkebangsaan.	13	Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman dalam berbangsa dan bernegara.	Strategi 5: Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan pemberdayaan pemerintah dan masyarakat untuk menjaga ketertiban, ketentraman, berbangsa dan bernegara
		14	Meningkatnya pembinaan kepada penyandang kesejahteraan sosial dan penanggulangan bencana.	Strategi 5: Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan pemberdayaan masalah kesejahteraan sosial
		15	Meningkatkan nilai dan jiwa kebangsaan masyarakat	Strategi 5: Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan nilai dan jiwa kebangsaan di masyarakat

Misi V: Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang, dan jasa					
No.	Tujuan	No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
5	Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya dan pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh.	16	Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi.	Strategi 6: Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana	Pengembangan sarana infrastuktur transportasi
		17	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman.	Strategi 6: Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana	Pengembangan sarana dan prasarana infrastuktur permukiman
		18	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan.	Strategi 6: Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana	Pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang pembangunan
		19	Meningkatnya partisipasi swasta/pihak ketiga untuk pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur.	Strategi 6: Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana	Pengembangan partisipasi swasta/pihak ketiga untuk pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur
	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan keseimbangan lingkungan dan tata ruang yang sesuai peruntukan.	20	Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.	Strategi 7: Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Hidup	Pengendalian pemanfaatan ruang

Misi VI: Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya					
No.	Tujuan	No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
6	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan budaya yang didukung oleh suasana yang kondusif dalam penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat.	21	Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan adat dan budaya lokal.	Strategi 4: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Olah Raga	Pengembangan pelestarian adat dan budaya lokal
		22	Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.	Strategi 4: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Olah Raga	Pengembangan masyarakat di bidang olahraga dan budaya lokal
Misi VII: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis serta melayani					
No.	Tujuan	No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
7	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel	23	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Strategi 8: Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pengawasan kinerja organisasi dan aparatur
		24	Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	Strategi 8: Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pengembangan sumber daya aparatur
		25	Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Strategi 8: Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pengawasan kinerja keuangan daerah
	26	Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat.	Strategi 8: Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pengembangan pelayanan publik	



Misi VIII: Menumbuh kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa					
No.	Tujuan	No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
8	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	27	Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama.	Strategi 9: Pemberdayaan Tokoh Agama dan Masyarakat	Meningkatkan komunikasi antar umat beragama
		28	Meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan.	Strategi 10: Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan	Perbaikan sarana dan prasarana peribadatan
Misi IX: Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan					
No.	Tujuan	No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
9	Meningkatkan daya saing pariwisata	29	Meningkatnya peran masyarakat dalam bidang pariwisata	Strategi 2: Pengembangan Sektor Ekonomi	Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang pariwisata
		30	Meningkatnya jumlah wisatawan	Strategi 2: Pengembangan Sektor Ekonomi	Peningkatan jumlah wisatawan
Misi IX: Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan					
10	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	31	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Strategi 7: Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Tabel 6.5

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lamandau 2014-2018

Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktifitas komoditi • Meningkatkan produktifitas pangan • Mengembangkan kelembagaan permodalan • Mempermudah layanan perizinan investasi • Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan • Peningkatan Layanan RSUD, Puskesmas • Peningkatan wawasan masyarakat terhadap pola hidup sehat • Pengembangan pemberdayaan pemerintah dan masyarakat untuk menjaga ketertiban, ketentraman, berbangsa dan bernegara • Peningkatan pemberdayaan masalah kesejahteraan sosial • Pengembangan sarana infrastruktur transportasi • Pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktifitas komoditi (lanjutan) • Meningkatkan produktifitas pangan (lanjutan) • Mengembangkan kelembagaan permodalan (lanjutan) • Mempermudah layanan perizinan investasi (lanjutan) • Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan (lanjutan) • Peningkatan Layanan RSUD, Puskesmas (lanjutan) • Peningkatan wawasan masyarakat terhadap pola hidup sehat (lanjutan) • Pengembangan pemberdayaan pemerintah dan masyarakat untuk menjaga ketertiban, ketentraman, berbangsa dan bernegara (lanjutan) • Peningkatan pemberdayaan masalah kesejahteraan sosial (lanjutan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktifitas komoditi(lanjutan) • Meningkatkan produktifitas pangan (lanjutan) • Mengembangkan tempat pelatihan kerja terhadap masyarakat yang belum bekerja • Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan (lanjutan) • Mengembangkan tempat pelatihan kerja untuk generasi muda • Penyebaran informasi tentang bahaya narkoba, obat-obatan terlarang • Pengembangan wawasan kebangsaan di generasi muda • Peningkatan Layanan RSUD, Puskesmas (lanjutan) • Peningkatan wawasan masyarakat terhadap pola hidup sehat (lanjutan) • Pengembangan Pemberdayaan Perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan tempat pelatihan kerja terhadap masyarakat yang belum bekerja (lanjutan) • Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan (lanjutan) • Mengembangkan tempat pelatihan kerja untuk generasi muda (lanjutan) • Penyebaran informasi tentang bahaya narkoba, obat-obatan terlarang (lanjutan) • Pengembangan wawasan kebangsaan di generasi muda (lanjutan) • Peningkatan Layanan RSUD, Puskesmas (lanjutan) • Peningkatan wawasan masyarakat terhadap pola hidup sehat (lanjutan) • Pengembangan Pemberdayaan Perempuan (lanjutan) • Pengembangan nilai dan jiwa kebangsaan di masyarakat (lanjutan) • Pengembangan sarana infrastruktur transportasi (lanjutan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan tempat pelatihan kerja terhadap masyarakat yang belum bekerja (lanjutan) • Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan (lanjutan) • Mengembangkan tempat pelatihan kerja untuk generasi muda (lanjutan) • Penyebaran informasi tentang bahaya narkoba, obat-obatan terlarang (lanjutan) • Pengembangan wawasan kebangsaan di generasi muda (lanjutan) • Peningkatan Layanan RSUD, Puskesmas (lanjutan) • Peningkatan wawasan masyarakat terhadap pola hidup sehat (lanjutan) • Pengembangan Pemberdayaan Perempuan (lanjutan) • Pengembangan nilai dan jiwa kebangsaan di masyarakat (lanjutan) • Pengembangan sarana infrastruktur transportasi (lanjutan)



Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pemanfaatan ruang • Pengembangan pelestarian adat dan budaya lokal • Pengawasan kinerja organisasi dan aparatur • Pengembangan sumber daya aparatur • Pengawasan kinerja keuangan daerah • Pengembangan pelayanan publik • Meningkatkan komunikasi antar umat beragama • Perbaikan sarana dan prasarana peribadatan • Peningkatan kualitas lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sarana infrastruktur transportasi (lanjutan) • Pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang pembangunan (lanjutan) • Pengendalian pemanfaatan ruang (lanjutan) • Pengembangan pelestarian adat dan budaya lokal (lanjutan) • Pengawasan kinerja organisasi dan aparatur (lanjutan) • Pengembangan sumber daya aparatur (lanjutan) • Pengawasan kinerja keuangan daerah (lanjutan) • Pengembangan pelayanan publik (lanjutan) • Meningkatkan komunikasi antar umat beragama (lanjutan) • Perbaikan sarana dan prasarana peribadatan (lanjutan) • Peningkatan kualitas lingkungan hidup (lanjutan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan nilai dan jiwa kebangsaan di masyarakat • Pengembangan sarana infrastruktur transportasi (lanjutan) • Pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman (lanjutan) • Pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang pembangunan (lanjutan) • Pengembangan partisipasi swasta/pihak ketiga untuk pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur • Pengembangan masyarakat di bidang olahraga dan budaya lokal • Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang pariwisata • Peningkatan jumlah wisatawan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman (lanjutan) • Pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang pembangunan (lanjutan) • Pengembangan partisipasi swasta/pihak ketiga untuk pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur (lanjutan) • Pengembangan masyarakat di bidang olahraga dan budaya lokal (lanjutan) • Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang pariwisata (lanjutan) • Peningkatan jumlah wisatawan (lanjutan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman (lanjutan) • Pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang pembangunan (lanjutan) • Pengembangan partisipasi swasta/pihak ketiga untuk pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur (lanjutan) • Pengembangan masyarakat di bidang olahraga dan budaya lokal (lanjutan) • Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang pariwisata (lanjutan) • Peningkatan jumlah wisatawan (lanjutan)





BAB VII

KEBIJAKAN UMUM & PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh di dalam menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan. Program-program pembangunan tersebut menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusun program-program pembangunan Kabupaten Lamandau mulai tahun 2014 sampai dengan 2018.

Setiap program pemerintahan daerah tidak dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika tidak disusun dan ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Sementara itu, RKPD disusun berpedoman kepada Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga dengan demikian program pemerintahan daerah yang disusun dalam RKPD harus konsisten dengan program, indikator kinerja outcome dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penanggung jawab yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang RPJMD. Hal ini bertujuan agar janji politik kepala daerah kepada masyarakat yang disampaikan pada saat kampanye pemilihan umum kepala daerah (berupa visi, misi dan program prioritas) dapat diwujudkan sesuai dengan harapan masyarakat.



Tabel 7.1

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi unggulan daerah	Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi Komoditi/Pangan	Meningkatkan produktifitas komoditi	2	2	2.02.01	15	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB	80	80	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
			2	2	2.02.01	16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	cakupan penghijauan dan reboisasi	50.000	100000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
			2	2	2.02.01	17	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	rasio pencegahan, pengendalian dan penindakan ilegal logging	1	2	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
			2	2	2.02.01	20	Program perencanaan dan pengembangan hutan	cakupan peran serta masyarakat dalam pembangunan hutan	10	40	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
			2	2	2.02.01	21	Program pemberdayaan Penyuluh Perkebunan Dan Kehutanan	persentase penyuluh yang dibina	80	80	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
			2	2	2.02.01	22	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	persentase peningkatan produksi hutan	3	5	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
			2	2	2.02.01	23	Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)	persentase peningkatan jumlah SDM perkebunan	2	4	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
			2	2	2.02.01	24	Program Pengembangan dan Penelitian Gaharu	produksi gaharu	80	80	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi Komoditi/Pangan	Meningkatkan produktifitas pangan	1	21	1.21.01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase binaan Kelompok Tani	80	80	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
			1	21	1.21.01	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Persentase desa berstatus swasembada pangan utama (beras)	80	80	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
			1	21	1.21.01	20	Program Pmberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan lapangan	Cakupan binaan kelompok tani	80	80	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
			1	21	1.21.01	21	Program Pengembangan Cadangan Pangan/Beras Daerah	ketersediaan pangan (beras)	80	80	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
			1	21	1.21.01	22	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	jumlah desa mandiri pangan	80	80	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
			2	1	2.01.01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	99,25	100,00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
								Padi (Ton)	24.563,88	33.573,50	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
								Jagung (Ton)	25,96	1.987,37	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
								Kedelai (Ton)	11,72	802,47	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
								Kacang Tanah (Ton)	10,68	106,03	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
								Kacang Hijau (Ton)	7,93	27,92	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
								Ubi Kayu (Ton)	119,54	6.468,17	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
								Ubi Jalar (Ton)	71,75	1.159,25	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
								Tanaman Buah (Ton)	4636,00	5.916,84	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
								Sayuran(Ton)	2834,00	3.616,98	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
			2	1	2.01.01	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) pertahun	8.660.788	10.039.112	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
			2	1	2.01.01	21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase ternak sakit yang ditangani	91,91	100,00	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
			2	5	2.01.01	21	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum	400,00	760,29	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
			2	5	2.01.01	22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	2,89	3,16	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
								Produksi daging	689,76	875,18	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
								Produksi telur	36,78	41,82	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
								Populasi Sapi Potong (Ekor)	3.145	4.014	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
								Populasi Kerbau (ekor)	-	-	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
								Populasi Kambing (Ekor)	3.544	4.970	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
								Populasi Domba (ekor)	196	251	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
								Populasi Babi (Ekor)	11.009	15.805	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
								Populasi Ayam Buras (Ekor)	69.985	93.656	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
								Populasi Ayam Ras Petelur (ekor)	-	-	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
								Populasi Ayam Ras Pedaging (Ekor)	16.199	26.088	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
								Populasi Itik (Ekor)	32.998	44.158	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
			2	5	2.01.01	20	Program Pengembangan Budi Daya Perikanan	Produksi perikanan budidaya	1212,00	1.414,58	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
			2	5	2.01.01	20		Produksi Benih	0,90	4,86	Dinas Pertanian, Pternakan dan Perikanan
			2	1	2.01.01	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan/Perkebunan	Jumlah Pemasaran Produksi Tanaman Hortikultura	1.867,50	21.451,10	Dinas Pertanian, Pternakan dan Perikanan
			2	1	2.01.01	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	213,47	270,37	Dinas Pertanian, Pternakan dan Perikanan
								Padi Sawah(Ton)	30,00	46,16	Dinas Pertanian, Pternakan dan Perikanan
								Padi Ladang(Ton)	21,26	25,14	Dinas Pertanian, Pternakan dan Perikanan
								Jagung (Ton)	25,96	30,69	Dinas Pertanian, Pternakan dan Perikanan
								Kedelai (Ton)	11,72	11,97	Dinas Pertanian, Pternakan dan Perikanan
								Kacang Tanah (Ton)	10,68	11,05	Dinas Pertanian, Pternakan dan Perikanan
								Kacang Hijau (Ton)	7,93	8,93	Dinas Pertanian, Pternakan dan Perikanan
								Ubi Kayu (Ton)	119,54	125,64	Dinas Pertanian, Pternakan dan Perikanan
								Ubi Jalar (Ton)	71,75	73,56	Dinas Pertanian, Pternakan dan Perikanan
			2	1	2.01.01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan	Kontribusi pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB	4,06	4,44	Dinas Pertanian, Pternakan dan Perikanan
			2	1	2.01.01	23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah Pemasaran Ternak pertahun	35.110	51.456	Dinas Pertanian, Pternakan dan Perikanan
			2	1	2.01.01	23			34.946	51.176	Distanakan



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
			2	1	2.01.01	23			129	215	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
			2	1	2.01.01	23			35	64	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
			2	1	2.01.01	24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah Bibit Ternak	72,03	76,45	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
			2	2	2.02.01	31	Peningkatan Ketahanan Pangan	peningkatan pemanfaatan lahan terlanjar	60	80	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
			2	2	2.02.01	32	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	pendapatan petani kebun	400-800	700-1000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan KUMKM dan IKM berbasis komoditi daerah serta berdaya saing	Pengembangan Sektor Ekonomi	Mengembangkan kelembagaan permodalan	1	15	1.15.01	15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Cakupan UKM aktif	800	1400	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
			2	6	1.15.01	15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Penurunan jumlah barang berbahaya/kadaluarsa di masyarakat	10	10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
			1	15	1.15.01	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan UMKM binaan	800	1400	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
			2	7	1.15.01	16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah IKM	800	1400	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
			1	15	1.15.01	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan jumlah UMKM yang dapat KUR	80	80	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
			2	6	1.15.01	17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Peningkatan Ekspor	18.704.930	9612301	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
			1	15	1.15.01	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif	113	150	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
			2	6	1.15.01	18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	1,95	2,9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
			2	7	1.15.01	18	Program penataan struktur industri	Usaha Mikro dan Kecil	1622	2050	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
			2	7	1.15.01	19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Tingkat pertumbuhan industri	48	91	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
			1	22	1.15.01	...	Program Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif	cakupan sumber daya produktif	80,00	80,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
			1	15	1.15.01	20	Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Koperasi	cakupan koperasi yang dibina	80,00	80,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
			1	15	1.15.01	21	Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi	cakupan pelatihan bagi SDM koperasi	80,00	80,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
			1	15	1.15.01	22	Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi UMKM	cakupan UMKM binaan	10,00	10,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
			2	06	1.15.01	19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	cakupan pedagang kaki lima dan asongan yang dibina	80,00	80,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
			2	07	1.15.01	15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Industri	cakupan iptek industri	80,00	80,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
			2	07	1.15.01	17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	cakupan teknologi industri	80,00	80,00	Disperindagkop UMKM



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
			1	22	1.21.02	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	83	83	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			1	22	1.21.02	16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah Lembaga Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	290	315	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Meningkatnya investasi yang mendorong kesempatan dan penciptaan lapangan kerja	Pengembangan Sektor Ekonomi	Memper memudahkan layanan perizinan investasi	1	16	1.20.12	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	75,00	75,00	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
			1	20	1.20.12	16	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Nilai realisasi PMDN dan PMA	91,91	96,15	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
			1	20	1.20.03	51	Program kerjasama antardaerah dan luar negeri	Cakupan Kerjasama yang terlaksana	80	95	Sekretariat Daerah
Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Mengembangkan tempat pelatihan kerja terhadap masyarakat yang belum bekerja	1	6	1.06.01	22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	rasio penduduk miskin	4,46	3,65	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	14	1.14.01	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Cakupan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	97,95	100	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	14	1.14.01	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	0,25	0,2	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Olah Raga	Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan	1	1	1.01.01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	100	100	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
			1	1	1.01.01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK pendidikan dasar sembilan tahun	113,81	114,81	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
			1	1	1.01.01	17	Program Pendidikan Menengah	APK Pend. Menengah	65	67	Disdikjar



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
			1	1	1.01.01	18	Program Pendidikan Non Formal	APK Pendidikan Non Formal	54	55	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
			1	1	1.01.01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik	43,57	90,5	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
			1	1	1.01.01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	50	60	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
			1	1	1.01.01	23	Program Pendidikan Perguruan Tinggi	APK Pendidikan Tinggi	20	20	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
			1	26	1.24.01	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	350	2510	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan generasi muda	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Mengembangkan tempat pelatihan kerja untuk generasi muda	1	18	1.18.01	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1. Jumlah Prestasi Kepemudaan	0,25	0,777777778	Dinas Pemuda dan Olahraga
								2. Jumlah Oraganisasi Kepemudaan	20	26	Dinas Pemuda dan Olahraga
								3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan	8	9	Dinas Pemuda dan Olahraga
			1	18	1.18.01	22	Program Pembinaan Pramuka	Jumlah Pembinaan Pramuka	0,081481481	0,140740741	Dinas Pemuda dan Olahraga
			1	18	1.18.01	15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.	Cakupan Kajian Kebijakan Pemuda	0	0,555555556	Dinas Pemuda dan Olahraga
			1	18	1.18.01	19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga.	Cakupan Kebijakan Bidang Olah Raga	0	0,166666667	Dinas Pemuda dan Olahraga
Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda atas bahaya minuman keras, narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Penyebaran informasi tentang bahaya narkoba, obat-obatan terlarang	1	18	1.18.01	18	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.	Persentase Kasus Narkoba	0	0	Dinas Pemuda dan Olahraga



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
Meningkatkan peran generasi muda dalam berbangsa dan bernegara	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan wawasan kebangsaan di generasi muda	1	18	1.18.01	21	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah Wirausahaan muda yang terdidik	0,3	1	Dinas Pemuda dan Olahraga
			1	19	1.19.01	21	Program pendidikan politik masyarakat	% Pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik	2	2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Olah Raga	Peningkatan Layanan RSUD, Puskesmas	1	2	1.02.01	25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio puskesmas, pustu dan poskesdes persatuan penduduk	1,94	2,11	Dinas Kesehatan
			1	2	1.02.02	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	cakupan fasilitas dan pelayanan kesehatan	tipe D	tipe C	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
			1	2	1.02.02	24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan pelayanan operasi katarak	34	60	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
			1	2	1.02.02	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata	Jumlah mobil ambulans/mobil jenazah yang diadakan	1	1	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
			1	2	1.02.02	27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata	Jumlah gedung rumah sakit yang dipelihara rutin/berkala	29	60	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
			1	2	1.02.02	28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan kandungan limbah sesuai standar	1	2	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
			1	2	1.02.02	33	Program Pelayanan Kesehatan Spesialistis	Jumlah dan jenis dokter spesialis yang disediakan	4	5	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan pengelolaan lingkungan sehat	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Olah Raga	Peningkatan wawasan masyarakat terhadap pola hidup sehat	1	2	1.02.01	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	90,00	94,00	Dinas Kesehatan
			1	2	1.02.01	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	33,60	45,00	Dinas Kesehatan



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
			1	2	1.02.01	16		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
			1	2	1.02.01	16		Cakupan rumah sehat	70,00	75,00	Dinas Kesehatan
			1	2	1.02.01	16		Usia Harapan Hidup	67,36	68,30	Dinas Kesehatan
			1	2	1.02.01	17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pemeriksaan IRT dan sarana kesehatan berizin	30,00	70,00	Dinas Kesehatan
			1	2	1.02.01	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	96,00	96,00	Dinas Kesehatan
			1	2	1.02.01	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
			1	2	1.02.01	20		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI ada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
			1	2	1.02.01	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan desa/kelurahan UCI	92,77	95,00	Dinas Kesehatan
								Presentase penemuan pasien baru TB BTA positif	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
								Cakupan kasus malaria yang ditangani	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
								Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
								Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	0,00	1,00	Dinas Kesehatan
								Penderita DBD yang ditangani	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
								Penderita diare yang ditangani	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
								Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan	100,00	100,00	Dinas Kesehatan



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
								penyelidikan epidemiologi < 24 jam			
			1	2	1.02.01	29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja	Cakupan penjangkauan kesehatan anak SD dan setingkat	31,30	60,00	Dinas Kesehatan
			1	2	1.02.01	34	Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Jumlah Dokumen profil kesehatan dan dokumen perencanaan yang dihasilkan	4,00	4,00	Dinas Kesehatan
Meningkatnya pembinaan kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Olah Raga	Pengembangan Pemberdayaan Perempuan	1	2	1.02.01	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
								Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	90,26	92,00	Dinas Kesehatan
								Cakupan pelayanan nifas	84,83	90,00	Dinas Kesehatan
								Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
								Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	84,83	95,00	Dinas Kesehatan
								Cakupan kunjungan bayi	95,63	95,80	Dinas Kesehatan
								Cakupan pelayanan anak balita	78,80	85,00	Dinas Kesehatan
								Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	0,00	<102	Dinas Kesehatan
								Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	17,70	17,00	Dinas Kesehatan



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
			1	11	1.11.01	15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	24	35	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
			1	12	1.11.01	15	Program Keluarga Berencana	Persentase Meningkatnya peserta KB baru dan KB aktif	10	15	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
			1	11	1.11.01	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	0,005	0	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
			1	12	1.11.01	17	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase Meningkatnya pelayanan KB baru dan KB aktif	5	20	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
			1	11	1.11.01	19	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Partisipasi angkatan kerja perempuan	23,27	32	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
			1	12	1.11.01	21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Persentase penyuluhan pada remaja	10	10	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
			1	20	1.20.17	31	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	pkk aktif	50%	80	Kecamatan Bulik Timur
			1	11	1.20.20	18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	pkk aktif	50%	80	Kecamatan Bulik
			1	20	1.20.23	31	Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	40	65	Kecamatan Sematu Jaya
			1	20	1.20.24	31	Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	40	65	Kecamatan Menthobi Raya
			1	22	1.21.02	19	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Persentase Jumlah PKK yang aktif	53	79	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, berbangsa dan bernegara	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan pemberdayaan pemerintah dan masyarakat untuk menjaga ketertiban, ketentraman, berbangsa dan bernegara	1	22	1.03.01	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	25,30	Dinas Pekerjaan Umum
			1	22	1.06.01	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	25,30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	22	1.07.01	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	25,30	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	22	1.08.01	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	25,30	Badan Lingkungan Hidup
			1	22	1.10.01	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	25,30	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	22	1.11.01	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	25,30	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
			1	22	1.14.01	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	25,30	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	22	1.15.01	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	25,30	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
			1	22	1.17.01	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	25,30	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
			1	22	1.18.01	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	25,30	Dinas Pemuda dan Olahraga
			1	19	1.19.01	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat	0,5	0,1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			1	19	1.19.01	19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten	—	—	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
			1	19	1.19.01	34	Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi	Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman peningkatan ketahanan ekonomi	65	85	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			1	19	1.19.01	35	Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman sosial dan budaya	65	85	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			1	19	1.19.01	36	Program Dukungan Kelancaran Pemilu	Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	—	—	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			1	22	1.19.01	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	25,30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			1	22	1.19.02	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	25,30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
			1	19	1.19.03	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	1	4	Satuan Polisi Pamong Praja
								Persentase penanganan demonstrasi/penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
								Jumlah patroli anggota Satpol PP	96	96	Satuan Polisi Pamong Praja
								Jumlah penyuluhan terhadap potensi berkembangnya penyakit masyarakat.	4	4	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	19	1.19.03	20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Jumlah pelatihan dan pembinaan terhadap anggota linmas desa/kelurahan	4	4	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	19	1.19.03	24	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Presentase penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	19	1.19.03	27	Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase penegakan perda	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
			1	22	1.19.03	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah penyuluhan terhadap pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	4	25,30	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	19	1.19.03	33	Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Lanjut Kriminal	Jumlah penyuluhan terhadap pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba	4	4	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	22	1.20.04	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	25,30	Sekretariat DPRD
			1	22	1.20.07	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah LPM yang berprestasi	3 desa	3 desa	Inspektorat
			1	20	1.20.11	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	25,30	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
			1	22	1.20.13	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	25,30	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			1	22	1.20.12	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terlaksananya BBGRM	100%	100%	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
			1	22	1.20.17	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	25,30	Kecamatan Bulik Timur
			1	22	1.20.20	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	25,30	Kecamatan Bulik
			1	22	1.20.21	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	25,30	Kecamatan Lamandau
			1	22	1.20.22	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	25,30	Kecamatan Delang
			1	22	1.20.23	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	25,30	Kecamatan Sematu Jaya
			1	22	1.20.24	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	25,30	Kecamatan Mentholi Raya
			1	22	1.20.25	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	25,30	Kecamatan Belantikan Raya
			1	22	1.20.27	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	25,30	Kecamatan Batang Kawa
			1	22	1.21.01	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	25,30	Badan PP dan KP



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
			1	22	1.21.02	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah LPM yang berprestasi	1	16	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			1	22	1.24.01	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	25,30	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			1	22	2.02.01	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	7,23	25,30	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Meningkatnya pembinaan kepada penyandang kesejahteraan sosial, dan penanggulangan bencana	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan pemberdayaan masalah kesejahteraan sosial	1	13	1.14.01	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS skala Kabupaten/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	23,07	23,27	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	13	1.14.01	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS skala Kabupaten/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	75,25	90,15	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	13	1.14.01	17	Program pembinaan anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang dibina	80,17	49,59	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	13	1.14.01	18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah penyandang cacat dan Trauma yang dilatih	22,49	17,3	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	14	1.14.01	20	Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	0	0,93	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	13	1.14.01	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah kelembagaan kesejahteraan sosial yang dibina	50,51	80,81	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	13	1.14.01	23	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang menerima bimbingan mental sosial	50	50	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	19	1.19.02	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Cakupan Pembinaan Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
			1	19	1.19.02	29	Program Pasca Bencana	Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	42%	72%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
			1	19	1.19.02	31	Program Tanggap Darurat	Tingkat waktu tanggap	2,2 jam	2,2 jam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Meningkatkan nilai dan kebangsaan jiwa masyarakat	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan nilai dan jiwa kebangsaan di masyarakat	1	19	1.19.01	23	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	70	87,5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			1	20	1.20.21	34	Program Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa	cakupan PKK aktif	80	80	Kecamatan Lamandau
			1	20	1.20.22	34	Program Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa	cakupan PKK aktif	80	80	Kecamatan Delang
			1	20	1.20.27	34	Program Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa	cakupan PKK aktif	80	80	Kecamatan Batang Kawa
			2	3	2.03.02	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa yang dibantu	12,04819277	24,09638554	Dinas Pertambangan dan Energi
Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana	Pengembangan sarana infrastruktur transportasi	1	3	1.03.01	15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	71%	0	Dinas Pekerjaan Umum
			1	3	1.03.01	15		Jembatan kabupaten dalam kondisi baik		0	Dinas Pekerjaan Umum
			1	3	1.03.01	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	84,462	100	Dinas Pekerjaan Umum
			1	3	1.03.01	30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	cakupan pembangunan infrastruktur perdesaan	100	100	Dinas Pekerjaan Umum
			1	3	1.03.01	33	Program Peningkatan Jalan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	94,46	100	Dinas Pekerjaan Umum
			1	3	1.03.01	42	Program pembangunan jalan lingkungan	persentase jalan dalam lingkungan dalam kondisi baik	80	80	Dinas Pekerjaan Umum
			1	3	1.03.01	43	Program peningkatan jalan dan pergantian jembatan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	94,46	100	Dinas Pekerjaan Umum



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
			1	7	1.07.01	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	3	4	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	7	1.07.01	15		Pelabuhan Laut	2	3	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	7	1.07.01	15		Pelabuhan Udara	0	0	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	7	1.07.01	15		Terminal Bis	1	1	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	7	1.07.01	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah prasarana dan fasilitas yang berfungsi dan kondisi baik	100%	100%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	7	1.07.01	17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	pelanggaran lalu lintas	1402	400	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	7	1.07.01	19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	cakupan rambu terpasang - persentase	11%	13%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana	Pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	1	4	1.03.01	15	Program Pengembangan Perumahan	Lingkungan pemukiman kumuh	1,53	1,17	Dinas Pekerjaan Umum
			1	5	1.03.01	20	Program Pembangunan dan Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk	1:55	100	Dinas Pekerjaan Umum
			1	5	1.03.01	21	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	1:08	1 : 5	Dinas Pekerjaan Umum
			1	5	1.03.01	22	Program Pemeliharaan Taman dan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	persentase TPU yang dibina	100	100	Dinas Pekerjaan Umum
			1	5	1.03.01	23	Program Pemeliharaan Kebersihan	persentase sampah tertangani		0	Dinas Pekerjaan Umum
			1	3	1.03.01	47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan	Rumah tangga pengguna air bersih	31,56	48,21	Dinas Pekerjaan Umum
			1	3	1.03.01	50	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	cakupan database jalan dan jembatan	90	90	Dinas Pekerjaan Umum



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
			2	8	1.14.01	21	Program Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi Baru	Persentase wilayah transmigrasi yang mencapai sasaran	2	2	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana	Pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang pembangunan	1	3	1.03.01	16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	92,742	96,849	Dinas Pekerjaan Umum
			1	3	1.03.01	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	54,58	44,55	Dinas Pekerjaan Umum
			1	3	1.03.01	25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rumah tangga pengguna air bersih	31,56	48,21	Dinas Pekerjaan Umum
			1	3	1.03.01	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk berakses air bersih	80	80	Dinas Pekerjaan Umum
			1	3	1.03.01	28	Program Pengendalian Banjir	persentase wilayah banjir tertangani	100	100	Dinas Pekerjaan Umum
			1	3	1.03.01	32	Program Pembangunan /Peningkatan Sarana Air Bersih Perdesaan			0	Dinas Pekerjaan Umum
			1	3	1.03.01	35	Program Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengairan	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	54,58	44,55	Dinas Pekerjaan Umum
			1	3	1.03.01	39	Program pembangunan infrastruktur desa tertinggal	Persentase rumah tinggal bersanitasi	31,56	48,21	Dinas Pekerjaan Umum
			1	3	1.03.01	49	Penataan Fasilitas Umum	cakupan fasilitas umum yang tertata	80	80	Dinas Pekerjaan Umum
							Program Pemeliharaan Kebersihan	Persentase sampah tertangani	80	100	
			1	8	1.08.01	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	rasio TPS per satuan penduduk	1:18	0,045833333	Badan Lingkungan Hidup
			2	3	2.03.01	17	Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	Ratio elektrifikasi	54,22	71,08	Dinas Pertambangan dan Energi
			2	3	2.03.01	18	Program Pembangunan Bidang Ketenagalistrikan	Ratio Jumlah Rumah Tangga berlistrik	11052	12950	Dinas Pertambangan dan Energi



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang	Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Hidup	Pengendalian pemanfaatan ruang	1	5	1.03.01	15	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Ruang publik yang berubah peruntukannya	20	6	Dinas Pekerjaan Umum
			1	5	1.03.01	18	Program Perencanaan Kota	persentase perencanaan kota		0	Dinas Pekerjaan Umum
			1	5	1.03.01	19	Program Pembangunan dan Penataan Taman	persentase taman yang tertata	100	100	Dinas Pekerjaan Umum
			1	6	1.06.01	24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	ketersediaan database sarana dan prasarana kecamatan	80	80	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	08	1.21.01	16	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan	cakupan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dampak kerusakan hutan	80	80	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
			2	3	2.03.01	15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	1,24	2,12	Dinas Pertambangan dan Energi
			2	3	2.03.01	16	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Menurunnya pertambangan yang tidak memiliki izin	350	100	Dinas Pertambangan dan Energi
			2	3	2.03.01	20	Pembinaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Minyak dan Gas	cakupan perusahaan minyak dan gas yang ditata	80	80	Dinas Pertambangan dan Energi
			2	3	2.03.01	19	Program Perencanaan Wilayah Geologi dan Konservasi Sumber Daya Mineral	Cakupan wilayah dan Konservasi Sumber Daya Mineral yang terencana	167343	173000	Dinas Pertambangan dan Energi
			2	3	2.03.01	21	Program Pengelolaan Air Tanah	Tersedianya data potensi dan pemanfaatan air tanah	-	550	Dinas Pertambangan dan Energi
			2	3	2.03.01	22	Program Penataan Wilayah Pertambangan	Cakupan Wilayah Pertambangan Rakyat yang legal	525	685	Dinas Pertambangan dan Energi



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan adat dan budaya lokal	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Olah Raga	Pengembangan pelestarian adat dan budaya lokal	1	17	1.20.17	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan keikutsertaan dalam festival seni dan budaya	5	10	Kecamatan Bulik Timur
			1	17	1.20.20	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Acara Kebudayaan	5	10	Kecamatan Bulik
			1	20	1.20.21	35	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Acara Kebudayaan	5	10	Kecamatan Lamandau
			1	17	1.20.22	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Acara Kebudayaan	5	10	Kecamatan Delang
			1	17	1.20.23	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Acara Kebudayaan	5	10	Kecamatan Sematu Jaya
			1	17	1.20.24	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Acara Kebudayaan	5	10	Kecamatan Mentohi Raya
			1	17	1.20.25	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Acara Kebudayaan	5	10	Kecamatan Belantikan Raya
			1	17	1.20.27	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Acara Kebudayaan	5	10	Kecamatan Batang Kawa
Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga serta revitalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Olah Raga	Pengembangan masyarakat di bidang olahraga dan budaya lokal	1	18	1.18.01	22	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	cakupan cabang olahraga yang diikuti	11	16	Dinas Pemuda dan Olahraga
								2. Jumlah Kegiatan Olahraga	30	36	Dinas Pemuda dan Olahraga
								3. Jumlah Organisasi Olahrag	18	24	Dinas Pemuda dan Olahraga
			1	18	1.18.01	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah Gedung dan Lapangan Olah Raga	9	16	Dinas Pemuda dan Olahraga
			1	20	1.20.03	50	Program Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan	cakupan referensi dan literatur pemerintah desa	blm ada	540	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.11	17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	WTP	WTP	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
								Penyampaian LKPD	100	100	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
											dan Aset Daerah (SKPD)
								Tertib administrasi BMD	100	100	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
								Rasio pemanfaatan aset	100	100	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
			1	18	1.20.17	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	cakupan cabang olahraga yang diikuti	11	16	Kecamatan Bulik Timur
			1	18	1.20.20	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	cakupan cabang olahraga yang diikuti	11	16	Kecamatan Bulik
			1	18	1.20.22	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	cakupan cabang olahraga yang diikuti	11	16	Kecamatan Delang
			1	18	1.20.23	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	cakupan cabang olahraga yang diikuti	11	16	Kecamatan Sematu Jaya
			1	18	1.20.24	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	cakupan cabang olahraga yang diikuti	11	16	Kecamatan Mentohi Raya
			1	18	1.20.25	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	cakupan cabang olahraga yang diikuti	11	16	Kecamatan Belantikan Raya
			1	18	1.20.27	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	cakupan cabang olahraga yang diikuti	11	16	Kecamatan Batang Kawa
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pengawasan kinerja organisasi dan aparatur	1	1	1.01.01	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	tepat waktu	tepat waktu	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
			1	3	1.03.01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	tepat waktu	tepat waktu	Dinas Pekerjaan Umum
			1	6	1.06.01	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	pelanggaran lalulintas	tepat waktu	tepat waktu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	18	1.18.01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	tepat waktu	tepat waktu	Dinas Pemuda dan Olahraga
			1	19	1.19.01	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	tepat waktu	tepat waktu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			1	20	1.20.03	16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah koordinasi yg dilakukan	100	100	Sekretariat Daerah



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
			1	20	1.20.03	26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	% perda yg disosialisasikan dan ditetapkan	100	100	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	40	Program Peningkatan Sarana Perekonomian	jmlh koordinasi money raskin	94	100	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	41	Program Pembangunan Dunia Usaha dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	jmlh UMKM yang memiliki basic skill	10	60	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	43	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Cakupan penerapan SOP SKPD	tidak	ada	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	44	Program Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan	jmlh dokumen perencanaan, kegiatan, dan pelaporan tepat waktu	5	25	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	46	Program Kesejahteraan Rakyat	jmlh koordinasi kesra	90	100	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	48	Pelaksanaan Tugas KDH/WKDH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar dan operasional KDH/WKDH	100	100	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	63	Program Pembinaan dan Pengembangan Birokrasi	cakupan penerapan roadmap reformasi birokrasi	blm ada	90	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.07	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	tepat waktu	tepat waktu	Inspektorat
			1	20	1.20.07	62	Program Peningkatan Profesianilisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase auditur yang memiliki sertifikasi JFA	44,44	100,00	Inspektorat
			1	20	1.20.11	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	tepat waktu	tepat waktu	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
			1	20	1.20.13	60	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	% PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	86,07	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
								% PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsi	20	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
								% PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan		100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
								fungsional			
								Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan		100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
								Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas		100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			1	20	1.20.13	61	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir	20,24	39,13	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			1	20	1.20.12	28	Program Pengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terbentuknya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	0	5	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
			1	20	1.20.21	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	tepat waktu	tepat waktu	Kecamatan Lamandau
			1	20	1.20.21	27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	cakupan desa yang sudah jelas tata batasnya	80	80	Kecamatan Lamandau
			1	20	1.20.21	32	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	cakupan desa yang memiliki APBDes	80%	80%	Kecamatan Lamandau
			1	20	1.20.23	32	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	cakupan desa yang memiliki APBDes	80%	80%	Kecamatan Sematu Jaya
			1	20	1.20.25	32	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	cakupan desa yang memiliki APBDes	80%	80%	Kecamatan Belantikan Raya
			1	20	1.20.27	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	tepat waktu	tepat waktu	Kecamatan Batang Kawa
			1	20	1.20.27	32	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	cakupan desa yang memiliki APBDes	80%	80%	Kecamatan Batang Kawa
			1	22	1.21.02	18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Sudah Pernah	244	689	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
								mendapat Pelatihan			
			1	24	1.24.01	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	tepat waktu	tepat waktu	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Meningkatnya akuntabilitas Keuangan pemerintah daerah	Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pengembangan sumber daya aparatur	1	1	1.01.01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
			1	1	1.01.01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
			1	2	1.02.01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Dinas Kesehatan
			1	2	1.02.01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Dinas Kesehatan
			1	2	1.02.02	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
			1	2	1.02.02	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
			1	2	1.02.02	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
			1	3	1.03.01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Dinas Pekerjaan Umum
			1	3	1.03.01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Dinas Pekerjaan Umum
			1	3	1.03.01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Dinas Pekerjaan Umum
			1	6	1.06.01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
			1	6	1.06.01	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	6	1.06.01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	7	1.07.01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	7	1.07.01	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	7	1.07.01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	8	1.08.01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Badan Lingkungan Hidup
			1	8	1.08.01	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Badan Lingkungan Hidup
			1	8	1.08.01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Badan Lingkungan Hidup
			1	10	1.10.01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	10	1.10.01	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	10	1.10.01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	11	1.11.01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
			1	11	1.11.01	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
			1	11	1.11.01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
			1	14	1.14.01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	14	1.14.01	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	14	1.14.01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	15	1.15.01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
			1	15	1.15.01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
			1	17	1.17.01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
			1	17	1.17.01	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
			1	17	1.17.01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
			1	18	1.18.01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
			1	18	1.18.01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Dinas Pemuda dan Olahraga
			1	18	1.18.01	4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
			1	19	1.19.01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
			1	19	1.19.01	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			1	19	1.19.01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			1	19	1.19.02	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
			1	19	1.19.02	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
			1	19	1.19.02	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
			1	19	1.19.03	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	19	1.19.03	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	19	1.19.03	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	20	1.20.03	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	persentase aparatur yang meninggal dalam masa jabatan	5	4	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	% penerapan e-government	5	30	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	38	Program Pembangunan Informasi	% meningkatnya penyebaran informasi	85	90	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	39	Program Dokumentasi Hukum Dan Peta Permasalahan Hukum	penyelesaian kasus bantuan hukum	5	5	Sekretariat Daerah



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
			1	20	1.20.03	42	Program Sosialisasi dan Pembinaan Hukum	jumlah desa sadar hukum	1	6	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.04	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Sekretariat DPRD
			1	20	1.20.04	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Sekretariat DPRD
			1	20	1.20.04	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Sekretariat DPRD
			1	20	1.20.04	15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tingkat pencapaian pengesahan Ranperda tiap tahun	0,75	0,75	Sekretariat DPRD
			1	20	1.20.07	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Inspektorat
			1	20	1.20.07	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Inspektorat
			1	20	1.20.11	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
			1	20	1.20.11	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
			1	20	1.20.11	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
			1	20	1.20.13	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			1	20	1.20.13	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			1	20	1.20.12	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
			1	20	1.20.12	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
			1	20	1.20.12	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
			1	20	1.20.12	49	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Tersedianya tingkat IKM	2,803(70,07)	80	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
			1	20	1.20.12	23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan layanan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: media massa, media baru, media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang	0	2	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
			1	20	1.20.17	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Kecamatan Bulik Timur
			1	20	1.20.17	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Kecamatan Bulik Timur
			1	20	1.20.17	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Kecamatan Bulik Timur
			1	20	1.20.20	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Kecamatan Bulik
			1	20	1.20.20	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Kecamatan Bulik
			1	20	1.20.20	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Kecamatan Bulik
			1	20	1.20.21	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Kecamatan Lamandau
			1	20	1.20.21	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Kecamatan Lamandau



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
			1	20	1.20.22	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Kecamatan Delang
			1	20	1.20.22	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Kecamatan Delang
			1	20	1.20.23	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Kecamatan Sematu Jaya
			1	20	1.20.23	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Kecamatan Sematu Jaya
			1	20	1.20.23	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Kecamatan Sematu Jaya
			1	20	1.20.24	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Kecamatan Mentohi Raya
			1	20	1.20.24	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Kecamatan Mentohi Raya
			1	20	1.20.24	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Kecamatan Mentohi Raya
			1	20	1.20.25	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Kecamatan Belantikan Raya
			1	20	1.20.25	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Kecamatan Belantikan Raya
			1	20	1.20.25	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Kecamatan Belantikan Raya
			1	20	1.20.27	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Kecamatan Batang Kawa
			1	20	1.20.27	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Kecamatan Batang Kawa
			1	20	1.20.27	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi	70	80	Kecamatan Batang Kawa



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
								sesuai bidangnya			
			1	21	1.21.01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
			1	21	1.21.01	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
			1	21	1.21.01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
			1	22	1.21.02	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			1	22	1.21.02	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			1	22	1.21.02	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			1	24	1.24.01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			1	24	1.24.01	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			1	24	1.24.01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			2	1	2.01.01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
			2	1	2.01.01	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
			2	1	2.01.01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
			2	2	2.02.01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana	100	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
								aparatur			
			2	2	2.02.01	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
			2	2	2.02.01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
			2	3	2.03.01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100	100	Dinas Pertambangan dan Energi
			2	3	2.03.01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	100	100	Dinas Pertambangan dan Energi
			2	3	2.03.01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	70	80	Dinas Pertambangan dan Energi
Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pengawasan kinerja keuangan daerah	1	1	1.01.01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
			1	2	1.02.01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Dinas Kesehatan
			1	2	1.02.02	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
			1	3	1.03.01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Dinas Pekerjaan Umum
			1	6	1.06.01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	7	1.07.01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	8	1.08.01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Badan Lingkungan Hidup
			1	10	1.10.01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
								perkantoran			
			1	11	1.11.01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
			1	14	1.14.01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	15	1.15.01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
			1	17	1.17.01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
			1	18	1.18.01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
			1	19	1.19.01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			1	19	1.19.02	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
			1	19	1.19.03	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	20	1.20.03	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	cakupan pelayanan keuangan daerah	100	100	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.03	27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	% tersedianya jumlah luas lahan bersertifikat	9,7	14	Sekretariat Daerah
			1	20	1.20.04	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Sekretariat DPRD
			1	20	1.20.07	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Inspektorat



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
			1	20	1.20.07	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	jumlah temuan yang ditindaklanjuti	33,67	63,64	Inspektorat
			1	20	1.20.11	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
			1	20	1.20.11	19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase Desa yang memiliki APBDes	90	100	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
			1	20	1.20.13	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			1	20	1.20.12	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
			1	20	1.20.17	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Kecamatan Bulik Timur
			1	20	1.20.17	27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	cakupan desa yang sudah jelas tata batasnya	80	80	Kecamatan Bulik Timur
			1	20	1.20.17	32	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	cakupan desa yang memiliki APBDes	80%	80%	Kecamatan Bulik Timur
			1	20	1.20.17	32		persentase Karang taruna aktif	70%	80	Kecamatan Bulik Timur
			1	20	1.20.20	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Kecamatan Bulik
			1	20	1.20.20	32	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	cakupan desa yang memiliki APBDes	80%	80%	Kecamatan Bulik
			1	20	1.20.21	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Kecamatan Lamandau
			1	20	1.20.22	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Kecamatan Delang
			1	20	1.20.23	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Kecamatan Sematu Jaya
			1	20	1.20.24	1	Program Pelayanan Administrasi	Cakupan pelayanan	100	100	Kecamatan Mentohi



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
							Perkantoran	administrasi perkantoran			Raya
			1	20	1.20.25	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Kecamatan Belantikan Raya
			1	20	1.20.27	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Kecamatan Batang Kawa
			1	20	1.20.27	27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	cakupan desa yang sudah jelas tata batasnya	80	80	Kecamatan Batang Kawa
			1	21	1.21.01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
			1	22	1.21.02	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			1	24	1.24.01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			2	1	2.01.01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
			2	2	2.02.01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
			2	3	2.03.01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	Dinas Pertambangan dan Energi
Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat	Penerapan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Pengembangan pelayanan publik	1	3	1.03.01	51	Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan ketersediaan dokumen kebinamargaan	100	100	Dinas Pekerjaan Umum
			1	6	1.06.01	15	Program pengembangan data/informasi	Profil daerah	ada	ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	6	1.06.01	15		PDRB	ada	ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	6	1.06.01	15		Daerah dalam angka	ada	ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	6	1.06.01	15		Profil daerah	ada	ada	Bappeda



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
			1	6	1.06.01	21	Program perencanaan pembangunan daerah	RPJPD	ada	ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
								RPJMD	ada	ada	
								RKPD	ada	ada	
			1	25	1.07.01	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan jumlah jaringan komunikasi	3	5	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	25	1.07.01	19	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi	Jumlah jaringan internet untuk umum terpasang	13%	50%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	25	1.07.01	20	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Komunikasi	jumlah fasilitas yg berfungsi dan kondisi baik	100%	100%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	25	1.07.01	21	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	cakupan sosialisasi kominfo	80	80	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	25	1.07.01	22	Program Monitoring Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah jaringan komunikasi setiap kecamatan	10%	60%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	7	1.07.01	26	Program Peningkatan Pelayanan masyarakat	cakupan sosialisasi perhubungan	80	80	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	10	1.10.01	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	78%	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								penerbitan akte kelahiran	68	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								Rasio pasangan berakte nikah	41,6	75	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								Kepemilikan KTP	78,2	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	67,9	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	24	1.24.01	15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah SKPD dan desa/kel.yang menerapkan	tidak ada	ada	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
								pengelolaan arsip baku			
			1	24	1.24.01	17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase sarana dan prasarana kearsipan yang terpelihara	tidak ada	ada	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			1	24	1.24.01	18	program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Jumlah dan jenis arsip daerah	tidak ada	ada	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			2	2	2.02.01	33	Program Penyusunan Data dan Informasi	cakupan ketersediaan dokumen kehutanan dan perkebunan	100	100	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai di kalangan umat beragama	Pemberdayaan Tokoh Agama dan Masyarakat	Meningkatkan komunikasi antar umat beragama	1	20	1.20.17	29	Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat	cakupan ajang perlombaan yang diikuti	80	80	Kecamatan Bulik Timur
			1	20	1.20.20	29	Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat	cakupan pelaksanaan kegiatan rohani	80	80	Kecamatan Bulik
			1	20	1.20.21	29	Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat	cakupan pelaksanaan kegiatan rohani	80	80	Kecamatan Lamandau
			1	20	1.20.22	29	Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat	cakupan pelaksanaan kegiatan rohani	80	80	Kecamatan Delang
			1	20	1.20.23	29	Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat	cakupan pelaksanaan kegiatan rohani	80	80	Kecamatan Sematu Jaya
			1	20	1.20.24	29	Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat	cakupan pelaksanaan kegiatan rohani	80	80	Kecamatan Menthobi Raya
			1	20	1.20.25	29	Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat	cakupan pelaksanaan kegiatan rohani	80	80	Kecamatan Belantikan Raya
			1	20	1.20.27	29	Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat	cakupan pelaksanaan kegiatan rohani	80	80	Kecamatan Batang Kawa
Meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan	Perbaikan sarana dan prasarana peribadatan	1	20	1.20.03	45	Program Bidang Keagamaan	jmlh desa yang dikunjungi dalam safari keagamaan	9	59	Sekretariat Daerah
Meningkatnya peran masyarakat dalam bidang pariwisata	Pengembangan Sektor Ekonomi	Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang pariwisata	1	16	1.01.01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
			1	16	1.02.02	15	Program Peningkatan Promosi dan	pameran budaya	ada	ada	RSUD Lamandau



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
							Kerjasama Investasi				
			1	16	1.03.01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	Dinas Pekerjaan Umum
			1	16	1.06.01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	16	1.07.01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikla
			1	16	1.08.01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	Badan Lingkungan Hidup
			1	16	1.10.01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	16	1.11.01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
			1	16	1.14.01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Cakupan Promosi Dan Kerjasama Investasi	1	1	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			1	16	1.17.01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	persentase tingkat partisipasi skpd	0	100	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
			1	17	1.17.01	18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	% masyarakat pengelola aset budaya	100	100,00	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
			1	16	1.18.01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	Dinas Pemuda dan Olahraga
			1	16	1.19.01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			1	16	1.19.02	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
			1	16	1.19.03	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	16	1.20.03	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	Sekretariat Daerah
			1	16	1.20.04	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	Sekretariat DPRD
			1	16	1.20.07	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	Inspektorat
			1	16	1.20.11	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
			1	16	1.20.13	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	BKPP



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
			1	16	1.20.17	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	Kecamatan Bulik Timur
			1	16	1.20.20	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	Kecamatan Bulik
			1	16	1.20.21	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	Kecamatan Lamandau
			1	16	1.20.22	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	Kecamatan Delang
			1	16	1.20.23	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	Kecamatan Sematu Jaya
			1	16	1.20.24	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	Kecamatan Mentohi Raya
			1	16	1.20.25	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	Kecamatan Belantikan Raya
			1	16	1.20.27	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	Kecamatan Batang Kawa
			1	16	1.21.01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
			1	16	1.21.02	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			1	16	1.24.01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			1	16	2.02.01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada	ada	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Meningkatkan daya saing pariwisata	Pengembangan Sektor Ekonomi	Peningkatan jumlah wisatawan	1	17	1.17.01	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan tempat	0	4	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
			2	4	1.17.01	15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Kunjungan wisata	63,33	100	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
			1	17	1.17.01	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	37,5	100	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
			2	4	1.17.01	16	Program pengembangan destinasi pariwisata	% obyek wisata yang layak jual	25	100	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
			1	17	1.17.01	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Acara Kebudayaan	5	10	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
					1.17.01			Jumlah Pelaku Budaya	0	34	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya



Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Kondisi Awal Kinerja 2013	Kondisi akhir kinerja 2018	SKPD Penanggung jawab
			2	4	1.17.01	17	Program pengembangan Kemitraan	% kemitraan promosi pariwisata dengan pihak luar/agency	100	100	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1	8	1.08.01	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup (jumlah perusahaan)	33	33	Badan Lingkungan Hidup
			1	8	1.08.01	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1	6	Badan Lingkungan Hidup
			1	8	1.08.01	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	peningkatan kualitas akses informasi SDA keanekaragaman hayati dan LH	4	4	Badan Lingkungan Hidup
			1	8	1.08.01	25	Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup	Cakupan sarana dan prasarana laboratorium dalam kondisi baik	80	80	Badan Lingkungan Hidup
			1	8	1.08.01	27	Program Pemantauan Hukum/Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup	penyelesaian perselisihan/sengketa lingkungan hidup	100	100	Badan Lingkungan Hidup
			1	8	1.08.01	29	Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	cakupan permukiman bersanitasi	80	80	Badan Lingkungan Hidup







BAB VIII

INDIKASI PROGRAM PRIORITAS BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas berisi seluruh program prioritas yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau yang disajikan berdasarkan bidang urusan pemerintahan. Program prioritas merupakan suatu bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan setiap tahunnya selama lima tahun. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD.

Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pagu indikatif merupakan ancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program di tiap-tiap SKPD dapat dilakukan untuk kurun waktu lima tahun masa pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, masing-masing pagu program menjadi pagu maksimal bagi SKPD dalam mendistribusikannya ke dalam kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun.



Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
U r	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	0	0	0	Wajib					322.479		332.208		341.106		353.469		364.128		1.713.390	
1	1	0	0	Pendidikan					41.765		39.676		40.739		42.215		43.553		207.948	
1	1	1.01.0 1	0	Dinas Pendidikan dan Pengajaran					41.765		39.676		40.739		42.215		43.553		207.948	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
1	1	1.01.0 1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	4.140	100	3.876	100	3.980	100	4.124	100	4.255	100	20.375	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
1	1	1.01.0 1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	773	100	513	100	527	100	546	100	564	100	2.923	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
1	1	1.01.0 1	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai		100	100	100	100	119	100	122	100	127	100	131	100		Dinas Pendidikan dan Pengajaran
1	1	1.01.0 1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	660	80	681	80	699	80	724	80	747	80	3.512	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
1	1	1.01.0 1	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	tepat waktu/tidak tepatwaktu	tepat waktu	tepat waktu	20	tepat waktu	21	tepat waktu	21	tepat waktu	22	tepat waktu	23	tepat waktu	106	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
1	1	1.01.0 1	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	persen	100	100	2.808	100	2.589	100	2.658	100	2.754	100	2.841	100	13.650	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
1	16	1.01.0 1	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	25	ada	26	ada	26	ada	27	ada	28	ada	133	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
1	1	1.01.0 1	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK pendidikan dasar sembilan tahun	persen	113,81	114,01	14.327	114,21	13.495	114,41	13.979	114,61	14.485	114,81	14.944	114,81	71.229	Dinas Pendidikan dan

RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
U r	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
																				Pengajaran
1	1	1.01.01	17	Program Pendidikan Menengah	APK Pendidikan Menengah	persen	65	65,2	9.829	65,4	9.955	65,6	10.222	65,8	10.593	67	10.928	67	51.528	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
1	1	1.01.01	18	Program Pendidikan Non Formal	APK Pendidikan Non Formal	persen	54	54,2	156	54,4	139	54,6	143	54,8	148	55	152	55	738	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
1	1	1.01.01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan memiliki sertifikat pendidik	persen	43,57	50,1	3.551	60,2	2.562	70,4	2.631	80,5	2.726	90,5	2.812	90,5	14.281	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
1	1	1.01.01	22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	persen	50	52	235	54	242	56	249	58	258	60	266	60	1.250	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
1	1	1.01.01	23	Program Pendidikan Perguruan Tinggi	APK Pendidikan Tinggi	persen	20	20	5.142	20	5.458	20	5.604	20	5.808	20	5.992	20	28.004	Dinas Pendidikan dan Pengajaran
1	2	0	0	Kesehatan				36.116		38.846		39.886		41.332		42.642		198.823		
1	2	1.02.01	0	Dinas Kesehatan				20.308		22.541		23.145		23.983		24.744		114.721		Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	3.461	100	4.621	100	4.745	100	4.917	100	5.072	100	22.815	Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	1.488	100	1.357	100	1.394	100	1.444	100	1.490	100	7.172	Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	43	80	44	80	46	80	47	80	49	80	229	Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	persen	90,00	92,00	2.351	93,00	2.016	93,00	2.070	94,00	2.145	94,00	2.213	94,00	Rp 10.796	Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	persen	33,60	35,00	1.916	37,00	1.966	40,00	2.019	42,00	2.092	45,00	2.159	45,00	Rp 10.153	Dinas Kesehatan



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
U r	Bi d a n	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	2	1.02.01	16		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	persen	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	Rp - Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	16		Cakupan rumah sehat	persen	70,00	70,00	-	72,00	-	73,00	-	74,00	-	75,00	-	75,00	-	Rp - Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	16		Usia Harapan Hidup	tahun	67,36	67,50	-	67,70	-	67,90	-	68,10	-	68,30	-	68,30	-	Rp - Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pemeriksaan IRT dan sarana kesehatan berizin	persen	30,00	35,00	54	40,00	56	50,00	57	60,00	60	70,00	61	70,00	-	Rp 289 Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	persen	96,00	96,00	146	96,00	124	96,00	128	96,00	132	96,00	136	96,00	-	Rp 666 Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	persen	100,00	100,00	164	100,00	200	100,00	205	100,00	213	100,00	219	100,00	-	Rp 1.001 Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	20		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI ada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	persen	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	Rp - Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan desa/kelurahan UCI	persen	92,77	93,00	1.696	93,00	1.749	93,00	1.796	95,00	1.861	95,00	1.920	95,00	-	Rp 9.023 Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	22		Presentase penemuan pasien baru TB BTA positif	persen	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	Rp - Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	22		Cakupan kasus malaria yang ditangani	persen	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	Rp - Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	22		Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani	persen	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	Rp - Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	22		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Angka absolut per 100.000 penduduk <15 tahun	0,00	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	Rp - Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	22		Penderita DBD yang ditangani	persen	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	Rp - Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	22		Penderita diare yang ditangani	persen	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	Rp - Dinas Kesehatan



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Ur	Bd Ur	Org	Pro g	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
									Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	2	1.02.01	22			Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	persen	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	Rp - Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	25		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya	Rasio puskesmas,ustu dan poskesdes persatuan penduduk	rasio	1,94	1,94	8.455	1,94	9.846	2,00	10.109	2,00	10.476	2,11	10.808	2,11	Rp 49.694	Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	29		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja	Cakupan penjarangan kesehatan anak SD dan setingkat	persen	31,30	35,00	166	45,00	171	50,00	176	55,00	182	60,00	188	60,00	Rp 883	Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	32		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	persen	100,00	100,00	320	100,00	338	100,00	347	100,00	359	100,00	370	100,00	Rp 1.733	Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	32			Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	persen	90,26	91,00	-	91,00	-	91,00	-	92,00	-	92,00	-	92,00	-	Rp - Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	32			Cakupan pelayanan nifas	persen	84,83	85,00	-	85,00	-	90,00	-	90,00	-	90,00	-	90,00	-	Rp - Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	32			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	persen	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	Rp - Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	32			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	84,83	90,00	-	90,00	-	90,00	-	95,00	-	95,00	-	95,00	-	Rp - Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	32			Cakupan kunjungan bayi	persen	95,63	95,70	-	95,70	-	95,70	-	95,80	-	95,80	-	95,80	-	Rp - Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	32			Cakupan pelayanan anak balita	persen	78,80	80,00	-	80,00	-	80,00	-	82,00	-	85,00	-	85,00	-	Rp - Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	32			Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	angka absolut	0,00	<102	-	<102	-	<102	-	<102	-	<102	-	<102	-	Rp - Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	32			Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	angka absolut	17,70	17,70	-	17,70	-	17,50	-	17,00	-	17,00	-	17,00	-	Rp - Dinas Kesehatan
1	2	1.02.01	34		Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Jumlah Dokumen profil kesehatan dan dokumen perencanaan yang dihasilkan	angka absolut	4,00	4,00	50	4,00	52	4,00	53	4,00	55	4,00	57	4,00	Rp 266	Dinas Kesehatan



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Ur	Bd Ur	Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
		Org	Pro g						Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	2	1.02.02	0		Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau					15.807		16.305		16.742		17.349		17.899		84.102	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
1	2	1.02.02	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	6.222	100	6.222	100	6.222	100	6.222	100	6.222	100	31.108	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
1	2	1.02.02	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	1.395	100	1.395	100	1.395	100	1.395	100	1.395	100	6.977	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
1	2	1.02.02	3		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	104	100	104	100	104	100	104	100	104	100	521	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
1	2	1.02.02	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	52	80	52	80	52	80	52	80	52	80	260	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
1	16	1.02.02	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	11	ada	11	ada	11	ada	11	ada	11	ada	55	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
1	2	1.02.02	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	cakupan fasilitas dan pelayanan kesehatan	persen	tipe D	tipe D	15	tipe D	15	tipe D	15	tipe D	15	tipe C	15	tipe C	75	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
1	2	1.02.02	24		Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Cakupan pelayanan operasi katarak	persen	34	40	30	45	30	50	30	55	30	60	30	60	150	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
1	2	1.02.02	26		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata	Jumlah mobil ambulans/mobil jenazah yang diadakan	buah	1	1	5.804		5.804	1	5.804		5.804	1	5.804	1	29.022	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
1	2	1.02.02	27		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata	Jumlah gedung rumah sakit yang dipelihara rutin/berkala	persen	29	30	144	40	144	45	144	50	144	60	144	60	722	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
1	2	1.02.02	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan kandungan limbah sesuai standar	persen	1	2	20	2	20	2	20	2	20	2	20	2	100	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
1	2	1.02.02	33		Program Pelayanan Kesehatan Spesialis	Jumlah dan jenis dokter spesialis yang disediakan	dokter	4	5	2.009	5	2.009	5	2.009	5	2.009	5	2.009	5	10.047	Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Ur	Bd Ur	Kode		Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
		Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	3	0	0	Pekerjaan Umum					107.681		104.307		107.101		110.983		114.501		544.572	
1	3	1.03.01	0	Dinas Pekerjaan Umum					107.681		104.307		107.101		110.983		114.501		544.572	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1.03.01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	2.772	100	3.134	100	3.218	100	3.335	100	3.440	100	15.900	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1.03.01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	2.498	100	2.394	100	2.458	100	2.547	100	2.628	100	12.525	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1.03.01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	68	100	65	100	66	100	69	100	71	100	338	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1.03.01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	200	80	192	80	197	80	204	80	210	80	1.003	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1.03.01	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	tepat waktu/tidak tepatwaktu	tepat waktu	tepat waktu	94	tepat waktu	90	tepat waktu	92	tepat waktu	95	tepat waktu	98	tepat waktu	469	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1.03.01	15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	persen	71%	76%	13.345		13.269		13.624		14.118		14.566	0	68.922	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1.03.01	15		Jembatan kabupaten dalam kondisi baik				-		-		-		-		-	0	-	Dinas Pekerjaan Umum
1	4	1.03.01	15	Program Pengembangan Perumahan	Lingkungan pemukiman kumuh	persen	1,53	1,43	1.831	1,37	1.755	1,21	1.802	1,19	1.867	1,17	1.926	1,17	9.181	Dinas Pekerjaan Umum
1	5	1.03.01	15	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Ruang publik yang berubah peruntukannya	persen	20	15	260	13	249	10	256	8	265	6	273	6	1.302	Dinas Pekerjaan Umum
1	16	1.03.01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	20	ada	19	ada	20	ada	20	ada	21	ada	100	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1.03.01	16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat		92,742	93,745	1.229	93,945	1.178	93,989	1.209	95,843	1.253	96,849	1.293	96,849	6.162	Dinas Pekerjaan Umum
1	22	1.03.01	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa terprogram BBGRM	persen	7,23	10,84	20	14,46	19	18,07	20	21,69	20	25,30	21	25,30	100	Dinas Pekerjaan Umum



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Ur	Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	3	1.03.0 1	18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	84,462	86,55	922	90,587	884	94,625	907	98,66	940	100	970	100	4.624	Dinas Pekerjaan Umum
1	5	1.03.0 1	18	Program Perencanaan Kota	persentase perencanaan kota	persen			512		491		504		522		539	0	2.567	Dinas Pekerjaan Umum
1	5	1.03.0 1	19	Program Pembangunan dan Penataan Taman	persentase taman yang tertata	persen	100	100	2.140	100	2.051	100	2.106	100	2.182	100	2.251	100	10.730	Dinas Pekerjaan Umum
1	5	1.03.0 1	20	Program Pembangunan dan Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk	persen	1:55	1 : 50	300	1 : 45	288	1 : 43	295	1 : 40	306	1 : 35	316	100	1.504	Dinas Pekerjaan Umum
1	5	1.03.0 1	21	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	rasio	1:08	1 : 7	2.829	1 : 6,5	2.711	1 : 6	2.784	1 : 5,5	2.885	1 : 5	2.976	1 : 5	14.185	Dinas Pekerjaan Umum
1	5	1.03.0 1	22	Program Pemeliharaan Taman dan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	persentase TPU yang dibina	persen	100	100	1.931	100	1.730	100	1.776	100	1.841	100	1.899	100	9.177	Dinas Pekerjaan Umum
1	5	1.03.0 1	23	Program Pemeliharaan Kebersihan	persentase sampah tertangani	persen			3.054		2.720		2.792		2.894		2.985	0	14.445	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1.03.0 1	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	54,58	38,17	3.642	25,72	2.344	30,87	2.406	37,07	2.493	44,55	2.573	44,55	13.458	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1.03.0 1	25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rumah tangga pengguna air bersih	persen	31,56	36,1	402	39,13	385	42,16	395	45,18	409	48,21	422	48,21	2.013	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1.03.0 1	26	Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau & Sumber Daya Air Lainnya	cakupan pengembangan, pengelolaan dan konservasi terhadap sumber daya air	persen			-	80	1.147	85	1.178	90	1.221	95	1.260	95	4.806	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1.03.0 1	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pesentase penduduk berakses air bersih	persen	80	80	2.589	80	2.481	80	2.547	80	2.640	80	2.723	80	12.980	Dinas Pekerjaan Umum



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
Ur	Id Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	3	1.03.0 1	28	Program Pengendalian Banjir	persentase wilayah banjir tertangani	persen	100	100	2.251	100	2.157	100	2.215	100	2.295	100	2.368	100	11.285	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1.03.0 1	30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	cakupan pembangunan infrastruktur perdesaan	persen	100	100	2.288	100	2.192	100	2.251	100	2.333	100	2.407	100	11.470	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1.03.0 1	32	Program Pembangunan /Peningkatan Sarana Air Bersih Perdesaan	cakupan sarana air bersih di perdesaan yang dikelola	persen			1.377		1.320		1.355		1.404		1.449	0	6.905	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1.03.0 1	33	Program Peningkatan Jalan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	persen	94,46	86,55	39.336	90,587	38.178	94,625	39.200	98,168	40.621	100	41.909	100	199.244	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1.03.0 1	35	Program Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengairan	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	54,58	38,17	284	25,72	272	30,87	280	37,07	290	44,55	299	44,55	1.425	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1.03.0 1	39	Program pembangunan infrastruktur desa	Persentase rumah tinggal bersanitasi	persen	31,56	36,1	859	39,13	823	42,16	845	45,18	875	48,21	903	48,21	4.305	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1.03.0 1	42	Program pembangunan jalan lingkungan	persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	persen	80	80	2.502	80	2.397	80	2.462	80	2.551	80	2.632	80	12.543	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1.03.0 1	43	Program peningkatan jalan dan pergantian jembatan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	persen	94,46	86,55	10.755	90,587	10.307	94,625	10.584	98,168	10.967	100	11.315	100	53.928	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1.03.0 1	47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan	Rumah tangga pengguna air bersih	persen	31,56	36,1	2.021	39,13	1.937	42,16	1.989	45,18	2.061	48,21	2.127	48,21	10.136	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1.03.0 1	49	Penataan Fasilitas Umum	cakupan fasilitas umum yang tertata	persen	80	80	4.614	80	3.170	80	3.255	80	3.373	80	3.480	80	17.891	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1.03.0 1	50	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	cakupan database jalan dan jembatan	persen	90	90	258	90	247	90	253	90	263	90	271	90	1.291	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1.03.0 1	52	Program Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih	cakupan pembangunan sarana dan prasarana air bersih	persen				80	1.252	85	1.285	90	1.332	95	1.374	95	5.243	Dinas Pekerjaan Umum



Ur	Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	3	1.03.0 1	51	Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan ketersediaan dokumen kebinamargaan	persen	100	100	482	100	461	100	474	100	491	100	507	100	2.414	Dinas Pekerjaan Umum
1	6	0	0	Perencanaan Pembangunan					5.185		5.377		5.521		5.721		5.902		27.705	
1	6	1.06.0 1	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					5.185		5.377		5.521		5.721		5.902		27.705	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	6	1.06.0 1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	912	100	945	100	971	100	1.006	100	1.038	100	4.871	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	6	1.06.0 1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	1.395	100	1.447	100	1.486	100	1.539	100	1.588	100	7.456	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	6	1.06.0 1	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	52	100	54	100	56	100	58	100	60	100	280	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	6	1.06.0 1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	50	80	52	80	53	80	55	80	57	80	267	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	6	1.06.0 1	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	pelanggaran lalulintas	tepat waktu/tidak tepatwaktu	tepat waktu	tepat waktu	47	tepat waktu	48	tepat waktu	50	tepat waktu	51	tepat waktu	53	tepat waktu	249	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	6	1.06.0 1	15	Program pengembangan data/informasi	Profil daerah		ada		605	ada	627	ada	644	ada	668	ada	689	ada	3.233	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	6	1.06.0 1	15		PDRB	ada/tidak	ada	ada	-	ada	-	ada	-	ada	-	ada	-	ada	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	6	1.06.0 1	15		Daerah dalam angka	ada/tidak	ada	ada	-	ada	-	ada	-	ada	-	ada	-	ada	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
U r	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	6	1.06.0 1	15		Profil daerah	ada/tidak	ada	ada	-	ada	-	ada	-	ada	-	ada	-	ada	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	16	1.06.0 1	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	21	ada	22	ada	22	ada	23	ada	24	ada	112	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	6	1.06.0 1	21	Program perencanaan pembangunan daerah	RPJPD	ada/tidak	ada	ada	1.250	ada	1.296	ada	1.330	ada	1.379	ada	1.422	ada	6.677	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					RPJMD	ada/tidak	ada	ada	-	ada	-	ada	-	ada	-	ada	-	ada	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					RKPD	ada/tidak	ada	ada	-	ada	-	ada	-	ada	-	ada	-	ada	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	6	1.06.0 1	22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	rasio penduduk miskin	persen	4,46	4,18	400	4,04	415	3,91	426	3,78	441	3,65	455	3,65	2.137	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	6	1.06.0 1	24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	ketersediaan database sarana dan prasarana kecamatan	persen	80	80	408	80	423	80	434	80	450	80	464	80	2.179	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	22	1.06.0 1	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	persen	7,23	10,84	46	14,46	47	18,07	49	21,69	50	25,30	52	25,30	244	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	7	0	0	Perhubungan					6.224		6.413		6.585		6.824		7.040		33.087	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	7	1.07.0 1	0	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika					6.224		6.413		6.585		6.824		7.040		33.087	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
U r	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	7	1.07.0 1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	1.480	100	1.504	100	1.544	100	1.600	100	1.651	100	7.779	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	7	1.07.0 1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	871	100	660	100	677	100	702	100	724	100	3.634	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	7	1.07.0 1	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	128	100	132	100	136	100	141	100	145	100	682	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	7	1.07.0 1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	150	80	155	80	159	80	165	80	170	80	798	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	7	1.07.0 1	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	buah	3	3	-	2	1.175	2	1.206	3	1.250	4	1.289	4	4.920	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	7	1.07.0 1	15		Pelabuhan Laut	dermaga	2	2	-	2	-	2	-	3	-	3	-	3	-	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	7	1.07.0 1	15		Pelabuhan Udara	bandara	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	7	1.07.0 1	15		Terminal Bis	terminal	1	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	16	1.07.0 1	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	20	ada	21	ada	21	ada	22	ada	23	ada	106	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika



Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
U r	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	25	1.07.01	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan jumlah jaringan komunikasi	unit/provider	3	3	6	3	6	4	6	4	7	5	7	5	32	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	7	1.07.01	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah prasarana dan fasilitas yang berfungsi dan kondisi baik	Persen	100%	100%	195	100%	449	100%	461	100%	477	100%	493	100%	2.074	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	7	1.07.01	17	Program peningkatan pelayanan angkutan	pelanggaran lalu lintas	kasus	1402	1200	653	1000	684	800	702	600	728	400	751	400	3.518	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	22	1.07.01	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa terprogram BBGRM	persen	7,23	10,84	20	14,46	21	18,07	21	21,69	22	25,30	23	25,30	106	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	7	1.07.01	19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	cakupan rambu terpasang - persentase	persen	11%	11%	763	11%	787	13%	808	13%	837	13%	863	13%	4.057	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	7	1.07.01	18	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Cakupan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	persen	30%	30%	1.126	30%	1.161	32%	1.192	33%	1.235	34%	1.274	35%	5.987	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	25	1.07.01	19	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi	Jumlah jaringan internet untuk umum terpasang	Persen	13%	25%	547	25%	567	38%	582	38%	603	50%	622	50%	2.920	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	25	1.07.01	20	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Komunikasi	jumlah fasilitas yg berfungsi dan kondisi baik	Persen	100%	100%	40	100%	41	100%	42	100%	44	100%	45	100%	213	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	25	1.07.01	21	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	cakupan sosialisasi kominfo	Persen	80	80	80	80	64	80	66	80	68	80	71	80	349	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
Ur	Bid Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	25	1.07.01	22	Program Monitoring Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah jaringan komunikasi setiap kecamatan	Persen	10%	12%	20	18%	21	24%	21	36%	22	60%	23	60%	106	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	7	1.07.01	26	Program Peningkatan Pelayanan masyarakat	cakupan sosialisasi perhubungan	Persen	80	80	125	80	129	80	132	80	137	80	142	80	665	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	8	0	0	Lingkungan Hidup					4.110		4.250		4.364		4.522		4.120		21.911	
1	8	1.08.01	0	Badan Lingkungan Hidup					4.110		4.250		4.364		4.522		4.665		21.911	Badan Lingkungan Hidup
1	8	1.08.01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	914	100	949	100	974	100	1.010	100	1.042	100	4.888	Badan Lingkungan Hidup
1	8	1.08.01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	110	100	130	100	134	100	139	100	143	100	656	Badan Lingkungan Hidup
1	8	1.08.01	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	40	100	41	100	42	100	44	100	45	100	213	Badan Lingkungan Hidup
1	8	1.08.01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	40	80	52	80	53	80	55	80	57	80	256	Badan Lingkungan Hidup
1	8	1.08.01	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	rasio TPS per satuan penduduk	rasio	1:18	1:08	62	1:07	63	1:06	65	1:07	67	1:06	70	0,0458	327	Badan Lingkungan Hidup
1	16	1.08.01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	20	ada	29	ada	29	ada	30	ada	31	ada	140	Badan Lingkungan Hidup
1	8	1.08.01	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup (jumlah perusahaan)	perusahaan	33	33	407	33	425	33	437	33	453	33	467	33	2.189	Badan Lingkungan Hidup
1	8	1.08.01	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	kecamatan	1	2	47	2	48	4	50	5	52	6	53	6	250	Badan Lingkungan Hidup



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Ur	Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	22	1.08.0 1	17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa terprogram BBGRM	persen	7,23	10,84	19	14,46	22	18,07	22	21,69	23	25,30	24	25,30	110	Badan Lingkungan Hidup
1	8	1.08.0 1	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	peningkatan kualitas akses informasi SDA keanekaragaman hayati dan LH	Kecamatan	4	4	55	4	57	4	58	4	60	4	62	4	293	Badan Lingkungan Hidup
1	8	1.08.0 1	25	Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup	Cakupan sarana dan prasarana laboratorium dalam kondisi baik	persen	80	80	30	80	2.242	80	2.302	80	2.386	80	2.461	80	9.421	Badan Lingkungan Hidup
1	8	1.08.0 1	27	Program Pemantauan Hukum/Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup	penyelesaian perselisihan/sengketa lingkungan hidup	persen	100	100	122	100	126	100	129	100	134	100	138	100	649	Badan Lingkungan Hidup
1	8	1.08.0 1	29	Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	cakupan permukiman bersanitasi	persen	80	80	64	80	66	80	67	80	70	80	72	80	339	Badan Lingkungan Hidup
1	8	1.08.0 1	30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	cakupan pengadaan sarana dan prasarana pengendali pencemaran	persen	80	80	1.030	80	1.065	80	1.094	80	1.134	80	1.170	80	5.493	Badan Lingkungan Hidup
1	8	1.08.0 1	31	Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	cakupan sarana dan prasaran pendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	persen	80	80	1.151	80	1.190	80	1.222	80	1.266	80	1.306	80	6.135	Badan Lingkungan Hidup
1	10	0	0	Kependudukan dan Catatan Sipil					3.469		3.578		3.674		3.807		3.928		18.455	
1	10	1.10.0 1	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					3.469		3.578		3.674		3.807		3.928		18.455	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	10	1.10.0 1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	978	100	1.008	100	1.035	100	1.073	100	1.107	100	5.201	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Ur	Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	10	1.10.0 1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	248	100	256	100	262	100	272	100	281	100	1.318	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	10	1.10.0 1	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	11	100	12	100	12	100	12	100	13	100	60	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	10	1.10.0 1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	60	80	62	80	64	80	66	80	68	80	319	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	10	1.10.0 1	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	persen	78%	85,56	2.132	88,92	2.199	91,28	2.258	95,64	2.340	100	2.414	100	11.344	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	10	1.10.0 1	15		penerbitan akte kelahiran	lembar	68	74,32	-	80,74	-	87,16	-	93,58	-	100	-	100	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	10	1.10.0 1	15		Rasio pasangan berakte nikah	rasio	41,6	50,6	-	55,6	-	65	-	70	-	75	-	75	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	10	1.10.0 1	15		Kepemilikan KTP	persen	78,2	85,56	-	88,92	-	91,28	-	95,64	-	100	-	100	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	10	1.10.0 1	15		Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	persen	67,9	74,32	-	80,74	-	87,16	-	93,58	-	100	-	100	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	10	1.10.0 1	15		Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/tidak	ada	ada	-	ada	-	ada	-	ada	-	ada	-	ada	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
Ur	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	10	1.10.0 1	15		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/belum	sudah	sudah	-	sudah	-	sudah	-	sudah	-	sudah	-	sudah	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	16	1.10.0 1	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	21	ada	22	ada	22	ada	23	ada	24	ada	112	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	22	1.10.0 1	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	persen	7,23	10,84	19	14,46	20	18,07	20	21,69	21	25,30	22	25,30	101	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	11	0	0	Pemberdayaan Perempuan					2.781		2.868		2.945		3.052		3.149		14.795	
1	11	1.11.0 1	0	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB					2.781		2.868		2.945		3.052		3.149		14.795	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
1	11	1.11.0 1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	938	100	967	100	993	100	1.029	100	1.062	100	4.989	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
1	11	1.11.0 1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	1.407	100	1.452	100	1.491	100	1.545	100	1.594	100	7.488	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
1	11	1.11.0 1	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	19	100	19	100	20	100	21	100	21	100	100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
1	11	1.11.0 1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	15	80	15	80	16	80	16	80	17	80	80	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB



Ur	Bd Ur	Kode		Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
		Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	11	1.11.0 1	15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	24	26	46	28	47	31	49	33	50	35	52	35	244	Badan Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
1	12	1.11.0 1	15	Program Keluarga Berencana	Persentase Meningkatnya peserta KB baru dan KB aktif	Persen	10	11	141	12	145	13	149	14	154	15	159	15	748	Badan Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
1	16	1.11.0 1	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	25	ada	26	ada	26	ada	27	ada	28	ada	133	Badan Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
1	11	1.11.0 1	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	rasio	0,005	0	30	0	31	0	32	0	33	0	34	0	161	Badan Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
1	12	1.11.0 1	17	Program pelayanan kontrasepsi	Persentase Meningkatnya pelayanan KB baru dan KB aktif	Persen	5	8	65	11	67	14	68	17	71	20	73	20	344	Badan Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
1	11	1.11.0 1	19	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	23,27	24	46	26	47	28	48	30	50	32	52	32	243	Badan Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
1	12	1.11.0 1	21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Persentase penyuluhan pada remaja	persen	10	10	30	10	31	10	32	10	33	10	34	10	160	Badan Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
1	22	1.11.0 1	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	persen	7,23	10,84	20	14,46	21	18,07	21	21,69	22	25,30	23	25,30	106	Badan Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
1	14	0	0	Tenaga Kerja					3.713		3.971		4.077		4.225		4.359		20.344	



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Ur	Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	14	1.14.0 1	0	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi					3.713		3.971		4.077		4.225		4.359		20.344	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	14	1.14.0 1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	1.125	100	1.194	100	1.226	100	1.271	100	1.311	100	6.127	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	14	1.14.0 1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	304	100	300	100	308	100	320	100	330	100	1.562	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	14	1.14.0 1	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	44	100	45	100	47	100	48	100	50	100	234	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	14	1.14.0 1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	45	80	26	80	26	80	27	80	28	80	153	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	13	1.14.0 1	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS skala Kabupaten/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persentase	23,07	45,21	382	38,43	403	34,57	414	26,93	429	23,27	443	23,27	2.072	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	16	1.14.0 1	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Cakupan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Jumlah kegiatan pameran	1	1	20	1	21	1	21	1	22	1	23	1	106	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	13	1.14.0 1	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS skala Kabupaten/Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase	75,25	78,3	390	80,25	425	85,5	436	87,5	452	90,15	467	90,15	2.170	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	14	1.14.0 1	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Cakupan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase	97,95	98,65	200	99,3	237	99,4	244	99,5	252	99,7	260	100	1.194	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	13	1.14.0 1	17	Program pembinaan anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang dibina	Persentase	80,17	49,59	30	49,59	31	49,59	32	49,59	33	49,59	34	49,59	159	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Ur	Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	14	1.14.0 1	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persentase	0,25	0,35	276	0,35	320	0,25	328	0,2	340	0,2	351	0,2	1.616	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	13	1.14.0 1	18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah penyandang cacat dan Trauma yang dilatih	Persentase	22,49	17,3	31	17,3	35	17,3	36	17,3	37	17,3	38	17,3	178	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	14	1.14.0 1	20	Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persentase	0	0,92	137	0,92	146	0,93	150	0,93	155	0,93	160	0,93	748	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	13	1.14.0 1	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah kelembagaan kesejahteraan sosial yang dibina	Persentase	50,51	60,61	38	65,66	39	70,71	40	75,76	42	80,81	43	80,81	202	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	8	1.14.0 1	21	Program Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi Baru	Persentase wilayah transmigrasi yang mencapai sasaran	Jumlah	2	2	676	2	732	2	752	2	779	2	804	2	3.743	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	13	1.14.0 1	23	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang menerima bimbingan mental sosial	Jumlah	50	50	1	50	1	50	2	50	2	50	2	50	8	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	22	1.14.0 1	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	persen	7,23	10,84	14	14,46	14	18,07	14	21,69	15	25,30	15	25,30	72	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1	15	0	0	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					9.245		9.536		9.791		10.146		10.468		49.185	
1	15	1.15.0 1	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah					9.245		9.536		9.791		10.146		10.468		49.185	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1	15	1.15.0 1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	1.064	100	1.097	100	1.127	100	1.168	100	1.205	100	5.660	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah



Ur	Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	15	1.15.0 1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	1.101	100	1.135	100	1.166	100	1.208	100	1.246	100	5.856	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1	15	1.15.0 1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	70	80	72	80	74	80	77	80	79	80	372	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1	15	1.15.0 1	15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Cakupan UKM aktif	UKM	800	900	225	1000	232	1100	238	1200	247	1400	255	1400	1.197	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	6	1.15.0 1	15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Penurunan jumlah barang berbahaya/kadaluarsa di masyarakat	persen	10	10	120	10	124	10	127	10	132	10	136	10	638	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1	15	1.15.0 1	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan UMKM binaan	UMKM	800	900	65	1000	67	1100	69	1200	71	1400	74	1400	346	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	7	1.15.0 1	16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah IKM	IKM	800	900	605	1000	624	1100	641	1200	664	1400	685	1400	3.219	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah



Ur	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
	Bi d Ur	Org	Pro g						Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	15	1.15.0 1	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan jumlah UMKM yang dapat KUR	persen	80	80	50	80	52	80	53	80	55	80	57	80	266	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	6	1.15.0 1	17		Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Peningkatan Ekspor	ribu rupiah	18.704.930	15.151	50	13.635	464	11.045	477	10.201	494	9.612	510	1E+07	2.394	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1	15	1.15.0 1	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif	koperasi	113	120	868	135	895	140	919	145	952	150	983	150	4.617	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	6	1.15.0 1	18		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	persen	1,95	2,36	4.517	2,86	3.897	2,88	4.001	2,89	4.146	2,9	4.278	2,9	20.839	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	7	1.15.0 1	18		Program penataan struktur industri	Usaha Mikro dan Kecil	UMKM	1622	1692	25	1792	26	2000	26	2030	27	2050	28	2050	133	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	7	1.15.0 1	19		Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Tingkat pertumbuhan industri	persern	48	57	60	64	62	73	64	82	66	91	68	91	319	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah



Ur	Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	22	1.15.0 1	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	persen	7,23	10,84	25	14,46	26	18,07	26	21,69	27	25,30	28	25,30	133	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1	22	1.15.0 1	...	Program Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif	cakupan sumber daya produktif	persen	80,00	80,00	-	80,00	95	80,00	98	80,00	101	80,00	105	80,00	399	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1	15	1.15.0 1	20	Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi Koperasi	cakupan koperasi yang dibina	persen	80,00	80,00	-	80,00	191	80,00	196	80,00	203	80,00	209	80,00	#REF!	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1	15	1.15.0 1	21	Program Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi	cakupan pelatihan bagi SDM koperasi	persen	80,00	80,00	-	80,00	124	80,00	127	80,00	132	80,00	136	80,00	519	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1	15	1.15.0 1	22	Program Pengembangan Produk dan Pemasaran Bagi UMKM	cakupan UMKM binaan	persen	800,00	900,00	-	1000,00	67	1100,00	69	1200,00	71	1400,00	73	1400,00	280	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	06	1.15.0 1	19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	cakupan pedagang kaki lima dan asongan yang dibina	persen	80,00	80,00	-	80,00	191	80,00	196	80,00	203	80,00	209	80,00	799	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Ur	Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
2	07	1.15.0 1	15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Industri	cakupan iptek industri	persen	80,00	80,00	-	80,00	38	80,00	39	80,00	41	80,00	42	80,00	160	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
2	07	1.15.0 1	17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	cakupan teknologi industri	persen	80,00	80,00	-	80,00	57	80,00	59	80,00	61	80,00	63	80,00	240	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
1	17	0	0	Kebudayaan				6.279		14.054		14.430		14.953		15.427		65.144		
1	17	1.17.0 1	0	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya				6.279		14.054		14.430		14.953		15.427		65.144		Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
1	17	1.17.0 1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	1.100	100	2.409	100	2.474	100	2.564	100	2.645	100	11.192	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
1	17	1.17.0 1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	198	100	443	100	455	100	472	100	487	100	2.054	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
1	17	1.17.0 1	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	22	100	48	100	50	100	51	100	53	100	224	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
1	17	1.17.0 1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	78	80	174	80	178	80	185	80	191	80	805	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
1	16	1.17.0 1	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	persentase tingkat partisipasi skpd	persen	0	100	25	100	56	100	57	100	60	100	61	100	259	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
1	17	1.17.0 1	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan tempat	unit	0	2	534	3	1.195	3	1.227	4	1.272	4	1.312	4	5.541	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
2	4	1.17.0 1	15	Program pengembangan	Kunjungan wisata	persen	63,33	93,33	490	80	1.097	85	1.126	97,5	1.167	100	1.204	100	5.084	Dinas Pariwisata,



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Ur	Id	Org	Pro	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
									Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
					pemasaran pariwisata																Seni dan Budaya
1	17	1.17.01	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	persen	37,5	50	2.082	62,5	4.660	75	4.785	87,5	4.959	100	5.116	100	21.602	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
2	4	1.17.01	16		Program pengembangan destinasi pariwisata	% obyek wisata yang layak jual	persen	25	50	160	75	358	100	368	100	381	100	393	100	1.660	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
1	17	1.17.01	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Acara Kebudayaan	kali	5	7	1.040	10	2.328	10	2.390	10	2.477	10	2.555	10	10.791	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
		1.17.01				Jumlah Pelaku Budaya	orang	0	10	-	18	-	34	-	34	-	34	-	34	-	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
2	4	1.17.01	17		Program pengembangan Kemitraan	% kemitraan promosi pariwisata dengan pihak luar/agency	persen	100	100	420	100	940	100	965	100	1.000	100	1.032	100	4.358	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
1	17	1.17.01	18		Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	% masyarakat pengelola aset budaya	persen	100	100	100	80	278	83,33	285	93,33	295	100,00	305	100,00	1.263	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
1	22	1.17.01	30		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	persen	7,23	10,84	30	14,46	67	18,07	69	21,69	71	25,30	74	25,30	311	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
1	18	0	0		Pemuda dan Olah Raga					4.684		4.806		4.934		5.113		5.275		24.812	
1	18	1.18.01	0		Dinas Pemuda dan Olahraga					4.684		4.806		4.934		5.113		5.275		24.812	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	18	1.18.01	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	1.025	100	849	100	871	100	903	100	932	100	4.580	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	18	1.18.01	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	1.037	100	925	100	950	100	984	100	1.016	100	4.912	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	18	1.18.01	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	66	80	68	80	69	80	72	80	74	80	349	Dinas Pemuda dan Olahraga



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Ur	Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	16	1.18.0 1	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	19	ada	20	ada	20	ada	21	ada	22	ada	102	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	18	1.18.0 1	16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1. Jumlah Prestasi Kepemudaan	Persen	0,25	0,375	940	0,4444	922	0,5556	946	0,6667	981	0,7778	1.012	0,7778	4.801	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	18	1.18.0 1	17		2. Jumlah Oraganisasi Kepemudaan	jumlah	20	22	-	23	-	24	-	25	-	26	-	26	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	18	1.18.0 1	20		3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan	jumlah	8	8	-	9	-	9	-	9	-	9	-	9	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	18	1.18.0 1	21	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah Wirausahaan muda yang terdidik	Persen	0,3	0,4	80	0,4	83	0,5	85	0,7	88	1	91	1	426	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	18	1.18.0 1	22	Program Pembinaan dan Pemasaryakatan Olah Raga	cakupan cabang olahraga yang diikuti	cabang	11	12	598	13	616	14	633	15	656	16	677	16	3.180	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	20	1.18.0 1	30		2. Jumlah Kegiatan Olahraga	Jumlah	30	32	-	33	-	34	-	35	-	36	-	36	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
		1.18.0 1			3. Jumlah Organisasi Olahrag	Jumlah	18	19	-	20	-	22	-	23	-	24	-	24	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	18	1.18.0 1	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah Gedung dan Lapangan Olah Raga	buah	9	12	600	13	619	14	635	15	659	16	679	16	3.192	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	18	1.18.0 1	22	Program Pembinaan Pramuka	Jumlah Pembinaan Pramuka	Pesen	0,081481481	0,0963	300	0,1111	309	0,1259	318	0,1333	329	0,1407	340	0,1407	1.596	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	22	1.18.0 1	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	persen	7,23	10,84	20	14,46	20	18,07	21	21,69	22	25,30	22	25,30	105	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	18	1.18.0 1	4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	-	100	62	100	64	100	66	100	69	100	262	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	18	1.18.0 1	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	persen	tepat waktu	tepat waktu	-	tepat waktu	67	tepat waktu	69	tepat waktu	72	tepat waktu	74	tepat waktu	282	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	18	1.18.0 1	15	Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda.	Cakupan Kajian Kebijakan Pemuda	persen	0	0,125	-	0,2222	72	0,3333	74	0,4444	77	0,5556	79	0,5556	302	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	18	1.18.0 1	18	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.	Persentase Kasus Narkoba	persen	0	0	-	0	82	0	84	0	87	0	90	0	342	Dinas Pemuda dan Olahraga



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Ur	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
	Bi d Ur	Org	Pro g						Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	18	1.18.0 1	19		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga.	Cakupan Kebijakan Bidang Olah Raga	Persen	0	0,0625	-	0,0909	91	0,1176	94	0,1429	97	0,1667	100	0,1667	382	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	19	0	0		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				9.308		9.653		9.911		10.270		10.596		49.738		
1	19	1.19.0 1	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				3.502		3.664		3.762		3.898		4.022		18.847		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	1.19.0 1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	798	100	860	100	883	100	915	100	944	100	4.399	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	1.19.0 1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	332	100	343	100	352	100	365	100	376	100	1.768	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	1.19.0 1	3		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	40	100	41	100	42	100	43	100	45	100	211	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	1.19.0 1	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	122	80	126	80	129	80	134	80	138	80	650	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	1.19.0 1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	tepat waktu/tidak tepatwaktu	tepat waktu	tepat waktu	14	tepat waktu	14	tepat waktu	15	tepat waktu	15	tepat waktu	16	tepat waktu	75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	16	1.19.0 1	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	19	ada	21	ada	22	ada	22	ada	23	ada	108	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	1.19.0 1	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat	persen	0,5	0,4	321	0,3	331	0,2	339	0,1	352	0,1	363	0,1	1.705	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	1.19.0 1	19		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten	org	-	-	63	-	65	-	67	-	69	-	72	-	336	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Ur	Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	19	1.19.0 1	21	Program pendidikan politik masyarakat	% Pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik	keg	2	2	188	2	194	2	199	2	206	2	213	2	1.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	1.19.0 1	23	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	persen	70	80	798	82	837	83	860	85	891	87,5	919	87,5	4.305	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	1.19.0 1	34	Program Peningkaan Ketahanan Ekonomi	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman peningkatan ketahanan ekonomi	persen	65	70	126	75	129	80	133	85	138	85	142	85	668	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	1.19.0 1	35	Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman sosial dan budaya	persen	65	70	276	75	284	80	292	85	303	85	312	85	1.467	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	1.19.0 1	36	Program Dukungan Kelancaran Pemilu	Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	persen	–	80	385	–	397	–	408	–	423	–	436	–	2.048	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	22	1.19.0 1	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	persen	7,23	10,84	20	14,46	21	18,07	21	21,69	22	25,30	23	25,30	107	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	1.19.0 2	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)				2.347		2.421		2.486		2.576		2.658		12.488	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah (BPBD)	
1	19	1.19.0 2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	1.128	100	1.164	100	1.195	100	1.238	100	1.277	100	6.003	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah (BPBD)
1	19	1.19.0 2	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	679	100	700	100	719	100	745	100	768	100	3.611	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah (BPBD)
1	19	1.19.0 2	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	69	100	71	100	73	100	76	100	78	100	366	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah (BPBD)
1	19	1.19.0 2	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	110	80	113	80	117	80	121	80	125	80	585	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah (BPBD)



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Ur	Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	16	1.19.0 2	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	20	ada	21	ada	21	ada	22	ada	23	ada	106	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah (BPBD)
1	19	1.19.0 2	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Cakupan Pembinaan Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase	100%	100%	112	100%	115	100%	118	100%	122	100%	126	100%	594	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah (BPBD)
1	19	1.19.0 2	29	Program Pasca Bencana	Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase	42%	48%	85	54%	88	60%	90	66%	93	72%	96	72%	452	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah (BPBD)
1	22	1.19.0 2	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	persen	7,23	10,84	32	14,46	33	18,07	34	21,69	35	25,30	36	25,30	170	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah (BPBD)
1	19	1.19.0 2	31	Program Tanggap Darurat	Tingkat waktu tanggap	Waktu	2,2 jam	2,2 jam	113	2,2 jam	116	2,2 jam	120	2,2 jam	124	2,2 jam	128	2,2 jam	601	Badan Penanggulangan an Bencana Daerah (BPBD)
1	19	1.19.0 3	0	Satuan Polisi Pamong Praja					3.459		3.568		3.663		3.796		3.916		18.403	Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	1.19.0 3	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	1.819	100	1.877	100	1.927	100	1.997	100	2.060	100	9.679	Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	1.19.0 3	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	503	100	519	100	533	100	552	100	570	100	2.677	Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	1.19.0 3	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	12	100	12	100	13	100	13	100	14	100	64	Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	1.19.0 3	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	117	80	121	80	124	80	129	80	133	80	624	Satuan Polisi Pamong Praja
1	16	1.19.0 3	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	25	ada	26	ada	26	ada	27	ada	28	ada	133	Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	1.19.0 3	15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	Persen	1	1	837	4	864	4	887	4	919	4	948	4	4.454	Satuan Polisi Pamong Praja



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Ur	Bd Ur	Kode		Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
		Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
		1.19.0 3			Persentase penanganan demonstrasi/penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah	Persen	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.19.0 3			Jumlah patroli anggota Satpol PP	Kali	96	96	-	96	-	96	-	96	-	96	-	96	-	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.19.0 3			Jumlah penyuluhan terhadap potensi berkembangnya penyakit masyarakat.	kali	4	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	1.19.0 3	20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Jumlah pelatihan dan pembinaan terhadap anggota linmas desa/kelurahan	Kali	4	4	24	4	25	4	25	4	26	4	27	4	128	Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	1.19.0 3	24	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Presentase penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	1	1	60	1	62	1	64	1	66	1	68	1	319	Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	1.19.0 3	27	Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase penegakan perda	persen	100	100	12	100	12	100	13	100	13	100	14	100	64	Satuan Polisi Pamong Praja
1	22	1.19.0 3	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah penyuluhan terhadap pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Kali	4	4	25	14,46	26	18,07	26	21,69	27	25,30	28	25,30	133	Satuan Polisi Pamong Praja
1	19	1.19.0 3	33	Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Lanjut Kriminal	Jumlah penyuluhan terhadap pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba	Kali	4	4	24	4	25	4	25	4	26	4	27	4	128	Satuan Polisi Pamong Praja
1	20	0	0	Pemerintahan Umum					75.335		77.701		79.782		82.674		85.294		400.785	
1	20	1.20.0 3	0	Sekretariat Daerah					36.508		37.657		38.666		40.067		41.337		194.236	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.0 3	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	11.043	100	11.014	100	11.309	100	11.719	100	12.091	100	57.177	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.0 3	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	8.509	100	8.777	100	9.012	100	9.339	100	9.635	100	45.273	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.0 3	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	161	100	166	100	171	100	177	100	183	100	858	Sekretariat Daerah



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

U r	Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	20	1.20.0 3	4	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	persentase aparatur yang meninggal dalam masa jabatan	persen	5	4	30	4	31	4	32	4	33	4	34	4	160	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.0 3	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	1.270	80	1.310	80	1.345	80	1.394	80	1.438	80	6.757	Sekretariat Daerah
1	16	1.20.0 3	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	70	ada	72	ada	74	ada	77	ada	79	ada	372	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.0 3	16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah koordinasi yg dilakukan	persen	100	20	1.869	20	1.928	20	1.979	20	2.051	20	2.116	100	9.943	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.0 3	17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	cakupan pelayanan keuangan daerah	bln	100	20	420	20	434	20	445	20	461	20	476	100	2.236	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.0 3	23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	% penerapan e-government	persen	5	6	684	10	705	15	724	25	750	30	774	30	3.636	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.0 3	26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	% perda yg disosialisasikan dan ditetapkan	persen	100	20	640	20	660	20	678	20	702	20	725	100	3.405	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.0 3	27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	% tersedianya jumlah luas lahan bersertifikat	persen	9,7	9,8	357	11	368	12,5	378	13	392	14	404	14	1.899	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.0 3	38	Program Pembangunan Informasi	% meningkatnya penyebaran informasi	bln	85	20	4.309	20	4.445	20	4.564	15	4.729	15	4.879	90	22.927	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.0 3	39	Program Dokumentasi Hukum Dan Peta Permasalahan Hukum	penyelesaian kasus bantuan hukum	persen	5	5	335	5	346	5	355	5	368	5	379	5	1.782	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.0 3	40	Program Peningkatan Sarana Perekonomian	jmlh koordinasi monev raskin	persen	94	20	1.000	20	1.031	20	1.059	20	1.098	20	1.132	100	5.320	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.0 3	41	Program Pembangunan Dunia Usaha dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	jmlh UMKM yang memiliki basic skill	org	10	10	85	10	88	10	90	10	93	10	96	60	452	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.0 3	42	Program Sosialisasi dan Pembinaan Hukum	jumlah desa sadar hukum	desa	1	1	405	1	418	1	429	1	444	1	459	6	2.155	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.0 3	43	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Cakupan penerapan SOP SKPD	ada/tidak	tidak	tidak	1.187	ada	1.224	ada	1.257	ada	1.303	ada	1.344	ada	6.315	Sekretariat Daerah



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Ur	Bd Ur	Org	Pro g	Kode	Urusan/Bidang Ururan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
									Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	20	1.20.0 3	44		Program Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan	jmlh dokumen perencanaan, kegiatan, dan pelaporan tepat waktu	dokumen	5	5	446	5	460	5	472	5	489	5	505	25	2.371	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.0 3	45		Program Bidang Keagamaan	jmlh desa yang dikunjungi dalam safari keagamaan	desa	9	10	667	10	688	10	707	10	732	10	756	59	3.550	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.0 3	46		Program Kesejahteraan Rakyat	jmlh koordinasi kesra	persen	90	20	675	20	696	20	715	20	741	20	764	100	3.591	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.0 3	48		Pelaksanaan Tugas KDH/WKDH	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar dan operasional KDH/WKDH	bln	100	20	1.936	20	1.997	20	2.050	20	2.125	20	2.192	100	10.299	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.0 3	50		Program Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan	cakupan referensi dan literatur pemerintah desa	buku	blm ada	90	90	90	93	90	95	90	99	90	102	540	479	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.0 3	63		Program Pembinaan dan Pengembangan Birokrasi	cakupan penerapan roadmap reformasi birokrasi	persen	blm ada	90	319	90	330	90	338	90	351	90	362	90	1.700	Sekretariat Daerah
1	20	1.20.0 3	64		Program kerjasama antardaerah dan luar negeri	cakupan Kerjasama yang tercipta				-		377		387		401		413			Sekretariat Daerah
1	20	1.20.0 4	0		Sekretariat DPRD					12.060		12.466		12.800		13.264		13.684		64.274	Sekretariat DPRD
1	20	1.20.0 4	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	5.601	100	5.870	100	6.028	100	6.246	100	6.444	100	30.190	Sekretariat DPRD
1	20	1.20.0 4	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	2.756	100	2.744	100	2.817	100	2.919	100	3.012	100	14.248	Sekretariat DPRD
1	20	1.20.0 4	3		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	422	100	441	100	453	100	470	100	484	100	2.270	Sekretariat DPRD
1	20	1.20.0 4	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	311	80	321	80	329	80	341	80	352	80	1.654	Sekretariat DPRD
1	16	1.20.0 4	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	20	ada	21	ada	21	ada	22	ada	23	ada	106	Sekretariat DPRD
1	20	1.20.0 4	15		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tingkat pencapaian pengesahan Ranperda tiap tahun	persen	0,75	0,75	2.901	0,75	3.018	0,75	3.099	0,75	3.211	0,75	3.313	0,75	15.541	Sekretariat DPRD
1	22	1.20.0 4	30		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun	Persentase desa terprogram BBGRM	persen	7,23	10,84	50	14,46	52	18,07	53	21,69	55	25,30	57	25,30	266	Sekretariat DPRD



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Ur	Bd Ur	Kode		Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
		Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
				Desa																
1	20	1.20.0 7	0	Inspektorat					2.986		3.113		3.196		3.312		3.417		16.023	Inspektorat
1	20	1.20.0 7	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	1.153	100	1.222	100	1.254	100	1.300	100	1.341	100	6.270	Inspektorat
1	20	1.20.0 7	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	673	100	695	100	713	100	739	100	762	100	3.583	Inspektorat
1	20	1.20.0 7	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	24	100	25	100	26	100	27	100	28	100	129	Inspektorat
1	20	1.20.0 7	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	tepat waktu/tidak tepatwaktu	tepat waktu	tepat waktu	25	tepat waktu	26	tepat waktu	26	tepat waktu	27	tepat waktu	28	tepat waktu	133	Inspektorat
1	16	1.20.0 7	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	28	ada	29	ada	30	ada	31	ada	32	ada	151	Inspektorat
1	20	1.20.0 7	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	jumlah temuan yang ditindaklanjuti	persen	33,67	40,00	886	45,71	914	50,00	939	53,85	973	63,64	1.004	63,64	4.715	Inspektorat
1	22	1.20.0 7	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah LPM yang berprestasi	desa	3 desa	3 desa	36	3 desa	37	3 desa	38	3 desa	39	3 desa	41	3 desa	190	Inspektorat
1	20	1.20.0 7	62	Program Peningkatan Profesianilisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase auditor yang memiliki sertifikasi JFA	Orang	44,44	55,56	160	66,67	165	77,78	170	88,89	176	100,00	181	100,00	852	Inspektorat
1	20	1.20.1 1	0	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)					6.425		6.627		6.805		7.052		7.275		34.184	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1	20	1.20.1 1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	1.484	100	1.531	100	1.572	100	1.629	100	1.681	100	7.897	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)



Ur	Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	20	1.20.1 1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	1.150	100	1.186	100	1.217	100	1.262	100	1.302	100	6.116	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1	20	1.20.1 1	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	45	100	46	100	48	100	49	100	51	100	240	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1	20	1.20.1 1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	100	80	103	80	106	80	110	80	113	80	532	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1	20	1.20.1 1	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	tepat waktu/tidak tepatwaktu	tepat waktu	tepat waktu	949	tepat waktu	979	tepat waktu	1.005	tepat waktu	1.041	tepat waktu	1.074	tepat waktu	5.049	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1	16	1.20.1 1	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	20	ada	21	ada	21	ada	22	ada	23	ada	106	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1	20	1.20.1 1	17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah	Nilai audit	WTP	WTP	2.557	WTP	2.638	WTP	2.709	WTP	2.807	WTP	2.896	WTP	13.606	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1	20	1.20.1 1	17		Penyampaian LKPD	Persen	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Ur	Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	20	1.20.1 1	17		Tertib administrasi BMD	Persen	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1	20	1.20.1 1	17		Rasio pemanfaatan aset	Persen	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1	20	1.20.1 1	19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase Desa yang memiliki APBDes		90	100	100	100	103	100	106	100	110	100	113	100	532	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1	20	1.20.1 1	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	persen	7,23	10,84	20	14,46	21	18,07	21	21,69	22	25,30	23	25,30	106	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)
1	20	1.20.1 3	0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan					5.407		5.576		5.726		5.933		6.121		28.763	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1	20	1.20.1 3	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	1.199	100	1.233	100	1.266	100	1.312	100	1.353	100	6.363	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1	20	1.20.1 3	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	862	100	900	100	924	100	957	100	988	100	4.631	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1	20	1.20.1 3	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	159	100	164	100	168	100	175	100	180	100	846	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan



Ur	Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
	Bi d Ur	Org	Pro g						Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	16	1.20.1 3	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	20	ada	21	ada	21	ada	22	ada	23	ada	106	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1	22	1.20.1 3	30		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	persen	7,23	10,84	15	14,46	15	18,07	16	21,69	16	25,30	17	25,30	78	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1	20	1.20.1 3	60		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	% PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persentase	86,07	95,9	1.793	100	1.842	100	1.891	100	1.960	100	2.022	100	9.507	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1	20	1.20.1 3	60			% PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsi	Persentase	20	40	-	56,67	-	70	-	86,67	-	100	-	100	-	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1	20	1.20.1 3	60			% PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional	Persentase	-	-	-	20	-	40	-	66,67	-	100	-	100	-	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1	20	1.20.1 3	60			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Persentase	-	-	-	57,14	-	71,43	-	92,86	-	100	-	100	-	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1	20	1.20.1 3	60			Cakupan pelayanan pindah pegawai dan purna tugas	Persentase	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1	20	1.20.1 3	61		Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah aparatur yang memperoleh pembinaan dan pengembangan karir	Persentase	20,24	24,07	1.360	28,22	1.402	32,7	1.440	34,33	1.492	39,13	1.539	39,13	7.232	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1	20	1.20.1 2	0		Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal				1.529		1.577		1.620		1.678		1.732		8.137		Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
1	20	1.20.1 2	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	738	100	603	100	619	100	642	100	662	100	3.263	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal



Ur	Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	20	1.20.1 2	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	420	100	433	100	445	100	461	100	475	100	2.233	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
1	20	1.20.1 2	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	16	100	16	100	17	100	17	100	18	100	83	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
1	20	1.20.1 2	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	15	80	15	80	16	80	16	80	17	80	80	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
1	16	1.20.1 2	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	persen	75,00	75,00	271	75,00	279	75,00	287	75,00	297	75,00	307	75,00	1.442	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
1	20	1.20.1 2	16	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Nilai realisasi PMDN dan PMA	persen	91,91	94,27	-	94,80	32	94,99	32	95,45	34	96,15	35	96,15	132	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
1	22	1.20.1 2	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terlaksananya BBGRM	persen	100%	100%	20	100%	21	100%	21	100%	22	100%	23	100%	106	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
1	20	1.20.1 2	49	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Tersedianya tingkat IKM	Persen	2,803(70,07)	72	50	73	52	76	53	78	55	80	57	80	269	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal



Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
Ur	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	20	1.20.1 2	23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan layanan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui: media massa, media baru, media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang	kali	0	0	-	2	47	2	49	2	50	2	52	2	198	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
1	20	1.20.1 2	28	Program Pengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terbentuknya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	orang	0	2	-	2	79	3	81	4	84	5	87	5	330	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
1	20	1.20.1 7	0	Kecamatan Bulik Timur					1.080		1.118		1.148		1.190		1.228		5.765	Kecamatan Bulik Timur
1	20	1.20.1 7	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	441	100	459	100	471	100	489	100	504	100	2.364	Kecamatan Bulik Timur
1	20	1.20.1 7	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	412	100	425	100	436	100	452	100	467	100	2.193	Kecamatan Bulik Timur
1	20	1.20.1 7	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	11	100	11	100	11	100	12	100	12	100	56	Kecamatan Bulik Timur
1	20	1.20.1 7	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	25	80	26	80	26	80	27	80	28	80	133	Kecamatan Bulik Timur
1	16	1.20.1 7	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	13	ada	13	ada	14	ada	14	ada	15	ada	69	Kecamatan Bulik Timur
1	17	1.20.1 7	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan keikutsertaan dalam festival seni dan budaya		5	7	19	10	19	10	20	10	20	10	21	10	99	Kecamatan Bulik Timur
1	18	1.20.1 7	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	cakupan cabang olahraga yang diikuti	cabang	11	12	20	13	21	14	21	15	22	16	23	16	107	Kecamatan Bulik Timur
1	20	1.20.1 7	27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	cakupan desa yang sudah jelas tata batasnya	persen	80	80	11	80	12	80	12	80	12	80	13	80	60	Kecamatan Bulik Timur
1	20	1.20.1 7	29	Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat	cakupan ajang perlombaan yang diikuti	persen	80	80	43	80	44	80	45	80	47	80	48	80	227	Kecamatan Bulik Timur



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

U r	Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	22	1.20.1 7	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	persen	7,23	10,84	70	14,46	72	18,07	74	21,69	77	25,30	79	25,30	373	Kecamatan Bulik Timur
1	20	1.20.1 7	31	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	pkk aktif	persen	50%	67%	8	70	8	80	8	80	9	80	9	80	43	Kecamatan Bulik Timur
1	20	1.20.1 7	32	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	cakupan desa yang memiliki APBDes	persen	80%	80%	8	80%	8	80%	8	80%	8	80%	9	80%	41	Kecamatan Bulik Timur
1	20	1.20.1 7	32		persentase Karang taruna aktif		70%	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	Kecamatan Bulik Timur
1	20	1.20.2 0	0	Kecamatan Bulik					2.022		2.085		2.141		2.219		2.289		10.757	Kecamatan Bulik
1	20	1.20.2 0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	670	100	690	100	709	100	734	100	758	100	3.561	Kecamatan Bulik
1	20	1.20.2 0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	1.012	100	1.044	100	1.072	100	1.111	100	1.146	100	5.386	Kecamatan Bulik
1	20	1.20.2 0	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	33	100	34	100	35	100	36	100	37	100	175	Kecamatan Bulik
1	20	1.20.2 0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	25	80	26	80	26	80	27	80	28	80	133	Kecamatan Bulik
1	16	1.20.2 0	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	20	ada	21	ada	21	ada	22	ada	23	ada	106	Kecamatan Bulik
1	17	1.20.2 0	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Acara Kebudayaan		5	7	30	10	31	10	32	10	33	10	34	10	160	Kecamatan Bulik
1	11	1.20.2 0	18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	pkk aktif	persen	50%	67%	29	70	30	80	31	80	32	80	33	80	156	Kecamatan Bulik
1	18	1.20.2 0	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	cakupan cabang olahraga yang diikuti	cabang	11	12	30	13	31	14	32	15	33	16	34	16	160	Kecamatan Bulik
1	20	1.20.2 0	29	Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan	cakupan pelaksanaan kegiatan rohani	persen	80	80	80	80	83	80	85	80	88	80	91	80	426	Kecamatan Bulik



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Ur	Bd Ur	Org	Pro g	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
									Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
					Masyarakat																
1	22	1.20.2 0	30		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	persen	7,23	10,84	85	14,46	87	18,07	90	21,69	93	25,30	96	25,30	450	Kecamatan Bulik
1	20	1.20.2 0	32		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	cakupan desa yang memiliki APBDes	persen	80%	80%	9	80%	9	80%	9	80%	9	80%	10	80%	45	Kecamatan Bulik
1	20	1.20.2 1	0		Kecamatan Lamandau				1.373		1.322		1.358		1.407		1.452		6.912		Kecamatan Lamandau
1	20	1.20.2 1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	744	100	760	100	780	100	808	100	834	100	3.927	Kecamatan Lamandau
1	20	1.20.2 1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	350	100	221	100	226	100	235	100	242	100	1.274	Kecamatan Lamandau
1	20	1.20.2 1	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	30	80	31	80	32	80	33	80	34	80	160	Kecamatan Lamandau
1	20	1.20.2 1	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	tepat waktu/tidak tepatwaktu	tepat waktu	tepat waktu	16	tepat waktu	47	tepat waktu	49	tepat waktu	50	tepat waktu	52	tepat waktu	215	Kecamatan Lamandau
1	16	1.20.2 1	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	10	ada	11	ada	11	ada	11	ada	12	ada	55	Kecamatan Lamandau
1	20	1.20.2 1	27		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	cakupan desa yang sudah jelas tata batasnya	persen	80	80	1	80	8	80	8	80	9	80	9	80	36	Kecamatan Lamandau
1	20	1.20.2 1	29		Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat	cakupan pelaksanaan kegiatan rohani	persen	80	80	115	80	121	80	124	80	129	80	133	80	623	Kecamatan Lamandau
1	22	1.20.2 1	30		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	persen	7,23	10,84	57	14,46	70	18,07	72	21,69	75	25,30	77	25,30	352	Kecamatan Lamandau
1	20	1.20.2 1	32		Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	cakupan desa yang memiliki APBDes	persen	80%	80%	11	80%	14	80%	14	80%	15	80%	15	80%	70	Kecamatan Lamandau



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
U r	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
				Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan																
1	20	1.20.2 1	34	Program Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa	cakupan PKK aktif	persen	80	80	7	80	8	80	8	80	8	80	8	80	39	Kecamatan Lamandau
1	20	1.20.2 1	35	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Acara Kebudayaan		5	7	30	10	31	10	32	10	33	10	35	10	162	Kecamatan Lamandau
1	20	1.20.2 2	0	Kecamatan Delang					1.569		1.619		1.662		1.722		1.777		8.348	Kecamatan Delang
1	20	1.20.2 2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	512	100	531	100	545	100	565	100	582	100	2.734	Kecamatan Delang
1	20	1.20.2 2	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	826	100	849	100	872	100	903	100	932	100	4.382	Kecamatan Delang
1	20	1.20.2 2	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	20	80	21	80	21	80	22	80	23	80	106	Kecamatan Delang
1	16	1.20.2 2	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	12	ada	12	ada	13	ada	13	ada	14	ada	64	Kecamatan Delang
1	17	1.20.2 2	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Acara Kebudayaan		5	7	25	10	26	10	26	10	27	10	28	10	133	Kecamatan Delang
1	18	1.20.2 2	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	cakupan cabang olahraga yang diikuti	cabang	11	12	38	13	39	14	40	15	41	16	42	16	200	Kecamatan Delang
1	20	1.20.2 2	29	Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat	cakupan pelaksanaan kegiatan rohani	persen	80	80	61	80	62	80	64	80	66	80	69	80	322	Kecamatan Delang
1	22	1.20.2 2	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	persen	7,23	10,84	62	14,46	63	18,07	65	21,69	68	25,30	70	25,30	327	Kecamatan Delang
1	20	1.20.2 2	34	Program Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa	cakupan PKK aktif	persen	80	80	15	80	15	80	16	80	16	80	17	80	80	Kecamatan Delang
1	20	1.20.2 3	0	Kecamatan Sematu Jaya					921		950		976		1.011		1.043		4.901	Kecamatan Sematu Jaya
1	20	1.20.2 3	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	358	100	368	100	378	100	392	100	404	100	1.901	Kecamatan Sematu Jaya



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Ur	Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	20	1.20.2 3	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	340	100	351	100	360	100	373	100	385	100	1.810	Kecamatan Sematu Jaya
1	20	1.20.2 3	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	13	100	13	100	14	100	14	100	15	100	69	Kecamatan Sematu Jaya
1	20	1.20.2 3	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	19	80	21	80	21	80	22	80	23	80	106	Kecamatan Sematu Jaya
1	16	1.20.2 3	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	15	ada	15	ada	16	ada	16	ada	17	ada	80	Kecamatan Sematu Jaya
1	17	1.20.2 3	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Acara Kebudayaan		5	7	17	10	18	10	18	10	19	10	19	10	90	Kecamatan Sematu Jaya
1	18	1.20.2 3	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	cakupan cabang olahraga yang diikuti	cabang	11	12	26	13	26	14	27	15	28	16	29	16	136	Kecamatan Sematu Jaya
1	20	1.20.2 3	29	Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat	cakupan pelaksanaan kegiatan rohani	persen	80	80	38	80	39	80	40	80	42	80	43	80	203	Kecamatan Sematu Jaya
1	22	1.20.2 3	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	persen	7,23	10,84	70	14,46	72	18,07	74	21,69	77	25,30	79	25,30	372	Kecamatan Sematu Jaya
1	20	1.20.2 3	31	Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		40	45	15	50	15	55	16	60	16	65	17	65	80	Kecamatan Sematu Jaya
1	20	1.20.2 3	32	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	cakupan desa yang memiliki APBDes	persen	80%	80%	10	80%	10	80%	11	80%	11	80%	11	80%	53	Kecamatan Sematu Jaya
1	20	1.20.2 4	0	Kecamatan Mentohi Raya					1.072		1.132		1.162		1.204		1.242		5.811	Kecamatan Mentohi Raya
1	20	1.20.2 4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	479	100	494	100	507	100	525	100	542	100	2.547	Kecamatan Mentohi Raya
1	20	1.20.2 4	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	393	100	406	100	417	100	432	100	445	100	2.093	Kecamatan Mentohi Raya



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Ur	Bd Ur	Kode		Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
		Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	20	1.20.2 4	3	Program peningkatan disiplin aparat	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	15	100	16	100	16	100	17	100	17	100	81	Kecamatan Mentohi Raya
1	20	1.20.2 4	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparat yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	25	80	26	80	26	80	27	80	28	80	133	Kecamatan Mentohi Raya
1	16	1.20.2 4	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	15	ada	16	ada	16	ada	17	ada	17	ada	82	Kecamatan Mentohi Raya
1	17	1.20.2 4	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Acara Kebudayaan		5	7	25	10	26	10	26	10	27	10	28	10	133	Kecamatan Mentohi Raya
1	18	1.20.2 4	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	cakupan cabang olahraga yang diikuti	cabang	11	12	19	13	19	14	20	15	20	16	21	16	99	Kecamatan Mentohi Raya
1	20	1.20.2 4	29	Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat	cakupan pelaksanaan kegiatan rohani	persen	80	80	21	80	47	80	49	80	50	80	52	80	220	Kecamatan Mentohi Raya
1	22	1.20.2 4	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	persen	7,23	10,84	69	14,46	71	18,07	73	21,69	76	25,30	78	25,30	367	Kecamatan Mentohi Raya
1	20	1.20.2 4	31	Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		40	45	11	50	11	55	11	60	12	65	12	65	56	Kecamatan Mentohi Raya
1	20	1.20.2 5	0	Kecamatan Belantikan Raya					1.212		1.250		1.284		1.331		1.373		6.450	Kecamatan Belantikan Raya
1	20	1.20.2 5	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	509	100	522	100	536	100	555	100	573	100	2.695	Kecamatan Belantikan Raya
1	20	1.20.2 5	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparat	persen	100	100	382	100	394	100	405	100	420	100	433	100	2.034	Kecamatan Belantikan Raya
1	20	1.20.2 5	3	Program peningkatan disiplin aparat	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	8	100	8	100	8	100	8	100	8	100	40	Kecamatan Belantikan Raya
1	20	1.20.2 5	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparat yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	40	80	41	80	42	80	44	80	45	80	213	Kecamatan Belantikan Raya



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Ur	Id	Org	Pro	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
									Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	16	1.20.2 5	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	20	ada	21	ada	21	ada	22	ada	23	ada	106	Kecamatan Belantikan Raya
1	17	1.20.2 5	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Acara Kebudayaan		5	7	27	10	28	10	29	10	30	10	31	10	144	Kecamatan Belantikan Raya
1	18	1.20.2 5	20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	cakupan cabang olahraga yang diikuti	cabang	11	12	29	13	30	14	31	15	32	16	33	16	156	Kecamatan Belantikan Raya
1	20	1.20.2 5	29		Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat	cakupan pelaksanaan kegiatan rohani	persen	80	80	28	80	29	80	30	80	31	80	32	80	150	Kecamatan Belantikan Raya
1	22	1.20.2 5	30		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	persen	7,23	10,84	125	14,46	132	18,07	136	21,69	141	25,30	145	25,30	679	Kecamatan Belantikan Raya
1	20	1.20.2 5	32		Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	cakupan desa yang memiliki APBDes	persen	80%	80%	44	80%	45	80%	47	80%	48	80%	50	80%	234	Kecamatan Belantikan Raya
1	20	1.20.2 7	0		Kecamatan Batang Kawa					1.170		1.207		1.239		1.284		1.325		6.225	Kecamatan Batang Kawa
1	20	1.20.2 7	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	385	100	387	100	397	100	412	100	425	100	2.005	Kecamatan Batang Kawa
1	20	1.20.2 7	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	532	100	549	100	563	100	584	100	602	100	2.830	Kecamatan Batang Kawa
1	20	1.20.2 7	3		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	10	100	10	100	11	100	11	100	11	100	53	Kecamatan Batang Kawa
1	20	1.20.2 7	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	20	80	21	80	21	80	22	80	23	80	106	Kecamatan Batang Kawa
1	20	1.20.2 7	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	tepat waktu/tidak tepatwaktu	tepat waktu	tepat waktu	48	tepat waktu	50	tepat waktu	51	tepat waktu	53	tepat waktu	54	tepat waktu	255	Kecamatan Batang Kawa
1	16	1.20.2 7	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	15	ada	15	ada	16	ada	16	ada	17	ada	80	Kecamatan Batang Kawa



Ur	Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	17	1.20.2 7	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Acara Kebudayaan		5	7	20	10	21	10	21	10	22	10	23	10	106	Kecamatan Batang Kawa
1	18	1.20.2 7	20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	cakupan cabang olahraga yang diikuti	cabang	11	12	25	13	26	14	26	15	27	16	28	16	133	Kecamatan Batang Kawa
1	20	1.20.2 7	27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	cakupan desa yang sudah jelas tata batasnya	persen	80	80	10	80	10	80	11	80	11	80	11	80	53	Kecamatan Batang Kawa
1	20	1.20.2 7	29	Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat	cakupan pelaksanaan kegiatan rohani	persen	80	80	10	80	21	80	21	80	22	80	23	80	96	Kecamatan Batang Kawa
1	22	1.20.2 7	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	persen	7,23	10,84	70	14,46	72	18,07	74	21,69	77	25,30	79	25,30	372	Kecamatan Batang Kawa
1	20	1.20.2 7	32	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	cakupan desa yang memiliki APBDes	persen	80%	80%	15	80%	15	80%	16	80%	16	80%	17	80%	80	Kecamatan Batang Kawa
1	20	1.20.2 7	34	Program Pembinaan PKK Kecamatan dan Desa	cakupan PKK aktif		80	80	10	80	10	80	11	80	11	80	11	80	53	Kecamatan Batang Kawa
1	21	0	0	Ketahanan Pangan					1.966		2.028		2.082		2.158		2.226		10.460	
1	21	1.21.0 1	0	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan					1.966		2.028		2.082		2.158		2.226		10.460	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
1	21	1.21.0 1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	703	100	725	100	744	100	771	100	796	100	3.739	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
1	21	1.21.0 1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	500	100	516	100	530	100	549	100	566	100	2.661	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan



Ur	Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	21	1.21.0 1	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	23	100	23	100	24	100	25	100	26	100	121	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
1	21	1.21.0 1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	25	80	26	80	26	80	27	80	28	80	133	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
1	16	1.21.0 1	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	15	ada	15	ada	16	ada	16	ada	17	ada	80	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
1	21	1.21.0 1	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase binaan Kelompok Tani	Persentase	80	80	169	80	174	80	179	80	185	80	191	80	898	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
1	21	1.21.0 1	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Persentase desa berstatus swasembada pangan utama (beras)	Persentase	80	80	392	80	384	80	394	80	409	80	422	80	2.001	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
1	21	1.21.0 1	20	Program Pmberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan lapangan	Cakupan binaan kelompok tani	Persentase	80	80	61	80	62	80	64	80	66	80	69	80	322	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
1	21	1.21.0 1	21	Program Pengembangan Cadangan Pangan/Beras Daerah	ketersediaan pangan (beras)	kg/kap/th	80	80	20	80	21	80	21	80	22	80	23	80	106	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
1	21	1.21.0 1	22	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	jumlah desa mandiri pangan	Jumlah	80	80	49	80	51	80	52	80	54	80	55	80	261	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Ur	Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
																				Ketahanan Pangan
1	22	1.21.0 1	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	persen	7,23	10,84	10	14,46	10	18,07	11	21,69	11	25,30	11	25,30	53	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
1	08	1.21.0 1	16	Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Kerusakan Hutan	cakupan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dampak kerusakan hutan	persen	80	80		80	20	80	21	80	22	80	22	80	85	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
1	22	0	0	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				3.805		3.924		4.029		4.175		4.308		20.242		
1	22	1.21.0 2	0	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa				3.805		3.924		4.029		4.175		4.308		20.242		Badan Pemberdayaa n Masyarakat Desa
1	22	1.21.0 2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	811	100	837	100	859	100	891	100	919	100	4.317	Badan Pemberdayaa n Masyarakat Desa
1	22	1.21.0 2	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	165	100	162	100	167	100	173	100	178	100	846	Badan Pemberdayaa n Masyarakat Desa
1	22	1.21.0 2	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	28	100	29	100	30	100	31	100	32	100	148	Badan Pemberdayaa n Masyarakat Desa
1	22	1.21.0 2	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	50	80	52	80	53	80	55	80	57	80	266	Badan Pemberdayaa n Masyarakat Desa
1	16	1.21.0 2	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	21	ada	22	ada	22	ada	23	ada	24	ada	112	Badan Pemberdayaa n Masyarakat Desa
1	22	1.21.0 2	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah kelompok lembaga perberdayaan masyarakat (LPM)	Jumlah Lembaga	83	83	1.010	83	1.042	83	1.070	83	1.109	83	1.144	83	5.375	Badan Pemberdayaa n Masyarakat



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Ur	Bd Ur	Org	Pro g	Kode	Urusan/Bidang Ururan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
									Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
																					Desa
1	22	1.21.0 2	16		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah Lembaga Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	Jumlah Lembaga	290	5	232	5	257	5	264	5	274	5	283	315	1.310	Badan Pemberdayaa n Masyarakat Desa
1	22	1.21.0 2	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah LPM yang berprestasi	Jumlah Lembaga	1	3	1.247	3	1.276	3	1.311	3	1.358	3	1.401	16	6.593	Badan Pemberdayaa n Masyarakat Desa
1	22	1.21.0 2	18		Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Sudah Pernah mendapat Pelatihan	Orang	244	89	156	89	161	89	165	89	171	89	177	689	829	Badan Pemberdayaa n Masyarakat Desa
1	22	1.21.0 2	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Persentase Jumlah PKK yang aktif	Persen	53	58	84	63	86	68	89	74	92	79	95	79	445	Badan Pemberdayaa n Masyarakat Desa
1	24	0	0		Kearsipan					816		1.221		1.254		1.299		1.340		5.930	
1	24	1.24.0 1	0		Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah			0%		816		1.221		1.254		1.299		1.340		5.930	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1	24	1.24.0 1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	580	100	624	100	640	100	664	100	685	100	3.193	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1	24	1.24.0 1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparat	persen	100	100	99	100	124	100	127	100	132	100	136	100	619	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1	24	1.24.0 1	3		Program peningkatan disiplin aparat	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	17	100	26	100	27	100	28	100	29	100	126	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1	24	1.24.0 1	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparat yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	25	80	37	80	38	80	40	80	41	80	182	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1	24	1.24.0 1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	tepat waktu/tidak tepatwaktu	tepat waktu	tepat waktu	43	tepat waktu	52	tepat waktu	54	tepat waktu	56	tepat waktu	58	tepat waktu	263	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Ur	Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
1	16	1.24.0 1	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	16	ada	25	ada	25	ada	26	ada	27	ada	119	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1	26	1.24.0 1	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	350	380	24	400	35	430	36	450	38	500	39	2510	172	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1	24	1.24.0 1	15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah SKPD dan desa/kel.yang menerapkan pengelolaan arsip baku	persen	tidak ada	0%	0	12%	61	18%	63	24%	65	30%	67	ada	256	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1	24	1.24.0 1	17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase sarana dan prasarana kearsipan yang terpelihara	persen	tidak ada	0%	0	33%	98	50%	100	56%	104	60%	107	ada	409	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1	24	1.24.0 1	18	program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Jumlah dan jenis arsip daerah	dokumen	tidak ada	0	0	50	122	100	125	150	130	200	134	ada	511,34532	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1	22	1.24.0 1	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa terprogram BBGRM	persen	7,23	10,84	11	14,46	16	18,07	17	21,69	18	25,30	18	25,30	80	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	0	0	0	Urusan Pilihan					45.254		46.679		47.929		49.667		51.241		240.770	
2	1	0	0	Pertanian					13.575		14.002		14.377		14.898		15.371		72.223	
2	1	2.01.0 1	0	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan					13.575		14.002		14.377		14.898		15.371		72.223	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2	1	2.01.0 1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	1.365	100	1.268	100	1.302	100	1.349	100	1.391	100	6.674	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2	1	2.01.0 1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	392	100	363	100	373	100	386	100	398	100	1.912	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2	1	2.01.0 1	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	23	100	24	100	24	100	25	100	26	100	122	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan



Ur	Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
2	1	2.01.0 1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	60	80	62	80	64	80	66	80	68	80	319	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
2	1	2.01.0 1	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani		99,25	99,50	874	99,75	761	100,00	782	100,00	810	100,00	836	100,00	4.063	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
2	5	2.01.0 1	21		Padi (Ton)	Jumlah (ton)	24563,88	26078,0 7	0,00	27720,6 2	0,00	29506,0 4	0,00	31450,7 9	0,00	33573,50	0,00	33573,49	-	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
2	1	2.01.0 1	22		Jagung (Ton)	Jumlah (ton)	25,96	26,84	0,00	1744,32	0,00	1821,84	0,00	1902,81	0,00	1987,37	0,00	1987,37	-	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
2	1	2.01.0 1	26		Kedelai (Ton)	Jumlah (ton)	11,72	11,77	0,00	725,17	0,00	750,09	0,00	775,84	0,00	802,47	0,00	802,47	-	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
		2.01.0 1			Kacang Tanah (Ton)	Jumlah (ton)	10,68	10,75	0,00	95,06	0,00	98,59	0,00	102,24	0,00	106,03	0,00	106,03	-	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
		2.01.0 1			Kacang Hijau (Ton)	Jumlah (ton)	7,93	8,13	0,00	25,28	0,00	26,14	0,00	27,02	0,00	27,92	0,00	27,92	-	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
		2.01.0 1			Ubi Kayu (Ton)	Jumlah (ton)	119,54	120,74	0,00	5423,12	0,00	5751,22	0,00	6099,17	0,00	6468,17	0,00	6468,17	-	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
		2.01.0 1			Ubi Jalar (Ton)	Jumlah (ton)	71,75	72,11	0,00	986,53	0,00	1041,04	0,00	1098,55	0,00	1159,25	0,00	1159,25	-	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
		2.01.0 1			Tanaman Buah (Ton)	Jumlah (ton)	4636,00	4867,80	0,00	5111,19	0,00	5366,75	0,00	5635,09	0,00	5916,84	0,00	5916,84	-	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
		2.01.0 1			Sayuran(Ton)	Jumlah (ton)	2834,00	2975,70	0,00	3124,49	0,00	3280,71	0,00	3444,74	0,00	3616,98	0,00	3616,98	-	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan



Ur	Bd Ur	Org	Pro g	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
									Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
2	1	2.01.01	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Rata-rata ketersediaan pangan utama (beras) pertahun	kg/penduduk/ Tahun	8.660.788	8.914.049	6.077	9.163.657	4.308	9.532.590	4.423	9.785.857	4.584	10.039.112	4.729	10.039.112	24.121	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2	1	2.01.01	21		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase ternak sakit yang ditangani	persen	91,91	93,29	307	94,69	317	96,11	325	97,55	337	99,01	348	100,00	1.633	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2	5	2.01.01	21		Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum	Ton	400,00	575,00	100	632,50	144	683,10	148	724,09	154	760,29	159	760,29	705	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2	5	2.01.01	22		Program peningkatan produksi hasil peternakan	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	persen	2,89	2,93	1.863	2,97	1.782	3,02	1.829	3,06	1.896	3,11	1.956	3,16	9.325	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2	5	2.01.01	22			Produksi daging	Jumlah (ton)	689,76	723,32	-	758,55	-	795,55	-	834,39	-	875,18	-	875,18	-	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2	5	2.01.01	22			Produksi telur	Jumlah (ton)	36,78	38,12	-	39,75	-	40,57	-	41,18	-	41,82	-	41,82	-	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2	5	2.01.01	22			Populasi Sapi Potong (Ekor)	Jumlah (ekor)	3.145	3.302	-	3.467	-	3.640	-	3.822	-	4.014	-	4.014	-	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2	5	2.01.01	22			Populasi Kerbau (ekor)	Jumlah (ekor)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2	5	2.01.01	22			Populasi Kambing (Ekor)	Jumlah (ekor)	3.544	3.792	-	4.057	-	4.341	-	4.645	-	4.970	-	4.970	-	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2	5	2.01.01	22			Populasi Domba (ekor)	Jumlah (ekor)	196	206	-	216	-	227	-	239	-	251	-	251	-	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
2	5	2.01.01	22			Populasi Babi (Ekor)	Jumlah (ekor)	11.009	11.835	-	12.722	-	13.677	-	14.702	-	15.805	-	15.805	-	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan



Ur	Bd Ur	Org	Pro g	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
									Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
2	5	2.01.0 1	22		Populasi Ayam Buras (Ekor)	Jumlah (ekor)		69.985	74.185	-	78.636	-	83.354	-	88.355	-	93.656	-	93.656	-	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
2	5	2.01.0 1	22		Populasi Ayam Ras Petelur (ekor)	Jumlah (ekor)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
2	5	2.01.0 1	22		Populasi Ayam Ras Pedaging (Ekor)	Jumlah (ekor)		16.199	17.818	-	19.600	-	21.560	-	23.716	-	26.088	-	26.088	-	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
2	5	2.01.0 1	22		Populasi Itik (Ekor)	Jumlah (ekor)		32.998	34.978	-	37.076	-	39.301	-	41.659	-	44.158	-	44.158	-	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
2	5	2.01.0 1	20	Program Pengembangan Budi Daya Perikanan	Produksi perikanan budidaya	Ton		1212,00	1251,00	2.514	1.290,03	2.454	1.330,28	2.519	1.371,78	2.611	1.414,58	2.693	1.414,58	12.791	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
2	5	2.01.0 1	20		Produksi Benih	Ekor		0,90	1,27	-	1,77	-	2,48	-	3,47	-	4,86	-	4,86	-	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
2	1	2.01.0 1	17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan/Perkebun an	Jumlah Pemasaran Produksi Tanaman Hortikultura	Ton		1.867,50	1.960,88	-	18.530,2 7	280	19.456,7 8	288	20.429,6 2	298	21.451,10	307	21.451,10	1.173	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
2	1	2.01.0 1	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	persen		213,47	223,28	-	233,80	490	245,09	503	257,25	521	270,37	538	270,37	2.053	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
2	1	2.01.0 1	18		Padi Sawah(Ton)	Ton/Ha		30,00	32,70	-	35,64	-	38,85	-	42,35	-	46,16	-	46,16	-	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
2	1	2.01.0 1	18		Padi Ladang(Ton)	Ton/Ha		21,26	21,99	-	22,74	-	23,51	-	24,31	-	25,14	-	25,14	-	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
2	1	2.01.0 1	18		Jagung (Ton)	Ton/Ha		25,96	26,84	-	27,76	-	28,70	-	29,68	-	30,69	-	30,69	-	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Ur	Bd Ur	Kode		Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
		Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
2	1	2.01.0 1	18		Kedelai (Ton)	Ton/Ha	11,72	11,77	-	11,82	-	11,87	-	11,92	-	11,97	-	11,97	-	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
2	1	2.01.0 1	18		Kacang Tanah (Ton)	Ton/Ha	10,68	10,75	-	10,83	-	10,90	-	10,98	-	11,05	-	11,05	-	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
2	1	2.01.0 1	18		Kacang Hijau (Ton)	Ton/Ha	7,93	8,13	-	8,33	-	8,53	-	8,73	-	8,93	-	8,93	-	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
2	1	2.01.0 1	18		Ubi Kayu (Ton)	Ton/Ha	119,54	120,74	-	121,95	-	123,17	-	124,40	-	125,64	-	125,64	-	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
2	1	2.01.0 1	18		Ubi Jalar (Ton)	Ton/Ha	71,75	72,11	-	72,47	-	72,83	-	73,19	-	73,56	-	73,56	-	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
2	1	2.01.0 1	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan	Kontribusi pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB	persen	4,06	4,12	-	4,18	630	4,25	647	4,31	670	4,38	692	4,44	2.639	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
2	1	2.01.0 1	23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah Pemasaran Ternak pertahun	Jumlah (ekor)	35.110	37.871	-	40.863	700	44.105	719	47.620	745	51.433	769	51.456	2.932	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
2	1	2.01.0 1	24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah Bibit Ternak	persen	72,03	73,11	-	74,21	420	75,32	431	75,32	447	76,45	461	76,45	1.759	Dinas Pertanian, Pernakan dan Perikanan
2	2	0	0	Kehutanan					10.808		11.149		11.447		11.862		12.238		57.504	
2	2	2.02.0 1	0	Dinas Kehutanan dan Perkebunan					10.808		11.149		11.447		11.862		12.238		57.504	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	2	2.02.0 1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	1.590	100	1.640	100	1.684	100	1.745	100	1.800	100	8.457	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	2	2.02.0 1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	578	100	596	100	612	100	635	100	655	100	3.076	Dinas Kehutanan dan Perkebunan



Ur	Kode			Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
2	2	2.02.01	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	39	100	40	100	41	100	43	100	44	100	206	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	2	2.02.01	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	60	80	62	80	64	80	66	80	68	80	319	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
1	16	2.02.01	15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	pameran budaya	ada/tidak	ada	ada	70	ada	72	ada	74	ada	77	ada	79	ada	372	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	2	2.02.01	15	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB	persen	80	80	238	80	246	80	252	80	262	80	270	80	1.268	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	2	2.02.01	16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	cakupan penghijauan dan reboisasi	bibit pohon	50.000	60.000	2.213	70.000	2.283	80.000	2.344	90.000	2.429	100.000	2.506	100.000	11.774	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	2	2.02.01	17	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	rasio pencegahan, pengendalian dan penindakan ilegal logging	operasi	1	2	229	2	237	2	243	2	252	2	260	2	1.221	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	2	2.02.01	20	Program perencanaan dan pengembangan hutan	cakupan peran serta masyarakat dalam pembangunan hutan	orang	10	20	602	25	621	30	638	35	661	40	682	40	3.203	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	2	2.02.01	21	Program pemberdayaan Penyuluh Perkebunan Dan Kehutanan	persentase penyuluh yang dibina	persen	80	80	80	80	19	80	20	80	20	80	21	80	161	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	2	2.02.01	22	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	persentase peningkatan produksi hutan	persen	3	3	1.820	4	1.877	4	1.927	5	1.997	5	2.060	5	9.681	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	2	2.02.01	23	Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L)	persentase peningkatan jumlah SDM perkebunan	persen	2	2	103	3	106	3	109	4	113	4	117	4	549	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	2	2.02.01	24	Program Pengembangan dan Penelitian Gaharu	produksi gaharu	Ton/Ha	80	80	2.250	80	2.321	80	2.383	80	2.469	80	2.548	80	11.971	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
1	22	2.02.01	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Persentase desa terprogram BBGRM	persen	7,23	10,84	20	14,46	21	18,07	21	21,69	22	25,30	23	25,30	106	Dinas Kehutanan



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
U r	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
				dalam Membangun Desa																dan Perkebunan
2	2	2.02.0 1	31	Peningkatan Ketahanan Pangan	peningkatan pemanfaatan lahan terlantar	Ha/Tahun	60	60	283	70	292	70	300	80	311	80	321	80	1.508	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	2	2.02.0 1	32	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	pendapatan petani kebun	US \$/KK/Th	400-800	500-800	499	500-900	515	600-900	529	600- 1000	548	700-1000	565	700-1000	2.656	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	2	2.02.0 1	33	Program Penyusunan Data dan Informasi	cakupan ketersediaan dokumen kehutanan dan perkebunan	persen	100	100	133	100	201	100	206	100	214	100	221	100	975	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2	3	0	0	Energi dan Sumberdaya Mineral					20.871		21.528		22.105		22.906		23.632		111.043	
2	3	2.03.0 1	0	Dinas Pertambangan dan Energi					20.871		21.528		22.105		22.906		23.632		111.043	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	2.03.0 1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100	100	1.145	100	1.182	100	1.213	100	1.257	100	1.297	100	6.094	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	2.03.0 1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100	295	100	304	100	312	100	323	100	334	100	1.567	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	2.03.0 1	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan pegawai	persen	100	100	47	100	49	100	50	100	52	100	54	100	252	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	2.03.0 1	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	persen	70	80	100	80	103	80	106	80	110	80	113	80	532	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	2.03.0 1	15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	persen	1,24	1,42	572	1,58	590	1,73	606	1,87	628	2,12	648	2,12	3.044	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	2.03.0 1	16	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Menurunnya pertambangan yang tidak memiliki izin	Ha	350	300	122	250	126	200	129	150	134	100	138	100	649	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	2.03.0 1	17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Ratio elektrifikasi	persen	54,22	57,83	250	61,45	258	65,06	265	68,67	274	71,08	283	71,08	1.330	Dinas Pertambangan dan Energi



RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal Kinerja 2013	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi akhir kinerja		SKPD Penanggung Jawab
U r	Bi d Ur	Org	Pro g					Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	Kinerja	Pagu Dana	
2	3	2.03.0 1	18	Program Pembangunan Bidang Ketenagalistrikan	Ratio Jumlah Rumah Tangga berlistrik	persen	11052	11452	18.280	12050	10.397	12350	10.676	12650	11.063	12950	11.414	12950	61.830	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	2.03.0 1	20	Pembinaan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pengusahaan Minyak dan Gas	cakupan perusahaan minyak dan gas yang ditata	persen	80	80	60	80	62	80	64	80	66	80	68	80	319	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	2.03.0 1	19	Program Perencanaan Wilayah Geologi dan Konservasi Sumber Daya Mineral	Cakupan wilayah dan Konservasi Sumber Daya Mineral yang terencana	Ha	167343	169000	-	170000	2.583	171000	2.653	172000	2.749	173000	2.836	173000	10.821	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	2.03.0 1	21	Program Pengelolaan Air Tanah	Tersedianya data potensi dan pemanfaatan air tanah	Ha	-	-	-	250	2.368	350	2.432	450	2.520	550	2.600	550	9.919	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	2.03.0 1	22	Program Penataan Wilayah Pertambangan	Cakupan Wilayah Pertambangan Rakyat yang legal	Ha	525	575	-	600	1.507	630	1.547	650	1.603	685	1.654	685	6.312	Dinas Pertambangan dan Energi
2	3	2.03.0 2	30	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase desa yang dibantu	desa	12,04819277	14,458	-	16,867	1.938	19,277	1.989	21,687	2.062	24,096	2.127	24,096	8.115	Dinas Pertambangan dan Energi
Total									367.733		378.887		389.035		403.136		415.369			







BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/ hasil) dari kegiatan (*output*/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*).



Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Awal*	TARGET CAPAIAN					Kondisi Akhir RPJMD
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1.1	Pertumbuhan PDRB Atas Harga Berlaku	persen	13,48	13,79	14,10	14,42	14,74	15,08	15,08
1.1.2	Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan	persen	6,89	6,99	7,14	7,24	7,39	7,45	7,45
1.1.3	Indeks Gini	indeks	n/a	0,295	0,285	0,275	0,265	0,26	0,26
1.1.4	Persentase penduduk miskin	persen	4,46	4,18	4,04	3,91	3,78	3,65	3,65
1.1.5	Angka Pengangguran	persen	2,68	2,62	2,56	2,50	2,43	2,36	2,36
2	Fokus Kesejahteraan Sosial								
2.1	Pendidikan								
2.1.1	Angka Melek Huruf	persen	99	99,2	99,4	99,6	99,8	100	100
2.1.2	Angka Rata-rata lama sekolah	tahun	7,7	7,9	8,1	8,3	8,5	8,7	8,7
2.1.3	APK SD	persen	118,42	118,62	118,82	118,82	119,02	119,22	119,22
2.1.4	APK SMP/MTs	persen	109,19	109,39	109,59	109,79	109,99	110,09	110,09
2.1.5	APK SMA/SMK/MA	persen	65,00	65,20	65,40	65,60	65,80	67,00	67,00
2.1.6	APM SD/SDLB/MI	persen	100	100	100	100	100	100	100
2.1.7	APM SMP	persen	100	100	100	100	100	100	100
2.1.8	APM SMA	persen	48,72	48,92	50,12	50,32	50,52	50,72	50,72



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Awal*	TARGET CAPAIAN					Kondisi Akhir RPJMD
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
2.2	Kesehatan								
2.2.1	Angka Kematian Bayi	jiwa	17,7	17,7	17,7	17,5	17	17	17
2.2.2	Angka Harapan Hidup	tahun	67,36	67,5	67,7	67,9	68,1	68,3	68,3
2.2.3	Persentase Balita Gizi buruk	persen	0	0	0	0	0	0	0
3	Fokus Budaya dan Olahraga								
3.1	Kebudayaan								
3.1.1	Jumlah Grup Kesenian	buah	20	23	25	27	30	32	32
3.1.2	Jumlah Sarana Peribadatan	buah	256	260	265	265	270	275	275
3.2	Olahraga								
3.2.1	Jumlah Gedung Olahraga	buah	1	2	3	4	5	6	6
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Fokus Layanan Urusan Wajib								
1.1	Pendidikan								
1.1.1	Pendidikan Dasar								
1.1.1a	Angka partisipasi sekolah SD	persen	118,42	118,62	118,82	118,82	119,02	119,22	119,22
1.1.1b	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dasar	rasio	1 : 102	1 : 104	1 : 106	1 : 108	1 : 120	1 : 122	1 : 122
1.1.1c	Rasio Guru terhadap murid	rasio	1 : 13	1 : 15	1 : 17	1 : 19	1 : 21	1 : 23	1 : 23
1.1.1d	Rasio Guru terhadap murid per kelas rata-rata	rasio	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Awal*	TARGET CAPAIAN					Kondisi Akhir RPJMD
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.1.2	Pendidikan Menengah								
1.1.2a	Angka partisipasi sekolah SMP	persen	109,19	109,39	109,59	109,79	109,99	110,09	110,09
1.1.2b	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah pertama	rasio	1 : 117	1 : 119	1 : 122	1 : 124	1 : 126	1 : 128	1 : 128
1.1.2c	Rasio Guru terhadap murid	rasio	1 : 14	1 : 16	1 : 18	1 : 20	1 : 22	1 : 24	1 : 24
1.1.2d	Rasio Guru terhadap murid per kelas rata-rata	rasio	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36
1.1.2e	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	persen	99,2	99,4	99,6	99,8	100	100	100
1.1.2f	Angka Partisipasi Sekolah SMA	persen	65,00	65,20	65,40	65,60	65,80	67,00	67,00
1.1.2g	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menengah atas	rasio	1 : 65	1 : 66	1 : 67	1 : 66	1 : 67	1 : 68	1 : 68
1.1.2h	Rasio guru terhadap murid	rasio	1 : 13	1 : 15	1 : 17	1 : 19	1 : 21	1 : 23	1 : 23
1.1.2i	Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata	rasio	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36
1.1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								
1.1.3a	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	persen	54,25	56,25	58,25	60,25	62,25	65	65
1.1.4	Angka Putus Sekolah								
1.1.4a	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	persen	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0	0
1.1.4b	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	persen	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	0	0
1.1.4c	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	persen	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	0	0
1.1.4d	Penurunan angka putus sekolah	persen	0	0,01	0,01	0,01	0	0,01	0,01
1.1.5	Angka Kelulusan								
1.1.5a	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	persen	100	100	100	100	100	100	100



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Awal*	TARGET CAPAIAN					Kondisi Akhir RPJMD
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.1.5b	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.1.5c	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	persen	95,67	95,67	96,60	98,67	98,75	99,00	99,00
	Angka melanjutkan sekolah :								
1.1.5d	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	persen	99,67	99,67	100	100	100	100	100
1.1.5e	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	persen	98,43	98,43	99,12	99,20	99,30	99,50	99,50
1.1.5f	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	43,57	50,10	60,20	70,40	80,50	90,50	90,50
1.2	Kesehatan								
1.2.1	Rasio Posyandu per satuan balita	rasio	15,54	15,54	15,54	15,54	15,54	15,54	15,54
1.2.2	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	rasio	1,94	1,94	1,94	2,00	2,00	2,11	2,11
1.2.3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	rasio	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
1.2.4	Rasio dokter per satuan penduduk	rasio	0,22	0,29	0,36	0,39	0,43	0,50	0,50
1.2.5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	rasio	0,53	0,65	0,79	0,94	1,01	1,08	1,08
1.2.6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	84,83	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00
1.2.8	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.11	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.14	Cakupan kunjungan bayi	persen	95,63	95,70	95,70	95,70	95,80	95,80	95,80



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Awal*	TARGET CAPAIAN					Kondisi Akhir RPJMD
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.2.15	Cakupan desa/kelurahan Universal Children Immunization	persen	92,77	93,00	93,00	93,00	95,00	95,00	95,00
1.3	Pekerjaan Umum								
1.3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	74,32	94,46	86,55	90,59	94,63	98,66	98,66
1.3.2	Rasio Jaringan Irigasi	rasio	1,5	1:0,02	1:0,26	1:0,31	1:0,37	1:0,45	1:0,45
1.3.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	persen	31,56	36,1	39,13	42,16	45,18	48,21	48,21
1.3.4	Rasio Tempat Pemakaman Umum per satuan penduduk	rasio	1:1,55	1 : 50	1 : 45	1 : 43	1 : 40	1 : 35	1 : 35
1.3.5	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	rasio	1:08	1 : 7	1 : 6,5	1 : 6	1 : 5,5	1 : 5	1 : 5
1.3.6	Rasio Rumah Layak Huni	rasio	1 : 1,48	1 : 1,47	1 : 1,46	1 : 1,45	1 : 1,44	1 : 1,43	1 : 1,43
1.3.7	Panjang Jalan dilalui roda empat	km	474,10	471,82	481,83	493,20	500,50	510,20	510,20
1.3.9	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	persen	92,74	93,74	93,94	93,99	95,84	96,85	96,85
1.3.11	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	persen	54,58	38,17	25,72	30,87	37,07	44,55	44,55
1.3.12	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	persen	94,46	86,550	90,587	94,625	98,168	100	100
1.4	Perumahan								
1.4.1	Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih	jumlah	3274	6152	6583	7110	7749	8524	8524
1.4.2	Persentase rumah tangga pengguna listrik	persen	45,60	46,40	46,80	47,40	48,20	49,00	49,00
1.4.3	Rumah tangga bersanitasi	persen	31,56	36,1	39,13	42,16	45,18	48,21	48,21
1.4.4	Lingkungan pemukiman kumuh	persen	1,53	1,43	1,37	1,21	1,19	1,17	1,17



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Awal*	TARGET CAPAIAN					Kondisi Akhir RPJMD
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.5	Penataan Ruang								
1.5.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	rasio	0,0003	0,0004	0,0005	0,0006	0,0008	0,001	0,001
1.5.2	Persentase Ruang publik yang berubah peruntukannya	persen	0	15	13	10	8	6	6
1.6	Perencanaan Pembangunan								
1.6.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.6.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.6.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.6.4	Persentase keselarasan penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.7	Perhubungan								
1.7.1	Jumlah uji kir angkutan darat	jumlah	774	851	937	1.030	1.133	1.133	1.133
1.7.2	Jumlah terminal angkutan umum	jumlah	1	1	1	1	1	2	2
1.7.3	Jumlah angkutan darat	jumlah	23.301	25.631	28.194	31.014	34.115	34.115	34.115
1.7.4	Persentase kepemilikan KIR angkutan darat	persen	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32
1.7.5	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	50	50	50	50	50	50	50
1.7.6	Pemasangan rambu-rambu	unit	72	0	100	100	0	150	422
1.8	Lingkungan Hidup								
1.8.1	Pencemaran status mutu air	persen	70	70	80	80	80	90	90
1.8.2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal	persen	97	94	97	94	94	94	94



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Awal*	TARGET CAPAIAN					Kondisi Akhir RPJMD
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.9	Kependudukan dan Catatan Sipil								
1.9.1	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	persen	78,20	85,56	88,92	91,28	95,64	100	100
1.9.2	Persentase bayi berakte kelahiran	persen	67,9	74,32	80,74	87,16	93,58	100	100
1.9.3	Pasangan berakte nikah	persen	41,60	55,60	60,60	65,00	70,00	75,00	75,00
1.9.4	Persentase kepemilikan KTP	persen	78,20	85,56	88,92	91,28	95,64	100	100
1.9.5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	persen	67,9	74,32	80,74	87,16	93,58	100	100
1.9.6	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.9.7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/belum	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
1.10	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1.10.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	persen	40	45	50	55	60	65	65
1.10.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	persen	24	26	28	31	33	35	35
1.10.3	Rasio KDRT	rasio	0,005	1	1,5	1,99	2	2,05	2,05
1.10.4	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	persen	5	4	3	2	1	0,5	0,5
1.10.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	23,27	24	26	28	30	32	32
1.10.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	persen	90	90	90	90	90	90	90
1.11	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
1.11.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	rata-rata	2 s/d 3	2 s/d 3	2 s/d 3	2 s/d 3	2 s/d 3	2 s/d 3	2 s/d 3
1.11.2	Persentase Akseptor KB	persen	45	50	55	60	65	70	70
1.11.3	Cakupan peserta KB aktif	orang	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500	14.500
1.11.4	Persentase keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	persen	40	45	50	55	60	65	65
1.11.5	Cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	persen	45	40	35	30	25	20	20



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Awal*	TARGET CAPAIAN					Kondisi Akhir RPJMD
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.11.6	Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif	persen	35	40	45	50	55	60	60
1.11.7	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet need)	persen	55	50	45	40	35	25	25
1.11.8	Cakupan bina keluarga balita (BKB) ber KB)	persen	35	40	45	50	55	60	60
1.11.9	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB	persen	13	15	17	19	21	25	25
1.11.10	Cakupan PLKB/PKB disetiap desa/kelurahan	persen	35	40	45	50	55	60	60
1.11.11	Keluarga pra sejahtera	persen	35	30	25	20	15	10	10
	Persentase Ks I swasta	persen	24	26	28	31	33	35	35
	Pemerintah daerah	persen	40	45	50	55	60	65	65
1.11.12	Cakupan PPKBD di setiap desa/kelurahan	persen	35	40	45	50	55	60	60
1.11.13	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	persen	45	50	55	60	65	70	70
1.12	Sosial								
1.12.1	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	orang	315	500	450	400	350	300	300
1.12.3	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	persen	50	73,5	86,5	76,9	92,5	85,7	85,7
1.12.4	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	unit	1	0	0	0	0	0	1
1.13	Ketenagakerjaan								
1.13.1	Angka Partisipasi angkatan kerja	jiwa	41.220	45.342	49.879	54.863	60.352	66.387	66.387
1.13.2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	angka	10	20	15	15	15	15	15
1.13.3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	86,91	93,42	95,43	96,3	97,45	98,5	98,5
1.13.4	Tingkat pengangguran terbuka	persen	2,35	2,3	2,25	2,2	2,15	2,1	2,1



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Awal*	TARGET CAPAIAN					Kondisi Akhir RPJMD
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.13.5	Persentase keselamatan dan perlindungan	persen	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
1.13.6	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	persen	5	0,4	0,35	0,25	0,2	0,2	0,2
1.14	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
1.14.1	Persentase koperasi aktif	persen	82	84	86	88	90	92	92
1.14.2	Persentase Usaha Mikro dan kecil	persen	43	47	52	57	62	68	68
1.14.3	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	jumlah	705	851	894	936	988	998	998
1.14.4	Jumlah BPR/LKM	jumlah	1	1	1	2	2	2	2
1.14.5	Usaha Mikro dan Kecil	jumlah	1.622	1.692	1.772	2.000	2.030	2.050	2.050
1.15	Penanaman Modal								
1.15.1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	jumlah	15	16	19	22	25	28	28
1.15.2	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	persen	94,61	94,80	94,80	94,99	95,45	96,15	96,15
1.16	Kebudayaan								
1.16.1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	jumlah	12	13	15	16	18	20	20
1.16.2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	jumlah	0	3	3	4	4	4	4
1.16.3	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	persen	37,5	50	62,5	75	87,5	100	100
1.17	Kepemudaan dan Olahraga								
1.17.1	Jumlah organisasi pemuda	jumlah	20	22	25	27	28	30	30
1.17.2	Jumlah Organisasi olahraga	jumlah	18	25	28	30	32	35	35
1.17.3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	jumlah	8	10	12	13	14	15	15



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Awal*	TARGET CAPAIAN					Kondisi Akhir RPJMD
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.17.4	Jumlah Kegiatan Olahraga	jumlah	30	32	34	36	38	40	40
1.17.5	Lapangan Olahraga	jumlah	8	11	14	17	20	23	23
1.18	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
1.18.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP	jumlah kegiatan	20	22	23	24	26	26	26
1.18.2	Kegiatan pembinaan politik daerah	jumlah kegiatan	14	10	10	10	10	10	10
1.18.3	Petugas perlindungan masyarakat	jumlah	44	55	53	51	51	51	51
1.18.4	Jumlah LSM	jumlah	21	21	21	21	21	21	21
1.19	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangn Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.19.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	orang	10	9	9	9	9	9	9
1.19.2	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	rasio	44	55	53	51	51	51	51
1.19.3	Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan	rasio	5	5	5	5	5	5	5
1.19.4	Sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintah	ada/tidak	tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.19.5	Persentase penegakan PERDA	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.19.6	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketrentaman, keindahan) di kabupaten	persen	100	100	100	100	100	100	100
1.20	Ketahanan Pangan								
1.20.1	Ketersedian Pangan :								
	Beras	ton	15.574,37	16.481,30	17.519,43	18.647,82	19.876,90	21.218,45	21.218,45
	Daging	ton	689,76	723,32	758,55	795,55	834,39	875,18	875,18



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Awal*	TARGET CAPAIAN					Kondisi Akhir RPJMD
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Telur	kg	36.782	38.124	39.746	40.570	41.176	41.818	41.818
	Ikan	ton	1.612,00	1.826,00	1.922,53	2.013,38	2.095,87	2.174,87	2.174,87
1.21	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1.21.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	rata-rata	83	83	83	83	83	83	83
1.21.2	Rata-rata Jumlah kelompok binaan PKK	rata-rata	35	40	45	50	55	60	60
1.21.3	Jumlah LSM yang aktif	jumlah	25	28	31	34	37	40	40
1.21.4	Persentase PKK aktif	persen	70	75	80	85	95	100	100
1.21.5	Persentase posyandu aktif	persen	65	70	75	80	85	90	90
1.21.6	Persentase Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	persen	10	15	20	25	30	40	40
1.21.7	Persentase pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	persen	10	15	20	25	30	40	40
1.22	Statistik								
1.22.1	Buku Kabupaten Dalam Angka	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.22.2	Buku PDRB Kabupaten	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.23	Kearsipan								
1.23.1	Persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku	persen	0	0	15	20	30	50	50
1.23.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	jumlah kegiatan	5	6	6	6	7	8	8
1.24	Komunikasi dan Informatika								
1.24.1	Jumlah jaringan komunikasi	jaringan	28	31	32	33	34	34	35
1.24.2	Rasio warnet terhadap penduduk	rasio	0,143	0,157	0,173	0,190	0,209	0,230	0,230



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Awal*	TARGET CAPAIAN					Kondisi Akhir RPJMD
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.24.3	Jumlah surat kabar nasional	eksemplar	7	7	7	7	7	7	7
1.24.4	Jumlah surat kabar daerah	eksemplar	2	3	3	3	4	4	4
1.24.5	Jumlah penyiaran radio	jumlah	4	5	5	5	5	5	5
1.24.6	Keberadaan website milik Pemerintah Daerah	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.24.7	Jumlah pelaksanaan pameran/expo	kali	5	4	4	4	5	4	4
1.25	Perpustakaan								
1.25.1	Jumlah perpustakaan	buah	1	2	23	45	67	91	91
1.25.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	350	380	400	430	450	500	500
1.25.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	jumlah	100	1.100	1.300	1.500	1.800	2.000	2.000
2	Fokus Layanan Urusan Pilihan								
2.1	Pertanian								
2.1.1	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	kuintal/ha	213,47	223,28	233,80	245,09	257,25	270,37	270,37
2.1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	persen	66,86	65,82	64,79	63,75	62,72	61,69	61,69
2.1.3	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	persen	51,34	50,30	49,27	48,23	47,20	46,17	46,17
2.1.4	Cakupan Bina Kelompok Tani	persen	56	59	60	65	68	70	70
2.2	Kehutanan								
2.2.1	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	persen	4,18	4,14	4,09	4,04	3,99	3,94	3,94
2.3	Energi dan Sumberdaya Mineral								
2.3.1	Persentase pertambangan tanpa izin	persen	10,70%	9,20%	7,30%	5,50%	4,20%	3,00%	3,00%
2.3.2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	persen	1,24	1,42	1,58	1,73	1,87	2,12	2,12



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Awal*	TARGET CAPAIAN					Kondisi Akhir RPJMD
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
2.4	Kelautan dan Perikanan								
2.4.1	Produksi Perikanan	ton/tahun	649,5	1.826,00	1.922,53	2.013,38	2.095,87	2.174,87	2.174,87
2.4.2	Konsumsi ikan	kg/kapita/thn	29,04	39,25	43,18	46,41	48,73	50,93	50,93
2.5	Pariwisata								
2.5.1	Kunjungan wisata	persen	63,33	93,33	80,00	85,00	97,50	100,00	100,00
2.6	Perdagangan								
2.6.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	persen	14,77	14,85	14,56	14,58	14,32	14,00	14,00
2.6.2	Nilai ekspor bersih perdagangan	juta rupiah	18.704.930	15.151.025	13.635.922	11.045.096	10.201.321	9.612.301	9.612.301
2.6.3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	persen	14,21	14,27	14,47	14,54	14,83	15,32	15,32
2.7	Perindustrian								
2.7.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (tanpa migas)	persen	0,64	0,62	0,61	0,60	0,58	0,57	0,57
2.7.3	Persentase pertumbuhan industri	persen	3	4	4	4	4	4	4
2.7.4	Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	20	24	28	32	36	40	40
2.8	Ketransmigrasian								
2.8.1	Persentase transmigran swakarsa	persen	0	0	0	0	0	0	0
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	ribu rupiah	847.996	841.319	869.981	899.413	929.876	961.461	961.461



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Awal*	TARGET CAPAIAN					Kondisi Akhir RPJMD
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
2.1	Perhubungan								
2.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	0,020	0,018	0,017	0,015	0,014	0,013	0,013
2.1.2	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	orang	17.052	18.757	20.633	22.696	24.966	27.462	27.462
2.1.3	Jumlah orang melalui terminal per tahun	orang	17.052	18.757	20.633	22.696	24.966	27.462	27.462
2.2	Penataan Ruang								
2.2.1	Ketaatan terhadap RTRW	persen	10,00%	25,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%
2.2.1	Luas wilayah produktif	ha	167.888	170.888	173.388	175.388	177.888	180.888	180.888
2.2.3	Luas wilayah industri	persen	9,00%	25,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%
2.2.4	Luas wilayah banjir	persen	88,73%	78,29%	62,63%	41,75%	20,88%	2,61%	2,61%
2.2.5	Luas wilayah kekeringan	persen	89,87%	70,92%	54,04%	40,53%	20,26%	6,75%	6,75%
2.2.6	Luas wilayah perkotaan	persen	16,00%	25,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%
3	Fokus Iklim Berinvestasi								
3.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
3.3.1	Angka kriminalitas	jumlah	111	99	95	90	87	84	84
3.3.2	Jumlah demo	kali	8	2	2	2	2	2	2
3.3.3	Lama proses perizinan (usaha strategis/perizinan tertentu)								
a.	IMB untuk rumah tinggal yang luasnya $\geq 200m^2$	hari kerja	14	14	14	14	14	14	14
b.	Izin Usaha Perkebunan	hari kerja	45	45	45	45	45	45	45
c.	Izin Usaha Pertambangan	hari kerja	155	155	155	155	155	155	155



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Kondisi Awal*	TARGET CAPAIAN					Kondisi Akhir RPJMD
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
d.	Izin Trayek Darat/Sungai Baru dan Perpanjangan	hari kerja	15	15	15	15	15	15	15
e.	Izin Sertifikasi dan Past Kapal	hari kerja	15	15	15	15	15	15	15
f.	Izin Pembuangan Limbah Cair	hari kerja	15	15	15	15	15	15	15
g.	Izin Pendirian SPBU	hari kerja	15	15	15	15	15	15	15
h.	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja	hari kerja	10	10	10	10	10	10	10
i.	Izin Penelitian	hari kerja	9	9	9	9	9	9	9
j.	Izin untuk Pendirian Hotel Berbintang	hari kerja	31	31	31	31	31	31	31
k.	Izin Usaha Jasa Kontruksi	hari kerja	14	14	14	14	14	14	14
3.3.4	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	macam	11 ; 30	11 ; 30	11 ; 30	11 ; 30	11 ; 30	11 ; 30	11 ; 30
3.3.5	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	perda	14	3	3	4	4	4	4
4	Fokus Sumber Daya Manusia								
4.1	Ketenagakerjaan								
4.1.1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	jumlah	2.368	2.486	2.611	2.741	2.878	2.741	2.878







BAB X

PENUTUP

10.1. Pedoman Transisi

Pedoman transisi merupakan arahan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau tetap menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun (RKPD) Tahun 2019 yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019. Penyusunan RKPD Tahun 2019 Kabupaten Lamandau harus berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan Rancangan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamandau dan mengacu kepada Rancangan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat waktu yang sangat sempit bagi Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung Tahun 2018 nanti untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 - 2023 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 sesuai dengan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten sesuai jadwal yang ditetapkan perundang-undangan, dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan tahun 2018, dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi pada tahun 2019.

Selanjutnya Kepala Daerah Kabupaten Lamandau terpilih hasil pemilihan kepala daerah secara langsung tahun 2018 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019 yang sudah disusun untuk pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lamandau yang lebih baik.



10.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dengan ditetapkannya RPJMD Lamandau 2013-2018, meliputi:

1. RPJM Daerah Kabupaten Lamandau merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra SKPD). Dalam pelaksanaan urusan pembangunan, SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018. Renstra SKPD tersebut nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD;

2. RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan RKPD

RPJM Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan. RKPD merupakan implementasi RPJMD yang program dan kegiatan SKPD-nya direncanakan harus sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah;

3. Penguatan peran para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan RPJMD

Rancangan awal RPJMD dalam penyusunannya telah melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam upaya menghasilkan RPJMD Kabupaten Lamandau yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

4. Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahun dan tahunan

RPJM Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 merupakan dasar untuk mengevaluasi dan laporan atas hasil kinerja Kepala Daerah terpilih untuk masa 5 (lima) tahun dan tahunan, dimana visi dan misi pembangunan yang ingin dicapai selaras dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan kebijakan umum serta program-program prioritas kepala daerah terpilih;

5. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Dokumen RPJMD adalah sasaran dan indikator kinerja Kabupaten Lamandau. SKPD sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masing-masing SKPD berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing;
6. Seluruh SKPD merumuskan dan menetapkan program dan kegiatan dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD ini berdasarkan kebutuhan masing-masing SKPD serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh SKPD setiap tahunnya merupakan perwujudan dari pelaksanaan RPJMD yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan selanjutnya;



**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup
Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2018**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun RPJMD kabupaten/kota dan penyusunan rencana kerja	V			
2.	Penyiapan data dan informasi	V			
3.	Penelaahan RTRW kabupaten/kota	V			
4.	Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota	V			
5.	Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan	V			
6.	Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota	V			
7.	Penelaahan RPJMN	V			
8.	Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten/kota	V			
9.	Penelaahan RPJPD kabupaten/kota	V			
10.	Perumusan penjelasan visi dan misi	V			
11.	Rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.	V			
12.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan provinsi, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD provinsi.	V			
13.	Rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota selaras dengan arah, kebijakan umum,serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN .	V			
14.	Perumusan tujuan dan sasaran	V			
15.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.	V			
16.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah provinsi.	V			

17.	Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional	V			
18.	Perumusan strategi dan arah kebijakan	V			
19.	Rumusan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	V			
20.	Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah	V			
21.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengacu pada agenda pembangunan jangka menengah provinsi dan nasional meliputi :				
21.a.	Pencapaian indikator IPM	V			
21.b.	Pencapaian target pelayanan publik dasar sesuai SPM	V			
21.c.	Pencapaian target MDG's dan perjanjian internasional lainnya yang telah diretrifikasi seperti: Carbon Trade, Clean Development Mechanism (CDM), Copenhagen Green Climate Fund	V			
21.d.	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	V			
21.e.	Penurunan tingkat pengangguran	V			
21.f.	Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah	V			
21.g.	Peningkatan umur harapan hidup	V			
21.h.	Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana	V			
21.i.	Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan, penurunan angka kematian Ibu dan Bayi	V			
21.j.	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pencapaian target indikator rata-rata lama sekolah, APM dan APK.	V			
21.k.	Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha	V			
21.l.	Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.	V			
21.m	Program aksi daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.				Kab. Lamandau tidak termasuk
21.n.	Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi	V			

22.	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota berpedoman pada RTRW kabupaten/kota yang meliputi:				
22.a.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Lindung:				
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya	V			
	2. Kawasan perlindungan setempat	V			
	3. Kawasan suaka alam	V			
	4. Kawasan pelestarian alam	V			
	5. Kawasan rawan bencana alam	V			
	6. Kawasan lindung lainnya	V			
	b. Kawasan Budi Daya:				
	1. Kawasan hutan produksi	V			
	2. Kawasan pertanian	V			
	3. Kawasan pertambangan	V			
	4. Kawasan industri	V			
	5. Kawasan pariwisata	V			
	6. Kawasan permukiman	V			
	7. Kawasan konservasi budaya & sejarah	V			
22.b.	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada :				
	a. sistem perkotaan kabupaten/kota;	V			
	b. sistem jaringan transportasi kabupaten/kota;	V			
	c. sistem jaringan energi kabupaten/kota;	V			
	d. sistem jaringan telekomunikasi kabupaten/kota;	V			
	e. sistem jaringan sumber daya air;	V			
23.	Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran	V			
24.	Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan	V			
25.	Pembahasan dengan SKPD kabupaten/kota	V			
26.	Pelaksanaan forum konsultasi Publik	V			
27.	Penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan	V			
28.	Musrenbang RPJMD kabupaten/kota menyepakati:				
28.a.	Sasaran pembangunan jangka menengah daerah.	V			
28.b.	Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	V			

28.c.	Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program bupati/walikota dan wakil bupati/walikota.	V			
28.d.	Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan.	V			
28.e.	Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD kabupaten/kota.	V			
28.f.	Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan daerah.	V			
29.	Naskah kesepakatan hasil musrenbang RPJMD	V			
30.	Penyusunan rancangan akhir	V			
31.	Rumusan kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya.	V			
32.	Program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya.	V			
33.	Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	V			
34.	Penyusunan RPJMD kabupaten/kota sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/kota yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini.	V			
35.	Penyusunan naskah akademis rancangan Perda RPJMD kabupaten/kota.	V			
36.	Dokumen RPJMD kabupaten/kota yang telah disahkan	V			

Nanga Bulik, Februari 2014
Kepala Bappeda
Kabupaten Lamandau,

Drs. MURIADI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690207 199012 1 001

Lampiran Surat Gubernur Kalimantan Tengah

Nomor :

Tanggal :

**Perihal : Masukan terhadap Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Lamandau
Tahun 2013-2018**

**MASUKAN UNTUK PENYEMPURNAAN
RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013-2018
SESUAI HASIL RAPAT KONSULTASI YANG DILAKSANAKAN
PADA TANGGAL 20 JANUARI 2014
DI RUANG RAPAT LANTAI 2 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

A. UMUM

1. Bahan:

Sesuai Permendagri 54 Tahun 2010, dalam pasal 68 disebutkan bahwa surat permohonan konsultasi RPJMD disertai dengan lampiran:

- 1) Draft Raperda tentang RPJMD Kabupaten Lamandau;
- 2) Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD Kabupaten Lamandau beserta lampirannya;
- 3) Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten.

Bahan tersebut butir 3) di atas belum disampaikan pada saat konsultasi Rancangan Akhir RPJMD. Agar bahan tersebut butir 3) di atas segera disusun dan disampaikan kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Laporan KLHS RPJMD agar disusun mengacu kepada Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
3. Perlu dicek kembali untuk pencantuman lampiran substansi RPJMD (tabel-tabel) sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tata naskah peraturan perundangan).

Jawaban:

Perbaikan akan dilakukan sesuai saran di atas.

B. SUBSTANSI

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH

- a. Draft Raperda RPJMD agar dikoordinasikan lagi dengan bagian hukum karena ada beberapa dasar hukum yang pencantumannya tidak sesuai ketentuan dan tidak lengkap.
- b. Halaman 3 dan 4, dasar hukum nomor 16 s/d 22 urutan pencantuman dasar hukum agar dicek kembali.

- c. Halaman 8, Pasal 10, agar dicek kembali khususnya pada kalimat yang berkaitan dengan Perda tentang RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2009-2013, agar dilengkapi dengan nomor dan tahun perda-nya.
- d. Landasan hukum perlu ditambahkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Jawaban:

Urutan perundang-undangan telah diperbaiki sesuai urutannya, nomor, dan tahun terbit yang lebih dahulu (tua), yaitu:

- Undang-undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Perda Provinsi Kalimantan Tengah
- Perda Kabupaten Lamandau

2. BAB I

- a. Landasan hukum pada substansi RPJMD Bab I perlu dilihat kesesuaiannya dengan dasar hukum yang tercantum pada Rancangan Perda RPJMD (Batang Tubuh Perda). Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 agar dikoreksi dan ditambah dengan peraturan perundangan yang relevan, serta disesuaikan dengan dasar hukum yang tercantum dalam Rancangan Perda RPJMD, antara lain:
 - 1). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 - 2). Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
 - 3). Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau .
 - 4) Permendagri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Jawaban:

Perbaikan telah dilakukan sesuai saran di atas

3. BAB II

- a. Data potensi/profil daerah hendaknya menggunakan data terbaru, minimal n-1 (n=tahun perencanaan).

Jawaban:

Revisi dengan data tahun 2012 telah dilakukan.

- b. **Halaman II-4**, paragraph 3, tertulis bahwa Kabupaten Lamandau memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun pada analisis SWOT di

halaman VI.1, potensi sumber daya alam tersebut tidak dimasukkan pada faktor internal kekuatan Kabupaten Lamandau. Agar dicek kembali hal tersebut.

Jawaban:

Revisi terhadap kata melimpah telah dilakukan. Sektor pertambangan memberikan kontribusi PDRB 1,38% dan tidak akan dijadikan sebagai faktor kekuatan untuk Kabupaten Lamandau

- c. **Halaman II-6** judul tabel jumlah penduduk perlu dicantumkan tahun.

Jawaban:

Revisi telah dilakukan

- d. **Tabel 2.20 Rasio Tenaga Dokter dan Tenaga Kesehatan, halaman II-33**, rasio tenaga dokter dan tenaga kesehatan yang mengalami penurunan perlu ditambahkan penjelasan tentang penyebab penurunan tersebut, supaya di tahun mendatang tidak terjadi penurunan rasio tenaga dokter dan tenaga kesehatan.

Jawaban:

Revisi telah dilakukan, di mana pertambahan penduduk tidak diikuti dengan pertambahan dokter sehingga terjadi penurunan.

- e. **Halaman II-42, butir f Perhubungan.** Perlu uraian tentang rencana pembangunan bandara dan pelabuhan laut serta kajiannya.

Jawaban:

File dari Dinas Perhubungan lagi on progress

- f. **Halaman II-43 butir g.1 Persentase Penanganan Sampah**, terkait pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dalam jumlah banyak sehingga pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga harus diperhatikan agar rasionya berimbang dan juga perlu melihat pengalokasian dananya. Perlu dicek kembali hal tersebut.

Jawaban:

Revisi telah dilakukan.

- g. **Lampiran I Tabel Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**, perlu pengecekan kembali pada satuan indikatornya dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. **Untuk butir 1.5 Penataan Ruang**, indikator ruang terbuka hijau dan persentase ruang publik, capaian kinerjanya masih 0 (nol) sehingga perlu ditinjau dan dikaji kembali sesuai RTRW.

Jawaban:

- h. Dalam Bab II belum terlihat data terkait kawasan pengembangan sesuai RTRW dan wilayah rawan bencana. Untuk itu agar ditambahkan dengan uraian terkait hal tersebut.

Jawaban:

Revisi telah dilakukan dengan memasukkan Gambar II.2 Peta Pola Ruang Kabupaten Lamandau dan tabel 2.38 Kondisi Lingkungan Hidup dan Tata Ruang di Kabupaten Lamandau .

4. BAB III

- a. **Halaman III-13, butir 3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**, sumbangan pihak ketiga agar dihilangkan/dihapus karena sudah termasuk dalam Pendapatan Hibah.

Jawaban:

Revisi telah dilakukan

- b. **Halaman III-21, butir 3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah**, tertulis bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Lamandau kurun waktu 2010-2012 yakni 8,89 persen, namun proyeksi untuk periode tahun 2014-2018 hanya sebesar 6,27 persen. Diminta untuk meneliti/analisis lagi terkait proyeksi pendapatan daerah. Angka proyeksi pendapatan daerah tahun 2014-2018 harusnya bisa lebih optimis mengacu pada angka pertumbuhan pendapatan pada periode sebelumnya.

Jawaban:

Proyeksi pendapatan menggunakan pertumbuhan 6,27% selama periode tahun 2014-2018 karena potensi riil pendapatan yang ada akan terjadi fluktuasi dari setiap pendapatan daerah sehingga dengan menetapkan pertumbuhan hanya 6,27% maka target pendapatan daerah dapat terealisasi atau mencapai target yang telah ditetapkan

- c. Data yang ada pada Bab III, perlu diteliti kembali. Terdapat ketidaksesuaian data antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya pada substansi yang sama, antara lain:

- 1). Tabel 3.13 halaman III-22 dan tabel 3.14 halaman III-23**, perlu dicek kembali kesesuaian datanya pada substansi yang sama.

Contoh: pada **tabel 3.13**, proyeksi Silpa untuk tahun 2014-2018 masing-masing adalah 79,229 milyar, 87,469 milyar, 99,162 milyar, 93,504 milyar, 105,268 milyar; sedangkan pada **tabel 3.14** proyeksi Silpa tahun 2014-2018 masing-masing adalah 90,339 milyar, 79,229 milyar, 87,469 milyar, 99,162 milyar, 93,504 milyar.

- 2). Tabel 3.15 halaman III-23 dan tabel 3.16 halaman III-25**, agar diteliti lagi kesesuaian datanya antara 2 tabel tersebut pada substansi yang sama. Proyeksi Belanja Langsung (BL) 2014-2018 pada tabel 3.15 tidak sesuai

angkanya dengan proyeksi BL 2014-2018 pada tabel 3.16. Demikian juga untuk proyeksi jumlah Belanja Prioritas I pada tabel 3.15 tidak sama angkanya dengan proyeksi jumlah Belanja Prioritas I pada tabel 3.16.

3). Tabel 3.17 halaman III-25, datanya perlu diperjelas dan diteliti kembali kaitannya dengan data pada tabel 3.13 halaman III-22 dan tabel 3.14 halaman III-23.

Jawaban:

Revisi telah dilakukan di mana:

- Di Tabel 3.13 dan Tabel 3.14, proyeksi Silpa telah menggunakan besaran yang bernilai sama;
- Di Tabel 3.17, kapasitas kemampuan daerah harus sesuai dengan Tabel 3.14, kemudian untuk Prioritas I, II, III harus sesuai dengan Tabel 3.16;

5. BAB IV

a. **Halaman IV.14 Butir 5 Pengembangan komoditas unggulan daerah,** komoditas unggulan daerah Kabupaten Lamandau mengarah pada sektor non pangan, namun demikian hendaknya komoditas unggulan daerah juga harus memperhatikan isu dunia yaitu mengatasi krisis pangan sehingga isu strategis dapat diarahkan ke sana. Perencanaan pembangunan Kabupaten Lamandau juga harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sehingga Kabupaten Lamandau harus mulai memikirkan ruang pangan agar ke depan tidak tergantung kepada daerah lain dan dapat mempertahankan keberadaan lahan pertanian yang ada.

Jawaban:

Revisi telah dilakukan dengan memasukkan peningkatan ketahanan pangan sebagai isu strategis.

b. Belum terlihat telaahan terhadap kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta RPJMD Kabupaten sekitarnya yang berbatasan

Jawaban:

Daerah sekitar masih menyusun RPJMD.

c. Perlu dimasukkan telaahan kebijakan provinsi, bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam mendukung kebijakan Provinsi terkait program-program unggulan inisiatif provinsi, antara lain: PM2L, Kalteng Harati, Kalteng Barigas dan Kalteng Besuh. Mulai tahun 2013 dari Pemprov Kalteng melalui Perubahan APBD Prov. Kalteng TA. 2013 sudah mengalokasikan bantuan keuangan kepada Pemkab/kota se-Kalteng untuk mendukung pelaksanaan

program Kalteng Harati dan Kalteng Barigas dalam bentuk semacam DAK provinsi ke kab/kota.

Jawaban:

Telaahan kebijakan inisiatif Provinsi Kalimantan Tengah tidak dimasukkan ke RPJMD, tetapi program inisiatif tersebut akan dilakukan semaksimal mungkin oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau.

5. BAB V

- a. **Tabel 5.1, misi 3 halaman V.4**, hendaknya pembangunan gender lebih pada konsep pengintegrasian kepada program dan kegiatan sehingga lebih kepada peran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Jawaban:

Pemerintah Kabupaten Lamandau melaksanakan petunjuk mengenai Pengarusutamaan Gender. Di mana di Kabupaten Lamandau untuk laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan

- b. **Tabel 5.3 Target Tahunan Indikator Sasaran RPJMD, halaman V.11**, penentuan indikator kinerja masih bias sehingga perlu ada kajian lagi dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan angkatan kerja dan sebagainya. Perlu perhitungan secara teliti dan proporsional sesuai dengan hasil analisa.

Jawaban:

Indikator tersebut dibuat berdasarkan kemampuan dari para SKPD. Di mana para SKPD telah mempunyai perhitungan tersendiri yang lebih valid.

- c. **Tabel 5.3, halaman V.13**, beberapa indikator kesehatan seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi dan jumlah penanganan penyandang kesejahteraan sosial setiap tahun jumlahnya sama dan ada yang meningkat. Perlu dijelaskan terkait penetapan indikator tersebut karena seharusnya jumlahnya menurun pada setiap tahunnya.

Jawaban:

Revisi telah dilakukan oleh para SKPD terkait.

6. BAB VI

- a. Terdapat ketidakkonsistenan antara narasi dan tabel, khususnya pada sasaran dan strategi. Agar dicek kembali hal tersebut, data dan narasi harus konsisten antara bab yang satu dengan yang lain pada substansi yang sama. Contoh: pada Bab V terdapat 31 sasaran, sedangkan pada Bab VI sasaran hanya 28.

Jawaban:

Revisi telah dilakukan. Adapun jumlah sasaran 31.

7. BAB VIII

- a. Pada **Tabel Lampiran III**, indikasi program prioritas beserta kerangka pendanaan, tidak ada penjumlahan total dana program prioritas. Ini sangat penting dilihat/diketahui karena berhubungan erat dengan kemampuan keuangan berdasarkan proyeksi kemampuan keuangan daerah (kerangka pendanaan tahun 2014-2018) pada bab III.

Untuk itu perlu ditampilkan penjumlahan total pagu indikatif program prioritas tersebut per-tahun selama 5 tahun (2014-2018) untuk melihat konsistensi/ kesesuaiannya dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah pada Bab III (Belanja Langsung Prioritas II dan III). Jumlah total pagu indikatif program prioritas seluruh SKPD pada tabel Lampiran III harus sama dengan jumlah Belanja Langsung pada bab III.

Jawaban:

(dalam juta)

BELANJA LANGSUNG	2014	2015	2016	2017	2018	KETERANGAN
BAB III	367.733	378.887	389.035	403.136	415.369	Tabel 3.17
BAB VIII	367.733	378.887	389.035	403.136	415.369	

Dari uraian tabel di atas, terlihat bahwa Belanja Langsung sudah sama. Adapun Belanja Langsung yang ada di Bab VIII merupakan Belanja Langsung dari: Prioritas I + Prioritas II

Adapun Prioritas III merupakan Belanja Tak Langsung.

- b. Pada tabel Lampiran III. Indikasi program prioritas, belum terlihat program untuk pencapaian visi, misi dan program untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan. Yang ada dalam tabel Lampiran III merupakan gabungan program prioritas pencapaian visi, misi dan program untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Jawaban:

Struktur yang dibangun di Bab VIII bahwa seluruh program yang ada di Bab VIII merupakan program untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, tidak ada lagi perbedaan program prioritas pencapaian visi, misi dan program untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bab VIII.